



Katalog: 2301014
ISSN 2598-5663

ANALISIS MOBILITAS TENAGA KERJA

HASIL SAKERNAS 2025

Volume 11, 2026



BADAN PUSAT STATISTIK

Katalog: 2301014
ISSN 2598-5663

ANALISIS MOBILITAS TENAGA KERJA

HASIL SAKERNAS 2025

Volume 11, 2026

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Sakernas 2025

Volume 11, 2026

Katalog: 2301014

ISSN: 2598-5663

No. Publikasi: 04100.26023

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: xxx+206 halaman

Penyusun Naskah:

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penyunting:

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pembuat Kover:

Direktorat Diseminasi, Pemberdayaan, dan Evaluasi

Penyelenggaraan Statistik

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:

magnific.com, canva.com, OpenAI

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Sakernas 2025

Volume 11, 2026

Pelindung

Amalia Adininggar Widyasanti
Sonny Harry Budiutomo Harmadi

Pengarah

M. Nashrul Wajdi

Penanggung Jawab

Teguh Sugiyarto

Penyunting

Winida Albertha

Penulis

Erie Sadewo - Fajar Santoso Putra - Heru Irawan
Viane Dortehea Tiwa - Hamim Tsalis Soblia
Putri Ilhami Firdaus - Amelia Dyah Safitri

Penata Letak

Direktorat Diseminasi, Pemberdayaan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik
Heru Irawan - Alfin Dian Amalia

Kontributor Data

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Kata Pengantar

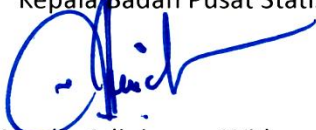
Mobilitas tenaga kerja merupakan salah satu mekanisme penting yang mencerminkan respons masyarakat terhadap perubahan struktur ekonomi, perkembangan wilayah, serta dinamika pasar kerja. Pergerakan tenaga kerja dapat berupa migrasi, mobilitas temporer (seperti perjalanan pulang pergi harian, komuter, sirkuler), perpindahan pekerjaan, maupun pengalaman bekerja di luar negeri. Berbagai bentuk pergerakan tenaga kerja tersebut tidak hanya memengaruhi distribusi tenaga kerja antarwilayah, tetapi juga menjadi indikator penting dalam memahami keterkaitan ekonomi, peluang kerja, dan transformasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Publikasi Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Sakernas 2025 menyajikan berbagai indikator dan analisis pola mobilitas tenaga kerja di Indonesia. Publikasi ini memberikan gambaran tentang besaran, distribusi, arus, dan karakteristik pekerja pelaku mobilitas.

Di tengah perubahan lanskap ketenagakerjaan yang terus berlangsung, informasi mengenai mobilitas tenaga kerja menjadi semakin penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, pengembangan wilayah, penyediaan infrastruktur, serta perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis bukti. Analisis yang disajikan diharapkan dapat membantu pengambil kebijakan, akademisi, peneliti, dan masyarakat luas dalam memahami dinamika pergerakan tenaga kerja serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk tim Sakernas BPS daerah, yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Kami menyadari bahwa publikasi ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, berbagai masukan konstruktif sangat kami harapkan. Semoga publikasi ini memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan, perencanaan pembangunan, dan perumusan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

Jakarta, 10 Juli 2026
Kepala Badan Pusat Statistik


Amalia Adininggar Widayanti

Ringkasan Eksekutif

Pembangunan dan dinamika kependudukan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Kondisi serta perilaku penduduk perlu dipahami agar kebijakan pembangunan yang disusun lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk untuk melihat kecenderungan penduduk dalam melakukan mobilitas. Dalam konteks ketenagakerjaan, mobilitas tenaga kerja menjadi isu penting karena dapat menggambarkan dampak pembangunan terhadap pergerakan tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, disusun publikasi *Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Sakernas 2025* sebagai sumber informasi mengenai pola mobilitas tenaga kerja di Indonesia.

Mobilitas tenaga kerja di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu mobilitas spasial dan mobilitas nonspasial. Mobilitas spasial mencakup perpindahan tenaga kerja antarwilayah yang terdiri atas migrasi dan mobilitas temporer. Adapun mobilitas nonspasial merujuk pada perpindahan tenaga kerja antarpekerjaan, baik dari sektor pekerjaan maupun status pekerjaannya. Penentuan migrasi dan mobilitas temporer didasarkan pada lamanya durasi perpindahan serta tujuan yang ingin dicapai. Seseorang dikategorikan melakukan migrasi apabila berpindah tempat tinggal dengan tujuan menetap selama minimal satu tahun. Dalam publikasi ini migrasi yang dicakup adalah migrasi risen dan pengalaman bekerja di luar negeri. Sebaliknya, perpindahan dengan durasi kurang dari satu tahun termasuk ke dalam mobilitas temporer. Mobilitas temporer tersebut dapat berupa perjalanan pulang pergi harian, mobilitas ulang-alik (komuter), maupun mobilitas sirkuler. Perkembangan pasar kerja yang semakin fleksibel mendorong meningkatnya mobilitas temporer di kalangan pekerja. Selain itu, kemajuan sarana dan akses transportasi juga menyebabkan pola mobilitas tenaga kerja cenderung bergeser ke mobilitas temporer.

Analisis spasial terhadap migrasi tenaga kerja menunjukkan adanya konsentrasi pekerja migran risen di wilayah tertentu. Pada tahun 2025, tren pekerja yang merupakan migran risen di Indonesia menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, baik secara jumlah maupun persentase. Pada 2025 pekerja risen mencapai 3,4 juta orang. Persentase pekerja migran risen menempati posisi terendah setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir (2,3 persen). Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah pekerja migran risen terbesar di Indonesia, dengan sekitar satu dari enam pekerja migran tinggal di wilayah ini. Provinsi dengan jumlah pekerja migran risen tertinggi berikutnya adalah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Karakteristik individu, khususnya tingkat pendidikan, juga berperan penting dalam mendorong mobilitas tenaga kerja. Pada tahun 2025, mayoritas pekerja migran risen di sepuluh provinsi terpilih memiliki tingkat pendidikan SMA ke atas. Proporsi ini lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan di bawah SMA, menandakan bahwa pendidikan menjadi modal penting bagi pekerja migran untuk bersaing di pasar tenaga kerja di daerah tujuan.

Karakteristik pasar kerja di daerah tujuan migrasi memengaruhi kesempatan kerja yang tersedia bagi pekerja migran, khususnya terkait akses terhadap pekerjaan di sektor formal maupun informal. Pada tahun 2025, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Selatan memiliki proporsi tertinggi pekerja migran risen yang bekerja di sektor formal, dengan lebih dari separuh dari total pekerja migran risen di masing-masing provinsi berada di sektor ini. Sebaliknya, di Maluku dan Sulawesi Barat, lebih dari 60 persen pekerja risen bekerja di sektor informal. Hal ini menunjukkan adanya variasi pola penyerapan tenaga kerja migran di sektor formal dan informal antarprovinsi.

Adapun jika ditinjau dari pola hubungan antara tempat tinggal dan lokasi kerja, pada tahun 2025, sekitar 113 juta orang atau 77,1 persen pekerja di Indonesia bekerja di luar rumahnya dan melakukan perjalanan pulang pergi harian. Dalam publikasi ini tipe pekerja demikian disebut sebagai pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian. Sepertiga pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian bekerja di pertanian. Tiga perempat pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian menggunakan moda transportasi pribadi.

Jenis mobilitas yang dibahas selanjutnya adalah mobilitas ulang-alik (*commuting*). Mobilitas ini mencakup perjalanan pulang pergi harian khusus untuk perjalanan antarkabupaten/kota. Pelaku *commuting* disebut sebagai komuter. Secara nasional, pada tahun 2025 pekerja komuter berjumlah 7,7 juta orang atau 5,2 persen dari total pekerja. Sebagian besar pekerja komuter terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (Sumatera, Jawa, dan Bali), yaitu mencapai 90 persen dari total komuter. Menurut pulau, sekitar tiga dari empat komuter berada di Pulau Jawa. Pada tingkat provinsi, provinsi dengan jumlah pekerja komuter terbesar berturut-turut terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Secara umum, dari 38 provinsi di Indonesia, lebih dari separuhnya mengalami peningkatan jumlah komuter, sementara sisanya mengalami penurunan.

Selain pekerja komuter, pekerja sirkuler juga melengkapi jenis mobilitas tenaga kerja di Indonesia. Pekerja sirkuler melakukan perjalanan untuk tujuan bekerja dalam frekuensi nonharian, misalnya mingguan, bulanan, dan seterusnya. Tiga provinsi yang

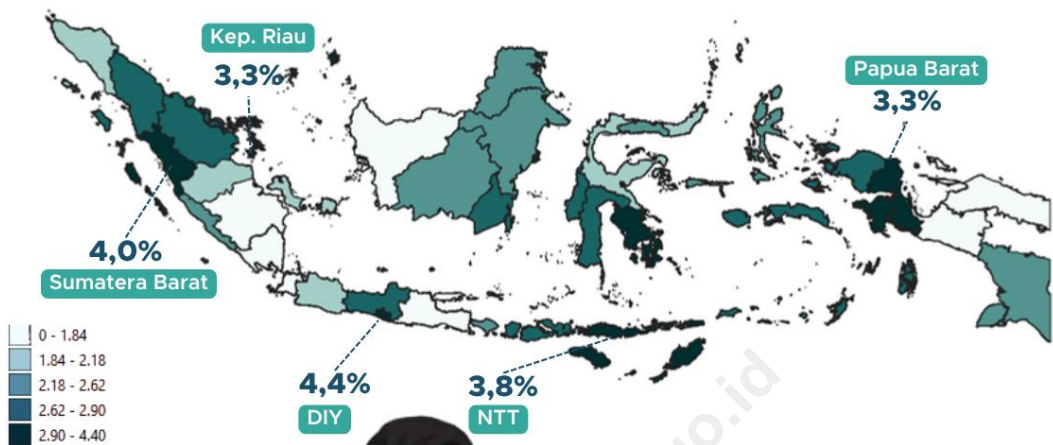
menjadi kontributor terbesar pekerja sirkuler di Indonesia pada tahun 2025 berada di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pekerja sirkuler di tiga provinsi tersebut didominasi oleh mereka yang bekerja di sektor formal. Sementara itu, menurut lapangan usaha, hampir 40 persen pekerja sirkuler di Jawa Barat dan Jawa Timur bekerja di sektor jasa berorientasi pasar, sedangkan di Jawa Tengah hampir separuh pekerja sirkuler bekerja di sektor konstruksi.

Mayoritas pekerja di Indonesia cenderung bekerja di wilayah tempat tinggalnya. Meski demikian, untuk provinsi-provinsi tertentu, terutama yang termasuk wilayah metropolitan, mobilitas tenaga kerja menunjukkan proporsi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Mobilitas temporer seperti komuter semakin dominan, seiring meningkatnya aksesibilitas transportasi dan konsentrasi lapangan kerja di wilayah barat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.

Selain mobilitas spasial, publikasi ini juga membahas mobilitas nonspasial, khususnya tentang perpindahan pekerjaan. Sebanyak 8,6 juta penduduk pernah berhenti bekerja pada periode Agustus 2024–Agustus 2025. Sebanyak 5,6 juta di antaranya telah bekerja kembali.

Karakteristik Pekerja Migran Risen Hasil Sakernas 2025

Persentase Migran Risen menurut Provinsi, 2025



Pekerja Migran Risen

adalah penduduk bekerja berusia 15 tahun ke atas yang pada 5 tahun sebelum pendataan tinggal di kabupaten/kota yang berbeda dengan kabupaten/kota tempat tinggal sekarang.



2,3%

penduduk bekerja berusia 15 tahun ke atas di Indonesia merupakan **Pekerja Migran Risen**

Kondisi Sosial Ekonomi Provinsi dengan Persentase Pekerja Migran Risen Terbesar¹

● Di bawah SMA

● SMA ke atas

● Informal

● Formal

DI Yogyakarta

13,7%

86,3%

24,1%

75,9%

Kepulauan Riau

Maluku

13,8%

86,2%

39,2%

60,8%

DI Yogyakarta

Kepulauan Riau

15,2%

84,8%

43,2%

56,8%

Kalimantan Selatan

3 Provinsi dengan persentase terbesar pekerja migran risen yang berpendidikan SMA ke atas (%), 2025

Pekerja migran risen yang berpendidikan SMA ke atas lebih besar dibandingkan SMA ke bawah, menunjukkan pendidikan sebagai modal untuk bersaing di pasar tenaga kerja di provinsi tujuan.

3 Provinsi dengan persentase terbesar pekerja migran risen bekerja di sektor formal (%), 2025

Kepulauan Riau, DI Yogyakarta dan Kalimantan Selatan merupakan 3 dari 10 provinsi terpilih dengan persentase migran risen bekerja pada sektor formal (status pekerjaannya sebagai buruh/pegawai/karyawan atau berusaha dibantu buruh) terbesar.

Catatan:

¹Dari 10 provinsi terpilih (Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat)



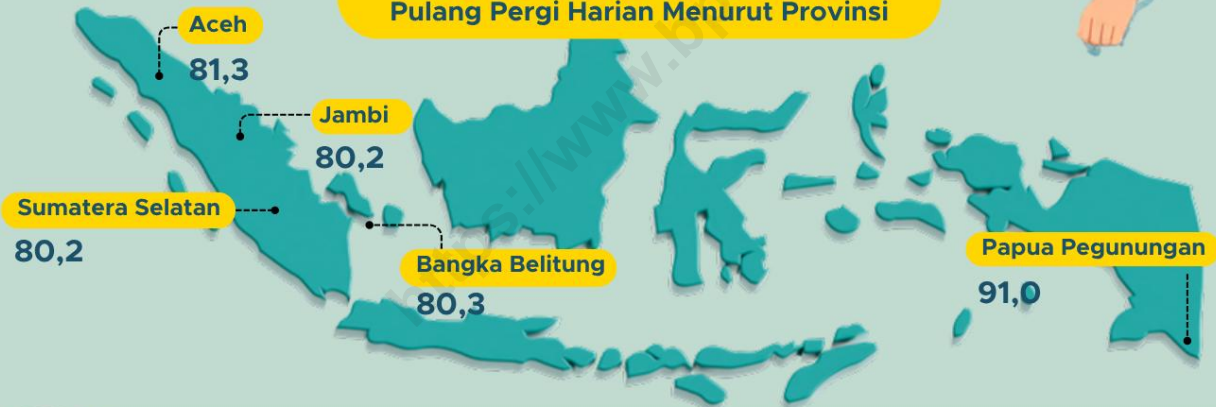
Karakteristik Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Hasil Sakernas 2025



113,0 juta

atau 77,1 persen pekerja melakukan perjalanan pulang pergi harian ke tempat kerja di luar rumah (di luar tempat tinggal)

Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi



3 provinsi dengan persentase pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian berpendidikan SMA ke atas tertinggi

79,4	71,6	69,3
DKI Jakarta	Kepulauan Riau	Papua



3 provinsi dengan persentase pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian bekerja di sektor formal tertinggi

76,4	72,9	66,7
Kepulauan Riau	DKI Jakarta	Kalimantan Timur



3 provinsi dengan persentase pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian di lapangan usaha pertanian tertinggi

95,6	75,1	55,6
Papua Pegunungan	Sumatera Utara	Sulawesi Barat



3 provinsi dengan persentase pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian di lapangan usaha industri pengolahan tertinggi

25,5	24,2	23,8
Maluku Utara	Kepulauan Riau	Banten

Gambar 2

Karakteristik Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Hasil Sakernas Agustus 2025

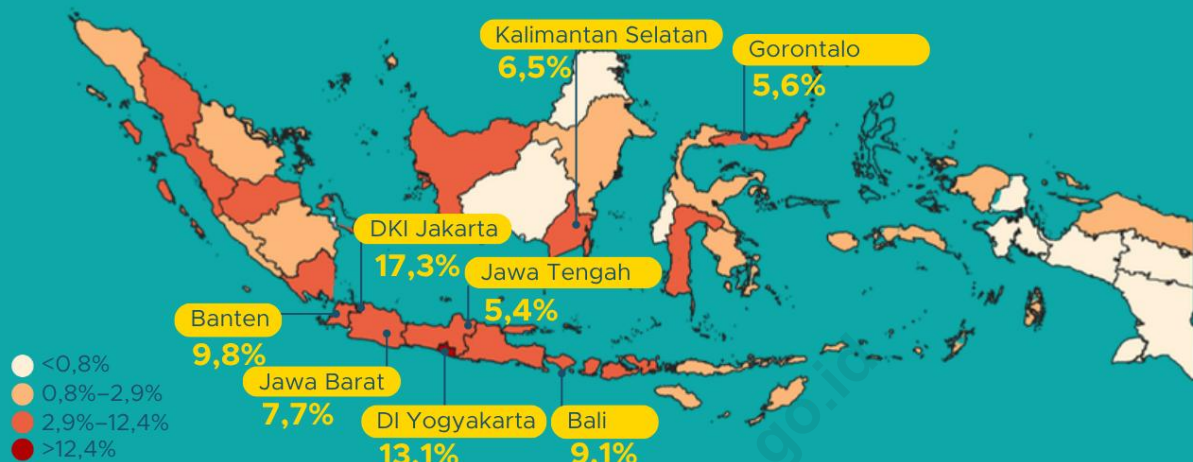
Sumber: Sakernas Agustus 2025



Karakteristik Pekerja Komuter Hasil Sakernas 2025

5,2 %

pekerja Indonesia adalah **pekerja komuter**. Tiga provinsi dengan persentase pekerja komuter tertinggi adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali.

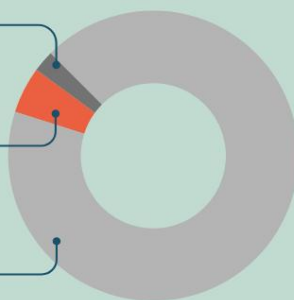


Pekerja komuter adalah pekerja yang melakukan perjalanan pulang pergi harian ke tempat kerja yang berada di kabupaten/kota yang berbeda dari kabupaten/kota tempat tinggalnya.

2,4%
Pekerja
Sirkuler

5,2%
Pekerja
Kometer

92,4%
Pekerja
Stayer



78,2% pekerja komuter berpendidikan SMA ke atas



82,3% pekerja komuter bekerja di sektor formal



45,2% pekerja komuter bekerja di lapangan usaha jasa berorientasi pasar

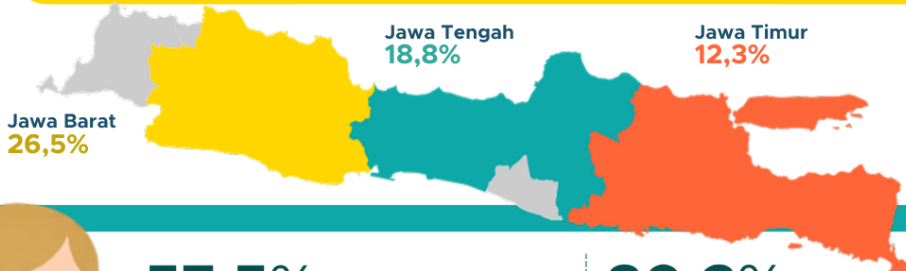


91,4% pekerja komuter melakukan perjalanan pulang pergi ke tempat bekerja dengan menggunakan moda transportasi pribadi

Karakteristik Pekerja Sirkuler

Hasil Sakernas 2025

3,5 juta atau 2,4 persen pekerja merupakan pekerja sirkuler, dengan 3 provinsi penyumbang terbesar adalah:



57,5%

Pekerja sirkuler nasional berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur

80,3%

Pekerja sirkuler nasional berada di **sepuluh provinsi**, yang terdiri dari **tiga wilayah utama di Jawa** beserta **tujuh provinsi lainnya di luar Pulau Jawa**.

Beberapa karakteristik pekerja sirkuler



89,4% pekerja sirkuler adalah laki-laki



76,7% pekerja sirkuler bekerja di sektor formal



35,3% pekerja sirkuler bekerja di lapangan usaha jasa berorientasi pasar



52,3% pekerja sirkuler berpendidikan SMA ke atas

Pengalaman Bekerja di Luar Negeri

Hasil Sakernas 2025

3 Negara Tujuan Terbesar

dari penduduk 15 tahun ke atas yang pernah bekerja di luar negeri dalam 5 tahun terakhir (persen)



Malaysia
50,6%



Arab Saudi
15,4%



Taiwan
8,0%¹



Karakteristik Demografi

Penduduk 15 tahun ke atas yang pernah bekerja di luar negeri (keberangkatan dan kepulangan dalam 5 tahun terakhir)



58,8%

Berjenis kelamin
laki-laki



59,6%

Berpendidikan
di bawah SMA



36,8%

Berumur
25–34 tahun



70,3%

Berstatus
kawin

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Daftar Isi

Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Sakernas 2025
Volume 11, 2026

Tim Penyusunv

Kata Pengantar.....vii

Ringkasan Eksekutifix

Ringkasan Dalam Infografis.....xii

Daftar Isixvii

Daftar Tabel.....xix

Daftar Gambarxx

Daftar Lampiranxxv

Penjelasan Umum.....xxx

BAB I Pendahuluan1

 1.1 Latar Belakang.....3

 1.2 Tujuan Penulisan5

 1.3 Manfaat Penulisan6

 1.4 Sistematika Penyajian.....6

BAB II Tinjauan Pustaka7

 2.1 Konsep Mobilitas Penduduk9

 2.2 Determinan Mobilitas Penduduk10

 2.3 Migrasi.....11

 2.4 Mobilitas Penduduk Temporer.....13

 2.4.1 Mobilitas Pekerja yang Pulang Pergi Harian13

 2.4.2 Mobilitas Ulang-Alik (*Commuting*)13

 2.4.3 Mobilitas Sirkuler14

 2.5 Mobilitas Pekerjaan.....15

 2.6 Pekerja yang Memiliki Pengalaman Bekerja di Luar Negeri16

BAB III Metodologi Penulisan17

 3.1 Sumber Data19

 3.2 Kerangka Sampel.....19

 3.3 Unit Analisis.....20

 3.4 Pengumpulan dan Pengolahan Data20

 3.5 Definisi Operasional21

 3.5.1 Variabel Sakernas yang Digunakan21

 3.5.2 Migrasi24

 3.5.3 Mobilitas Temporer25

 3.5.4 Mobilitas Pekerjaan26

 3.5.5 Metode Analisis27

BAB IV	Pembahasan dan Analisis	29
4.1	Kondisi Pasar Kerja Indonesia	31
4.2	Pekerja Migran Risen	36
4.2.1	Besaran dan Tren Pekerja Migran Risen	36
4.2.2	Distribusi Wilayah Pekerja Migran Risen	38
4.2.3	Arus dan Pola Migrasi Pekerja Migran Risen	41
4.2.4	Karakteristik Demografi dan Ketenagakerjaan Pekerja Migran Risen	45
4.3	Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian	51
4.3.1	Besaran dan Tren Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian	52
4.3.2	Distribusi Wilayah Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian	55
4.3.3	Arus dan Pola Pergerakan Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian	56
4.3.4	Karakteristik Demografi dan Ketenagakerjaan Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian	57
4.4	Pekerja Komuter	66
4.4.1	Besaran dan Tren Pekerja Komuter	67
4.4.2	Distribusi Wilayah Pekerja Komuter	69
4.4.3	Arus dan Pola Pergerakan Pekerja Komuter	75
4.4.4	Karakteristik Demografi dan Ketenagakerjaan Pekerja Komuter	81
4.5	Pekerja Sirkuler	97
4.5.1	Besaran dan Tren Pekerja Sirkuler	97
4.5.2	Distribusi Wilayah Pekerja Sirkuler	98
4.5.3	Arus dan Pola Pergerakan Pekerja Sirkuler	100
4.5.4	Karakteristik Demografi dan Ketenagakerjaan Pekerja Sirkuler	104
4.6	Mobilitas Pekerjaan	110
4.6.1	Distribusi Wilayah Penduduk yang Pernah Berhenti Bekerja Setahun Terakhir	111
4.6.2	Mobilitas Pekerjaan	113
4.7	Penduduk Pernah Bekerja di Luar Negeri	115
4.7.1	Besaran dan Tren Penduduk Pernah Bekerja di Luar Negeri	116
4.7.2	Distribusi Wilayah Penduduk Pernah Bekerja di Luar Negeri	116
4.7.3	Karakteristik Demografi dan Ketenagakerjaan Penduduk Pernah Bekerja di Luar Negeri	119
BAB V	Kesimpulan dan Saran	125
5.1	Kesimpulan	127
5.2	Saran	131
	Daftar Pustaka	135
	Lampiran	141

Daftar Tabel

Tabel 1	Definisi Operasional Jenis-jenis Mobilitas Temporer	26
Tabel 2	Karakteristik Ketenagakerjaan Indonesia, 2016–2025	33
Tabel 3	Persentase Angkatan Kerja Indonesia Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2016–2025	34
Tabel 4	Persentase Pekerja di Indonesia Menurut Sektor Ekonomi, 2020–2025	35
Tabel 5	Penduduk Menurut Status Bekerja dan Status Migrasi Risen, 2025.....	37
Tabel 6	Pekerja Menurut Jenis Tempat Bekerja dan Periode Kepulangan, 2025	53
Tabel 7	Penduduk Bekerja Menurut Lokasi Tempat Kerja dan Periode Pulang Pergi, 2025	67

Daftar Gambar

Gambar 1	Karakteristik Pekerja Migran Risen Hasil Sakernas Agustus 2025	xii
Gambar 2	Karakteristik Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Hasil Sakernas Agustus 2025.....	xiii
Gambar 3	Karakteristik Pekerja Komuter Hasil Sakernas Agustus 2025	xiv
Gambar 4	Karakteristik Pekerja Sirkuler Hasil Sakernas Agustus 2025.....	xv
Gambar 5	Pengalaman Bekerja di Luar Negeri Hasil Sakernas Agustus 2025.....	xvi
Gambar 6	Jumlah dan Persentase Pekerja Migran Risen, 2016–2025.....	37
Gambar 7	Jumlah dan Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Provinsi, 2025	39
Gambar 8	Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Jumlah Pekerja Migran Risen Terbesar dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Persentase Pekerja Migran Risen Tertinggi, 2025.....	40
Gambar 9	Lima Belas Kabupaten/Kota Asal Pekerja Migran Risen Terbesar dan Lima Belas Kabupaten/Kota Asal dengan Persentase Pekerja Migran Risen Tertinggi.....	41
Gambar 10	Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Migrasi Neto Positif Terbesar dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Migrasi Neto Negatif Terbesar pada Pekerja, 2025	42
Gambar 11	Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Angka Migrasi Neto Positif Tertinggi dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Angka Migrasi Neto Negatif Terendah pada Pekerja, 2025	43
Gambar 12	Dua Puluh Arus Migrasi Pekerja Migran Risen Antarkabupaten/kota dengan Volume Terbesar	44
Gambar 13	Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Jenis Kelamin di 10 Provinsi Terpilih, 2025	45
Gambar 14	Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Kelompok Umur di 10 Provinsi Terpilih, 2025	46
Gambar 15	Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Status Perkawinan di 10 Provinsi Terpilih, 2025	47
Gambar 16	Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Tingkat Pendidikan di 10 Provinsi Terpilih, 2025	48

Gambar 17	Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di 10 Provinsi Terpilih, 2025	49
Gambar 18	Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Jenis Pekerjaan Utama di 10 Provinsi Terpilih, 2025	50
Gambar 19	Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Status Formalitas Pekerjaan Utama di 10 Provinsi Terpilih, 2025	51
Gambar 20	Jumlah dan Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian, 2022–2025.....	54
Gambar 21	Jumlah dan Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi, 2025.....	55
Gambar 22	Dua Puluh Arus Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian dengan Volume Terbesar	57
Gambar 23	Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025	58
Gambar 24	Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025.....	59
Gambar 25	Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025	60
Gambar 26	Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Berpendidikan SMA ke Atas Menurut Provinsi, 2025	61
Gambar 27	Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2025.....	62
Gambar 28	Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2025	63
Gambar 29	Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian dengan Pekerjaan Utama Berstatus Formal, 2025.....	65
Gambar 30	Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian yang Menggunakan Kendaraan Pribadi sebagai Moda Transportasi Utama, 2025.....	66
Gambar 31	Jumlah dan Persentase Pekerja Komuter, 2016–2025	68
Gambar 32	Jumlah dan Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi, 2025.....	70
Gambar 33	Lima Belas Kabupaten/Kota Asal dengan Jumlah Pekerja Komuter Terbesar, 2025.....	71
Gambar 34	Lima Belas Kabupaten/Kota Asal dengan Persentase Pekerja Komuter Tertinggi, 2025	72

Gambar 35	Lima Belas Kabupaten/Kota Tujuan dengan Pekerja Komuter Terbesar, 2025.....	73
Gambar 36	Lima Belas Kabupaten/Kota Tujuan dengan Persentase Pekerja Komuter Tertinggi, 2025	74
Gambar 37	Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Arus Komuter Neto Positif Terbesar dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Arus Komuter Neto Negatif Terbesar pada Pekerja, 2025	76
Gambar 38	Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Persentase Neto Komuter Positif dan Negatif Terbesar	78
Gambar 39	Dua Puluh Besar Arus Pekerja Komuter Antarkabupaten/kota, 2025	80
Gambar 40	Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025	82
Gambar 41	Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025	83
Gambar 42	Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025.....	85
Gambar 43	Persentase Pekerja Komuter dengan Tingkat Pendidikan SMA ke atas Menurut Provinsi, 2025	87
Gambar 44	Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2025.....	89
Gambar 45	Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Jenis Jabatan dalam Pekerjaan Utama, 2025	92
Gambar 46	Persentase Pekerja Komuter dengan Pekerjaan Utama Berstatus Formal Menurut Provinsi, 2025	94
Gambar 47	Persentase Pekerja Komuter yang Menggunakan Kendaraan Pribadi sebagai Moda Transportasi Utama Menurut Provinsi, 2025	96
Gambar 48	Jumlah dan Persentase Pekerja Sirkuler, 2016–2025.....	97
Gambar 49	Jumlah dan Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi, 2025.....	99
Gambar 50	Pekerja Menurut Status Pekerja Sirkuler di 15 Kabupaten/Kota Tempat Tinggal dengan Pekerja Sirkuler Terbesar, 2025.....	99
Gambar 51	Pekerja Sirkuler di 15 Kabupaten/Kota Tujuan Bekerja Terbesar, 2025	100
Gambar 52	Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Sirkuler Neto Positif Terbesar dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Sirkuler Neto Negatif Terbesar pada Pekerja, 2025	101

Gambar 53	Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Persentase Pekerja Sirkuler Neto Positif Terbesar dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Persentase Pekerja Sirkuler Neto Negatif Terbesar pada Pekerja, 2025	102
Gambar 54	Dua Puluh Besar Arus Pekerja Sirkuler Antarkabupaten/kota, 2025 ...	103
Gambar 55	Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025	104
Gambar 56	Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025	105
Gambar 57	Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025.....	106
Gambar 58	Persentase Pekerja Sirkuler dengan Tingkat Pendidikan SMA ke Atas Menurut Provinsi, 2025	107
Gambar 59	Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2025.....	108
Gambar 60	Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2025.....	109
Gambar 61	Persentase Pekerja Sirkuler dengan Status Formal pada Pekerjaan Utama, 2025.....	110
Gambar 62	Penduduk yang Pernah Berhenti Bekerja dari Pekerjaan Dalam Setahun Terakhir (Agustus 2024–Agustus 2025) Menurut Provinsi, 2025	112
Gambar 63	Perpindahan Lapangan Usaha dari Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Berhenti Bekerja dalam Setahun Terakhir, 2025	113
Gambar 64	Perpindahan Status Pekerjaan dari Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Berhenti Pekerjaan dalam Setahun Terakhir, 2025	114
Gambar 65	Penduduk Bekerja yang Pernah Berhenti Bekerja dari Pekerjaan Dalam Setahun Terakhir (Agustus 2024–Agustus 2025) Menurut Alasan Utama Berhenti Bekerja, 2025	115
Gambar 66	Penduduk yang Pernah Bekerja ke Luar Negeri Menurut Periode Keberangkatan, 2021–2025	116
Gambar 67	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Masa Keberangkatan dan Kepulangan di Lima Provinsi dengan Penduduk yang Berangkat dan Pulang dalam 5 Tahun Terakhir Terbesar, 2025.....	117
Gambar 68	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Berangkat untuk Bekerja ke Luar Negeri dalam 5 Tahun Terakhir Menurut Negara Tujuan, 2025	118

Gambar 69	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Pernah Bekerja di Luar Negeri dengan Keberangkatan dan Kepulangan dalam Lima Tahun Terakhir Menurut Provinsi Tempat Tinggal dan Negara Tujuan, 2025	119
Gambar 70	Penduduk Pernah Bekerja di Luar Negeri Menurut Periode Keberangkatan dan Jenis Kelamin, 2025.....	120
Gambar 71	Penduduk Pernah Bekerja di Luar Negeri Menurut Periode Keberangkatan dan Klasifikasi Tempat Tinggal, 2025	120
Gambar 72	Penduduk Pernah Bekerja di Luar Negeri Menurut Periode Keberangkatan dan Tingkat Pendidikan, 2025	120
Gambar 73	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Periode Keberangkatan dan Umur	121
Gambar 74	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Periode Keberangkatan dan Status Perkawinan.....	121
Gambar 75	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Berangkat untuk Bekerja ke Luar Negeri dalam 5 Tahun Terakhir Menurut Negara Tujuan dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025	122
Gambar 76	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Berangkat untuk Bekerja ke Luar Negeri dalam 5 Tahun Terakhir Menurut Sektor Ekonomi, 2025	123

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Penduduk Menurut Status Bekerja dan Status Migrasi Risen, 2025	143
Lampiran 2	Penduduk Bekerja Menurut Status Migrasi Risen, 2016–2025	143
Lampiran 3	Pekerja Menurut Provinsi Tempat Tinggal Sekarang dan Status Migrasi Risen, 2025	144
Lampiran 4	Pekerja Menurut Status Migrasi Risen di 15 Kabupaten/Kota Tujuan dengan Pekerja Migran Risen Terbesar, 2025	145
Lampiran 5	Pekerja Menurut Status Migrasi Risen di 15 Kabupaten/Kota Tujuan dengan Persentase Pekerja Migran Risen Tertinggi, 2025	145
Lampiran 6	Pekerja Menurut Status Migrasi Risen di 15 Kabupaten/Kota Asal dengan Pekerja Migran Risen Terbesar	146
Lampiran 7	Pekerja Menurut Status Migrasi Risen di 15 Kabupaten/Kota Asal dengan Persentase Pekerja Migran Risen Tertinggi, 2025	146
Lampiran 8	Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Migrasi Neto Positif Terbesar dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Migrasi Neto Negatif Terbesar pada Pekerja, 2025	147
Lampiran 9	Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Angka Migrasi Neto Positif Terbesar dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Angka Migrasi Neto Negatif Terbesar pada Pekerja, 2025	148
Lampiran 10	Dua Puluh Arus Migrasi Pekerja Migran Risen Antarkabupaten/kota dengan Volume Terbesar, 2025	149
Lampiran 11	Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Jenis Kelamin di 10 Provinsi Terpilih, 2025	149
Lampiran 12	Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Kelompok Umur di 10 Provinsi Terpilih, 2025	150
Lampiran 13	Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Status Perkawinan di 10 Provinsi Terpilih, 2025	150
Lampiran 14	Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Tingkat Pendidikan di 10 Provinsi Terpilih, 2025	151
Lampiran 15	Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di 10 Provinsi Terpilih, 2025	151

Lampiran 16	Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Jenis Pekerjaan Utama di 10 Provinsi Terpilih, 2025	152
Lampiran 17	Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Status Formalitas Pekerjaan Utama di 10 Provinsi Terpilih, 2025	152
Lampiran 18	Pekerja Menurut Jenis Tempat Bekerja dan Periode Kepulangan, 2025	153
Lampiran 19	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian, 2022–2025.....	153
Lampiran 20	Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi, 2025	154
Lampiran 21	Dua Puluh Arus Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian dengan Volume Terbesar, 2025.....	155
Lampiran 22	Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025	156
Lampiran 23	Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025.....	157
Lampiran 24	Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025	158
Lampiran 25	Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2025	159
Lampiran 26	Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2025.....	160
Lampiran 27	Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2025	161
Lampiran 28	Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Status Formalitas Pekerjaan Utama, 2025	162
Lampiran 29	Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Moda Transportasi Utama, 2025	163
Lampiran 30	Penduduk Bekerja Menurut Lokasi Tempat Kerja dan Periode Pulang Pergi, 2025	164
Lampiran 31	Penduduk Bekerja Menurut Status Komuter, 2025	164
Lampiran 32	Pekerja Menurut Provinsi Tempat Tinggal Sekarang dan Status Pekerja Komuter, 2025.....	165
Lampiran 33	Pekerja Menurut Status Pekerja Komuter di 15 Kabupaten/Kota Tempat Tinggal dengan Pekerja Komuter Terbesar, 2025	166

Lampiran 34	Pekerja Menurut Status Pekerja Komuter di 15 Kabupaten/Kota Tempat Tinggal dengan Persentase Pekerja Komuter Tertinggi, 2025	166
Lampiran 35	Pekerja Komuter di 15 Kabupaten/Kota Tujuan Bekerja Terbesar, 2025	167
Lampiran 36	Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Arus Komuter Neto Positif Terbesar dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Arus Komuter Neto Negatif Terbesar pada Pekerja, 2025	168
Lampiran 37	Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Persentase Komuter Neto Positif Tertinggi dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Persentase Komuter Neto Negatif Terendah pada Pekerja, 2025	169
Lampiran 38	Dua Puluh Besar Arus Pekerja Komuter Antarkabupaten/kota, 2025	170
Lampiran 39	Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025	171
Lampiran 40	Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025	172
Lampiran 41	Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025.....	173
Lampiran 42	Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2025.....	174
Lampiran 43	Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2025.....	175
Lampiran 44	Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2025.....	176
Lampiran 45	Persentase Pekerja Komuter Menurut Status Formalitas Pekerjaan Utama, 2025.....	177
Lampiran 46	Persentase Pekerja Komuter Menurut Moda Transportasi Utama, 2025	178
Lampiran 47	Penduduk Bekerja Menurut Status Bersirkuler, 2025	179
Lampiran 48	Pekerja Menurut Provinsi Tempat Tinggal Sekarang dan Status Pekerja Sirkuler, 2025.....	180
Lampiran 49	Pekerja Menurut Status Pekerja Sirkuler di 15 Kabupaten/Kota Tempat Tinggal dengan Pekerja Sirkuler Terbesar, 2025.....	181
Lampiran 50	Pekerja Sirkuler di 15 Kabupaten/Kota Tujuan Bekerja Terbesar, 2025	181

Lampiran 51	Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Sirkuler Neto Positif Tertinggi dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Sirkuler Neto Negatif Terendah pada Pekerja, 2025.....	182
Lampiran 52	Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Persentase Pekerja Sirkuler Neto Positif Tertinggi dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Persentase Pekerja Sirkuler Neto Negatif Terendah, 2025	183
Lampiran 53	Dua Puluh Besar Arus Pekerja Sirkuler Antarkabupaten/kota, 2025 ...	184
Lampiran 54	Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025	185
Lampiran 55	Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025	186
Lampiran 56	Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025.....	187
Lampiran 57	Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2025.....	188
Lampiran 58	Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2025.....	189
Lampiran 59	Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2025.....	190
Lampiran 60	Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Status Formalitas Pekerjaan Utama, 2025.....	191
Lampiran 61	Penduduk yang Pernah Berhenti Bekerja dari Pekerjaan Dalam Setahun Terakhir (Agustus 2024–Agustus 2025) Menurut Provinsi dan Status Bekerja, 2025	192
Lampiran 62	Persentase Perpindahan Lapangan Usaha dari Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Berhenti Bekerja dalam Setahun Terakhir, 2025	193
Lampiran 63	Persentase Perpindahan Status Pekerjaan Penduduk 15 Tahun ke Atas Dalam Setahun Terakhir, 2025	193
Lampiran 64	Penduduk Bekerja yang Pernah Berhenti Bekerja dari Pekerjaan Dalam Setahun Terakhir (Agustus 2024–Agustus 2025) Menurut Alasan Utama Berhenti Bekerja, 2025	194
Lampiran 65	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Bekerja di Luar Negeri Menurut Periode Keberangkatan dan Kepulangan, 2021—2025	194
Lampiran 66	Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Status Pengalaman Bekerja di Luar Negeri, 2025	195

Lampiran 67	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Berangkat untuk Bekerja ke Luar Negeri dalam 5 Tahun Terakhir Menurut Negara Tujuan, 2025	196
Lampiran 68	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Berangkat untuk Bekerja ke Luar Negeri dalam 5 Tahun Terakhir Menurut Negara Tujuan dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (ribu orang), 2025	196
Lampiran 69	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Berangkat untuk Bekerja ke Luar Negeri dalam 5 Tahun Terakhir Menurut Sektor Ekonomi, 2025	196
Lampiran 70	Karakteristik Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Bekerja di Luar Negeri Menurut Periode Keberangkatan, 2025	197
Lampiran 71	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Bekerja di Luar Negeri dengan Keberangkatan dan Kepulangan dalam Lima Tahun Terakhir Menurut Provinsi Tempat Tinggal dan Negara Tujuan, 2025	197
Lampiran 72	Kesalahan Sampling Jumlah Pekerja Migran Risen Menurut Provinsi, Sakernas Agustus 2025.....	198
Lampiran 73	Kesalahan Sampling Jumlah Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi, Sakernas Agustus 2025	199
Lampiran 74	Kesalahan Sampling Jumlah Pekerja Komuter Menurut Provinsi, Sakernas Agustus 2025	200
Lampiran 75	Kesalahan Sampling Jumlah Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi, Sakernas Agustus 2025	201
Lampiran 76	Kesalahan Sampling Jumlah Penduduk yang Pernah Berhenti Bekerja dari Pekerjaan Dalam Setahun Terakhir, Sakernas Agustus 2025	202
Lampiran 77	Kesalahan Sampling Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Bekerja di Luar Negeri dengan Keberangkatan dan Kepulangan dalam Lima Tahun Terakhir, Sakernas Agustus 2025	203

Penjelasan Umum

Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error/RSE*)

Dalam publikasi ini, angka yang disajikan dilengkapi dengan informasi mengenai tingkat ketidakpastiannya melalui nilai Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error/RSE*). RSE merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar kesalahan baku suatu estimasi dibandingkan dengan nilai estimasi itu sendiri, dinyatakan dalam persen. Publikasi ini menerapkan klasifikasi RSE sebagai berikut:

- RSE $\leq 25\%$, tidak diberikan tanda apapun, menunjukkan kesalahan relatif rendah;
- RSE bernilai $>25\%$ namun $\leq 50\%$ diberikan tanda superskrip, yang menunjukkan kesalahan relatif sedang sehingga estimasi harus digunakan dengan hati-hati;
- RSE $>50\%$ diberi label NA (*Not Applicable*), menunjukkan kesalahan relatif tinggi sehingga estimasi dianggap tidak akurat.

Tanda

Tanda-tanda yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

Tanda	Penjelasan
[–]	Tidak ada atau nol mutlak
[,]	Tanda desimal
[.]	Tanda pemisah ribuan
NA	<i>Not Applicable</i> /data tidak dapat ditampilkan, misalnya karena kesalahan baku relatifnya besar atau banyaknya sampel tidak mencukupi

Catatan Pembulatan

Angka-angka pada tabel mungkin tidak berjumlah tepat sama dengan totalnya akibat pembulatan.

An illustration of the interior of a modern bus. Passengers are seated and standing, some looking out the windows at a cityscape. A man with a backpack stands in the aisle, holding a pole. A woman stands near the front. A digital display at the front shows 'NEXT STOP: STASIUN KOTA'. A map of the bus route is visible on the wall. A large teal shape with the number '1' is overlaid on the right side.

1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mobilitas penduduk dan tenaga kerja merupakan salah satu fenomena sosial-ekonomi yang terus berkembang seiring dengan perubahan struktur pembangunan, dinamika pasar kerja, serta kemajuan sarana transportasi dan komunikasi. Perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain tidak hanya mencerminkan keputusan individu atau rumah tangga dalam mencari peluang hidup yang lebih baik, tetapi juga menggambarkan keterkaitan antardaerah dalam proses pembangunan nasional. Dalam konteks ketenagakerjaan, mobilitas menjadi salah satu strategi yang ditempuh penduduk untuk memperoleh pekerjaan, meningkatkan pendapatan, maupun memperluas akses terhadap berbagai sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pola dan karakteristik mobilitas tenaga kerja menjadi penting untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Perkembangan kajian mobilitas menunjukkan bahwa perpindahan manusia tidak lagi dipandang sekadar sebagai pergerakan fisik dari satu tempat ke tempat lain. Sheller dan Urry (2006) melalui konsep *The New Mobilities Paradigm* menjelaskan bahwa mobilitas merupakan bagian penting dari kehidupan sosial modern yang membentuk hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan politik antarwilayah maupun antarnegara. Mobilitas menjadi salah satu cara masyarakat merespons perubahan kesempatan kerja, ketimpangan pembangunan, serta transformasi ekonomi yang berlangsung secara cepat. Dalam perspektif tersebut, mobilitas tenaga kerja tidak hanya berkaitan dengan perpindahan lokasi bekerja, tetapi juga merefleksikan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Dengan demikian, kajian mengenai mobilitas tenaga kerja menjadi semakin relevan untuk memahami berbagai dinamika pembangunan di Indonesia.

Kajian migrasi klasik juga menunjukkan bahwa perpindahan penduduk dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Everett S. Lee (1966) dalam tulisannya yang berjudul *A Theory of Migration* menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk bermigrasi dipengaruhi oleh faktor pendorong dari daerah asal, faktor penarik dari daerah tujuan, hambatan yang dihadapi selama proses perpindahan, serta karakteristik individu yang bersangkutan. Teori tersebut masih relevan hingga saat ini, terutama dalam menjelaskan arus migrasi antardaerah yang terjadi akibat perbedaan kesempatan kerja, tingkat upah, dan ketersediaan fasilitas sosial-ekonomi. Dalam konteks Indonesia yang memiliki karakteristik wilayah sangat beragam, faktor-faktor tersebut membentuk pola mobilitas yang unik dan berbeda antarprovinsi maupun antarpulau. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut menjadi landasan penting dalam membaca berbagai temuan statistik yang disajikan dalam publikasi ini.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar memiliki dinamika mobilitas yang sangat kompleks. Perbedaan tingkat pembangunan, konsentrasi kegiatan ekonomi, struktur industri, serta karakteristik pasar kerja antarwilayah mendorong terjadinya perpindahan penduduk dalam berbagai bentuk. Sebagian penduduk memilih berpindah lokasi tempat tinggal secara permanen (bermigrasi), sementara sebagian lainnya melakukan mobilitas temporer dengan tetap mempertahankan tempat tinggal utama di daerah asal. Fenomena pekerja komuter yang melakukan perjalanan rutin untuk bekerja dan pekerja sirkuler yang berpindah sementara ke daerah lain menjadi bagian penting dari strategi masyarakat dalam mengakses kesempatan kerja. Berbagai bentuk mobilitas tersebut memberikan kontribusi terhadap distribusi tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi wilayah, dan perubahan struktur sosial masyarakat. Besarnya peran mobilitas dalam membentuk distribusi penduduk dan tenaga kerja menjadikan fenomena ini sebagai salah satu aspek penting yang perlu dikelola dalam kebijakan pembangunan nasional.

Di Indonesia, pengelolaan mobilitas penduduk merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan kependudukan. Hal ini tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang menempatkan persebaran penduduk dan pengarahannya sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang lebih seimbang antarwilayah. Mobilitas penduduk perlu diarahkan agar selaras dengan daya dukung lingkungan dan kebutuhan pembangunan daerah. Dalam konteks tersebut, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru serta penyediaan fasilitas sosial dan ekonomi di berbagai daerah menjadi strategi yang ditempuh untuk mengurangi konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah metropolitan.

Kebutuhan akan informasi yang akurat mengenai mobilitas penduduk semakin meningkat seiring dengan pentingnya isu tersebut dalam perencanaan pembangunan. Upaya pemenuhan ketersediaan data dan informasi terkait mobilitas penduduk telah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui berbagai kegiatan sensus dan survei. Pertanyaan mengenai tempat lahir dan tempat tinggal pada lima tahun sebelumnya telah dicantumkan dalam instrumen pendataan Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada beberapa periode terakhir. Pencantuman pertanyaan tersebut secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu menghasilkan informasi mengenai jumlah dan karakteristik migran. Meskipun demikian, pemanfaatannya dilakukan mengikuti tujuan dari sensus dan survei yang dilakukan. Penyajian data dan analisis mengenai tingkat kesejahteraan migran dilakukan menggunakan data Susenas, mengikuti tujuannya sebagai basis data kesejahteraan penduduk. Sementara penyajian data dan analisis yang mengaitkan antara migrasi dan

karakteristik ketenagakerjaan dapat menggunakan data Sakernas. Untuk itu, diperlukan kehati-hatian dan pemahaman pengguna data dalam memanfaatkan data mobilitas yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Meskipun sebagian besar dinamika mobilitas tenaga kerja Indonesia terjadi di dalam negeri, mobilitas lintas negara juga menjadi bagian penting dari sistem ketenagakerjaan nasional. Kesempatan kerja internasional telah membuka ruang bagi banyak penduduk Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui pekerjaan di berbagai negara tujuan. Pada saat yang sama, migrasi internasional menghadirkan berbagai tantangan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran, pengelolaan remitansi, peningkatan keterampilan, serta reintegrasi sosial dan ekonomi setelah kembali ke daerah asal. Berbagai studi menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja internasional tidak hanya berdampak pada individu yang bermigrasi, tetapi juga terhadap kesejahteraan keluarga dan pembangunan daerah asal. Adams dan Page (2005) menemukan bahwa remitansi berkontribusi pada penurunan kemiskinan di negara berkembang, sementara berbagai laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa remitansi turut mendukung investasi rumah tangga pada pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi produktif. Oleh karena itu, informasi mengenai pengalaman bekerja di luar negeri menjadi bagian yang penting untuk melengkapi gambaran mobilitas tenaga kerja Indonesia secara menyeluruh.

Memasuki periode bonus demografi, mobilitas tenaga kerja menjadi salah satu mekanisme penting dalam menyeimbangkan kebutuhan tenaga kerja antarwilayah. Perkembangan kawasan industri baru, pembangunan infrastruktur, dan meningkatnya konektivitas antarwilayah telah mendorong perubahan pola mobilitas penduduk yang semakin dinamis. Pada saat yang sama, kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi menuntut tersedianya informasi yang lebih komprehensif mengenai karakteristik dan pola pergerakan pekerja. Oleh karena itu, analisis mobilitas tenaga kerja menjadi semakin penting sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan wilayah.

1.2 Tujuan Penulisan

Penulisan publikasi ini secara umum ditujukan untuk meningkatkan pemanfaatan informasi hasil Sakernas 2025 menjadi suatu pengetahuan melalui eksplorasi potensi mobilitas tenaga kerja di Indonesia. Adapun tujuan khusus penulisan publikasi ini adalah:

1. Memperbarui informasi pola mobilitas pekerja di Indonesia;
2. Mengidentifikasi karakteristik pekerja yang melakukan mobilitas;

3. Mengidentifikasi pola mobilitas pekerja menurut sektor ekonomi untuk mengetahui potensi penyerapan tenaga kerja;
4. Memperbarui informasi pengalaman bekerja di luar negeri.

1.3 Manfaat Penulisan

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Sebagai referensi akademis terkait mobilitas tenaga kerja di Indonesia;
2. Memberikan masukan bagi pemerintah dalam memetakan target dan rencana pembangunan sektoral berbasis ketenagakerjaan; dan
3. Sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan terkait kependudukan untuk mendukung tujuan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045.

1.4 Sistematika Penyajian

Publikasi ini disusun atas beberapa bagian yang saling melengkapi. Setelah diawali dengan pendahuluan, pada bagian kedua tulisan disampaikan tinjauan pustaka terkait mobilitas tenaga kerja. Pada bagian ketiga dijelaskan mengenai metodologi, termasuk sumber data, kerangka sampel, unit analisis, pengumpulan dan pengolahan data, serta definisi operasional. Pada bagian empat disampaikan mengenai hasil pembahasan dan analisis. Publikasi ini ditutup dengan kesimpulan dan saran pada bagian lima. Di bagian akhir disertakan lampiran tabel hasil pengolahan data Sakernas tahun 2025.



2

Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Mobilitas Penduduk

Dalam kajian kependudukan, istilah *mobilitas* merujuk pada pergerakan individu maupun kelompok dalam dimensi ruang dan waktu (Barbosa et al., 2018). Mobilitas manusia mencerminkan kemampuan seseorang untuk bergerak, kebebasan untuk menetap atau berpindah, dan tendensi untuk berubah dengan cepat (de Haas, 2020). Meskipun terdapat variasi dalam pola mobilitas penduduk, namun pola pergerakan manusia menunjukkan keteraturan secara spasial secara umum. Setiap individu dicirikan oleh jarak perjalanan khas yang relatif tetap dari waktu ke waktu serta memiliki probabilitas yang tinggi untuk kembali ke beberapa lokasi yang sering dikunjungi. (González et al., 2008). Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas penduduk mengikuti pola yang terstruktur dan tidak sepenuhnya acak.

Pooley et al. (2005) mengklasifikasikan pola mobilitas penduduk ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1. Mobilitas sederhana, seperti perjalanan rutin untuk bekerja, berbelanja, atau rekreasi;
2. Mobilitas sirkuler, yaitu perjalanan reguler dengan jarak yang lebih jauh namun bersifat berulang;
3. Migrasi jarak jauh, yakni perpindahan tempat tinggal yang melibatkan relokasi permanen atau jangka panjang.

Konsep ini dikenal sebagai '*mobility continuum*'. Meningkatnya fleksibilitas pasar tenaga kerja dan kemajuan infrastruktur transportasi mendorong penurunan migrasi satu arah. Sebaliknya, kegiatan komuter serta kepemilikan rumah kedua untuk keperluan ulang-alik jarak jauh secara sirkuler semakin meningkat (Petzold, 2020). Oleh karena itu, secara geografis mobilitas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pergerakan berupa komuter harian dan migrasi jarak jauh (Haley, 2017).

Bentuk-bentuk mobilitas yang berbeda membawa banyak konsekuensi bagi beragam orang dan tempat. Mobilitas merupakan konsekuensi dari sumber daya yang teralokasikan dan termaterialisasikan secara tidak berimbang bagi setiap manusia (Sheller & Urry, 2006). Akibatnya pergerakan dan perpindahan manusia selalu bervariasi bergantung pada perubahan aktivitas serta ketersediaan sumber daya tersebut. Dalam konteks ekonomi, perpindahan akibat perubahan aktivitas maupun sumber daya tersebut dikenal sebagai mobilitas tenaga kerja. Gregson (2023) berargumen bahwa sebagian besar mobilitas penduduk yang terjadi melibatkan migrasi tenaga kerja pada berbagai skala geografis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap pola mobilitas tenaga kerja dan perubahannya sangat penting

dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi, baik pada level daerah maupun nasional.

2.2 Determinan Mobilitas Penduduk

Alasan mengapa individu atau kelompok melakukan mobilitas, serta bagaimana mereka melakukannya, merupakan isu sentral dalam studi kependudukan. Mobilitas menjadi strategi adaptif yang diperlukan manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Pada masa lampau, mobilitas manusia didorong oleh faktor alam seperti perubahan musim, kesulitan mengolah lahan, konflik, dan kelangkaan makanan. Perubahan pola mobilitas terjadi dengan cepat pada abad 20 dan awal abad 21 sejalan dengan proses globalisasi yang membawa perubahan pada kondisi politik, ekonomi, dan teknologi (Montanari, 2005). Pada masa modern, mobilitas manusia lebih dipengaruhi oleh faktor sosioekonomi seperti kesenjangan upah dan ketimpangan kesejahteraan (Barbosa et al., 2018). Dalam konteks demografis, ketika tingkat kelahiran mengalami penurunan, mobilitas penduduk menjadi determinan utama yang memengaruhi dinamika jumlah populasi suatu wilayah.

Pada skala spasial terbatas, mobilitas jarak pendek seperti perjalanan komuter banyak dipengaruhi oleh distribusi spasial antara lokasi tempat tinggal dan tempat kerja. Pemisahan fungsional antara kawasan hunian dan kawasan aktivitas ekonomi menyebabkan peningkatan jarak dan waktu tempuh perjalanan harian (Suzuki & Lee, 2012). Pemilihan lokasi tempat tinggal sendiri bersifat relatif terhadap lokasi aktivitas utama, terutama pekerjaan, dan sangat dipengaruhi oleh variabel harga lahan atau harga perumahan (Islam & Saphores, 2022). Selain harga, atribut sosioekonomi rumah tangga dan kualitas lingkungan juga memengaruhi pilihan lokasi tempat tinggal dan pola perjalanan menuju tempat kerja (Aditjandra et al., 2012). Faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah kemudahan akses terhadap moda transportasi. Preferensi terhadap moda transportasi tertentu sering kali menjadi pertimbangan utama dalam memilih tempat tinggal (van Wee, 2009). Apabila durasi perjalanan harian melebihi ambang toleransi yang dimiliki individu, maka terdapat kecenderungan untuk melakukan mobilitas residensial, yaitu berpindah tempat tinggal (Clark et al., 2003).

Dalam konteks mobilitas jarak jauh atau migrasi, terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan motif dan mekanisme terjadinya perpindahan penduduk. Czaika dan Reinprecht (2022) membagi teori-teori migrasi ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Teori Migrasi Neoklasik

Teori ini menekankan bahwa migrasi merupakan hasil keputusan rasional individu untuk memaksimalkan manfaat ekonomi. Ketimpangan kesempatan kerja dan tingkat upah antarwilayah menjadi pendorong utama perpindahan. Lee (1966) mengembangkan model ini lebih lanjut dengan merumuskan empat kategori faktor yang memengaruhi migrasi: faktor pendorong di wilayah asal, faktor penarik di wilayah tujuan, hambatan migrasi seperti jarak dan aksesibilitas transportasi, serta faktor-faktor individual seperti persepsi dan preferensi pribadi. Sjaastad (1962) memandang migrasi sebagai bentuk investasi, di mana individu mengalokasikan sumber dayanya (waktu, uang, tenaga) untuk memperoleh pengembalian dalam bentuk peningkatan pendapatan atau kesejahteraan di masa depan. Dalam konteks ini, persepsi terhadap peluang spasial menjadi prasyarat penting dalam pengambilan keputusan migrasi.

2. Ekonomi Baru Migrasi Tenaga Kerja

Dipelopori oleh Stark dan Bloom (1985), pendekatan ini menempatkan keluarga atau rumah tangga sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan migrasi. Migrasi dipandang sebagai strategi diversifikasi risiko ekonomi, di mana anggota rumah tangga dikirim ke lokasi-lokasi berbeda guna mengakses sumber pendapatan yang lebih stabil, terutama dalam konteks ekonomi yang penuh ketidakpastian.

3. Teori Jaringan Migrasi

Migrasi dianggap sebagai keluaran sosial yang terhubung secara kompleks oleh keputusan individu, keluarga, organisasi migran, serta aktor ekonomi dan politik lainnya (Boyd, 1989).

4. Model Transisi Mobilitas

Pandangan struktural menempatkan migrasi sebagai bagian dari dinamika pembangunan ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Zelinsky (1971) melalui model transisi mobilitas menjelaskan bahwa hubungan antara migrasi dan struktur demografi sangat dipengaruhi oleh tahapan urbanisasi, industrialisasi, dan modernisasi yang dialami suatu masyarakat.

2.3 Migrasi

Migrasi merujuk pada perpindahan individu atau kelompok dari satu tempat tinggal ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap. Upaya menjelaskan pola migrasi penduduk dirumuskan pertama kali, antara lain, oleh Ravenstein (1889) dalam suatu hukum migrasi sebagai berikut:

1. Sebagian besar migrasi terjadi pada jarak yang dekat. Arus migrasi akan mengarah ke pusat perdagangan dan industri yang mampu menyerap banyak pekerja;
2. Proses penyerapan pekerja berlangsung sesuai pola berikut: Penduduk sekitar kota besar pindah ke pusat kota untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian meninggalkan lahan pertaniannya. Penduduk dari sekitar pinggiran kota tersebut akan pindah ke lokasi pertanian yang ditinggalkan tersebut, dan berlangsung seterusnya hingga wilayah yang paling ujung;
3. Proses penyebaran penduduk merupakan kebalikan dari proses penyerapan pekerja tersebut, dan berlangsung dalam pola yang sama;
4. Setiap arus migrasi akan menciptakan arus sebaliknya sebagai kompensasi;
5. Migran yang berpindah dalam jarak jauh secara umum dilakukan dengan memilih satu dari pusat perdagangan dan industri terbesar;
6. Penduduk pusat kota cenderung kurang bermigrasi dibandingkan mereka yang berasal dari kawasan perdesaan;
7. Perempuan cenderung lebih bermigrasi dibandingkan laki-laki.
8. Penduduk perkotaan akan lebih banyak dipengaruhi oleh migrasi masuk dibandingkan pertumbuhan natural;
9. Jumlah migrasi akan meningkat sejalan dengan perkembangan transportasi dan pertumbuhan industri.

Argumen Ravenstein (1889) kemudian dikembangkan oleh Stouffer (1940) untuk pemahaman lebih lanjut terkait pola migrasi bahwa mobilitas penduduk didorong oleh aksesibilitas sosioekonomi antara dua lokasi. Secara agregat, Zipf (1946) menyampaikan hipotesis bahwa volume migrasi antar dua lokasi akan sebanding dengan proporsi dari populasi kedua lokasi tersebut, dan berbanding terbalik dengan jarak. Migrasi kemudian dianggap sebagai bentuk investasi individu untuk meningkatkan peluang mendapatkan kesempatan pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi (Harris & Todaro, 1970).

Keinginan untuk bermigrasi muncul pada suatu tahap dalam kehidupan individu ketika terdapat kesempatan untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik (Czaika dan Reinprecht, 2022). Dalam perkembangannya, keputusan migrasi juga dipahami sebagai bagian dari siklus kehidupan individu yang dipengaruhi oleh berbagai peristiwa penting, seperti perkawinan, kelahiran anak, pendidikan, maupun perubahan karier pekerjaan. Faktor-faktor seperti frekuensi perpindahan, usia ketika berpindah, jarak migrasi, tujuan perpindahan, dan motif migrasi turut membentuk dinamika mobilitas

penduduk. Di sisi lain, keputusan untuk bermigrasi juga dapat memengaruhi perjalanan hidup individu dan keluarganya.

2.4 Mobilitas Penduduk Temporer

2.4.1 Mobilitas Pekerja yang Pulang Pergi Harian

Mobilitas pekerja yang pulang pergi harian merupakan salah satu bentuk mobilitas temporer yang dilakukan oleh penduduk untuk melakukan aktivitas pekerjaan tanpa berpindah tempat tinggal secara menetap (Fisher & Mitchelson, 1981). Mobilitas ini terjadi ketika seseorang melakukan perjalanan dari tempat tinggal menuju lokasi kerja dan kembali lagi pada hari yang sama.

Mobilitas pekerja pulang pergi harian dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, perkembangan pusat kegiatan ekonomi, serta kemudahan akses transportasi. Pertumbuhan wilayah perkotaan dan kawasan industri menyebabkan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang mendorong pergerakan penduduk dari tempat tinggal menuju lokasi kerja setiap harinya (van der Veen & Evers, 1983). Selain itu, perkembangan infrastruktur transportasi dan konektivitas wilayah turut mendukung meningkatnya mobilitas harian pekerja karena mempermudah akses menuju tempat kerja (Haas & Osland, 2014).

Keberadaan pekerja pulang pergi harian menunjukkan adanya interaksi ekonomi dan sosial yang cukup tinggi dalam suatu wilayah. Mobilitas ini juga mencerminkan pola persebaran pekerjaan dan tempat tinggal penduduk yang tidak selalu berada pada lokasi yang sama. Oleh karena itu, mobilitas pekerja pulang pergi harian menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan dinamika ketenagakerjaan, aktivitas ekonomi, serta pola pergerakan penduduk di suatu daerah (Green et al., 1999).

2.4.2 Mobilitas Ulang-Alik (*Commuting*)

Kegiatan mobilitas ulang-alik (*commuting*) meliputi perjalanan yang dilakukan secara rutin oleh pekerja maupun pelajar untuk bekerja dan menempuh pendidikan. Studi mengenai komuter penting untuk memahami dinamika sistem transportasi, kondisi pekerja, serta perkembangan kawasan metropolitan (Nuvolati, 2014). Pertumbuhan jumlah komuter dalam beberapa dekade terakhir didorong oleh suburbanisasi, peningkatan kualitas transportasi, serta mobilitas penduduk yang tinggi. Selain itu, kondisi ini dipicu oleh tetap dibutuhkannya pertemuan fisik di tengah kemajuan teknologi, serta masih terpusatnya lapangan kerja dan fungsi perkotaan di pusat kota.

Perilaku komuter dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan makro serta mikro. Secara makro, Reitsma dan Vergoossen (1988) menjelaskan bahwa untuk dapat memahami keputusan individu terkait migrasi, maka penyesuaian spasial dari lokasi tempat tinggal dan pekerjaan serta perilaku komuternya perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Sementara secara mikro, pilihan untuk melakukan *commuting* dipengaruhi oleh hierarki keputusan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (Ben-Akiva & Atherton, 1977). Pilihan lokasi, lingkungan, dan unit rumah sebagai keputusan jangka panjang mempengaruhi keputusan jangka menengah untuk memiliki mobil, yang akhirnya dapat mempengaruhi keputusan jangka pendek seperti frekuensi penggunaan moda transportasi.

Upaya untuk mengatasi diskrepansi antara lokasi permukiman dan tempat pekerjaan dapat dijelaskan dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama, individu membuat keputusan secara bertahap yaitu apakah mencari lokasi permukiman dengan mempertimbangkan letak lokasi pekerjaan (Rouwendal & Rietveld, 1994), atau kedua mencari pekerjaan dengan mempertimbangkan letak lokasi permukiman (Weinberg, 1979). Pendekatan pertama cenderung menghasilkan mobilitas permukiman yang mendekati lokasi pekerjaan, sementara pendekatan kedua cenderung menghasilkan lokasi permukiman yang tetap dan kegiatan komuter.

2.4.3 Mobilitas Sirkuler

Mobilitas penduduk tidak selalu melibatkan perpindahan tempat tinggal secara permanen. Salah satu perubahan yang signifikan adalah terjadinya kecenderungan migrasi berulang dengan lokasi asal dan tujuan yang sama. Pola ini dikenal sebagai mobilitas sirkuler (Hugo, 2013). Pola mobilitas ini dicirikan oleh perpindahan secara periodik dari tempat asal ke tempat tujuan, baik ke tempat yang sama maupun berbeda, biasanya untuk bekerja dalam waktu pendek, melibatkan orang yang sama, dan tidak ada intensi untuk menetap di tempat tujuan (Schneider & Parusel, 2011). Mobilitas sirkuler dikenal juga sebagai “rumah kedua”, yaitu ketika seseorang memiliki tempat tinggal kedua yang menjadi substitusi bagi keharusan merelokasi tempat tinggal atau melakukan komuter (Petzold, 2020). Pelaku mobilitas sirkuler memiliki komitmen terhadap lokasi tertentu yang sifatnya sementara.

Hugo (1982) berpendapat bahwa perbedaan antara mobilitas sirkuler dan komuter terletak pada durasi, sementara perbedaan dengan migrasi terletak pada tujuan perpindahan. Mobilitas sirkuler dilakukan lebih dari satu hari bepergian, bahkan dapat berlangsung 6 hingga 12 bulan. Mobilitas sirkuler tumbuh karena terdapat peluang ekonomi di suatu lokasi, namun migran keberatan untuk meninggalkan tempat tinggalnya saat ini karena berbagai alasan (Hidayati, 2021). Hugo (2013) berpendapat

bahwa alasan memilih pola sirkuler tersebut antara lain karena keinginan untuk memaksimalkan daya beli dengan menghasilkan pendapatan yang besar di daerah tujuan, dan membelanjakan uang di daerah dengan biaya hidup lebih rendah. Selain itu, migran sirkuler juga terikat pada aspek tradisi, budaya, bahasa, maupun karakteristik wilayah asal yang lain, serta berharap keluarganya bisa memperoleh hal serupa.

Menurut *United Nations Economic Commission for Europe* (2017), terdapat lima dimensi yang perlu dipertimbangkan dalam analisis mobilitas sirkuler yaitu pengulangan perpindahan (frekuensi), arah yang tetap, durasi, tujuan atau alasan perpindahan, dan dampak terhadap pembangunan. Hugo (2013) menjelaskan bahwa dampak mobilitas sirkuler tidak hanya dapat dirasakan oleh pelaku migrasi, namun juga bagi wilayah pengirim dan penerima. Beberapa dampak mobilitas sirkuler terhadap pembangunan antara lain mengatasi kekurangan tenaga kerja di daerah tujuan secara lebih fleksibel dan terukur, tanpa mempengaruhi penduduk di kelompok usia tertentu. Sementara bagi daerah pengirim, mobilitas sirkuler memberikan keuntungan melalui remitansi. Migran sirkuler juga kembali dari daerah tujuan dengan membawa pengetahuan serta keahlian baru yang diperlukan bagi pengembangan wilayah asalnya. Mobilitas sirkuler juga mengurangi risiko kehilangan sumber daya manusia bagi daerah pengirim.

2.5 Mobilitas Pekerjaan

Seseorang dikatakan pindah pekerjaan jika pekerjaan sekarang berbeda dengan pekerjaan sebelumnya, baik berbeda lapangan usaha atau status pekerjaannya maupun pindah pekerjaan tetapi masih dalam lapangan usaha atau status pekerjaan yang sama. Untuk menentukan pekerjaan sekarang dan pekerjaan terdahulu biasanya menggunakan rentang waktu tertentu. Konsep rentang waktu itu sendiri tidak ada batasan yang baku. Namun, data Sakernas mengenai pindah pekerjaan hanya mencakup pindah pekerjaan yang terjadi selama setahun terakhir. Jika dalam setahun telah terjadi beberapa kali pindah pekerjaan maka pekerjaan sebelumnya yang dicatat adalah pekerjaan sebelumnya yang terakhir sebelum pekerjaan sekarang.

Terdapat tiga sudut pandang terkait alasan terjadinya mobilitas pekerjaan (Ng et al., 2007). Perspektif struktural menjelaskan bahwa faktor yang bersifat makro seperti kondisi ekonomi dan perbedaan industri merupakan penentu dari struktur peluang pada pasar tenaga kerja. Perspektif perbedaan individu menjelaskan bahwa atribut disposisional mempengaruhi preferensi seseorang serta perilakunya terkait mobilitas pekerjaan. Sementara perspektif ketiga yang disebut sebagai *decisional* menjelaskan bahwa mobilitas pekerjaan terjadi menurut evaluasi terhadap tiga hal yaitu norma

subjektif, keinginan untuk mendapatkan opsi mobilitas, dan kesiapan individu terhadap perubahan.

2.6 Pekerja yang Memiliki Pengalaman Bekerja di Luar Negeri

Ketersediaan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja mengakibatkan adanya tenaga kerja yang tidak terserap. Hal ini menjadi alasan bagi sebagian penduduk usia kerja untuk mencari peluang bekerja di luar negeri. Banyak pekerja Indonesia yang memilih untuk berangkat ke luar negeri dengan harapan mendapatkan pekerjaan. Pengalaman bekerja di luar negeri tidak hanya membuka peluang untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, tapi juga dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi bagi para pekerja. Selain itu, bekerja di luar negeri yang berarti menjadi pekerja migran, dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional melalui remitansi yang dikirimkan ke tanah air. Saat kembali ke Indonesia, para pekerja ini dapat membawa serta pengetahuan dan praktik terbaik dari negara tempatnya bekerja, yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan standar kerja di dalam negeri.

Teori *Human Capital Model* menyebutkan bahwa niat seseorang untuk melakukan migrasi dipengaruhi oleh motivasi untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih baik. Dalam konteks ini, banyak pekerja Indonesia yang tertarik untuk bekerja di luar negeri karena adanya kesempatan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang bisa diperoleh jika bekerja di dalam negeri. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya prospek pekerjaan jangka panjang dan stabilitas ekonomi sebagai faktor pendorong utama migrasi. Sebagai hasilnya, pengalaman kerja di luar negeri tidak hanya menawarkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan, tetapi juga memberikan rasa aman finansial yang lebih besar bagi para pekerja.

Seseorang dikatakan memiliki pengalaman bekerja di luar negeri jika pernah berangkat ke luar negeri untuk bekerja dengan masa tinggal di luar negeri minimal selama setahun sesuai dengan konsep penduduk, dan saat ini sudah kembali tinggal di Indonesia. Selain itu, status pekerjaan di luar negeri tersebut harus sebagai buruh/karyawan (terikat untuk hadir secara rutin di tempat kerja).



3

Metodologi Penulisan

3.1 Sumber Data

Publikasi Analisis Mobilitas Tenaga Kerja menggunakan data hasil Sakernas yang dihasilkan oleh BPS. Hingga 2007, informasi mengenai mobilitas tenaga kerja yang diperoleh dari hasil Sakernas masih terbatas. Sejak tahun 2008, Sakernas mengumpulkan informasi mobilitas tenaga kerja secara lebih lengkap dan dapat disajikan hingga level kabupaten/kota. Informasi tambahan yang disajikan tidak hanya tentang perpindahan pekerja secara geografis, tetapi juga perpindahan lapangan pekerjaan dan pergeseran status pekerjaan.

Tujuan utama dari Sakernas adalah mengumpulkan data ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Pada awal pelaksanaan, yakni tahun 1986 sampai dengan 1993, pencacahan Sakernas dilakukan secara triwulanan. Sakernas kemudian hanya dilakukan setahun sekali pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 tepatnya di bulan Agustus. Pada periode tahun 2002 sampai 2004 selain secara tahunan, Sakernas juga dilaksanakan secara triwulanan. Sementara itu, pada tahun 2005 hingga 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran pada bulan Februari dan Agustus.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan variasi, kontinuitas, kemutakhiran, dan akurasi data ketenagakerjaan, sejak tahun 2011 pengumpulan data Sakernas mulai dilakukan kembali secara triwulanan, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Pada kegiatan Sakernas bulan Agustus, dilakukan penambahan sampel untuk melengkapi sampel triwulanan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh angka tahunan sebagai estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota. Penulisan publikasi analisis mobilitas tenaga kerja ini dilakukan dengan menggunakan sumber data utama Sakernas Agustus 2025. Sebagai informasi tambahan/pembanding, publikasi ini juga menggunakan data-data hasil Sakernas Agustus tahun sebelumnya.

3.2 Kerangka Sampel

Kegiatan Sakernas tahun 2025 dilaksanakan tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Agustus, dan November di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di wilayah Republik Indonesia. Sakernas Februari dan November 2025 dikumpulkan untuk memperoleh estimasi data ketenagakerjaan sampai tingkat provinsi. Sampel pada kedua pendataan tersebut adalah sekitar 76.800 dan 77.400 rumah tangga. Sementara itu, Sakernas Agustus 2025 menggunakan sampel yang lebih besar, yaitu sekitar 302.860 rumah tangga dengan tingkat pemasukan dokumen 99,18 persen. Besarnya sampel yang digunakan pada Sakernas Agustus 2025 adalah untuk memperoleh estimasi data ketenagakerjaan sampai tingkat kabupaten/kota. Kegiatan Sakernas 2025

telah menggunakan kerangka sampel BS2020 dan kerangka sampel rumah tangga yang berasal dari keluarga hasil SP2020. Kerangka sampel yang digunakan adalah:

1. Daftar *Enumeration Area* (EA) pada *Master Frame* (MF) yang dilengkapi dengan informasi strata konsentrasi kesejahteraan dan strata wilayah urban/rural.
2. Daftar EA terpilih sampel SUPAS 2025 dilengkapi dengan informasi strata konsentrasi kesejahteraan dan strata wilayah urban/rural.
3. Daftar rumah tangga hasil pemutakhiran pada EA terpilih yang memuat informasi tingkat pendidikan kepala rumah tangga.

3.3 Unit Analisis

Analisis mobilitas tenaga kerja dilakukan terhadap penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan status bekerja. Analisis dilakukan pada empat unit observasi, yaitu tenaga kerja yang melakukan migrasi, tenaga kerja yang melakukan mobilitas temporer, tenaga kerja yang melakukan perpindahan pekerjaan, dan tenaga kerja yang mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri. Untuk menyesuaikan dengan konteks situasi sosial ekonomi terkini, analisis migrasi dibatasi pada pelaku migrasi risen, yaitu penduduk yang kabupaten/kota tempat tinggalnya saat ini berbeda dengan kabupaten/kota tempat tinggalnya lima tahun yang lalu. Analisis mobilitas temporer mencakup analisis pekerja yang melakukan perjalanan pulang pergi harian, komuter, dan sirkuler. Analisis mobilitas pekerjaan adalah tenaga kerja yang pernah berhenti bekerja dalam setahun terakhir yaitu pada Agustus 2024–Agustus 2025. Sementara itu, analisis tenaga kerja yang memiliki pengalaman bekerja di luar negeri dibatasi pada mereka yang pernah bekerja di luar negeri pada kurun waktu lima tahun terakhir (Agustus 2020–Agustus 2025) dan saat ini sudah kembali ke Indonesia. Analisis juga dilengkapi dengan besaran dan arus dari mobilitas yang terjadi serta karakteristik pekerja yang dapat melengkapi gambaran mobilitas tenaga kerja di Indonesia berdasarkan Sakernas tahun 2025.

3.4 Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pelaksanaan Sakernas Agustus 2025 dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan daftar SAK.AGS25-AK. Pendataan Sakernas tidak mencakup rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di Satuan Lingkungan Setempat (SLS) khusus, dan rumah tangga khusus yang berada di SLS biasa. Sejak 2011 pelaksanaan pendataan lapangan Sakernas Agustus tidak lagi dilakukan dalam bentuk tim, melainkan secara individual oleh petugas pendataan dan pemeriksaan. Petugas pemeriksa diutamakan pegawai organik BPS Kabupaten/Kota atau Provinsi (diutamakan lulusan D-III ke atas), sedangkan petugas pencacah adalah pegawai organik BPS Kabupaten/Kota maupun nonorganik (mitra) BPS yang ditugaskan

dan berpendidikan minimal SLTA (diutamakan D-III ke atas). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara petugas pendataan dan responden. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja merupakan pertanyaan individu dalam kuesioner, sehingga diusahakan bersumber dari individu yang bersangkutan.

Moda pendataan yang digunakan pada Sakernas Agustus 2025 adalah CAPI (*Computer Assisted Personal Interview*). Kegiatan pendataan Sakernas Agustus 2025 ini dilakukan dengan menggunakan *device portable (tablet/smartphone)* yang dimiliki oleh petugas, yang disebut dengan metode BYOD (*Bring Your Own Device*). Dengan menggunakan metode CAPI, petugas dapat melakukan wawancara tanpa membawa sejumlah dokumen fisik, kerahasiaan data terjaga, dan dapat melakukan pengiriman data segera setelah pendataan selesai, sehingga data dapat diperoleh secara *near real time*. Kegiatan pengolahan data Sakernas dilanjutkan dengan pemeriksaan melalui validasi dan tabulasi. Pemeriksaan yang dimaksud adalah pengecekan isian pertanyaan, pemeriksaan konsistensi isian dalam blok maupun antarblok. Proses pengolahan ditunjang dengan program validasi yang sudah tertanam pada CAPI, sehingga data yang masuk ke sistem tidak mengandung anomali atau ketidakwajaran. Proses kemudian dilanjutkan dengan tabulasi dengan hasil akhir yang disajikan berupa data berbentuk tabel.

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang dirumuskan berdasarkan sifat-sifat atau hal-hal yang dapat diamati. Definisi ini menggunakan istilah-istilah operasional agar variabel dapat diukur. Manfaat definisi operasional variabel adalah untuk mengidentifikasi kriteria yang dapat diamati, sehingga memudahkan observasi atau pengukuran variabel tersebut.

3.5.1 Variabel Sakernas yang Digunakan

Beberapa definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam analisis yang bersumber dari kuesioner Sakernas Agustus 2025 dan tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut :

- a) Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal serta makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya yang dikelola menjadi satu. Rumah tangga biasa umumnya terdiri dari bapak, ibu, dan anak.

- b) Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, dan/atau makan dari satu dapur, baik yang sedang berada di rumah pada saat pencacahan maupun yang sementara tidak berada di rumah. Anggota rumah tangga yang telah bepergian selama 1 tahun atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian selama kurang dari 1 tahun tetapi dengan tujuan akan meninggalkan rumah 1 tahun atau lebih tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga. Tamu yang telah tinggal di rumah tangga selama 1 tahun atau lebih dan tamu yang tinggal di rumah tangga selama kurang dari 1 tahun tetapi akan bertempat tinggal selama 1 tahun atau lebih, dianggap sebagai anggota rumah tangga.
- c) Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau berdasarkan ulang tahun terakhir sebelum pencacahan. Perhitungan umur didasarkan pada kalender masehi. Terkait dengan kebutuhan analisis, variabel umur dikelompokkan menjadi kelompok umur sepuluh tahunan dengan batas bawah 15 tahun.
- d) Status perkawinan dikelompokkan menjadi Belum Kawin, Kawin, dan Cerai dengan penjelasan sebagai berikut.
- Belum kawin adalah status bagi mereka yang belum terikat dalam perkawinan.
 - Kawin adalah status dari mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.
 - Cerai yang mencakup status perkawinan cerai hidup dan cerai mati dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Cerai hidup adalah status bagi mereka yang hidup berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri yang ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil dikategorikan berstatus cerai hidup.
 - Cerai mati adalah status dari mereka yang suami/istrinya telah meninggal dunia dan belum kawin lagi.
- e) Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dibuktikan dengan memperoleh tanda tamat pendidikan (ijazah/STTB). Pada publikasi ini, tingkat pendidikan dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

- Di bawah SMA, mencakup mereka yang tidak/belum tamat Sekolah Dasar (SD), tamat SD atau sederajat, dan tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat.
 - SMA ke atas, mencakup mereka yang tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan mereka yang tamat Perguruan Tinggi.
- f) Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.
- g) Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut boleh dilakukan baik secara berturut-turut/tidak terputus maupun secara kumulatif satu jam dalam seminggu. Termasuk ke dalam konsep bekerja adalah orang yang sementara tidak bekerja, yaitu mereka yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu terakhir tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, tugas belajar, atau mogok kerja. Jika seseorang melakukan pekerjaan tetapi tidak bermaksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, maka dianggap tidak bekerja.
- h) Pekerjaan utama, cara penentuan suatu kegiatan merupakan pekerjaan utama atau bukan adalah sebagai berikut:
- Jika responden pada seminggu yang lalu hanya mempunyai satu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dicatat sebagai pekerjaan utama;
 - Jika responden pada seminggu yang lalu mempunyai lebih dari satu pekerjaan, maka pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak dicatat sebagai pekerjaan utama. Jika waktu yang digunakan sama, maka pekerjaan yang memberikan penghasilan terbesar dianggap sebagai pekerjaan utama. Jika waktu yang digunakan sama dan penghasilannya juga sama besar, maka jenis pekerjaan diserahkan kepada responden, pekerjaan mana yang dianggap merupakan pekerjaan utama.
 - Jika responden pada seminggu yang lalu sementara sedang tidak bekerja, maka pekerjaan yang sementara ditinggalkan tersebut dicatat sebagai pekerjaan utama.
- i) Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja. Lapangan usaha/pekerjaan pada publikasi ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Lapangan usaha pada publikasi ini juga disajikan dengan pembagian menjadi enam kelompok:
- Kelompok pertanian mencakup tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, serta pertanian lainnya.
 - Kelompok industri pengolahan
 - Kelompok konstruksi

- Kelompok pertambangan dan penggalian; Penyediaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; dan *treatment* air, *treatment* air limbah, *treatment* dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi
 - Kelompok jasa berorientasi pasar mencakup perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, informasi dan komunikasi, aktivitas keuangan dan asuransi, dan real estat
 - Kelompok jasa tidak berorientasi pasar mencakup aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa kemasyarakatan, jasa pemerintahan dan perorangan, dan lainnya.
- j) Jenis pekerjaan/jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau apa yang dilakukan di tempat kerjanya. Jenis pekerjaan pada publikasi ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 dan dikategorikan berdasarkan tingkat keterampilan sebagai berikut:
- Tingkat keterampilan 3 dan 4: mencakup manajer; profesional; serta teknisi dan asisten profesional;
 - Tingkat keterampilan 2: mencakup tenaga tata usaha; tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan; pekerja terampil pertanian, kehutanan, dan perikanan; pekerja pengolahan, kerajinan, dan yang berhubungan dengan itu; operator dan perakitan mesin;
 - Tingkat keterampilan 1: pekerja kasar;
 - TNI/Polri.
- k) Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Status pekerjaan dalam publikasi ini dibahas melalui pengelompokan status formalitas pekerjaan dengan penjelasan sebagai berikut:
- Status pekerjaan formal meliputi berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar dan buruh/karyawan/pegawai
 - Status pekerjaan informal meliputi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non-pertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar
- l) Penduduk yang pernah bekerja di luar negeri jika penduduk tersebut pernah ke luar negeri dengan niat atau tujuan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dan sudah kembali ke Indonesia dengan bermaksud menetap atau bertempat tinggal sebagai penduduk Indonesia. Seseorang yang pada periode pendataan sedang bekerja di luar negeri tidak dicakup dalam Sakernas.

3.5.2 Migrasi

Migrasi adalah pergerakan penduduk yang melewati suatu wilayah administrasi tertentu dengan niat untuk menetap di daerah tujuan setidaknya selama satu tahun. Migrasi mencakup migrasi seumur hidup dan migrasi risen. Migrasi seumur hidup

didefinisikan sebagai perpindahan penduduk melewati suatu wilayah administrasi, yakni apabila tempat tinggal responden saat ia dilahirkan berbeda dengan wilayah administrasi tempat tinggalnya pada saat pendataan. Jenis migrasi lainnya adalah migrasi risen. Seseorang dikatakan sebagai migran risen apabila wilayah administrasi tempat tinggal responden lima tahun yang lalu berbeda dengan tempat tinggalnya sekarang (pada saat pencacahan). Secara khusus yang dimaksud dengan penduduk berstatus migran risen pada publikasi ini adalah penduduk yang kabupaten/kota tempat tinggalnya saat pencacahan (Agustus 2025) berbeda dengan kabupaten/kota tempat tinggalnya lima tahun sebelum pendataan (Agustus 2020). Dari dua jenis migrasi yang telah disebutkan, hanya penduduk yang bekerja dan berstatus sebagai migran risen yang akan dianalisis lebih lanjut dalam publikasi ini.

3.5.3 Mobilitas Temporer

Mobilitas penduduk temporer adalah pergerakan penduduk dari suatu wilayah menuju ke wilayah lain tanpa niatan menetap di daerah tujuan. Mobilitas ulang-alik dan mobilitas sirkuler termasuk dalam mobilitas temporer. Mobilitas ulang alik atau komuter adalah pergerakan penduduk secara rutin pergi ke tempat tujuan dan kembali ke tempat tinggal dalam waktu kurang dari 24 jam dengan melewati batas administratif tingkat kabupaten atau kota. Sedangkan mobilitas sirkuler adalah pergerakan penduduk secara rutin ke tempat tujuan dan kembali ke tempat tinggal dalam jangka waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu minggu. Mobilitas sirkuler juga mencakup mereka yang secara rutin kembali ke tempat tinggal lebih dari satu minggu tetapi tidak berniat menetap di tempat tujuan (seperti pekerja musiman), serta pekerja yang lokasi bekerjanya selalu berpindah-pindah. Mobilitas sirkuler yang dimaksud dalam publikasi ini adalah pergerakan melewati batas administratif tingkat kabupaten atau kota. Selain itu, untuk memperkaya analisis hasil Sakernas Agustus 2025, publikasi ini juga mengulas pelaku perjalanan pulang pergi harian yang didefinisikan sebagai penduduk yang bekerja di luar rumahnya, baik menuju lokasi kerja di dalam wilayah administrasi yang sama maupun lintas kabupaten/kota.

Definisi yang digunakan antara lain:

1. Pekerja komuter adalah pelaku mobilitas ulang-alik dengan tujuan utama untuk bekerja.
2. Pekerja sirkuler adalah pelaku mobilitas sirkuler dengan tujuan utama untuk bekerja.
3. *Stayer* adalah pekerja yang tidak melakukan mobilitas temporer atau dengan kata lain tempat bekerjanya berada di satu kabupaten/kota yang sama dengan tempat tinggalnya.

Mobilitas temporer dapat dibedakan berdasarkan karakteristik spasial dan temporal perjalanan. Dimensi spasial mencakup wilayah perpindahan yang dilalui, sedangkan dimensi temporal mencakup periode perjalanan. Berdasarkan karakteristik tersebut, pelaku perjalanan pulang pergi harian, komuter, sirkuler, dan *stayer* memiliki perbedaan mendasar sebagaimana dirangkum pada Tabel 1. Berdasarkan tabel tersebut pelaku perjalanan pulang pergi harian mencakup komuter dan sebagian *stayer*.

Tabel 1 Definisi Operasional Jenis-jenis Mobilitas Temporer

Aspek	Pelaku perjalanan pulang pergi harian	Komuter	Sirkuler	Stayer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Level perpindahan	Keluar dari rumah/tempat tinggal	Antarkabupaten/kota	Antarkabupaten/kota	Mencakup: - Tidak berpindah - Berpindah hanya di dalam kabupaten/kota
Periode pulang pergi	Hari yang sama (harian)	Hari yang sama (harian)	Tidak harian (mingguan, bulanan, musiman dst)	Tidak ada pola khusus
Contoh	Pergi bekerja ke luar rumah, lalu pulang pada hari yang sama	Tinggal di Kabupaten Bogor, bekerja di Jakarta Selatan setiap hari	Pekerja proyek yang pulang seminggu sekali, di tempat proyek dia tinggal di bedeng	Berjualan di warung kelontong di rumahnya; Pulang pergi untuk bekerja di kabupaten yang sama dengan tempat tinggal

3.5.4 Mobilitas Pekerjaan

Mobilitas pekerjaan didefinisikan sebagai pindah lapangan pekerjaan dan/atau status pekerjaan sehingga tidak lagi mempunyai ikatan dengan usaha (pekerjaan) atau organisasi tempat bekerja sebelumnya. Kim (2008) dalam Fitta et al. (2020) menyatakan bahwa intensi pindah kerja yang tinggi terjadi pada suatu organisasi bukanlah suatu kebetulan, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Salah satu faktor yang menyebabkan sering terjadinya keinginan karyawan untuk keluar dari perusahaan tempat bekerja adalah perasaan tidak nyaman karyawan pada pekerjaannya. Alasan seseorang pindah pekerjaan dalam Sakernas dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu alasan internal, alasan eksternal, dan alasan lainnya. Alasan internal adalah alasan pindah kerja karena pendapatan kurang memuaskan dan tidak cocok dengan lingkungan kerja. Alasan eksternal adalah alasan pindah kerja karena PHK, usaha terhenti/bangkrut, dan habis masa kerja/kontrak. Alasan lainnya adalah alasan pindah kerja karena mengurus rumah tangga atau alasan lainnya.

3.5.5 Metode Analisis

Publikasi ini menyajikan informasi mobilitas tenaga kerja yang lengkap dan sesuai dengan ketersediaan data yang bersumber dari Sakernas Agustus 2025 melalui metode analisis deskriptif. Secara umum skema analisis deskriptif dilakukan melalui tabulasi satu arah maupun dua arah dalam satuan jumlah maupun persen. Selain disajikan dalam bentuk tabulasi, analisis juga didukung oleh visualisasi grafis dari beberapa informasi khusus yang terkait. Kelebihan dalam melakukan analisis deskriptif adalah bahwa pendekatan ini dapat dilakukan dengan membandingkan dan melihat rasio informasi tenaga kerja yang relevan.

<https://www.bps.go.id>



4

Pembahasan dan Analisis

4.1 Kondisi Pasar Kerja Indonesia

Kondisi pasar tenaga kerja Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global dan nasional. Pemulihan ekonomi dunia berlangsung relatif stabil, meskipun masih terdapat variasi pertumbuhan antarnegara. Di sisi lain, pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi Covid-19 mendorong peningkatan aktivitas produksi dan konsumsi yang berdampak pada meningkatnya permintaan tenaga kerja di berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi nasional menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat kapasitas dunia usaha untuk menyerap tenaga kerja dan menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat.

Perkembangan pasar kerja Indonesia juga dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan transformasi digital yang semakin pesat. Pemanfaatan teknologi dalam proses produksi, distribusi, dan pelayanan mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Di sisi lain, digitalisasi menciptakan kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki keahlian teknologi dan keterampilan digital. Oleh karena itu, tenaga kerja dituntut lebih adaptif terhadap perubahan teknologi agar mampu bersaing di dunia kerja yang semakin maju.

Selain perkembangan teknologi, kondisi pasar tenaga kerja Indonesia pada tahun 2025 turut dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global. Pemulihan ekonomi di negara-negara maju meningkatkan permintaan terhadap produk ekspor Indonesia yang mendorong aktivitas industri dan perdagangan. Namun demikian, ketidakpastian di tingkat global akibat konflik geopolitik, volatilitas harga energi, dan perubahan kondisi perdagangan internasional masih menjadi tantangan bagi perekonomian nasional. Kondisi ini berpotensi memengaruhi stabilitas industri dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Perubahan dalam rantai pasok global juga berdampak terhadap pasar kerja nasional. Banyak perusahaan internasional mulai melakukan diversifikasi lokasi produksi untuk mengurangi risiko gangguan pada rantai pasok. Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi dan relokasi industri dikarenakan keberadaan jumlah tenaga kerja yang besar dan pasar domestik yang luas. Peningkatan investasi ini menciptakan peluang kerja baru, terutama pada sektor manufaktur, logistik, dan industri ekspor.

Di sisi lain, pasar tenaga kerja Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran tetap menjadi perhatian utama, terutama di kalangan penduduk muda dan lulusan baru.

Selain itu, sebagian tenaga kerja masih berada di sektor informal yang umumnya memiliki tingkat produktivitas, pendapatan, dan perlindungan kerja yang relatif rendah. Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan dunia kerja juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia.

Mobilitas tenaga kerja juga merupakan aspek penting dalam dinamika pasar tenaga kerja Indonesia tahun 2025. Urbanisasi dan perkembangan pusat-pusat ekonomi mendorong peningkatan mobilitas pekerja antarwilayah, baik dalam bentuk komuter maupun migrasi kerja. Kota-kota besar masih menjadi pusat penyerapan tenaga kerja karena menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan dibanding daerah lain. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi kesempatan kerja antarwilayah di Indonesia.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pasar tenaga kerja Indonesia tahun 2025 tetap memiliki peluang yang besar. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, perkembangan ekonomi digital, industri kreatif, dan ekonomi hijau berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di masa mendatang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi langkah penting untuk mendukung daya saing tenaga kerja Indonesia.

Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Berdasarkan Tabel 2, penduduk usia kerja meningkat dari 189,1 juta orang pada tahun 2016 menjadi 218,2 juta orang pada tahun 2025. Kenaikan ini diikuti oleh dinamika angkatan kerja yang cukup fluktuatif. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2016 sebesar 125,4 juta orang meningkat hingga tahun 2020 menjadi 138,2 juta orang. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 131 juta orang, jumlah angkatan kerja kembali meningkat secara signifikan hingga mencapai 154 juta orang pada tahun 2025. Di tengah pertumbuhan ini, struktur komposisi angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin cenderung stabil, dengan proporsi laki-laki berkisar antara 60 hingga 61 persen dan perempuan antara 38 hingga 40 persen. Namun, data tahun 2025 mencatat peningkatan partisipasi perempuan yang mencapai 39,9 persen, level tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

Berdasarkan karakteristik sektor pekerjaan, pasar tenaga kerja Indonesia secara bertahap mengalami pergeseran dari sektor informal ke sektor formal. Pada tahun 2016, sekitar 57,6 persen penduduk yang bekerja berada di sektor informal. Meskipun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 60,5 persen, angka tersebut menurun secara konsisten menjadi 57,8 persen pada tahun 2025. Peningkatan sektor formal ini

dapat dibaca sebagai indikasi perbaikan kualitas pekerjaan yang tersedia, serta kemungkinan adanya ekspansi industri dan jasa formal. Tingkat pengangguran juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pada tahun 2016, persentase pengangguran sebesar 5,6 persen kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 3,5 persen pada tahun 2019. Akan tetapi, pengangguran meningkat pada tahun 2020 menjadi 4,8 persen dan mencapai angka tertinggi dalam satu dekade terakhir sebesar 6,5 persen pada tahun 2021. Mulai tahun 2022, tingkat pengangguran terus mengalami penurunan hingga mencapai 4,8 persen pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan pemulihan pasar kerja secara menyeluruh.

Tabel 2 Karakteristik Ketenagakerjaan Indonesia, 2016–2025

Indikator Ketenagakerjaan	Tahun									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Jumlah penduduk usia kerja (juta orang)	189,1	192,1	194,8	201,2	204,0	206,7	209,4	212,5	215,4	218,2
Jumlah angkatan kerja (juta orang)	125,4	128,1	131,0	135,9	138,2	131,0	135,3	147,7	152,1	154,0
Persentase angkatan kerja menurut jenis kelamin										
Laki-laki (%)	61,7	61,8	61,4	61,6	60,8	60,6	61,1	61,0	60,3	60,1
Perempuan (%)	38,3	38,2	38,6	38,4	39,2	39,4	38,9	39,0	39,7	39,9
Persentase penduduk bekerja menurut sektor										
Formal (%)	42,4	42,7	43,2	44,1	39,5	40,6	40,7	40,9	42,0	42,2
Informal (%)	57,6	57,3	56,8	55,9	60,5	59,4	59,3	59,1	58,0	57,8
Persentase pengangguran (%)	5,6	5,5	3,6	3,5	4,8	6,5	5,9	5,3	4,9	4,8
Persentase pekerja menurut status mobilitas										
Pekerja komuter (%)	6,0	6,5	6,8	6,9	5,5	5,6	6,0	5,3	5,2	5,2
Pekerja sirkuler (%)	2,1	2,2	2,2	1,9	1,8	1,8	1,6	2,3	2,4	2,4
Pekerja migran risen (%)	3,4	4,0	4,0	4,5	3,7	2,5	2,8	3,1	3,1	2,3

Sumber: Hasil pengolahan Sakernas, 2016–2025

Dalam hal mobilitas kerja, sebagian pekerja menunjukkan pola mobilitas temporer. Proporsi pekerja komuter cenderung fluktuatif pada kisaran 5 hingga 7 persen dengan persentase terendah sebesar 5,2 persen pada tahun 2025. Pekerja sirkuler pada tahun 2016 sebesar 2,1 persen kemudian meningkat menjadi 2,2 persen pada tahun 2017 dan tetap stabil hingga tahun 2018. Persentase pekerja sirkuler terjadi pada tahun 2019–2022 hingga menyentuh angka 1,6 persen, tetapi meningkat kembali hingga tahun 2025 menjadi 2,4 persen. Sementara itu, pekerja migran risen, yakni mereka yang pernah berpindah wilayah dan kini kembali aktif bekerja, menunjukkan pola yang mirip dengan mobilitas temporer lainnya. Pekerja migran risen tertinggi sebesar 4,5 persen pada tahun 2019 dan cenderung menurun menjadi 2,3 persen pada tahun 2025. Gambaran ini mencerminkan lanskap ketenagakerjaan Indonesia yang secara perlahan mengarah pada struktur kerja yang lebih formal, partisipasi kerja

perempuan yang sedikit meningkat, serta dinamika mobilitas pekerja yang tetap relevan di tengah transformasi ekonomi.

Komposisi angkatan kerja Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan yang digambarkan pada Tabel 3 menunjukkan pola pergeseran yang konsisten selama periode 2016 hingga 2025. Saat ini, proporsi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan di bawah sekolah menengah atas (SMA) dan SMA ke atas cenderung seimbang. Angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan di bawah SMA proporsinya terus menurun dari 63,7 persen pada tahun 2016 menjadi 50,8 persen pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan perubahan bertahap dalam struktur pendidikan tenaga kerja, yang semakin bergeser ke arah pendidikan menengah dan tinggi. Rinciannya, proporsi angkatan kerja yang tidak tamat SD pada tahun 2016 hingga 2020 terus menurun menjadi 11,4 persen. Namun, terjadi peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 hingga mencapai 13,1 persen, sebelum kembali turun menjadi 11,4 persen pada 2025. Sementara itu, proporsi mereka yang menamatkan pendidikan dasar (SD) menurun dari tahun 2016 hingga 2019 menjadi 23,9 persen. Peningkatan terjadi pada tahun 2020 dengan angka sebesar 26,2 persen, namun tren menunjukkan penurunan yang cukup konsisten pada tahun-tahun berikutnya dari 24,5 persen pada tahun 2021 menjadi 22,4 persen pada tahun 2025.

Tabel 3 **Persentase Angkatan Kerja Indonesia Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2016–2025**

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tahun									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Di bawah SMA	63,7	58,8	57,5	56,4	55,7	54,4	55,4	53,4	52,3	50,8
Tidak tamat SD	15,7	15,7	14,9	14,8	11,4	12,1	13,1	11,8	11,6	11,4
Tamat SD	25,6	25,1	24,5	23,9	26,2	24,5	24,8	23,9	23,2	22,4
Tamat SMP	22,4	18,0	18,0	17,8	18,2	17,8	17,5	17,7	17,5	16,9
SMA ke atas	36,3	41,2	42,5	42,5	44,3	45,6	44,6	46,6	47,7	49,2
Tamat SMA	26,9	29,1	30,3	31,1	32,0	32,9	32,4	33,8	34,8	36,1
Perguruan Tinggi	9,4	12,1	12,3	12,4	12,4	12,7	12,2	12,7	12,9	13,1

Sumber: Hasil pengolahan Sakernas, 2016–2025

Pola yang sama juga dimiliki oleh angkatan kerja yang tamat SMP dengan kondisi pada tahun 2016 sebesar 22,4 persen dan menurun menjadi 16,9 persen pada tahun 2025, meskipun pada tahun 2020 sempat mengalami kenaikan persentase tamatan SMP hingga berada pada angka 18,2 persen. Hal ini dapat menunjukkan semakin sedikitnya angkatan kerja baru yang berhenti pada jenjang di bawah SMA. Sebaliknya, angkatan kerja dengan pendidikan SMA ke atas terus meningkat. Pada tahun 2016,

kelompok ini mencakup 36,3 persen dari total angkatan kerja dan meningkat menjadi 49,2 persen pada 2025. Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok lulusan SMA, dari 26,9 persen menjadi 36,1 persen dalam sepuluh tahun. Sementara itu, persentase angkatan kerja dengan pendidikan perguruan tinggi juga terus mengalami peningkatan dari 9,4 persen pada tahun 2016 menjadi 13,1 persen pada tahun 2025.

Kondisi karakteristik pendidikan yang ditamatkan oleh angkatan kerja di Indonesia telah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya angkatan kerja lulusan SMA ke atas yang meningkat dari tahun ke tahun. Sebaliknya, angkatan kerja yang memiliki pendidikan di bawah SMA semakin menurun setiap tahunnya. Perubahan-perubahan ini mencerminkan pergeseran struktur pendidikan tenaga kerja Indonesia yang semakin mengarah ke tingkat menengah dan atas. Tren tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam kualifikasi pendidikan angkatan kerja di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir.

Selanjutnya, Tabel 4 menunjukkan struktur ketenagakerjaan Indonesia menurut sektor ekonomi selama periode 2016 hingga 2025 menunjukkan adanya pergeseran moderat namun konsisten. Dalam sepuluh tahun terakhir, sektor pertanian mencatat penurunan proporsi pekerja, dari 31,9 persen pada 2016 menjadi 28,2 persen pada tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan tren jangka panjang deagrarianisasi, di mana sebagian tenaga kerja secara bertahap berpindah dari sektor primer ke sektor-sektor non-pertanian.

Tabel 4 Persentase Pekerja di Indonesia Menurut Sektor Ekonomi, 2020–2025

Sektor Ekonomi	Tahun									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanian	31,9	29,7	30,0	28,6	30,8	28,3	28,6	28,2	28,2	28,2
Manufaktur	21,4	22,2	22,0	22,3	20,5	22,4	22,2	22,2	22,2	22,2
Jasa	46,7	48,1	48,0	49,1	48,7	49,3	49,2	49,6	49,6	49,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Hasil pengolahan Sakernas 2016–2025

Sektor manufaktur mengalami peningkatan proporsi pekerja pada awal periode, naik dari 21,4 persen pada 2016 menjadi 22,3 persen pada 2019. Namun, proporsi pekerja sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 20,5 persen. Pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 22,4 persen dan proporsinya relatif stabil di angka 22,2 persen hingga 2025. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa sektor manufaktur mempertahankan kapasitasnya dalam menyerap tenaga kerja, meskipun belum menunjukkan ekspansi yang signifikan dalam proporsi terhadap total ketenagakerjaan.

Sektor jasa tetap menjadi sektor dominan dalam penyerapan tenaga kerja nasional. Mulai tahun 2016 hingga 2023, pekerja sektor jasa terus mengalami peningkatan dari 46,7 persen hingga mencapai 49,6 persen meskipun pada tahun 2020 sempat mengalami sedikit penurunan menjadi 48,7 persen. Pada tahun 2023 hingga 2025 tetap berada pada level yang sama, yakni sebesar 49,6 persen. Stabilitasnya dominasi sektor jasa menunjukkan peran sentral sektor tersier dalam struktur ekonomi nasional dan ketenagakerjaan di Indonesia.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan pola transformasi struktural yang khas dalam proses pembangunan ekonomi, di mana kontribusi sektor pertanian terhadap ketenagakerjaan berangsur menurun, sementara sektor jasa mempertahankan posisinya. Sektor manufaktur berperan sebagai sektor transisi, meskipun proporsinya belum mengalami pertumbuhan lanjutan dalam beberapa tahun terakhir.

4.2 Pekerja Migran Risen

4.2.1 Besaran dan Tren Pekerja Migran Risen

Dalam konteks migrasi, migran risen adalah penduduk yang tempat tinggalnya saat survei berbeda dengan tempat tinggalnya lima tahun yang lalu. Informasi mengenai pekerja migran risen penting untuk memahami dinamika mobilitas tenaga kerja antardaerah, mengidentifikasi wilayah asal dan tujuan migrasi, serta memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara perpindahan penduduk dan kesempatan kerja. Menurut Lee (1966) dalam teori migrasi klasiknya, keputusan migrasi umumnya dipengaruhi oleh faktor pendorong dari daerah asal dan faktor penarik dari daerah tujuan, terutama yang berkaitan dengan peluang ekonomi dan pekerjaan. Oleh karena itu, karakteristik pekerja migran risen dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat arah pergerakan tenaga kerja dan konsentrasi aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

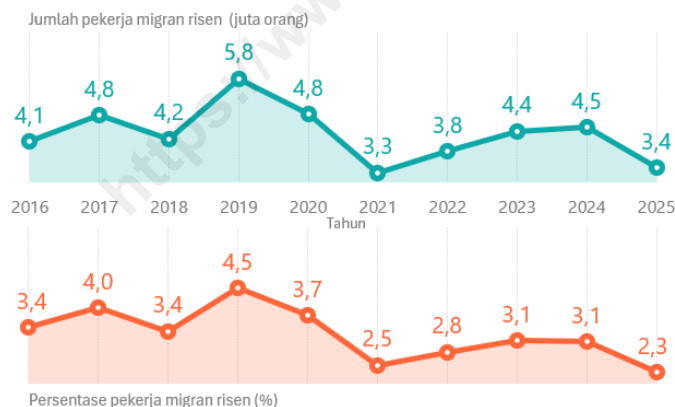
Tabel 5 menyajikan informasi penduduk menurut status bekerja dan status migrasi risen. Hasil Sakernas 2025 menunjukkan bahwa penduduk migran risen berjumlah sekitar 5,1 juta orang atau 2,3 persen dari total penduduk usia kerja yang diamati. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,4 juta orang berstatus bekerja, sedangkan 1,7 juta orang lainnya tidak bekerja. Di sisi lain, penduduk nonmigran masih mendominasi baik pada kelompok yang bekerja maupun yang tidak bekerja, dengan proporsi mencapai 97,7 persen dari total penduduk. Temuan ini mengindikasikan bahwa mobilitas penduduk antardaerah dalam lima tahun terakhir hanya melibatkan sebagian kecil penduduk, tetapi tetap memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap dinamika pasar tenaga kerja nasional.

Tabel 5 Penduduk Menurut Status Bekerja dan Status Migrasi Risen, 2025

Status Bekerja	Status Migrasi Risen				Total	
	Migran		Nonmigran			
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bekerja	3.393,6	2,3	143.148,6	97,7	146.542,2	100,0
Tidak bekerja	1.726,1	2,4	69.899,5	97,6	71.625,6	100,0
Total	5.119,7	2,3	213.048,1	97,7	218.167,8	100,0

Sumber: Hasil pengolahan Sakernas 2025

Jika dilihat menurut status bekerja, proporsi migran risen pada kelompok tidak bekerja (2,4 persen) sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok bekerja (2,3 persen). Perbedaan tersebut relatif kecil, yang menunjukkan bahwa migran risen tersebar pada berbagai kondisi aktivitas ekonomi. Menurut Lee (1966), perpindahan penduduk merupakan hasil interaksi antara faktor pendorong di daerah asal dan faktor penarik di daerah tujuan, sehingga migrasi tidak selalu berujung pada keberhasilan memperoleh pekerjaan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, keberadaan migran risen yang belum bekerja dapat mencerminkan proses adaptasi terhadap pasar kerja di daerah tujuan maupun perpindahan yang didorong oleh alasan selain pekerjaan, seperti pendidikan, keluarga, atau perubahan tempat tinggal.



Gambar 6 Jumlah dan Persentase Pekerja Migran Risen, 2016–2025

Gambar 6 menampilkan jumlah dan persentase pekerja migran risen selama periode 2016–2025. Jumlah pekerja migran risen selama periode tersebut menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2016 tercatat sekitar 4,1 juta pekerja migran risen, kemudian meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019 sebesar 5,8 juta orang. Setelah itu jumlahnya menurun menjadi 4,8 juta orang pada tahun 2020 dan kembali turun menjadi 3,3 juta orang pada tahun 2021. Kondisi

tersebut kemungkinan berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Setelah pandemi mereda, jumlah pekerja migran risen kembali meningkat menjadi 3,8 juta orang pada tahun 2022, 4,4 juta orang pada tahun 2023, dan 4,5 juta orang pada tahun 2024, sebelum kembali turun menjadi 3,4 juta orang pada tahun 2025.

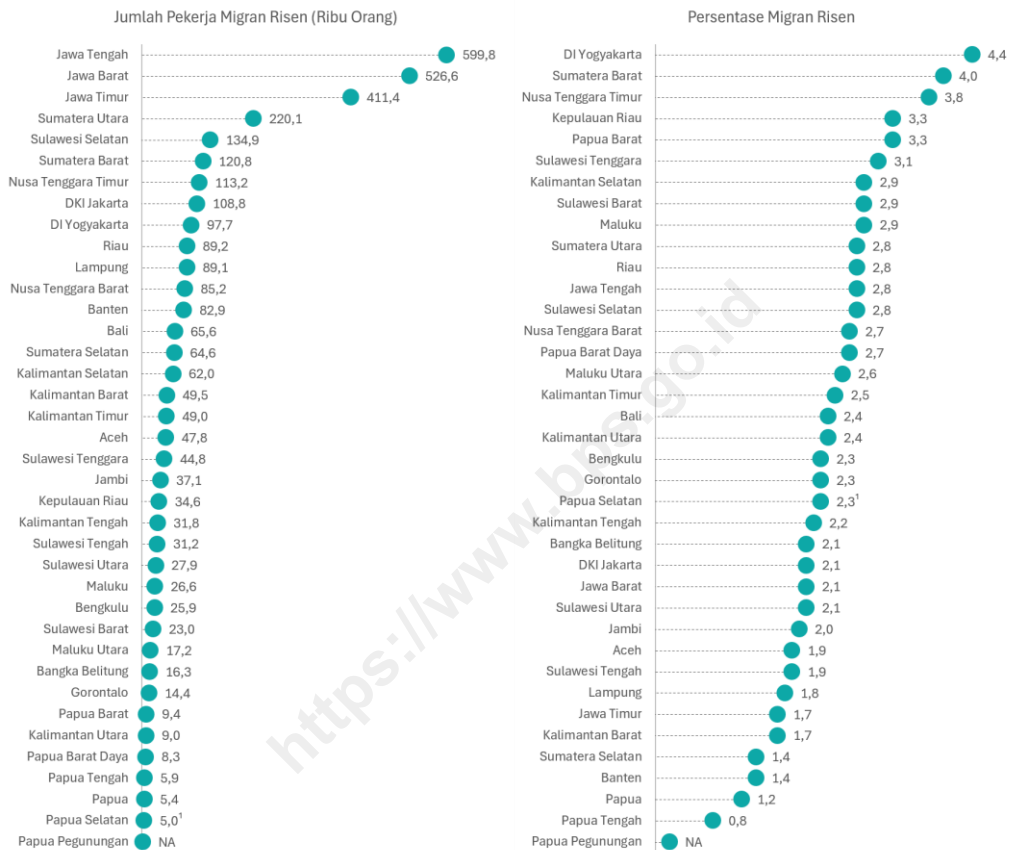
Pola yang serupa juga terlihat pada persentase pekerja migran risen terhadap total pekerja. Persentase tersebut meningkat dari 3,4 persen pada tahun 2016 menjadi 4,5 persen pada tahun 2019, kemudian menurun hingga mencapai 2,5 persen pada tahun 2021. Pada periode pemulihan pascapandemi, persentase pekerja migran risen kembali meningkat menjadi 3,1 persen pada tahun 2023 dan 2024, namun turun menjadi 2,3 persen pada tahun 2025. Secara umum, tren ini menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kemudahan perpindahan penduduk. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Todaro dan Smith (2020) yang menyatakan bahwa migrasi tenaga kerja merupakan respons terhadap perubahan peluang ekonomi antardaerah, sehingga cenderung meningkat ketika kondisi ekonomi membaik dan menurun ketika terjadi gangguan terhadap aktivitas ekonomi maupun mobilitas penduduk.

4.2.2 Distribusi Wilayah Pekerja Migran Risen

Sebaran pekerja migran risen pada tahun 2025 menunjukkan konsentrasi yang cukup tinggi di beberapa provinsi dengan aktivitas ekonomi yang besar. Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pekerja migran risen terbanyak, yaitu sekitar 599,8 ribu orang, diikuti Jawa Barat sebanyak 526,6 ribu orang dan Jawa Timur sebanyak 411,4 ribu orang. Besarnya jumlah pekerja migran risen di ketiga provinsi tersebut tidak terlepas dari jumlah penduduk yang besar serta tingginya mobilitas tenaga kerja yang terjadi di Pulau Jawa. Sebaliknya, jumlah pekerja migran risen paling sedikit tercatat di Papua Selatan (5,0 ribu orang), Papua (5,4 ribu orang), dan Papua Tengah (5,9 ribu orang), yang mencerminkan relatif terbatasnya arus perpindahan tenaga kerja di provinsi tersebut dibandingkan wilayah lain.

Apabila dilihat dari persentasenya terhadap total pekerja di masing-masing provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi tertinggi dengan persentase pekerja migran risen sebesar 4,4 persen, diikuti Sumatera Barat sebesar 4,0 persen dan Nusa Tenggara Timur sebesar 3,8 persen. Tingginya proporsi pekerja migran risen di ketiga provinsi tersebut menunjukkan bahwa mobilitas penduduk memiliki peran yang cukup besar dalam pembentukan struktur tenaga kerja daerah. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik sosial dan historis masing-masing wilayah. Menurut teori jaringan migrasi yang dikemukakan oleh Massey et al. (1993), keberadaan jaringan sosial dan budaya migrasi

yang telah terbentuk dapat mendorong perpindahan penduduk secara berkelanjutan karena menurunkan biaya dan risiko migrasi. Selain itu, dalam konteks DI Yogyakarta, tingginya proporsi pekerja migran juga dapat dikaitkan dengan peran provinsi tersebut sebagai pusat pendidikan yang menarik penduduk dari berbagai daerah untuk menempuh pendidikan dan kemudian memasuki pasar kerja setempat. Sebaran pekerja migran risen menurut provinsi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 7 berikut.

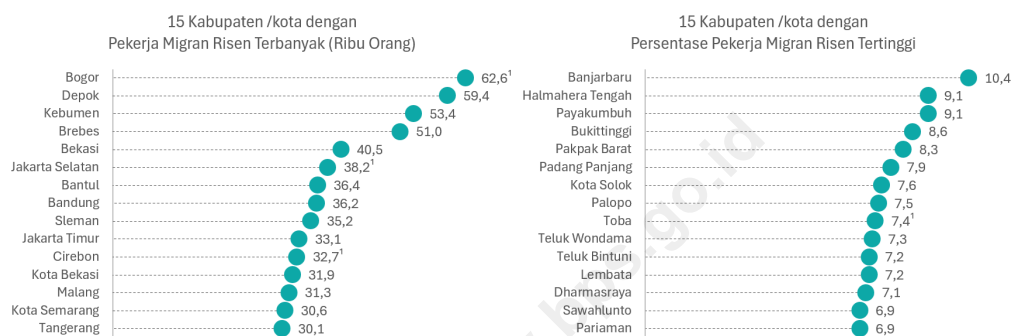


Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 7 Jumlah dan Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Provinsi, 2025

Pada tingkat kabupaten/kota, Kota Bogor tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pekerja migran risen terbanyak, yaitu sekitar 62,6 ribu orang. Posisi berikutnya ditempati Kota Depok sebanyak 59,4 ribu orang dan Kabupaten Kebumen sebanyak 53,4 ribu orang. Dominasi wilayah penyangga metropolitan, seperti Kota Bogor dan Kota Depok, menunjukkan kuatnya pengaruh kawasan perkotaan besar sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menarik perpindahan tenaga kerja. Selain itu, beberapa kabupaten di Pulau Jawa juga masuk dalam daftar wilayah dengan jumlah pekerja migran risen terbesar, mencerminkan tingginya mobilitas penduduk di kawasan yang memiliki jaringan ekonomi dan transportasi yang relatif berkembang.

Dilihat dari persentasenya, Kabupaten Banjarbaru mencatat proporsi pekerja migran risen tertinggi sebesar 10,4 persen, disusul Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Payakumbuh yang persentase pekerja migran sebesar 9,1 persen. Tingginya persentase tersebut mengindikasikan bahwa pekerja migran risen memiliki peran yang cukup signifikan dalam struktur ketenagakerjaan wilayah setempat. Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah tertentu tidak hanya menjadi tujuan perpindahan tenaga kerja, tetapi juga mengalami dinamika pasar kerja yang sangat dipengaruhi oleh arus migrasi. Menurut Bell dan Charles-Edwards (2013), variasi intensitas migrasi antarwilayah merupakan refleksi dari perbedaan kesempatan ekonomi, karakteristik demografi, dan tingkat keterhubungan antarwilayah.



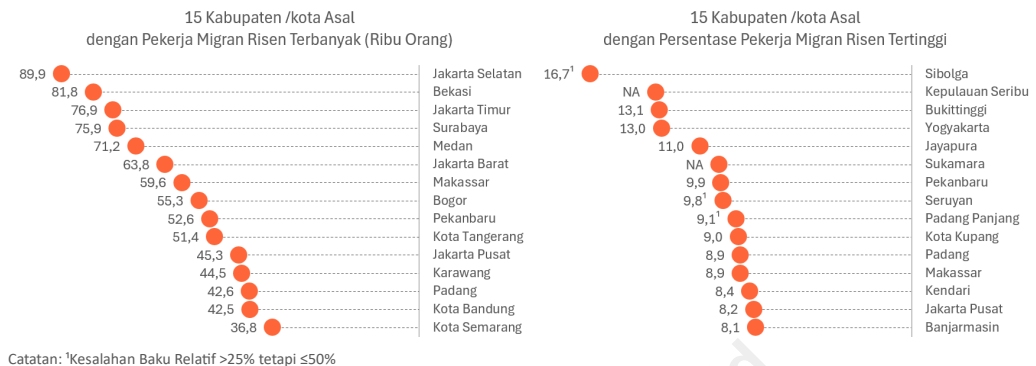
Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 8 Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Jumlah Pekerja Migran Risen Terbesar dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Persentase Pekerja Migran Risen Tertinggi, 2025

Wilayah asal pekerja migran risen didominasi oleh kota-kota besar yang memiliki tingkat mobilitas penduduk tinggi. Kota Jakarta Selatan menjadi daerah asal pekerja migran risen terbesar dengan sekitar 89,9 ribu orang, diikuti Kabupaten Bekasi sebanyak 81,8 ribu orang dan Kota Jakarta Timur sebanyak 76,9 ribu orang. Besarnya jumlah pekerja migran yang berasal dari wilayah-wilayah tersebut menunjukkan tingginya dinamika perpindahan penduduk di kawasan metropolitan, baik karena alasan pekerjaan, pendidikan, maupun kebutuhan tempat tinggal. Fenomena ini juga mengindikasikan bahwa migrasi tidak hanya terjadi dari daerah yang kurang berkembang menuju daerah yang lebih maju, tetapi juga berlangsung secara intensif di dalam dan antarwilayah perkotaan.

Dari sisi persentase, Kota Sibolga mencatat proporsi pekerja migran risen tertinggi sebesar 16,7 persen. Bukittinggi dan Yogyakarta juga mencatat persentase tinggi, berturut-turut sebesar 13,3 persen dan 13,1 persen. Tingginya proporsi pekerja migran risen yang berasal dari wilayah-wilayah tersebut menunjukkan bahwa mobilitas penduduk menjadi salah satu strategi penting dalam memperoleh kesempatan kerja.

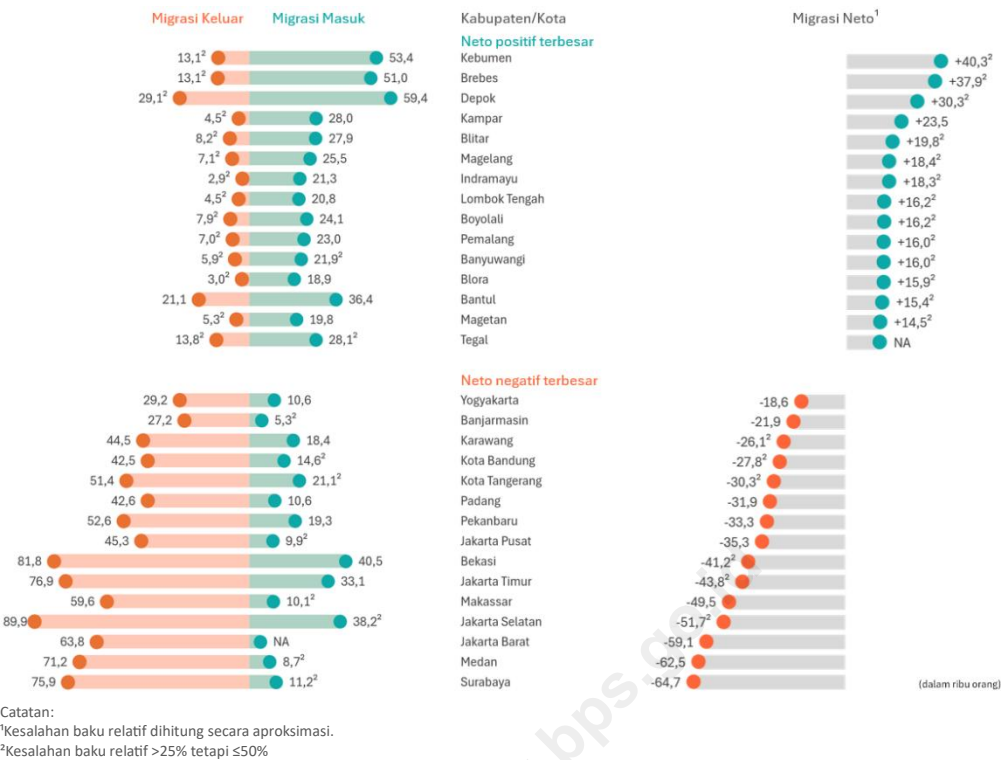
Temuan ini sejalan dengan konsep migrasi sebagai strategi rumah tangga yang dikemukakan oleh Stark dan Bloom (1985), yang menjelaskan bahwa perpindahan penduduk sering kali dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui diversifikasi sumber pendapatan dan akses ke pasar kerja yang lebih luas.



Gambar 9 Lima Belas Kabupaten/Kota Asal Pekerja Migran Risen Terbesar dan Lima Belas Kabupaten/Kota Asal dengan Persentase Pekerja Migran Risen Tertinggi

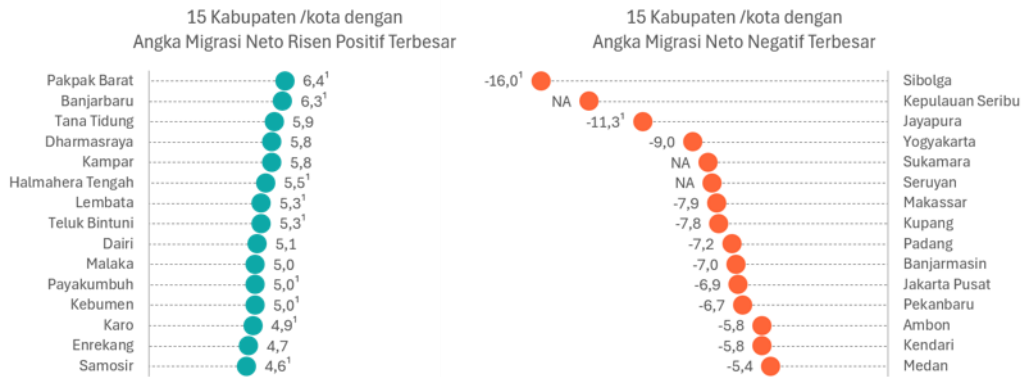
4.2.3 Arus dan Pola Migrasi Pekerja Migran Risen

Arus dan pola migrasi pekerja migran risen menggambarkan arah perpindahan tenaga kerja antardaerah serta keseimbangan antara migrasi masuk dan migrasi keluar pada suatu wilayah. Analisis terhadap arus migrasi penting untuk memahami daerah-daerah yang berperan sebagai tujuan maupun sumber tenaga kerja, sekaligus mengidentifikasi keterkaitannya dengan perkembangan ekonomi dan pusat-pusat pertumbuhan baru. Dalam kajian migrasi, arus perpindahan penduduk umumnya dipengaruhi oleh perbedaan peluang ekonomi, aksesibilitas wilayah, dan karakteristik sosial-demografi antarwilayah (Lee, 1966). Oleh karena itu, analisis mengenai migrasi neto dan volume arus migrasi pekerja risen dapat memberikan gambaran mengenai dinamika redistribusi tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2025.



Gambar 10 Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Migrasi Neto Positif Terbesar dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Migrasi Neto Negatif Terbesar pada Pekerja, 2025

Migrasi neto pekerja risen menunjukkan adanya kabupaten/kota yang berperan sebagai daerah tujuan utama perpindahan tenaga kerja, sekaligus daerah yang mengalami kehilangan tenaga kerja akibat migrasi keluar yang lebih besar daripada migrasi masuk. Pada tahun 2025, Kabupaten Kebumen mencatat migrasi neto positif terbesar secara absolut, yaitu sekitar 40,3 ribu orang, diikuti oleh Kabupaten Brebes sebesar 37,9 ribu orang dan Kota Depok sebesar 30,3 ribu orang. Sebaliknya, Kota Surabaya mengalami migrasi neto negatif terbesar dengan kehilangan bersih sekitar 64,7 ribu pekerja migran risen, diikuti Kota Medan sebesar 62,5 ribu orang dan Jakarta Barat sebesar 59,1 ribu orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan migrasi neto yang besar memiliki daya tarik yang relatif kuat bagi perpindahan tenaga kerja, baik karena berkembangnya aktivitas ekonomi maupun meningkatnya peluang kerja.

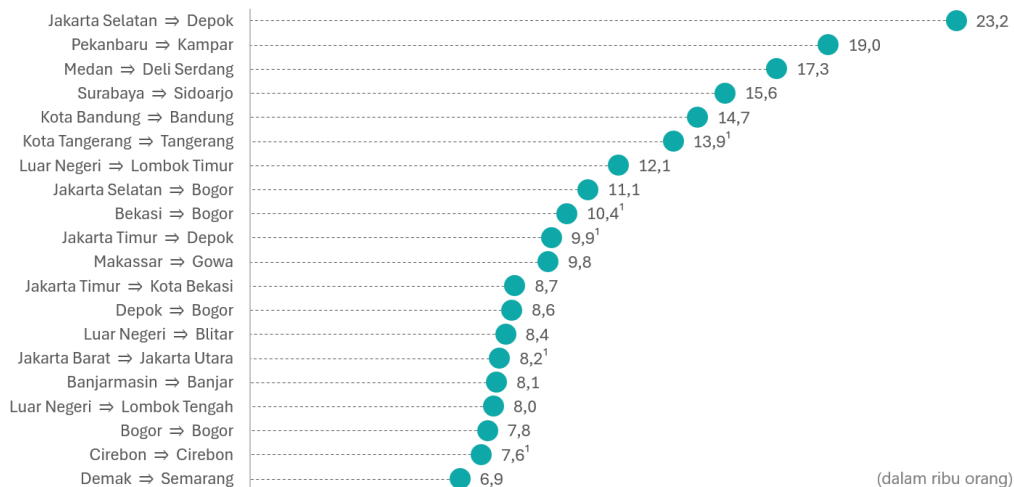


Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 11 Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Angka Migrasi Neto Positif Tertinggi dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Angka Migrasi Neto Negatif Terendah pada Pekerja, 2025

Sementara itu, dari sisi angka migrasi neto, Kabupaten Pakpak Bharat menjadi wilayah dengan nilai tertinggi, yaitu 6,4 persen, disusul Kota Banjarbaru sebesar 6,3 persen dan Kabupaten Tana Tidung sebesar 5,9 persen. Sebaliknya, Kota Sibolga tercatat memiliki angka migrasi neto negatif terdalam, yaitu sebesar -16,0 persen. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sebagian pekerja memilih berpindah dari pusat-pusat kota menuju wilayah penyangga atau daerah lain yang menawarkan peluang ekonomi dan biaya hidup yang lebih kompetitif. Temuan tersebut sejalan dengan teori push and pull factors dari Lee (1966), yang menyatakan bahwa perpindahan penduduk merupakan hasil interaksi antara faktor penarik di daerah tujuan dan faktor pendorong dari daerah asal.

Data migrasi masuk dan migrasi keluar pekerja risen menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan angka migrasi neto positif umumnya memiliki jumlah migrasi masuk yang jauh lebih besar dibandingkan migrasi keluar. Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut berfungsi sebagai magnet baru bagi tenaga kerja, kemungkinan didukung oleh perkembangan ekonomi lokal dan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja. Di sisi lain, kabupaten/kota dengan angka migrasi neto negatif menunjukkan kondisi yang berlawanan, yaitu arus keluar pekerja lebih besar dibandingkan arus masuk. Menurut Bell dan Charles-Edwards (2013), perbedaan intensitas migrasi antardaerah merupakan refleksi dari ketimpangan peluang ekonomi, perkembangan infrastruktur, dan konektivitas wilayah. Dengan demikian, angka migrasi neto dapat menjadi salah satu indikator penting untuk mengidentifikasi daerah yang sedang mengalami penguatan maupun pelemahan daya tarik ekonomi.



Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

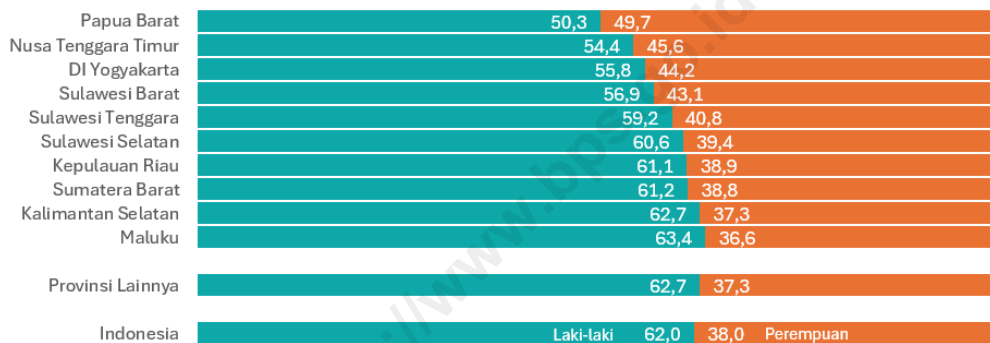
Gambar 12 Dua Puluh Arus Migrasi Pekerja Migran Risen Antarkabupaten/kota dengan Volume Terbesar

Arus migrasi pekerja risen antarkabupaten/kota dengan volume terbesar pada tahun 2025 didominasi oleh perpindahan yang terjadi di kawasan metropolitan dan wilayah penyangganya. Arus terbesar tercatat dari Jakarta Selatan menuju Kota Depok dengan volume sekitar 23,2 ribu orang, diikuti perpindahan dari Pekanbaru ke Kabupaten Kampar sebanyak 19,0 ribu orang dan dari Kota Medan ke Kabupaten Deli Serdang sebesar 17,3 ribu orang. Selain itu, arus yang cukup besar juga terlihat dari Surabaya ke Sidoarjo, Kota Bandung ke Kabupaten Bandung, serta Kota Tangerang ke Kabupaten Tangerang. Pola ini menunjukkan adanya kecenderungan suburbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari pusat kota menuju wilayah penyangga yang masih memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat.

Menariknya, daftar arus migrasi terbesar juga memperlihatkan kontribusi migrasi dari luar negeri menuju beberapa daerah di Indonesia, seperti Lombok Timur, Blitar, dan Lombok Tengah. Hal ini mengindikasikan adanya pekerja migran Indonesia yang kembali ke daerah asal dan kemudian tercatat sebagai migran risen dalam Sakernas. Secara umum, pola arus migrasi tersebut menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan pusat-pusat ekonomi besar, tetapi juga oleh hubungan fungsional antarwilayah yang semakin kuat. Temuan ini sejalan dengan konsep sistem migrasi (*migration systems theory*) yang menjelaskan bahwa arus perpindahan penduduk cenderung membentuk jaringan yang stabil antara daerah asal dan tujuan karena adanya keterkaitan ekonomi, sosial, dan historis (Mabogunje, 1970).

4.2.4 Karakteristik Demografi dan Ketenagakerjaan Pekerja Migran Risen

Karakteristik demografi dan ketenagakerjaan pekerja migran risen memberikan gambaran mengenai profil tenaga kerja yang melakukan perpindahan tempat tinggal dalam lima tahun terakhir. Informasi ini penting untuk memahami kelompok penduduk yang paling aktif bermigrasi, karakteristik sosial ekonomi yang mereka miliki, serta posisi mereka dalam pasar kerja. Berbagai kajian menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja merupakan proses yang sangat selektif, di mana karakteristik seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, dan status pekerjaan berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk berpindah wilayah (Lee, 1966; Bell et al., 2015). Oleh karena itu, analisis karakteristik pekerja migran risen dapat membantu mengidentifikasi kelompok penduduk yang paling responsif terhadap peluang ekonomi dan perubahan kondisi pasar kerja di berbagai daerah.

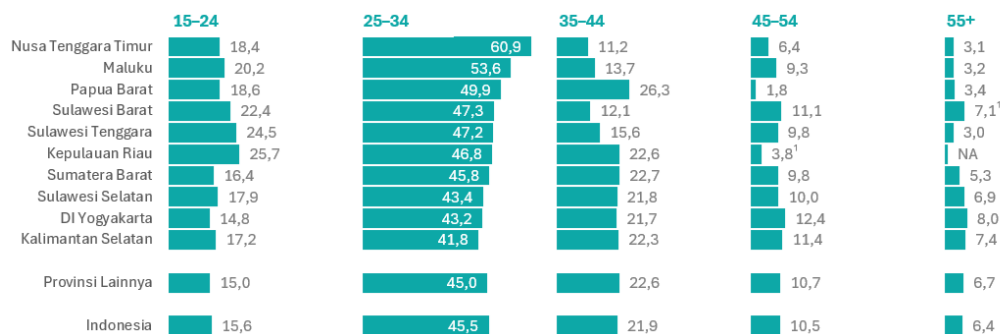


Gambar 13 Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Jenis Kelamin di 10 Provinsi Terpilih, 2025

Pada tahun 2025, pekerja migran risen di Indonesia didominasi oleh laki-laki, yaitu sebesar 62,0 persen, sedangkan perempuan mencapai 38,0 persen. Dominasi laki-laki terlihat hampir di seluruh provinsi terpilih. Proporsi pekerja migran risen laki-laki tertinggi terdapat di Maluku (63,4 persen), Kalimantan Selatan (62,7 persen), dan Sumatera Barat (61,2 persen). Sementara itu, Papua Barat menunjukkan komposisi yang paling seimbang, dengan persentase laki-laki sebesar 50,3 persen dan perempuan sebesar 49,7 persen.

Pola tersebut menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja antardaerah masih lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Temuan ini sejalan dengan teori migrasi tenaga kerja yang menyebutkan bahwa laki-laki cenderung memiliki mobilitas geografis yang lebih tinggi karena lebih banyak terlibat dalam sektor-sektor pekerjaan yang menuntut perpindahan lokasi kerja (Massey et al., 1993). Namun demikian, tingginya proporsi

pekerja migran risen perempuan di beberapa provinsi mengindikasikan bahwa perempuan semakin berpartisipasi dalam mobilitas tenaga kerja dan pasar kerja modern.

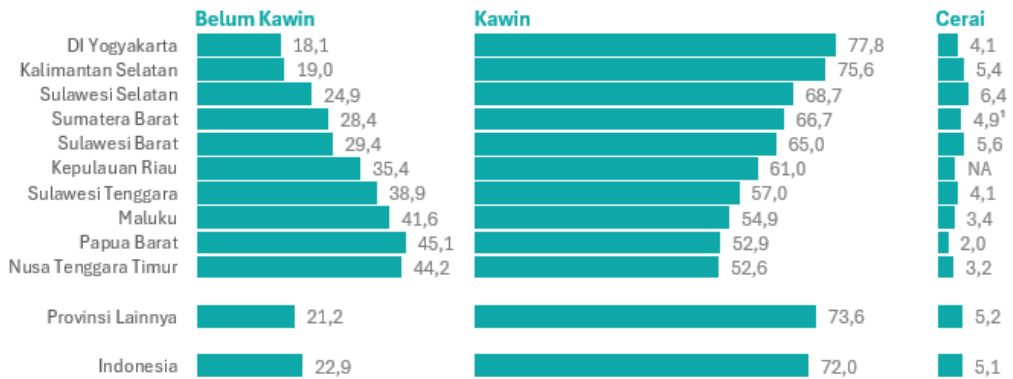


Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 14 Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Kelompok Umur di 10 Provinsi Terpilih, 2025

Struktur umur pekerja migran risen menunjukkan dominasi kelompok usia produktif muda. Secara nasional, kelompok umur 25–34 tahun merupakan kelompok terbesar dengan proporsi 45,5 persen, diikuti oleh kelompok umur 35–44 tahun sebesar 21,9 persen dan kelompok umur 15–24 tahun sebesar 15,6 persen. Sebaliknya, kelompok umur 55 tahun ke atas hanya mencapai 6,4 persen. Di beberapa provinsi, seperti Nusa Tenggara Timur dan Maluku, proporsi pekerja migran risen usia 25–34 tahun bahkan melampaui 50 persen.

Dominasi kelompok usia muda menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja erat kaitannya dengan fase pembentukan karier dan pencarian peluang ekonomi yang lebih baik. Menurut Rogers dan Castro (1981), migrasi umumnya mencapai puncaknya pada usia dewasa muda karena pada periode tersebut individu memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dan lebih fleksibel dalam mengambil keputusan perpindahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa migrasi risen di Indonesia terutama didorong oleh kelompok usia yang berada pada masa paling aktif dalam pasar kerja.

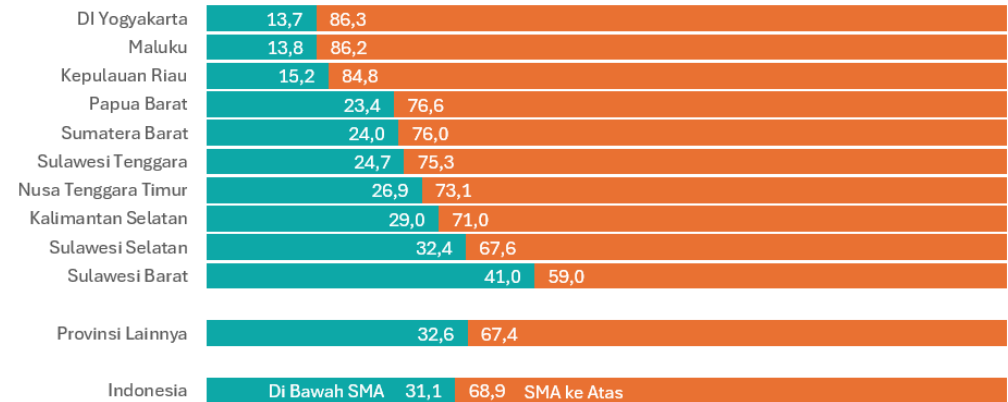


Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 15 Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Status Perkawinan di 10 Provinsi Terpilih, 2025

Sebagian besar pekerja migran risen di Indonesia berstatus kawin, yaitu sebesar 72,0 persen. Sementara itu, yang belum kawin mencapai 22,9 persen dan yang berstatus cerai hanya sekitar 5,1 persen. Proporsi pekerja migran risen yang berstatus kawin tertinggi terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta (77,8 persen) dan Kalimantan Selatan (75,6 persen). Sebaliknya, proporsi pekerja migran risen yang belum kawin relatif lebih tinggi di Papua Barat (45,1 persen) dan Nusa Tenggara Timur (44,2 persen).

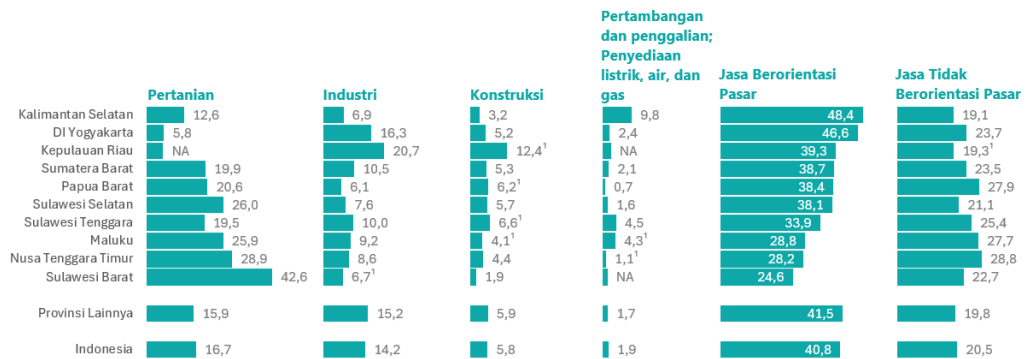
Tingginya proporsi pekerja migran yang telah menikah menunjukkan bahwa migrasi tidak hanya dilakukan oleh individu lajang, tetapi juga menjadi strategi rumah tangga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Hal ini sejalan dengan pendekatan *New Economics of Labour Migration* yang menyatakan bahwa keputusan migrasi sering kali diambil pada tingkat rumah tangga sebagai upaya diversifikasi sumber pendapatan dan pengurangan risiko ekonomi (Stark & Bloom, 1985).



Gambar 16 Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Tingkat Pendidikan di 10 Provinsi Terpilih, 2025

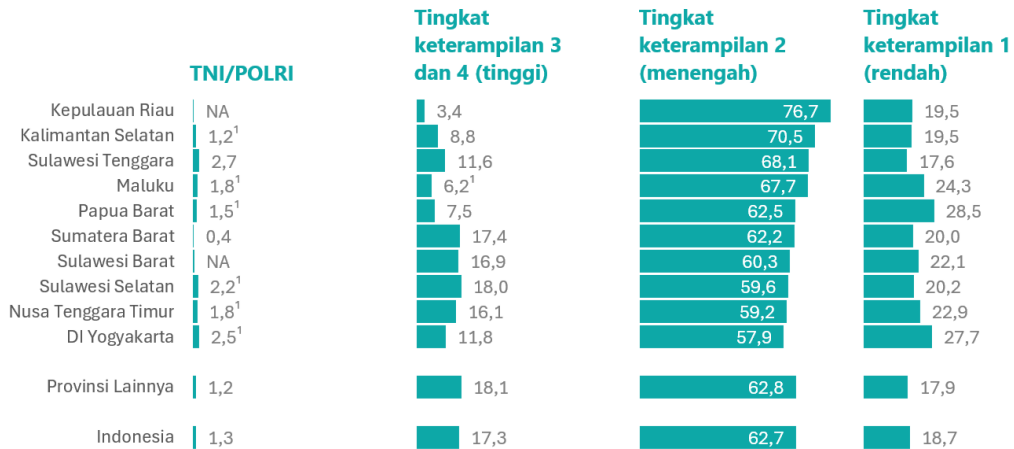
Dari sisi pendidikan, pekerja migran risen di Indonesia didominasi oleh penduduk berpendidikan SMA ke atas, dengan proporsi mencapai 68,9 persen. Sementara itu, pekerja migran risen yang berpendidikan di bawah SMA sebesar 31,1 persen. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Maluku menjadi provinsi dengan proporsi pekerja migran risen berpendidikan SMA ke atas tertinggi, masing-masing mencapai lebih dari 86 persen. Sebaliknya, Sulawesi Barat memiliki proporsi pekerja migran risen berpendidikan tinggi yang relatif lebih rendah, yaitu sekitar 59,0 persen.

Tingginya tingkat pendidikan pekerja migran risen menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja cenderung dilakukan oleh individu yang memiliki modal manusia (*human capital*) lebih baik. Menurut teori modal manusia yang dikemukakan Sjaastad (1962), pendidikan meningkatkan kemampuan individu dalam memperoleh informasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, serta memanfaatkan peluang kerja yang tersedia di daerah tujuan. Oleh karena itu, penduduk berpendidikan lebih tinggi umumnya memiliki kecenderungan migrasi yang lebih besar dibandingkan kelompok berpendidikan rendah.



Lapangan pekerjaan utama pekerja migran risen didominasi oleh sektor jasa berorientasi pasar dengan proporsi 40,8 persen secara nasional. Selanjutnya, sektor jasa tidak berorientasi pasar mencapai 20,5 persen, sedangkan sektor pertanian dan industri masing-masing sebesar 16,7 persen dan 14,2 persen. Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan proporsi pekerja migran risen di sektor pertanian tertinggi (42,6 persen), sementara Kalimantan Selatan memiliki proporsi tertinggi pada sektor jasa berorientasi pasar (48,4 persen).

Dominasi sektor jasa menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja saat ini semakin terkait dengan pertumbuhan sektor tersier yang berkembang pesat di berbagai wilayah. Temuan ini konsisten dengan teori transformasi struktural yang menyatakan bahwa seiring perkembangan ekonomi, tenaga kerja akan bergeser dari sektor primer ke sektor industri dan jasa yang menawarkan produktivitas serta pendapatan lebih tinggi (Lewis, 1954).



Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 18 Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Jenis Pekerjaan Utama di 10 Provinsi Terpilih, 2025

Berdasarkan jenis pekerjaan utama, pekerja migran risen di Indonesia didominasi oleh pekerjaan dengan tingkat keterampilan menengah (*skill level* 2), yaitu sebesar 62,7 persen. Sementara itu, pekerja dengan tingkat keterampilan rendah (*skill level* 1) mencapai 18,7 persen dan pekerja dengan keterampilan tinggi (*skill level* 3 dan 4) sebesar 17,3 persen. Proporsi pekerja berketerampilan menengah tertinggi tercatat di Kepulauan Riau (76,7 persen), sedangkan pekerja berketerampilan rendah relatif lebih banyak ditemukan di Papua Barat (28,5 persen) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (27,7 persen).

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa migrasi risen di Indonesia didominasi oleh tenaga kerja yang bekerja di berbagai jenis pekerjaan teknis, administrasi, penjualan, dan jasa yang memerlukan keterampilan menengah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa migrasi tenaga kerja berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja di berbagai daerah, khususnya untuk jenis pekerjaan yang membutuhkan keterampilan spesifik namun tidak selalu mensyaratkan pendidikan tinggi.



Gambar 19 Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Status Formalitas Pekerjaan Utama di 10 Provinsi Terpilih, 2025

Secara nasional, lebih dari separuh pekerja migran risen bekerja pada sektor formal, yaitu sebesar 53,7 persen, sedangkan 46,3 persen lainnya bekerja pada sektor informal. Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan proporsi pekerja migran risen formal tertinggi, mencapai 75,9 persen. Sebaliknya, Sulawesi Barat memiliki proporsi pekerja formal terendah, yaitu 33,3 persen, sehingga sebagian besar pekerja migran risen di provinsi tersebut bekerja pada sektor informal.

Tingginya proporsi pekerja migran risen di sektor formal menunjukkan bahwa perpindahan penduduk antardaerah banyak dilakukan untuk mengakses pekerjaan yang lebih stabil dan mendapatkan perlindungan kerja yang lebih baik. Menurut ILO (2024), pekerjaan formal umumnya menawarkan kepastian pendapatan, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang lebih terlindungi dibandingkan pekerjaan informal. Oleh karena itu, migrasi dapat menjadi salah satu mekanisme bagi tenaga kerja untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

4.3 Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian

Mobilitas penduduk merupakan salah satu dinamika penting dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan spasial suatu wilayah. Salah satu bentuk mobilitas yang paling umum terjadi adalah perjalanan pulang pergi harian, yaitu aktivitas penduduk yang melakukan perjalanan secara rutin dari tempat tinggal menuju lokasi pekerjaan dan kembali lagi pada hari yang sama. Fenomena ini berkembang seiring dengan meningkatnya konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu, pertumbuhan

kawasan perkotaan, serta ketidakseimbangan antara lokasi tempat tinggal dan pusat-pusat pekerjaan. Dalam konteks pembangunan modern, pelaku perjalanan pulang pergi harian menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi dan produktivitas wilayah.

Pelaku perjalanan pulang pergi harian merupakan penduduk yang bekerja di luar rumahnya, baik menuju lokasi kerja di dalam wilayah administrasi yang sama maupun lintas kabupaten/kota. Mobilitas ini mencerminkan keterkaitan antarwilayah yang semakin kuat, terutama antara kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi. Tingginya intensitas perjalanan harian juga menunjukkan adanya ketergantungan tenaga kerja terhadap wilayah tujuan kerja yang menyediakan kesempatan ekonomi lebih besar dibandingkan wilayah tempat tinggalnya. Di sisi lain, pola mobilitas tersebut turut memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kebutuhan transportasi, konsumsi energi, waktu tempuh, hingga kualitas hidup pekerja.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan, analisis terhadap pelaku perjalanan pulang pergi harian menjadi penting untuk memahami pola interaksi antarruang dan karakteristik tenaga kerja yang bergerak setiap hari. Informasi mengenai karakteristik sosial ekonomi, jenis pekerjaan, moda transportasi yang digunakan, serta arah mobilitas pekerja dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan transportasi, pengembangan kawasan perkotaan, penyediaan infrastruktur, dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pengkajian mengenai perjalanan pulang pergi harian tidak hanya memberikan gambaran mengenai mobilitas penduduk bekerja, tetapi juga mencerminkan dinamika pembangunan dan keterhubungan antarwilayah yang terus berkembang.

4.3.1 Besaran dan Tren Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian

Tabel 6 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk bekerja di Indonesia merupakan pelaku perjalanan pulang pergi harian, yaitu penduduk yang setiap hari kembali ke tempat tinggal setelah bekerja. Dari total sekitar 146,5 juta penduduk yang bekerja, sebanyak 113 juta orang atau 77,1 persen melakukan perjalanan harian, jauh lebih besar dibandingkan pekerja dengan pola kepulangan nonharian, tidak rutin, dan mereka yang bekerja di rumah tempat tinggalnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia masih sangat didominasi oleh pola kerja berbasis mobilitas harian, di mana pekerja melakukan perjalanan rutin dari rumah menuju lokasi kerja dan kembali pada hari yang sama. Fenomena ini juga mencerminkan tingginya ketergantungan tenaga kerja terhadap sistem transportasi dan aksesibilitas antarwilayah, terutama di kawasan perkotaan dan wilayah penyangga.

Tabel 6 Pekerja Menurut Jenis Tempat Bekerja dan Periode Kepulangan, 2025

Jenis Tempat Bekerja	Periode Kepulangan (ribu orang)				Total
	Harian (pada hari yang sama)	Nonharian (tidak pada hari yang sama)	Tidak rutin	Tidak melakukan perjalanan pulang pergi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Di rumah tempat tinggalnya					
Rumah sendiri	–	–	–	26.192,8	26.192,8
Rumah majikan/pemberi kerja ¹	–	–	–	69,3	69,3
Di luar rumah tempat tinggalnya					
Rumah keluarga/teman/tetangga	2.181,5	73,1	44,0	–	2.298,6
Rumah majikan/pemberi kerja	9.529,8	675,2	168,7	–	10.373,8
Lokasi pertanian, lahan pertanian atau perikanan (sawah, kebun, ladang, dll)	38.670,8	1.339,4	366,6	–	40.376,7
Sentra usaha, kantor, pabrik, mal, pasar dengan bangunan, pertokoan, tempat/lokasi tetap	50.535,7	2.942,6	412,4	–	53.890,7
Pasar tanpa bangunan	1.065,5	34,6	9,7 ²	–	1.109,8
Jalan atau ruang publik lainnya tanpa struktur tetap	5.790,5	382,4	79,6	–	6.252,4
Kendaraan (tanpa ada tempat pangkal sehari-hari)	2.405,0	353,6	65,3	–	2.823,9
Rumah ke rumah	1.352,2	58,5	9,3 ²	–	1.420,0
Lainnya/tidak tahu	1.465,7	196,2	72,5	–	1.734,3
Total	112.996,5	6.055,5	1.228,1	26.262,1	146.542,3

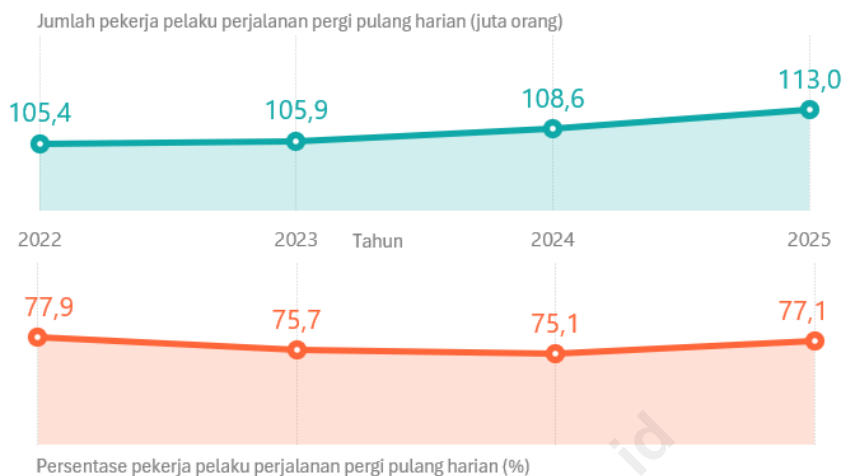
Catatan:

¹Khusus pembantu rumah tangga, sopir, tukang kebun, dan yang semacamnya yang menjadi anggota rumah tangga²Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Jika dilihat berdasarkan jenis tempat bekerja, kelompok terbesar pelaku perjalanan harian bekerja pada sentra usaha, kantor, pabrik, mal, pasar dengan bangunan, pertokoan, atau lokasi tetap, yaitu mencapai lebih dari 50,5 juta orang atau 44,7 persen dari total pelaku perjalanan harian. Selanjutnya, penduduk yang bekerja di lokasi pertanian, perkebunan, dan perikanan juga menunjukkan jumlah yang sangat besar, yakni sekitar 38,7 juta orang yang melakukan perjalanan harian (34,2 persen). Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas pekerja tidak hanya terkonsentrasi di sektor modern perkotaan, tetapi juga terjadi secara luas pada sektor primer yang umumnya berada di wilayah perdesaan.

Di sisi lain, jumlah penduduk yang tidak melakukan perjalanan pulang pergi sebagian besar berasal dari kelompok yang bekerja di rumah tempat tinggalnya sendiri, mencapai lebih dari 26 juta orang. Temuan ini menunjukkan bahwa bekerja dari rumah masih menjadi karakteristik penting dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia, terutama pada usaha keluarga, pekerjaan informal rumahan, maupun aktivitas usaha berbasis rumah tangga. Dengan demikian, tabel ini memperlihatkan adanya dualitas pola kerja di Indonesia, yaitu dominasi pekerja dengan mobilitas harian tinggi di satu sisi dan masih besarnya pekerja berbasis rumah di sisi lain. Kondisi tersebut menjadi penting untuk diperhatikan dalam penyusunan kebijakan transportasi, pengembangan

wilayah, serta perencanaan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap pola mobilitas penduduk bekerja.



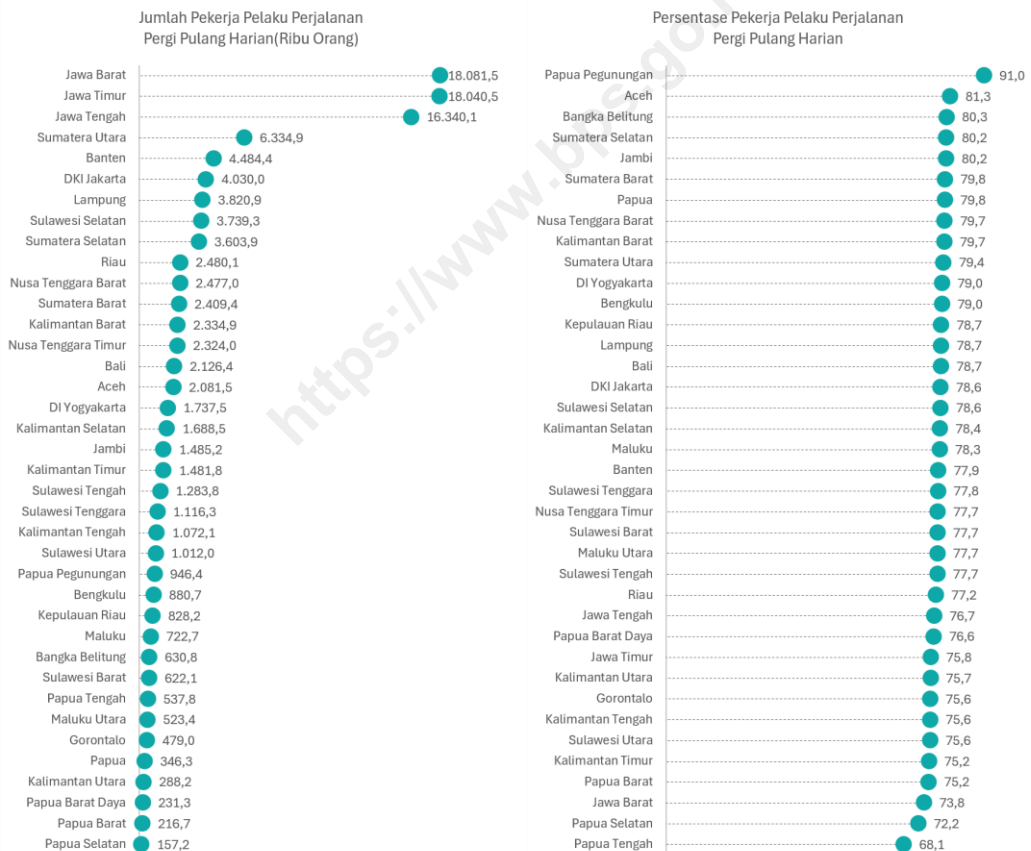
Gambar 20 Jumlah dan Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian, 2022–2025

Berdasarkan Gambar 20, pelaku perjalanan pulang pergi harian tetap mendominasi struktur penduduk bekerja di Indonesia selama periode 2022–2025. Jumlah pekerja yang melakukan perjalanan harian meningkat secara konsisten dari sekitar 105,4 juta orang pada tahun 2022 menjadi sekitar 113 juta orang pada tahun 2025. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya total penduduk bekerja secara nasional yang naik dari 135,3 juta pada tahun 2022 menjadi 146,5 juta pada tahun 2025. Kondisi tersebut mencerminkan semakin tingginya aktivitas ekonomi masyarakat yang mengandalkan mobilitas rutin dari tempat tinggal menuju lokasi kerja setiap harinya.

Meskipun jumlah pelaku perjalanan harian cenderung meningkat, persentasenya terhadap total pekerja mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, proporsi pekerja pelaku perjalanan harian mencapai 77,9 persen, kemudian menurun menjadi 75,7 persen pada 2023 dan 75,1 persen pada 2024, sebelum kembali meningkat menjadi 77,1 persen pada 2025. Penurunan proporsi pada periode 2023–2024 mengindikasikan adanya peningkatan jumlah pekerja nonpelaku perjalanan harian yang relatif lebih cepat, kemungkinan dipengaruhi oleh berkembangnya pola kerja berbasis rumah, usaha mandiri rumahan, atau fleksibilitas pola kerja pascapandemi. Namun demikian, kenaikan kembali pada tahun 2025 menunjukkan bahwa mobilitas harian tetap menjadi pola dominan dalam aktivitas ketenagakerjaan di Indonesia.

4.3.2 Distribusi Wilayah Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian

Gambar 21 menunjukkan bahwa distribusi pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian di Indonesia sangat terkonsentrasi di provinsi-provinsi dengan tingkat urbanisasi dan aktivitas ekonomi tinggi, khususnya di Pulau Jawa. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pekerja pelaku perjalanan harian terbesar, yaitu sekitar 18,1 juta orang atau 73,8 persen dari total pekerja di provinsi tersebut. Posisi berikutnya ditempati oleh Jawa Timur dengan sekitar 18 juta orang dan Jawa Tengah sebesar 16,3 juta orang. Tingginya jumlah pekerja pulang pergi harian di ketiga provinsi ini mencerminkan besarnya populasi usia kerja, luasnya kawasan metropolitan dan industri, serta kuatnya keterkaitan antara wilayah permukiman dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Selain itu, provinsi seperti Sumatera Utara, Banten, dan DKI Jakarta juga menunjukkan jumlah pelaku perjalanan harian yang besar sebagai dampak tingginya mobilitas tenaga kerja menuju kawasan perdagangan, jasa, dan industri.



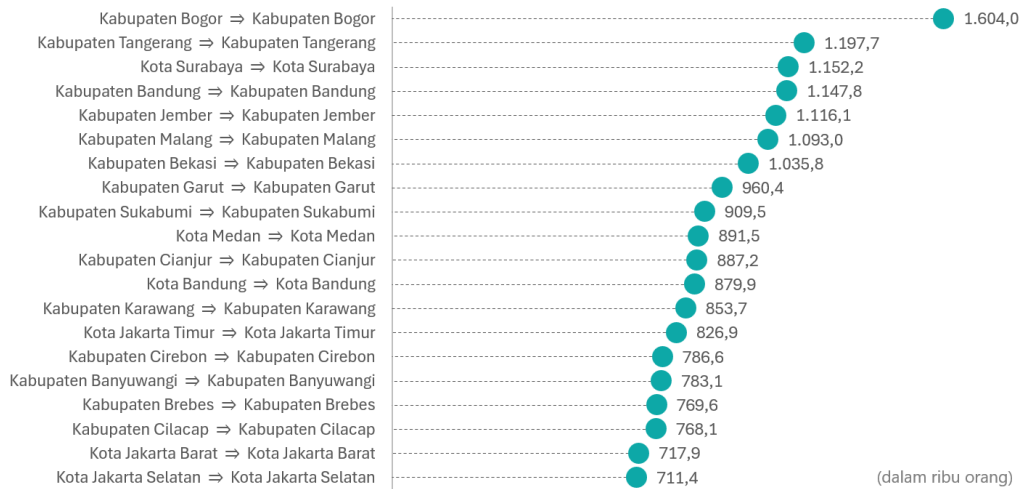
Gambar 21 Jumlah dan Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi, 2025

Dilihat dari persentasenya, beberapa provinsi menunjukkan proporsi pekerja pelaku perjalanan harian yang sangat tinggi, bahkan mencapai lebih dari 80 persen. Papua Pegunungan tercatat memiliki persentase tertinggi sebesar 91 persen, disusul Aceh sebesar 81,3 persen dan Bangka Belitung sebesar 80,3 persen. Tingginya proporsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja di provinsi tersebut melakukan aktivitas kerja di luar rumah dan kembali pada hari yang sama. Sebaliknya, beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia memiliki persentase yang relatif lebih rendah, seperti Papua Tengah sekitar 68,1 persen. Rendahnya proporsi tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik geografis, keterbatasan infrastruktur transportasi, pola permukiman yang tersebar, serta dominasi pekerjaan subsisten atau berbasis rumah tangga.

Secara umum, distribusi wilayah pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian memperlihatkan adanya keterkaitan erat antara mobilitas tenaga kerja dengan tingkat perkembangan ekonomi wilayah. Provinsi dengan kawasan perkotaan, industri, dan jaringan transportasi yang berkembang cenderung memiliki jumlah dan intensitas mobilitas harian yang lebih tinggi. Di sisi lain, wilayah dengan kondisi geografis menantang dan aktivitas ekonomi yang lebih tersebar menunjukkan pola mobilitas yang berbeda. Temuan ini penting sebagai dasar dalam perencanaan transportasi, pengembangan infrastruktur wilayah, serta kebijakan ketenagakerjaan dan tata ruang yang mampu mendukung mobilitas penduduk secara lebih efisien dan berkelanjutan.

4.3.3 Arus dan Pola Pergerakan Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian

Gambar 22 menunjukkan bahwa arus pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian didominasi oleh mobilitas yang terjadi di dalam kabupaten/kota yang sama. Hal ini terlihat dari seluruh daerah asal dan tujuan pada daftar tersebut memiliki wilayah yang identik, seperti dari Kabupaten Bogor ke Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang ke Kabupaten Tangerang, hingga dari Kota Surabaya ke Kota Surabaya. Pola ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pekerja melakukan perjalanan harian dalam lingkup wilayah administrasi yang sama, meskipun lokasi tempat tinggal dan tempat kerja berada pada kecamatan atau kawasan yang berbeda. Dengan kata lain, mobilitas harian pekerja di Indonesia tidak selalu berupa perpindahan lintas kabupaten/kota atau lintas provinsi, tetapi juga mencerminkan tingginya pergerakan internal di dalam suatu wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi besar dan kawasan permukiman yang tersebar.

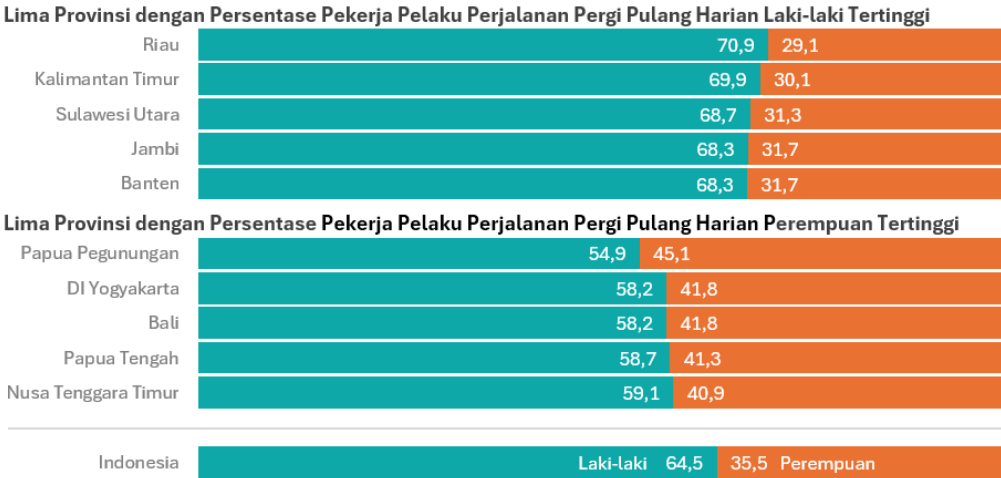


Gambar 22 Dua Puluh Arus Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian dengan Volume Terbesar

Kabupaten Bogor tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian terbesar, mencapai sekitar 1,6 juta orang. Tingginya angka ini menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk usia kerja di wilayah penyangga metropolitan Jabodetabek. Selain Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Surabaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Bekasi juga memiliki jumlah pekerja pulang pergi harian yang sangat besar. Dominasi wilayah-wilayah di Pulau Jawa mencerminkan konsentrasi penduduk, industrialisasi, urbanisasi, serta berkembangnya pusat perdagangan dan jasa yang mendorong mobilitas pekerja setiap hari. Kehadiran beberapa kota besar seperti Medan, Bandung, dan wilayah administrasi DKI Jakarta juga memperlihatkan kuatnya dinamika ekonomi perkotaan yang membutuhkan mobilitas tenaga kerja yang tinggi.

4.3.4 Karakteristik Demografi dan Ketenagakerjaan Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian

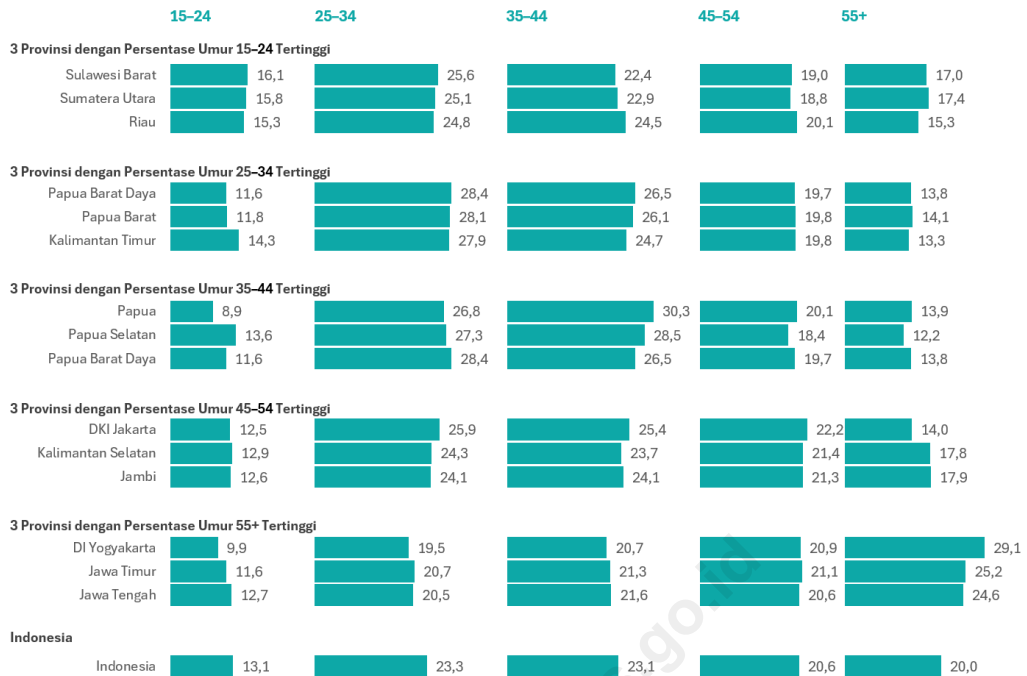
Gambar 23 menunjukkan bahwa pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Secara nasional, proporsi pekerja laki-laki mencapai 64,5 persen, sedangkan perempuan mencapai 35,5 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mobilitas harian untuk bekerja lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan peran domestik perempuan memengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam mobilitas kerja harian.



Gambar 23 Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025

Riau menjadi provinsi dengan persentase pekerja laki-laki tertinggi, yaitu mencapai 70,9 persen, diikuti Kalimantan Timur (69,9 persen) dan Sulawesi Utara (68,7 persen). Di sisi lain, terdapat beberapa provinsi yang menunjukkan persentase pekerja perempuan pelaku perjalanan harian relatif lebih tinggi dibanding wilayah lain. Bali dan DI Yogyakarta memiliki persentase perempuan mencapai 41,8 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan di wilayah tersebut memiliki partisipasi dalam mobilitas kerja yang lebih besar, kemungkinan didorong oleh sektor jasa dan pariwisata yang lebih inklusif terhadap tenaga kerja perempuan. Secara umum, perbedaan komposisi gender antarprovinsi mencerminkan variasi struktur ekonomi, budaya kerja, dan karakteristik sosial masyarakat di masing-masing wilayah sehingga analisis gender dalam mobilitas pekerja menjadi penting untuk mendukung kebijakan ketenagakerjaan dan transportasi yang lebih inklusif.

Berdasarkan Gambar 24, kelompok umur produktif muda hingga dewasa awal (25–44 tahun) mendominasi pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian di Indonesia. Secara nasional, persentase tertinggi terdapat pada kelompok umur 25–34 tahun sebesar 23,3 persen dan 35–44 tahun sebesar 23,1 persen. Provinsi-provinsi seperti Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Kalimantan Timur menunjukkan dominasi usia 25–34 tahun dengan angka sekitar 28 persen, sedangkan kelompok usia 35–44 tahun tertinggi terdapat di Papua mencapai 30,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas harian pekerja paling banyak dilakukan oleh penduduk usia produktif yang aktif bekerja dan memiliki kebutuhan mobilitas tinggi antarwilayah untuk bekerja.

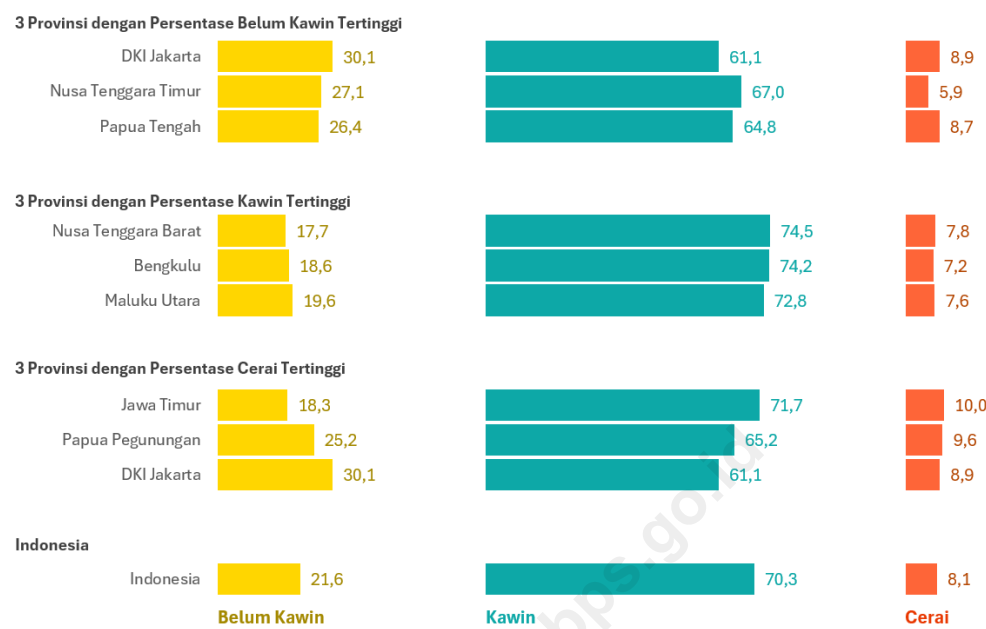


Gambar 24 Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Sementara itu, kelompok usia muda 15–24 tahun memiliki persentase relatif lebih rendah secara nasional yaitu 13,1 persen, meskipun beberapa provinsi seperti Sulawesi Barat, Sumatera Utara, dan Riau menunjukkan angka lebih tinggi dibanding daerah lain. Rendahnya proporsi kelompok ini dapat dipengaruhi oleh masih tingginya penduduk usia sekolah yang belum sepenuhnya masuk ke pasar kerja. Di sisi lain, kelompok usia 45–54 tahun dan 55+ menunjukkan kecenderungan penurunan mobilitas harian pekerja. Namun, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah memiliki persentase usia 55+ yang cukup tinggi, bahkan DI Yogyakarta mencapai 29,1 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa di wilayah tersebut masih banyak penduduk usia lanjut yang tetap aktif bekerja dan melakukan perjalanan harian, kemungkinan karena faktor ekonomi maupun struktur pekerjaan yang fleksibel.

Berdasarkan Gambar 25, mayoritas pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian di Indonesia berstatus kawin. Secara nasional, persentasenya mencapai 70,3 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang belum kawin (21,6 persen) maupun cerai (8,1 persen). Provinsi dengan persentase pekerja berstatus kawin tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat (74,5 persen), Bengkulu (74,2 persen), dan Maluku Utara (72,8 persen). Tingginya proporsi pekerja menikah menunjukkan bahwa

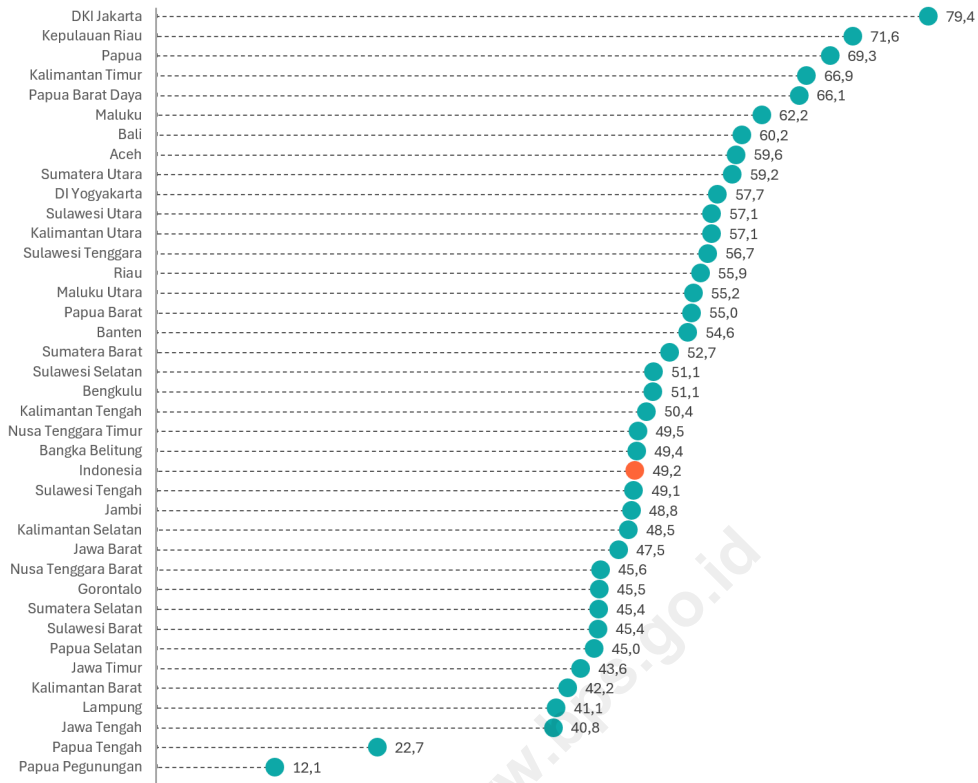
kelompok ini berada pada fase kehidupan dengan tanggung jawab ekonomi yang lebih besar sehingga mobilitas harian untuk bekerja menjadi lebih intensif.



Gambar 25 Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025

Sementara itu, pekerja yang belum kawin memiliki proporsi cukup tinggi di DKI Jakarta (30,1 persen), Nusa Tenggara Timur (27,1 persen), dan Papua Tengah (26,4 persen). Kondisi ini mengindikasikan bahwa wilayah perkotaan atau daerah dengan banyak penduduk usia muda cenderung memiliki mobilitas yang tinggi, terutama karena faktor pendidikan, urbanisasi, dan pencarian pekerjaan. DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional menjadi contoh daerah dengan dominasi pekerja muda dan belum kawin yang aktif melakukan perjalanan harian untuk bekerja.

Pada kategori cerai, persentase nasional relatif kecil yaitu 8,1 persen, tetapi beberapa provinsi menunjukkan angka yang lebih tinggi seperti Jawa Timur (10,0 persen), Papua Pegunungan (9,6 persen), dan DKI Jakarta (8,9 persen). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok pekerja berstatus cerai tetap aktif dalam kegiatan ekonomi dan mobilitas kerja harian. Secara umum, data menggambarkan bahwa status perkawinan berpengaruh terhadap pola perjalanan pekerja, di mana pekerja yang sudah menikah mendominasi karena kebutuhan ekonomi keluarga dan stabilitas pekerjaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya.

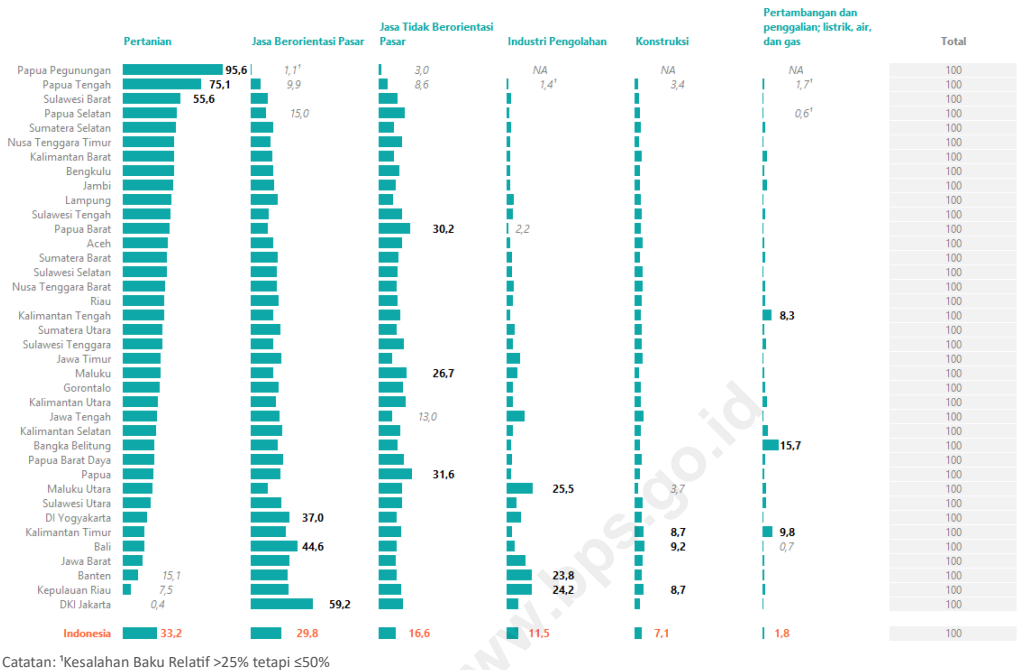


Gambar 26 Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Berpendidikan SMA ke Atas Menurut Provinsi, 2025

Berdasarkan Gambar 26, tingkat pendidikan pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian yang berpendidikan SMA ke atas di Indonesia mencapai 49,2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir separuh pekerja yang melakukan perjalanan pulang pergi harian memiliki tingkat pendidikan menengah hingga tinggi, yang mencerminkan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terdidik dalam aktivitas ekonomi perkotaan maupun antarwilayah. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 79,4 persen, diikuti Kepulauan Riau (71,6 persen) dan Papua (69,3 persen). Tingginya angka di wilayah tersebut berkaitan erat dengan dominasi sektor jasa, industri modern, pemerintahan, dan perdagangan yang umumnya membutuhkan tenaga kerja berpendidikan lebih tinggi.

Sebaliknya, beberapa provinsi memiliki persentase pekerja berpendidikan SMA ke atas yang relatif rendah, seperti Papua Pegunungan (12,1 persen), Papua Tengah (22,7 persen), Jawa Tengah (40,8 persen), dan Lampung (41,1 persen). Rendahnya persentase ini dapat dipengaruhi oleh keterbatasan akses pendidikan, struktur ekonomi yang masih didominasi sektor informal atau pertanian, serta rendahnya kebutuhan

tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi. Perbedaan yang cukup tajam antarprovinsi menunjukkan adanya kesenjangan dalam kualitas sumber daya manusia dan pembangunan pendidikan di Indonesia.



Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 27 Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2025

Berdasarkan Gambar 27, pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian di Indonesia masih sangat didominasi oleh sektor pertanian di beberapa provinsi tertentu. Papua Pegunungan menempati peringkat tertinggi dengan persentase pekerja pulang pergi harian di sektor pertanian mencapai 95,6 persen, diikuti Papua Tengah sebesar 75,1 persen, dan Sulawesi Barat sebesar 55,6 persen. Tingginya dominasi sektor pertanian menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah tersebut masih bertumpu pada sektor primer dan mobilitas harian pekerja banyak terjadi untuk kegiatan pertanian. Sebaliknya, provinsi dengan persentase terendah pada sektor pertanian adalah DKI Jakarta (0,4 persen), Kepulauan Riau (7,5 persen), dan Banten (15,1 persen). Kondisi ini mencerminkan karakter wilayah perkotaan dan industri yang lebih mengandalkan sektor jasa, perdagangan, maupun manufaktur dibandingkan sektor agraris.

Pada lapangan pekerjaan jasa tidak berorientasi pasar, persentase terbesar dimiliki Papua sebesar 31,6 persen dan Papua Barat sebesar 30,2 persen. Hal ini mengindikasikan besarnya peran layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan

administrasi pemerintahan dalam menyerap pekerja pulang pergi harian di daerah tersebut. Sementara itu, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan persentase tertinggi pada jasa berorientasi pasar sebesar 59,2 persen, menunjukkan kuatnya sektor perdagangan dan jasa modern sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional. Di sektor industri pengolahan, Maluku Utara (25,5 persen), Kepulauan Riau (24,2 persen), dan Banten (23,8 persen) termasuk yang tertinggi, menandakan tingginya mobilitas pekerja menuju kawasan industri dan pusat manufaktur.

Selain itu, sektor konstruksi dan pertambangan juga menunjukkan konsentrasi tertentu di beberapa provinsi. Bali memiliki persentase pekerja pulang pergi harian sektor konstruksi tertinggi sebesar 9,2 persen, diikuti Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau sebesar 8,7 persen, yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan kawasan ekonomi. Pada sektor pertambangan dan penggalian serta listrik, gas, dan air, Bangka Belitung mencatat angka tertinggi sebesar 15,7 persen, disusul Kalimantan Timur sebesar 9,8 persen dan Kalimantan Tengah sebesar 8,3 persen.



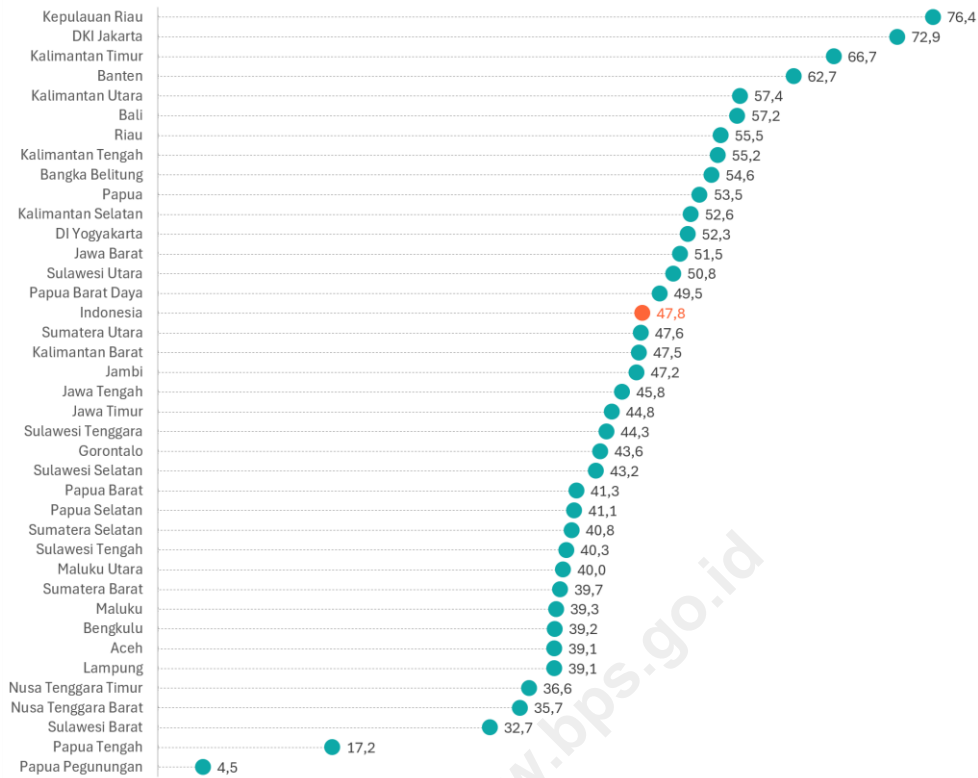
Gambar 28 Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2025

Berdasarkan Gambar 28, mayoritas pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian di Indonesia berada pada kategori keterampilan menengah. Pada kategori keterampilan menengah, Papua Pegunungan mencatat persentase tertinggi sebesar 97,9 persen, diikuti Papua Tengah sebesar 78,4 persen dan Papua Selatan sebesar 73,1 persen. Tingginya proporsi pekerja pulang pergi harian dengan keterampilan menengah di wilayah-wilayah tersebut menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja masih didominasi oleh pekerjaan yang membutuhkan kemampuan teknis menengah.

Pada kategori keterampilan tinggi, DKI Jakarta memiliki persentase tertinggi sebesar 21,3 persen, diikuti oleh Kalimantan Timur 19,4 persen, dan Kepulauan Riau 18,6 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa wilayah perkotaan dan pusat industri lebih banyak menyerap pekerja dengan kemampuan profesional dan spesialisasi yang tinggi. Sebaliknya, Papua Pegunungan hanya mencatat 1,7 persen, Papua Tengah 6,8 persen, dan Lampung 9,0 persen sebagai wilayah dengan proporsi keterampilan tinggi terendah. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya lapangan kerja berbasis keahlian tinggi di daerah tersebut dibandingkan dengan kota-kota besar dan pusat ekonomi nasional.

Sementara itu, pada kategori keterampilan rendah, Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan persentase tertinggi sebesar 32,5 persen, disusul Riau 30,1 persen dan Sumatera Utara 28,0 persen. Tingginya proporsi pekerja berketerampilan rendah menunjukkan dominasi pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan khusus. Secara umum, data tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan karakteristik tenaga kerja antarwilayah di Indonesia, di mana daerah metropolitan lebih didominasi oleh pekerja berketerampilan tinggi, sedangkan beberapa daerah lainnya masih bertumpu pada tenaga kerja berketerampilan menengah dan rendah.

Berdasarkan Gambar 29, pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian di Indonesia masih didominasi oleh sektor informal. Secara nasional, persentase pekerja informal mencapai 52,2 persen, sedangkan pekerja formal mencapai 47,8 persen. Provinsi dengan proporsi pekerja formal tertinggi adalah Kepulauan Riau sebesar 76,4 persen, diikuti DKI Jakarta sebesar 72,9 persen, dan Kalimantan Timur sebesar 66,7 persen. Tingginya pekerja formal di wilayah tersebut menunjukkan kuatnya sektor industri, jasa modern, dan perusahaan besar. Sebaliknya, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan persentase pekerja formal terendah hanya 4,5 persen, disusul Papua Tengah 17,2 persen dan Sulawesi Barat 32,7 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja pulang pergi harian di wilayah tersebut masih bekerja pada sektor informal yang umumnya berusaha sendiri atau pekerja bebas.



Gambar 29 Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian dengan Pekerjaan Utama Berstatus Formal, 2025

Pada sisi pekerja informal, Papua Pegunungan mencatat angka tertinggi sebesar 95,5 persen, diikuti Papua Tengah 82,8 persen. Dominasi sektor informal di daerah tersebut mengindikasikan bahwa mobilitas pekerja harian lebih banyak terjadi pada aktivitas ekonomi tradisional seperti pekerja yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar atau pekerja bebas.

Wilayah metropolitan, kawasan industri, dan pusat investasi seperti DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur cenderung memiliki proporsi pekerja formal yang lebih tinggi. Sebaliknya, daerah dengan basis ekonomi agraris dan keterbatasan industri modern masih didominasi oleh pekerja informal. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perkembangan ekonomi daerah sangat memengaruhi status pekerjaan utama para pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian.

Berdasarkan Gambar 30, penggunaan transportasi pribadi menuju tempat bekerja masih menjadi moda transportasi yang dominan di Indonesia. Dari 100 pekerja pulang pergi harian, sebanyak 75 diantaranya menggunakan transportasi pribadi

sebagai moda transportasi utama. Penggunaan transportasi pribadi tertinggi terdapat di Provinsi Bangka Belitung (93,1 persen), Kalimantan Timur (91,6 persen), dan Kepulauan Riau (90,7 persen). Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan akses transportasi umum untuk menunjang aktivitas pekerja di wilayah tersebut. Rendahnya penggunaan transportasi pribadi di Papua Pegunungan (4,5 persen) dan Papua Tengah (27,7 persen) lebih disebabkan oleh banyaknya pekerja pulang pergi harian yang berjalan kaki dari tempat tinggal ke tempat bekerjanya.



Gambar 30 Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian yang Menggunakan Kendaraan Pribadi sebagai Moda Transportasi Utama, 2025

4.4 Pekerja Komuter

Perjalanan komuter merupakan salah satu bentuk mobilitas temporer yang banyak terjadi di Indonesia, selain migrasi dan mobilitas sirkuler. Mobilitas ini umumnya terjadi karena adanya perbedaan lokasi antara tempat tinggal dan tempat bekerja. Perjalanan komuter didorong oleh berbagai faktor seperti kesempatan kerja, keterjangkauan tempat tinggal, akses transportasi, dan keterhubungan antarwilayah.

Berbeda dengan migrasi yang disertai perubahan tempat tinggal, komuter tetap mempertahankan tempat tinggal asal dan melakukan perjalanan pulang pergi secara rutin ke lokasi kerja. Mobilitas komuter biasanya terjadi pada jarak yang masih memungkinkan untuk ditempuh secara harian, terutama di kawasan perkotaan, wilayah penyangga, dan daerah yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dengan pusat kegiatan ekonomi. Dalam publikasi ini, pekerja komuter didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan melakukan perjalanan pulang pergi secara rutin, melewati batas wilayah administrasi kabupaten/kota setiap hari untuk bekerja.

4.4.1 Besaran dan Tren Pekerja Komuter

Perjalanan rutin dari tempat tinggal ke lokasi kerja merupakan salah satu indikator mobilitas harian tenaga kerja yang penting untuk memahami pola interaksi ekonomi antarwilayah. Berdasarkan Tabel 7, mayoritas pekerja yang bekerja di dalam kabupaten/kota tempat tinggal melakukan perjalanan pulang pergi setiap hari, yaitu sebesar 78,1 persen. Sementara itu, pekerja yang melakukan perjalanan pulang pergi nonharian dan tidak berkala masing-masing sebesar 1,9 persen dan 0,5 persen. Selain itu, terdapat 19,5 persen pekerja yang tidak melakukan perjalanan pulang pergi, yang dapat mencerminkan pekerja dengan lokasi kerja sangat dekat dengan tempat tinggal atau pekerja dengan pola kerja yang tidak memerlukan mobilitas rutin.

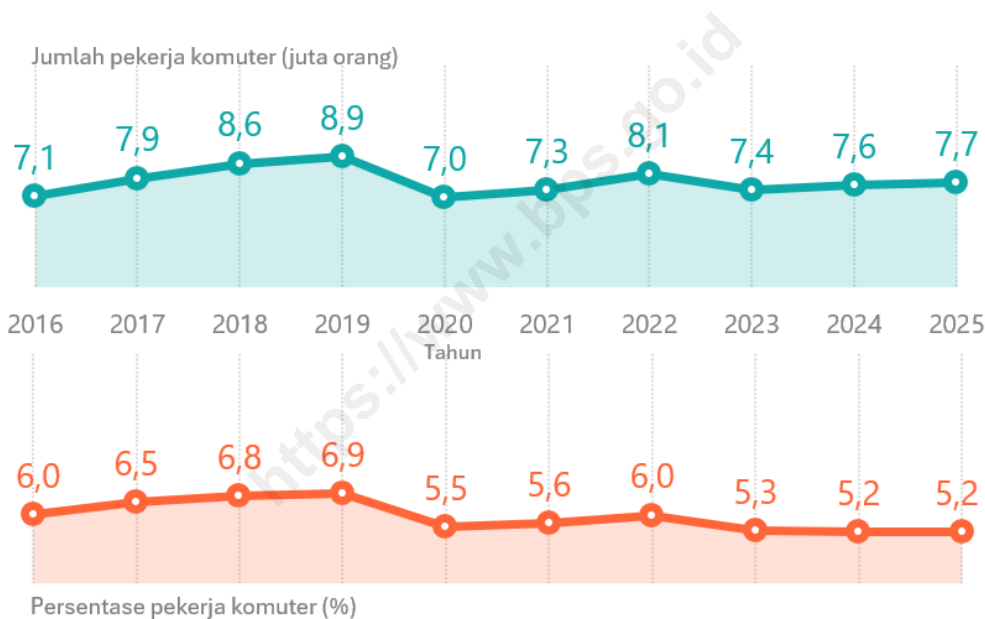
Tabel 7 Penduduk Bekerja Menurut Lokasi Tempat Kerja dan Periode Pulang Pergi, 2025

Lokasi Tempat Kerja	Periode Pulang Pergi								Total	
	Berkala harian		Berkala nonharian		Tidak berkala		Tidak melakukan perjalanan pulang pergi			
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Di dalam kabupaten/kota tempat tinggal	105.303,6	78,1	2.573,8	1,9	628,7	0,5	26.262,1	19,5	134.768	100,0
Di luar kabupaten/kota tempat tinggal	7.692,9	65,3	3.481,7	29,6	599,4	5,1	–	–	11.775	100,0
Dalam provinsi	6.137,9	73,9	1.997,7	24,1	166,7	2,0	–	–	8.303	100,0
Di luar provinsi (termasuk luar negeri)	1.555,0	46,5	1.484,0	42,9	432,7	10,6	–	–	3.472	100,0
Total	112.996,5	77,1	6.055,5	4,1	1.228,1	0,8	26.262,1	17,9	146.542	100,0

Pola perjalanan yang lebih bervariasi terlihat pada pekerja yang bekerja di luar kabupaten/kota tempat tinggal mereka. Pada kelompok ini, sebanyak 65,3 persen pekerja melakukan perjalanan harian, 29,6 persen melakukan perjalanan nonharian, dan 5,1 persen melakukan perjalanan tidak berkala. Jika diperinci lebih lanjut, pekerja yang bekerja di luar kabupaten/kota tetapi masih dalam provinsi yang sama lebih banyak melakukan perjalanan harian. Sebaliknya, pekerja yang bekerja di luar provinsi

atau luar negeri memiliki proporsi perjalanan berkala nonharian yang lebih tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa semakin jauh lokasi kerja dari tempat tinggal, semakin besar kecenderungan pekerja untuk tidak melakukan perjalanan pulang pergi secara harian.

Selain periode perjalanan, perkembangan jumlah pekerja komuter dari tahun ke tahun memberikan gambaran lebih lanjut mengenai dinamika mobilitas tenaga kerja. Gambar 31 menunjukkan bahwa jumlah pekerja komuter pada 2016–2025 mengalami fluktuasi. Jumlah pekerja komuter meningkat dari 7,1 juta orang pada 2016 menjadi 8,9 juta orang pada 2019. Setelah itu, jumlah pekerja komuter menurun menjadi 7,0 juta orang pada 2020, kemudian kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 8,1 juta orang pada 2022. Pada periode berikutnya, jumlah pekerja komuter kembali menurun menjadi 7,4 juta orang pada 2023, sebelum meningkat menjadi 7,6 juta orang pada 2024 dan 7,7 juta orang pada 2025.



Gambar 31 Jumlah dan Persentase Pekerja Komuter, 2016–2025

Pola perkembangan serupa terlihat pada persentase pekerja komuter terhadap total pekerja. Persentase pekerja komuter meningkat dari 6,0 persen pada 2016 menjadi 6,8 persen pada 2018, kemudian relatif stabil pada 6,9 persen di 2019. Setelah itu, persentasenya menurun cukup besar menjadi 5,5 persen pada 2020. Pada 2021 dan 2022, persentase pekerja komuter kembali meningkat masing-masing menjadi 5,6 persen dan 6,0 persen. Namun, sejak 2023, persentase pekerja komuter berada di kisaran 5,2–5,3 persen.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa jumlah pekerja komuter belum bergerak secara linier, melainkan mengikuti dinamika pasar kerja dan pola mobilitas tenaga kerja dari tahun ke tahun. Meskipun jumlah pekerja komuter pada 2025 meningkat dibandingkan dengan tahun 2023, persentasenya terhadap total pekerja relatif stabil pada 2024–2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah pekerja komuter berlangsung sejalan dengan pertumbuhan total pekerja, sehingga peran relatif pekerja komuter dalam struktur ketenagakerjaan nasional tidak banyak berubah dalam dua tahun terakhir.

Periode perjalanan dan tren pekerja komuter menunjukkan bahwa mobilitas komuter tetap menjadi bagian penting dari mobilitas tenaga kerja, meskipun perkembangannya berfluktuasi. Periode perjalanan dipengaruhi oleh jarak antara tempat tinggal dan lokasi kerja, sedangkan perubahan jumlah dan persentase pekerja komuter menunjukkan dinamika posisi komuter dalam keseluruhan struktur kegiatan pekerja. Temuan ini menjadi dasar untuk melihat lebih lanjut bagaimana sebaran wilayah asal-tujuan pekerja komuter dan bagaimana pola pergerakan antarwilayah yang terbentuk.

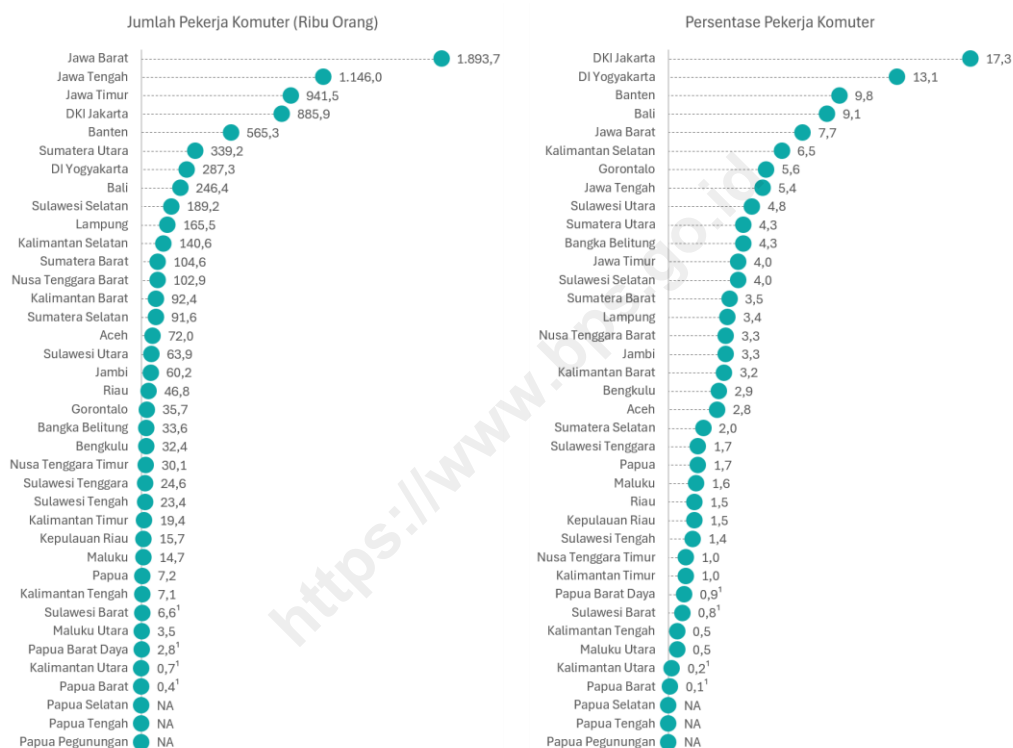
4.4.2 Distribusi Wilayah Pekerja Komuter

Secara nasional, jumlah pekerja komuter pada tahun 2025 mencapai 7,7 juta orang, atau sekitar 5,2 persen dari total pekerja di Indonesia. Dengan demikian, sebagian besar pekerja masih termasuk dalam kelompok nonkomuter, yaitu sekitar 138,8 juta orang atau 94,8 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa meskipun pekerja komuter merupakan bagian penting dalam mobilitas tenaga kerja, secara proporsi jumlahnya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan pekerja nonkomuter.

Sebaran pekerja komuter menurut provinsi menunjukkan bahwa mobilitas harian tenaga kerja masih terkonsentrasi di wilayah dengan aktivitas ekonomi dan jumlah penduduk bekerja yang besar. Gambar 32 menunjukkan bahwa jumlah pekerja komuter terbesar terdapat di Jawa Barat, yaitu sekitar 1.893,7 ribu orang atau 7,7 persen dari total pekerja di provinsi tersebut. Provinsi berikutnya dengan jumlah pekerja komuter relatif besar adalah Jawa Tengah sebesar 1.146,0 ribu orang, Jawa Timur sebesar 941,5 ribu orang, DKI Jakarta sebesar 885,9 ribu orang, dan Banten sebesar 565,3 ribu orang. Dominasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa skala pekerja komuter berkaitan erat dengan besarnya pasar kerja, konsentrasi penduduk, serta keterhubungan antarwilayah antara tempat tinggal dan tempat bekerja.

Meskipun jumlah pekerja komuter terbesar terdapat di provinsi-provinsi dengan basis penduduk besar, persentase pekerja komuter terhadap total pekerja

menunjukkan pola yang berbeda. DKI Jakarta mencatat persentase pekerja komuter tertinggi, yaitu 17,3 persen, diikuti oleh DI Yogyakarta sebesar 13,1 persen, Banten sebesar 9,8 persen, Bali sebesar 9,1 persen, dan Jawa Barat sebesar 7,7 persen. Pola ini mengindikasikan bahwa intensitas komuter tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah pekerja, tetapi juga oleh karakter wilayah, aglomerasi ekonomi, dan kedekatan fungsional antara kawasan tempat tinggal dan pusat kegiatan kerja. Dengan demikian, provinsi dengan jumlah pekerja komuter yang tidak terlalu besar secara absolut dapat memiliki intensitas komuter yang relatif tinggi apabila proporsinya terhadap total pekerja cukup besar.



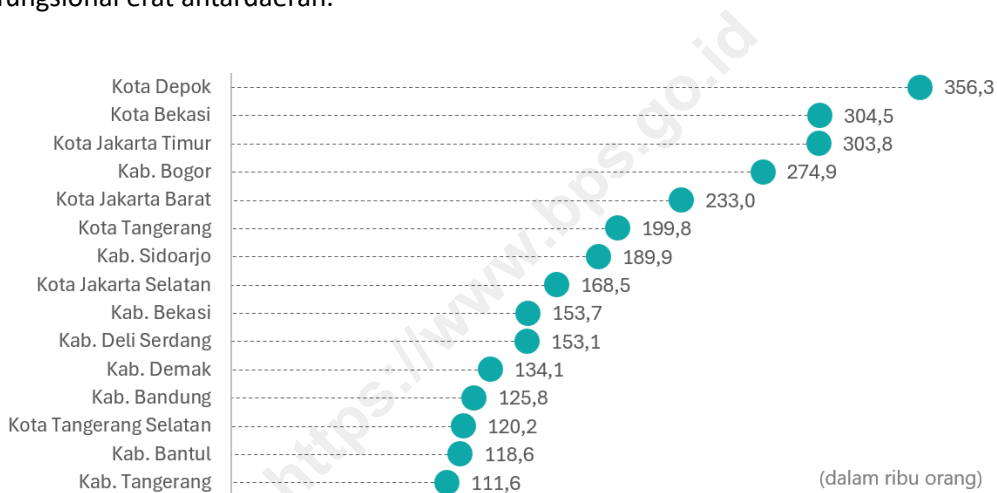
Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 32 Jumlah dan Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi, 2025

Di luar kelompok provinsi dengan jumlah pekerja komuter terbesar, sebagian besar provinsi memiliki jumlah pekerja komuter yang jauh lebih rendah. Beberapa provinsi di luar Jawa, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat masih mencatat jumlah pekerja komuter di atas 100 ribu orang, tetapi selisihnya cukup besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi utama di Jawa. Sementara itu, beberapa provinsi di wilayah timur Indonesia dan provinsi hasil pemekaran di Papua mencatat jumlah pekerja komuter yang sangat kecil. Pola ini memperlihatkan adanya perbedaan spasial dalam

mobilitas komuter, yang dapat berkaitan dengan variasi struktur ekonomi, kepadatan permukiman, jaringan transportasi, dan persebaran pusat-pusat pekerjaan antarprovinsi.

Sebaran pekerja komuter terkonsentrasi di beberapa provinsi dengan aktivitas ekonomi yang besar dengan beberapa kabupaten/kota yang memiliki jumlah dominan. Gambar 33 menunjukkan 15 kabupaten/kota dengan jumlah komuter keluar terbesar di Indonesia. Pada level kabupaten/kota, jumlah pekerja komuter terbesar terdapat di Kota Depok, yaitu sebanyak 356,3 ribu orang. Jumlah ini diikuti oleh Kota Bekasi sebanyak 304,5 ribu orang, Jakarta Timur sebanyak 303,8 ribu orang, dan Kabupaten Bogor sebanyak 274,9 ribu orang. Besarnya jumlah pekerja komuter pada wilayah-wilayah tersebut menunjukkan kuatnya keterkaitan antara kawasan tempat tinggal dan pusat kegiatan kerja, terutama pada wilayah metropolitan yang memiliki hubungan fungsional erat antardaerah.

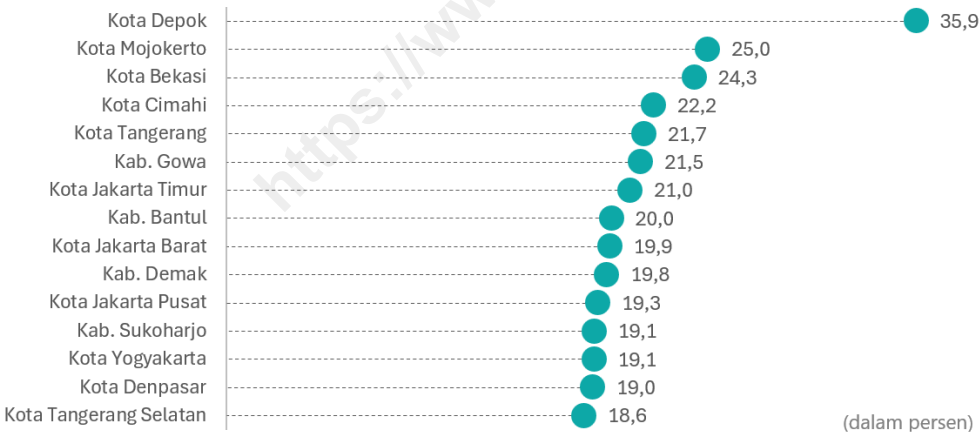


Gambar 33 Lima Belas Kabupaten/Kota Asal dengan Jumlah Pekerja Komuter Terbesar, 2025

Pola sebaran pada tingkat kabupaten/kota menunjukkan bahwa mobilitas komuter tidak hanya terkait dengan besarnya jumlah penduduk yang bekerja, tetapi juga dengan posisi suatu wilayah dalam sistem perkotaan. Beberapa wilayah dengan jumlah pekerja komuter terbesar berada di sekitar pusat kegiatan ekonomi utama, seperti Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Tangerang yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek. Di wilayah-wilayah tersebut, banyak penduduk tinggal di satu kabupaten/kota, tetapi bekerja di kabupaten/kota lain yang masih terhubung secara ekonomi dan transportasi. Dengan demikian, besarnya pekerja komuter di wilayah penyangga metropolitan mencerminkan tingginya integrasi pasar kerja antarwilayah.

Selain wilayah di sekitar Jabodetabek, Gambar 33 menunjukkan adanya konsentrasi pekerja komuter di beberapa kabupaten/kota lain di luar kawasan tersebut. Sidoarjo, Deli Serdang, Demak, Bandung, dan Bantul termasuk dalam kelompok wilayah dengan jumlah pekerja komuter yang relatif besar. Keberadaan wilayah-wilayah ini menunjukkan bahwa fenomena komuter tidak hanya terjadi di metropolitan terbesar, tetapi juga berkembang di kawasan perkotaan lain yang memiliki pusat kegiatan ekonomi, kawasan industri, atau hubungan kuat dengan kota inti di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pola komuter merupakan gejala spasial yang berkaitan dengan perluasan kawasan perkotaan dan keterhubungan ekonomi antarwilayah.

Berdasarkan proporsinya terhadap penduduk bekerja, beberapa kabupaten/kota memiliki intensitas komuter yang sangat menonjol. Kota Depok mencatat persentase pekerja komuter tertinggi dalam Gambar 34, yaitu 35,9 persen, yang berarti lebih dari sepertiga pekerja yang tinggal di wilayah tersebut merupakan pekerja komuter. Persentase yang cukup tinggi juga terlihat di Kota Bekasi sebesar 24,3 persen, Kota Tangerang sebesar 21,7 persen, Jakarta Timur sebesar 21,0 persen, Bantul sebesar 20,0 persen, serta Jakarta Barat dan Demak yang masing-masing mendekati 20 persen. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pada beberapa wilayah, komuter bukan hanya besar secara jumlah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam struktur ketenagakerjaan lokal.

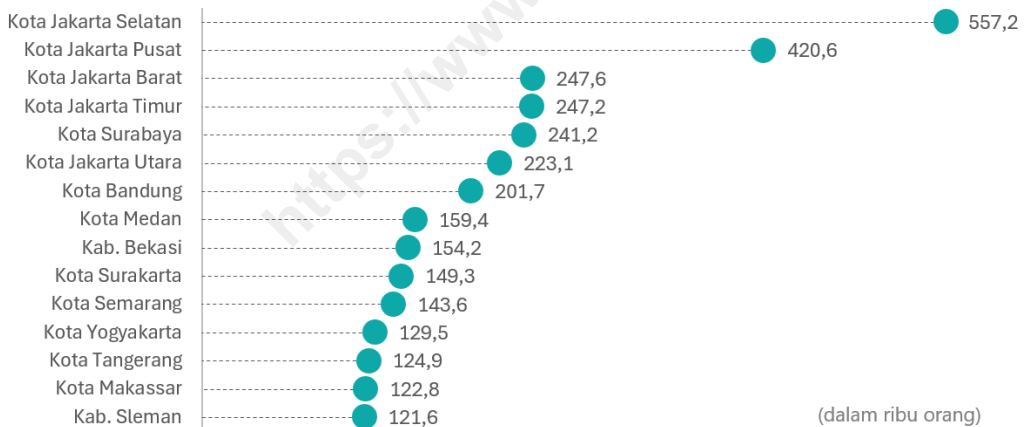


Gambar 34 Lima Belas Kabupaten/Kota Asal dengan Persentase Pekerja Komuter Tertinggi, 2025

Persentase pekerja komuter terhadap total pekerja merupakan ukuran penting yang dapat menunjukkan seberapa besar peran mobilitas komuter dalam struktur ketenagakerjaan suatu wilayah. Selain merupakan wilayah dengan jumlah pekerja komuter absolut terbesar, Kota Depok juga merupakan wilayah dengan persentase

pekerja komuter tertinggi yaitu 35,9 persen. Artinya, lebih dari sepertiga pekerja yang tinggal di Kota Depok merupakan pekerja komuter. Setelah Depok, persentase pekerja komuter tertinggi terdapat di Kota Mojokerto sebesar 25,0 persen, Kota Bekasi sebesar 24,3 persen, Kota Cimahi sebesar 22,2 persen, serta Kota Tangerang sebesar 21,7 persen. Tingginya persentase tersebut menunjukkan bahwa pada wilayah-wilayah ini, mobilitas tenaga kerja lintas wilayah menjadi bagian yang cukup menonjol dalam aktivitas penduduk bekerja.

Pola yang terlihat pada Gambar 34 juga menunjukkan kuatnya hubungan antara wilayah tempat tinggal dan pusat kegiatan ekonomi di sekitarnya. Beberapa wilayah dengan persentase komuter tinggi berada di kawasan metropolitan atau wilayah penyangga kota besar, seperti Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Tangerang Selatan. Selain itu, terdapat pula wilayah lain di luar Jabodetabek yang memiliki proporsi komuter cukup tinggi, seperti Gowa sebesar 21,5 persen, Bantul sebesar 20,0 persen, Demak sebesar 19,8 persen, Sukoharjo sebesar 19,1 persen, Kota Yogyakarta sebesar 19,1 persen, dan Kota Denpasar sebesar 19,0 persen. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas komuter tidak hanya terjadi di kawasan metropolitan terbesar, tetapi juga pada wilayah yang memiliki keterkaitan fungsional dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi di sekitarnya.



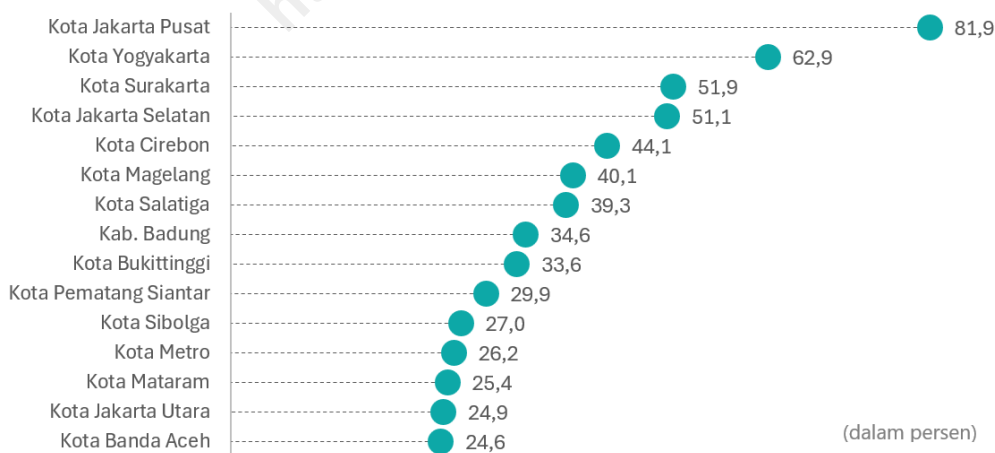
Gambar 35 Lima Belas Kabupaten/Kota Tujuan dengan Pekerja Komuter Terbesar, 2025

Perbandingan antara jumlah absolut dan persentase pekerja komuter menunjukkan bahwa kedua ukuran tersebut memberikan informasi yang saling melengkapi. Sebagai contoh, Kota Mojokerto menempati posisi kedua berdasarkan persentase pekerja komuter, meskipun jumlah pekerja komuter di wilayah ini hanya sekitar 18,2 ribu orang. Sebaliknya, Kabupaten Bogor yang sebelumnya termasuk

wilayah dengan jumlah pekerja komuter besar tidak muncul dalam kelompok teratas berdasarkan persentase, karena total pekerjaanya juga sangat besar. Dengan demikian, jumlah absolut lebih menggambarkan skala mobilitas komuter, sedangkan persentase lebih menunjukkan intensitas mobilitas komuter dalam pasar kerja lokal.

Jika Gambar 34 menunjukkan daerah asal atau tempat tinggal pekerja komuter, maka Gambar 35 memperlihatkan pusat-pusat kegiatan kerja yang menarik arus komuter dari wilayah lain. Kota Jakarta Selatan menjadi kabupaten/kota dengan jumlah pekerja komuter masuk terbesar, yaitu sebanyak 557,2 ribu orang atau 39,2 persen dari total pekerja yang bekerja di wilayah tersebut. Posisi berikutnya ditempati oleh Jakarta Pusat sebanyak 420,6 ribu orang atau 48,5 persen, kemudian Jakarta Barat sebanyak 247,6 ribu orang atau 22,4 persen, Jakarta Timur sebanyak 247,2 ribu orang atau 20,2 persen, dan Surabaya sebanyak 241,2 ribu orang atau 15,1 persen. Dominasi wilayah-wilayah tersebut menunjukkan bahwa kota-kota besar masih menjadi pusat utama penyerapan tenaga kerja komuter, terutama karena konsentrasi kegiatan ekonomi, perkantoran, perdagangan, jasa, dan pemerintahan.

Empat kota administrasi di DKI Jakarta, yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur, termasuk dalam lima besar tujuan pekerja komuter. Bahkan, Jakarta Pusat mencatat proporsi komuter tertinggi dimana hampir separuh pekerja yang bekerja di wilayah tersebut merupakan pekerja komuter. Kondisi ini mencerminkan peran Jakarta Pusat sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan yang menarik pekerja dari luar wilayah administrasinya. Dengan demikian, DKI Jakarta tidak hanya menjadi wilayah dengan intensitas komuter tinggi dari sisi tempat tinggal, tetapi juga menjadi simpul utama tujuan perjalanan kerja.



Gambar 36 Lima Belas Kabupaten/Kota Tujuan dengan Persentase Pekerja Komuter Tertinggi, 2025

Selain DKI Jakarta dan Surabaya, beberapa wilayah lain juga muncul sebagai tujuan komuter yang cukup besar. Kota Bandung sebanyak 201,7 ribu orang atau 16,8 persen, Kota Medan sebanyak 159,4 ribu orang atau 14,3 persen, serta Kabupaten Bekasi sebanyak 154,2 ribu orang atau 11,8 persen. Di luar kelompok kota besar tersebut, terdapat pula wilayah seperti Surakarta, Semarang, Yogyakarta, Tangerang, Makassar, dan Sleman yang menjadi tujuan komuter dalam jumlah relatif besar. Hal ini menunjukkan bahwa arus komuter tidak hanya menuju pusat metropolitan terbesar, tetapi juga mengarah ke pusat-pusat kegiatan ekonomi regional.

Selain dilihat dari jumlah absolut, peran kabupaten/kota sebagai tujuan komuter juga dapat dilihat dari persentase pekerja komuter terhadap total pekerja yang bekerja di wilayah tersebut. Gambar 36 menunjukkan bahwa Kota Jakarta Pusat menjadi wilayah tujuan dengan persentase pekerja komuter tertinggi, yaitu sebesar 81,9 persen. Artinya, lebih dari delapan dari sepuluh pekerja yang bekerja di Kota Jakarta Pusat merupakan pekerja komuter dari wilayah lain. Tingginya persentase tersebut menunjukkan kuatnya fungsi Jakarta Pusat sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan yang menarik tenaga kerja dari luar wilayah administrasinya.

Wilayah lain yang juga memiliki persentase pekerja komuter tinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 62,9 persen, Kota Surakarta sebesar 51,9 persen, Kota Jakarta Selatan sebesar 51,1 persen, dan Kota Cirebon sebesar 44,1 persen. Berbeda dengan Gambar 35 yang menampilkan dominasi wilayah dengan jumlah pekerja komuter terbesar, Gambar 36 memperlihatkan bahwa beberapa kota berukuran lebih kecil juga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap tenaga kerja dari luar wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas komuter tidak selalu sejalan dengan besarnya jumlah absolut pekerja komuter.

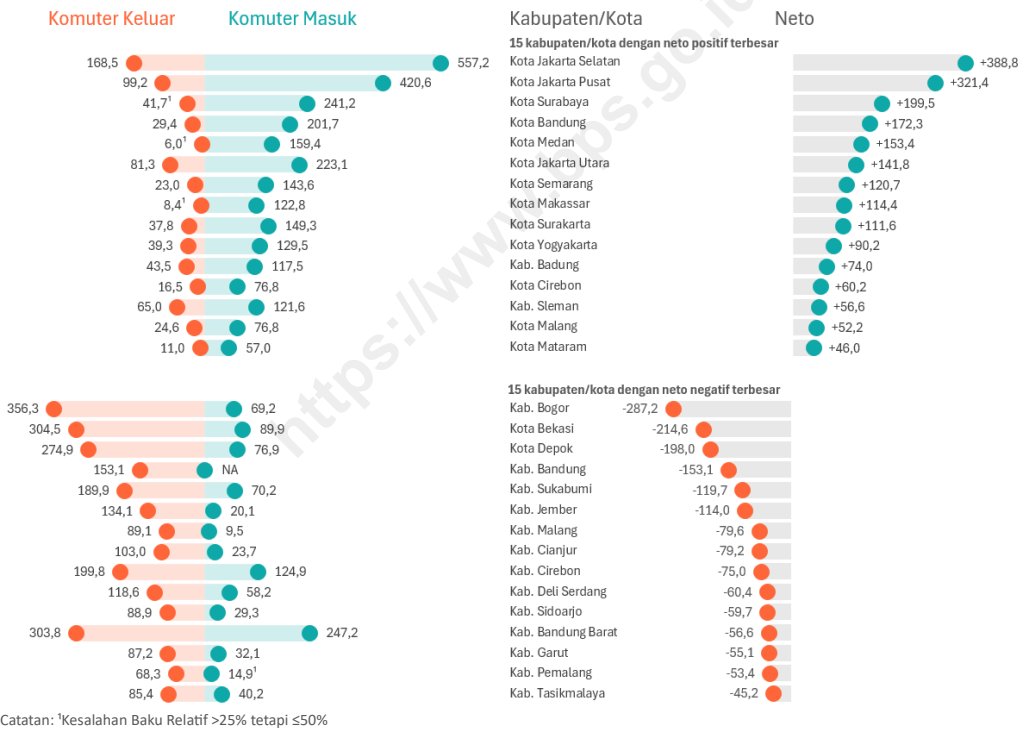
Beberapa kota lain seperti Kota Magelang, Kota Salatiga, Kabupaten Badung, Kota Bukittinggi, dan Kota Pematangsiantar juga mencatat persentase pekerja komuter yang relatif tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kota-kota tersebut berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, pemerintahan, pariwisata, atau perdagangan bagi wilayah sekitarnya. Dengan demikian, Gambar 36 melengkapi Gambar 35 dengan menunjukkan bahwa peran suatu wilayah sebagai tujuan komuter tidak hanya dapat diukur dari besarnya jumlah pekerja yang masuk, tetapi juga dari seberapa besar kontribusi pekerja komuter dalam struktur ketenagakerjaan wilayah tujuan.

4.4.3 Arus dan Pola Pergerakan Pekerja Komuter

Pola pergerakan pekerja komuter merupakan indikasi keseimbangan antara pekerja komuter yang masuk ke suatu kabupaten/kota dan pekerja komuter yang keluar dari kabupaten/kota tersebut. Selisih antara keduanya menghasilkan nilai neto, yang

menunjukkan apakah suatu wilayah lebih berperan sebagai tujuan kerja atau sebagai daerah tempat tinggal pekerja komuter. Wilayah dengan neto positif menunjukkan bahwa jumlah pekerja komuter yang masuk lebih besar daripada yang keluar, sedangkan neto negatif menunjukkan bahwa wilayah tersebut lebih banyak mengirim pekerja komuter ke wilayah lain.

Berdasarkan Gambar 37, wilayah dengan neto komuter positif terbesar didominasi oleh kota-kota besar dan pusat kegiatan ekonomi. Jakarta Selatan mencatat neto positif tertinggi, yaitu 388,8 ribu orang atau 23,7 persen, yang berasal dari 557,2 ribu pekerja komuter masuk dan 168,5 ribu pekerja komuter keluar. Posisi berikutnya ditempati oleh Jakarta Pusat dengan neto 321,4 ribu orang atau 29,2 persen, serta Surabaya dengan neto 199,5 ribu orang atau 12,4 persen. Ketiga wilayah ini menunjukkan peran yang kuat sebagai pusat penyerapan tenaga kerja dari wilayah sekitarnya.



Gambar 37 Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Arus Komuter Neto Positif Terbesar dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Arus Komuter Neto Negatif Terbesar pada Pekerja, 2025

Pola serupa juga terlihat di beberapa kota besar lainnya. Kota Bandung memiliki neto positif sebesar 172,3 ribu orang, diikuti oleh Kota Medan sebesar 153,4 ribu orang, Jakarta Utara sebesar 141,8 ribu orang, dan Kota Semarang sebesar 120,7 ribu orang.

Selain itu, beberapa pusat kegiatan ekonomi regional seperti Makassar, Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Cirebon, Sleman, Malang, dan Mataram juga mencatat saldo netto positif. Temuan ini menunjukkan bahwa arus komuter tidak hanya terkonsentrasi di Jakarta dan Surabaya, tetapi juga terbentuk di kota-kota lain yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, jasa, pemerintahan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi regional.

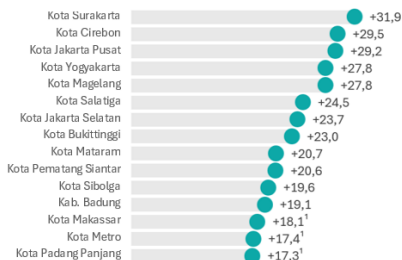
Sebaliknya, wilayah dengan netto komuter negatif terbesar umumnya merupakan daerah tempat tinggal atau wilayah penyangga pusat kegiatan ekonomi. Kabupaten Bogor mencatat netto negatif terbesar, yaitu -287,2 ribu orang atau -23,9 persen, dengan 69,2 ribu pekerja komuter masuk dan 356,3 ribu pekerja komuter keluar. Kondisi serupa terlihat pada Kota Bekasi dengan netto -214,6 ribu orang, Kota Depok sebesar -198,0 ribu orang, dan Kabupaten Bandung sebesar -153,1 ribu orang. Wilayah-wilayah tersebut memiliki jumlah pekerja komuter keluar yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pekerja komuter masuk, sehingga lebih berperan sebagai daerah asal pekerja komuter.

Beberapa wilayah penyangga metropolitan juga menunjukkan netto negatif yang cukup besar, seperti Kabupaten Sidoarjo sebesar -119,7 ribu orang, Kabupaten Demak sebesar -114,0 ribu orang, Kabupaten Gowa sebesar -79,6 ribu orang, Kabupaten Bandung Barat sebesar -79,2 ribu orang, dan Kota Tangerang sebesar -75,0 ribu orang. Pola ini mengindikasikan bahwa sebagian penduduk yang bekerja di wilayah-wilayah tersebut melakukan perjalanan ke pusat kegiatan ekonomi di sekitarnya. Dengan demikian, netto negatif tidak selalu menunjukkan lemahnya aktivitas ekonomi lokal, tetapi dapat mencerminkan fungsi wilayah sebagai kawasan permukiman yang terhubung dengan pusat kerja di wilayah lain.

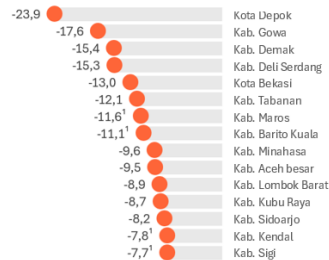
Secara umum, Gambar 37 memperlihatkan adanya pemisahan peran spasial antara wilayah tujuan kerja dan wilayah asal komuter. Kota-kota inti cenderung memiliki netto positif karena menarik pekerja dari wilayah sekitarnya, sedangkan wilayah penyangga cenderung memiliki netto negatif karena lebih banyak penduduknya bekerja di luar wilayah tempat tinggal. Pola ini menegaskan bahwa mobilitas komuter merupakan cerminan hubungan fungsional antarwilayah, terutama di kawasan metropolitan dan sistem perkotaan yang saling terhubung.

Selain menggunakan jumlah absolut, arus pekerja komuter juga perlu dianalisis berdasarkan persentase netonya. Ukuran persentase ini menunjukkan seberapa besar selisih antara komuter masuk dan komuter keluar terhadap total pekerja di suatu kabupaten/kota. Dengan demikian, analisis tidak hanya menangkap wilayah dengan skala arus komuter terbesar, tetapi juga wilayah yang secara relatif paling kuat berperan sebagai pusat tujuan kerja atau sebagai daerah asal pekerja komuter.

Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Neto Positif Terbesar



Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Neto Negatif Terbesar



Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 38 Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Persentase Neto Komuter Positif dan Negatif Terbesar

Wilayah dengan persentase komuter neto positif terbesar adalah Kota Surakarta, yaitu sebesar 31,9 persen. Angka tersebut berasal dari persentase komuter masuk sebesar 45,0 persen dan komuter keluar sebesar 13,1 persen, sehingga menghasilkan angka neto positif sebesar 111,6 ribu orang. Posisi berikutnya ditempati oleh Kota Cirebon dengan angka neto positif 29,5 persen, Jakarta Pusat sebesar 29,2 persen, Kota Yogyakarta sebesar 27,8 persen, dan Kota Magelang sebesar 27,8 persen. Pola ini menunjukkan bahwa beberapa kota dengan jumlah penduduk bekerja yang tidak sebesar Jakarta atau Surabaya dapat memiliki intensitas neto komuter yang sangat tinggi karena perannya sebagai pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, perdagangan, atau jasa bagi wilayah sekitarnya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa ukuran persentase memberikan gambaran yang berbeda dibandingkan dengan ukuran absolut. Wilayah seperti Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Surabaya menonjol karena memiliki jumlah neto komuter positif terbesar. Namun, jika dilihat dari persentase, beberapa kota berukuran menengah seperti Surakarta, Cirebon, Yogyakarta, dan Magelang muncul sebagai wilayah dengan intensitas penyerapan komuter yang sangat kuat. Dengan kata lain, kota-kota tersebut tidak selalu menjadi tujuan komuter terbesar secara jumlah, tetapi memiliki ketergantungan yang relatif tinggi terhadap tenaga kerja dari luar wilayah administrasinya.

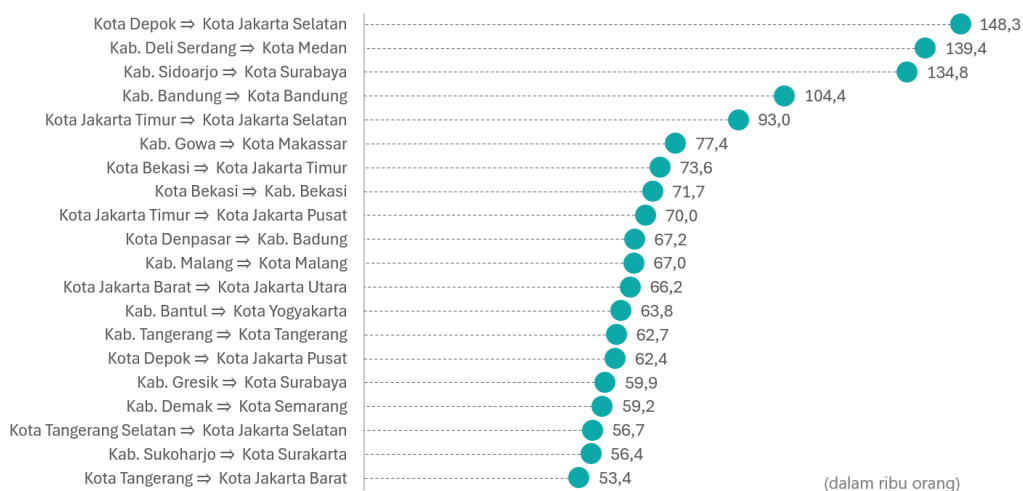
Di sisi sebaliknya, wilayah dengan persentase komuter neto negatif terendah menunjukkan bahwa daerah yang lebih banyak mengirim pekerja komuter keluar dibandingkan menerima komuter masuk. Kota Depok mencatat persentase neto negatif terbesar, yaitu -23,9 persen, dengan komuter masuk sebesar 12,0 persen dan komuter keluar sebesar 35,9 persen. Wilayah berikutnya adalah Kabupaten Gowa sebesar -17,6 persen, Kabupaten Demak sebesar -15,4 persen, Kabupaten Deli Serdang sebesar -15,3 persen, dan Kota Bekasi sebesar -13,0 persen. Angka-angka tersebut menunjukkan

bahwa wilayah-wilayah ini lebih berperan sebagai daerah tempat tinggal bagi pekerja yang melakukan perjalanan ke pusat kerja di wilayah lain.

Pola neto negatif juga tampak pada beberapa wilayah penyangga pusat kegiatan ekonomi, seperti Tabanan sebesar -12,1 persen, Maros sebesar -11,6 persen, Barito Kuala sebesar -11,1 persen, dan Minahasa sebesar -9,6 persen. Wilayah-wilayah tersebut memiliki komuter keluar yang lebih tinggi dibandingkan dengan komuter masuk, sehingga menunjukkan keterhubungan yang kuat dengan pusat kegiatan di sekitarnya. Kondisi ini menegaskan bahwa kawasan penyangga tidak hanya berfungsi sebagai wilayah permukiman, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pasar kerja yang lebih luas melalui mobilitas harian penduduknya.

Secara keseluruhan, analisis berdasarkan persentase neto memperjelas perbedaan peran antarwilayah dalam sistem komuter. Wilayah dengan neto positif tinggi secara persentase cenderung berfungsi sebagai pusat tujuan kerja, sedangkan wilayah dengan neto negatif tinggi berperan sebagai daerah asal pekerja komuter. Dengan membaca ukuran absolut dan persentase secara bersamaan, arus komuter dapat dipahami tidak hanya dari sisi besarnya jumlah pergerakan, tetapi juga dari intensitas hubungan fungsional antara wilayah tempat tinggal dan wilayah tempat bekerja.

Selain melihat posisi suatu wilayah sebagai daerah penerima atau pengirim pekerja komuter, pola pergerakan juga dapat dipahami melalui pasangan wilayah asal dan wilayah tujuan. Informasi ini penting karena menunjukkan hubungan langsung antarkabupaten/kota yang membentuk arus komuter terbesar. Dengan demikian, analisis tidak hanya berhenti pada wilayah mana yang menjadi pusat masuk atau keluar komuter, tetapi juga memperlihatkan dari mana pekerja komuter berasal dan ke mana mereka bekerja.



Gambar 39 Dua Puluh Besar Arus Pekerja Komuter Antarkabupaten/kota, 2025

Berdasarkan Gambar 39, arus komuter terbesar terjadi dari Kota Depok menuju Jakarta Selatan, yaitu sebanyak 148,3 ribu orang. Arus terbesar berikutnya adalah dari Kabupaten Deli Serdang menuju Kota Medan sebanyak 139,4 ribu orang, serta dari Kabupaten Sidoarjo menuju Surabaya sebanyak 134,8 ribu orang. Ketiga pasangan wilayah tersebut menunjukkan pola yang sama, yaitu pergerakan dari wilayah tempat tinggal atau wilayah penyangga menuju kota inti sebagai pusat kegiatan ekonomi. Pola ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa mobilitas komuter banyak terbentuk dalam sistem metropolitan, ketika pusat kerja dan kawasan permukiman berada pada wilayah administrasi yang berbeda.

Arus komuter yang besar juga terlihat pada beberapa pasangan di kawasan Jabodetabek. Selain Depok–Jakarta Selatan, terdapat arus dari Jakarta Timur menuju Jakarta Selatan sebanyak 93,0 ribu orang, dari Kota Bekasi menuju Jakarta Timur sebanyak 73,6 ribu orang, dari Kab. Bekasi menuju Kota Bekasi sebanyak 71,7 ribu orang, serta dari Jakarta Timur menuju Jakarta Pusat sebanyak 70,0 ribu orang. Munculnya beberapa pasangan asal-tujuan di wilayah Jabodetabek menunjukkan bahwa pergerakan komuter tidak hanya terjadi dari daerah penyangga menuju pusat kota, tetapi juga antarwilayah dalam satu kawasan metropolitan yang saling terhubung.

Di luar Jabodetabek, pola arus komuter terbesar juga muncul di beberapa kawasan perkotaan lain. Pasangan Kabupaten Bandung menuju Kota Bandung sebanyak 104,4 ribu orang, Kab. Gowa menuju Kota Makassar mencatat arus sebesar 77,4 ribu orang, sedangkan Kota Denpasar menuju Kab. Badung sebesar 67,2 ribu orang, Kabupaten Malang menuju Kota Malang sebesar 67,0 ribu orang, dan Bantul menuju Kota Yogyakarta sebesar 63,8 ribu orang. Arus-arus ini menunjukkan bahwa hubungan

komuter juga kuat pada kawasan metropolitan atau aglomerasi perkotaan di luar Jakarta, terutama ketika kabupaten/kota sekitar berfungsi sebagai wilayah tempat tinggal dan kota inti berfungsi sebagai pusat pekerjaan.

Jika diperhatikan lebih lanjut, beberapa pasangan asal-tujuan menunjukkan adanya kedekatan geografis dan keterhubungan fungsional yang kuat. Misalnya, dari Kabupaten Tangerang menuju Kota Tangerang sebanyak 62,7 ribu orang, Depok menuju Jakarta Pusat sebanyak 62,4 ribu orang, dari Gresik menuju Surabaya sebanyak 60,0 ribu orang, dari Demak menuju Semarang sebanyak 59,2 ribu orang, dan dari Tangerang Selatan menuju Jakarta Selatan sebanyak 56,7 ribu orang. Pasangan-pasangan ini mengindikasikan bahwa arus komuter terbesar umumnya terjadi pada wilayah yang berdekatan dan memiliki jaringan transportasi serta aktivitas ekonomi yang saling terhubung.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa arus komuter terbesar terbentuk melalui hubungan antara wilayah tempat tinggal dan pusat kegiatan kerja dalam kawasan perkotaan. Wilayah asal umumnya merupakan daerah penyangga atau wilayah permukiman, sedangkan wilayah tujuan merupakan kota inti atau pusat kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pola pasangan asal-tujuan ini memperkuat gambaran bahwa mobilitas komuter merupakan cerminan hubungan fungsional antardaerah, bukan semata-mata pergerakan individual pekerja.

4.4.4 Karakteristik Demografi dan Ketenagakerjaan Pekerja Komuter

Karakteristik pekerja komuter menurut jenis kelamin memberikan gambaran mengenai komposisi laki-laki dan perempuan dalam mobilitas kerja lintas wilayah. Secara umum, pekerja komuter masih didominasi oleh laki-laki di hampir seluruh provinsi. Hal ini terlihat dari proporsi pekerja komuter laki-laki yang pada sebagian besar provinsi berada di atas 60 persen. Sebaliknya, proporsi pekerja komuter perempuan umumnya berada di bawah 40 persen. Pola ini menunjukkan bahwa mobilitas komuter lebih banyak dilakukan oleh pekerja laki-laki, meskipun pekerja perempuan tetap menjadi bagian penting dalam pergerakan tenaga kerja harian.

Dominasi pekerja komuter laki-laki terlihat cukup kuat di beberapa provinsi. Kalimantan Timur mencatat proporsi pekerja komuter laki-laki tertinggi, yaitu sebesar 89,9 persen, sedangkan perempuan hanya 10,1 persen. Proporsi laki-laki yang tinggi juga terlihat di Kalimantan Utara sebesar 88,6 persen, Papua Barat sebesar 87,0 persen, Kalimantan Tengah sebesar 84,9 persen, dan Riau sebesar 83,0 persen (Gambar 40). Tingginya proporsi laki-laki pada provinsi-provinsi tersebut menunjukkan bahwa mobilitas komuter di wilayah tersebut lebih banyak dilakukan oleh pekerja laki-laki.

Kondisi ini dapat berkaitan dengan struktur lapangan pekerjaan, pola kesempatan kerja, serta karakteristik sektor ekonomi yang banyak menyerap pekerja komuter laki-laki.

Meskipun laki-laki mendominasi komposisi pekerja komuter, beberapa provinsi menunjukkan proporsi pekerja komuter perempuan yang relatif lebih tinggi. Maluku mencatat proporsi pekerja komuter perempuan tertinggi, yaitu 41,3 persen, sedangkan laki-laki sebesar 58,7 persen. Proporsi perempuan yang cukup besar juga terlihat di Nusa Tenggara Timur sebesar 37,4 persen, Bali sebesar 36,2 persen, Bangka Belitung sebesar 35,5 persen, dan DI Yogyakarta sebesar 35,3 persen. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa di beberapa provinsi, keterlibatan perempuan dalam mobilitas komuter relatif lebih besar dibandingkan dengan provinsi lainnya, meskipun belum melampaui proporsi laki-laki.

Variasi komposisi menurut jenis kelamin antarprovinsi menunjukkan bahwa pola komuter tidak sepenuhnya seragam. Pada provinsi dengan proporsi laki-laki yang sangat tinggi, mobilitas komuter cenderung lebih terkonsentrasi pada pekerja laki-laki. Sementara itu, pada provinsi dengan proporsi perempuan yang lebih besar, mobilitas komuter menunjukkan keterlibatan pekerja perempuan yang lebih kuat. Perbedaan ini dapat mencerminkan variasi struktur ekonomi wilayah, jenis pekerjaan yang tersedia, akses terhadap transportasi, serta karakteristik sosial dan ketenagakerjaan di masing-masing provinsi.

Lima Provinsi dengan Persentase Komuter Laki-laki Tertinggi

Kalimantan Timur	89,9	10,1 ¹
Kalimantan Utara	88,6	NA
Papua Barat	87,0	NA
Kalimantan Tengah	84,9	15,1 ¹
Riau	83,0	17,0

Lima Provinsi dengan Persentase Komuter Perempuan Tertinggi

Maluku	58,7	41,3
Nusa Tenggara Timur	62,6	37,4
Bali	63,8	36,2
Bangka Belitung	64,5	35,5
DI Yogyakarta	64,7	35,3
Indonesia	Laki-laki 71,2	28,8 Perempuan

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 40 Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025

Komposisi pekerja komuter menurut kelompok umur menunjukkan bahwa mobilitas komuter terutama dilakukan oleh penduduk pada usia kerja produktif. Secara nasional, kelompok umur 25–34 tahun merupakan kelompok terbesar di antara pekerja komuter, yaitu 32,9 persen. Kelompok berikutnya adalah usia 35–44 tahun sebesar 26,1

persen, kemudian usia 45–54 tahun sebesar 17,9 persen, usia 15–24 tahun sebesar 14,5 persen, dan usia 55 tahun ke atas sebesar 8,6 persen. Pola ini menunjukkan bahwa pekerja komuter didominasi oleh kelompok usia produktif utama, terutama pada fase ketika partisipasi kerja dan mobilitas pekerjaan relatif tinggi.

Dominasi kelompok umur 25–34 tahun terlihat di banyak provinsi (Gambar 41). Beberapa provinsi bahkan mencatat proporsi pekerja komuter usia 25–34 tahun yang cukup tinggi, seperti Sulawesi Barat sebesar 43,0 persen, Sulawesi Selatan sebesar 40,5 persen, Sulawesi Tenggara sebesar 39,4 persen, Kalimantan Tengah sebesar 37,6 persen, dan Nusa Tenggara Barat sebesar 36,7 persen. Sementara itu, provinsi dengan jumlah pekerja komuter besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten juga menunjukkan pola yang sama, yaitu kelompok umur 25–34 tahun menjadi komponen terbesar dalam struktur pekerja komuter. Hal ini mengindikasikan bahwa usia awal hingga pertengahan masa kerja merupakan fase yang paling kuat terkait dengan mobilitas komuter.



Gambar 41 Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

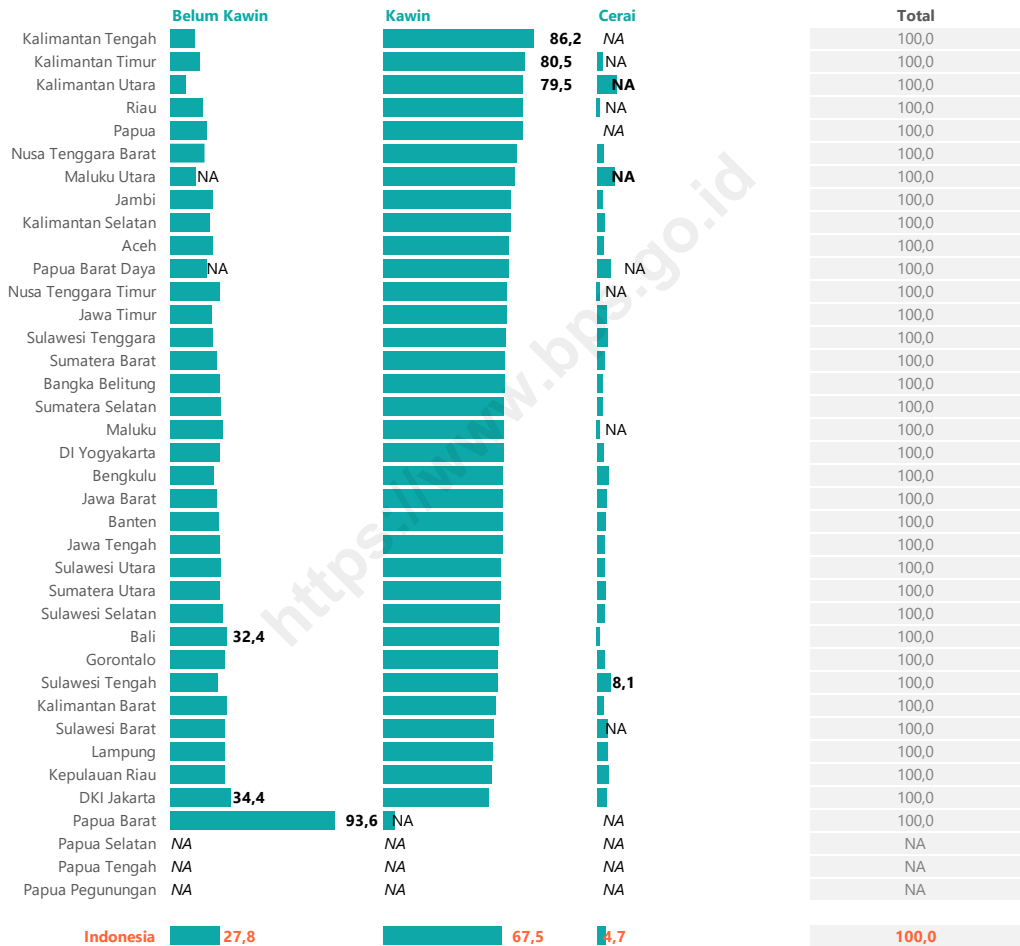
Pada kelompok umur 35–44 tahun, proporsinya juga cukup besar dan menjadi kelompok kedua terbesar secara nasional. Beberapa provinsi mencatat proporsi yang menonjol pada kelompok ini, seperti Nusa Tenggara Timur sebesar 32,5 persen, Aceh sebesar 30,0 persen, Sulawesi Utara sebesar 29,3 persen, Kalimantan Tengah sebesar 28,3 persen, serta beberapa provinsi besar di Jawa yang berada pada kisaran sekitar seperempat dari total pekerja komuter. Besarnya proporsi kelompok umur ini menunjukkan bahwa komuter tidak hanya dilakukan oleh pekerja muda, tetapi juga oleh pekerja yang sudah berada pada fase karier yang lebih mapan. Dengan demikian, mobilitas komuter merupakan bagian dari pola kerja lintas umur produktif, bukan semata-mata karakteristik pekerja muda.

Kelompok umur 15–24 tahun dan 55 tahun ke atas memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan kelompok umur utama. Secara nasional, pekerja komuter usia 15–24 tahun mencakup 14,5 persen, sementara kelompok usia 55 tahun ke atas hanya 8,6 persen. Proporsi yang lebih rendah pada usia muda dapat berkaitan dengan transisi dari pendidikan ke dunia kerja, sedangkan rendahnya proporsi pada usia 55 tahun ke atas menunjukkan bahwa mobilitas komuter cenderung menurun pada kelompok usia lanjut. Meskipun demikian, beberapa provinsi masih menunjukkan proporsi pekerja komuter usia 15–24 tahun yang relatif tinggi, seperti Lampung sebesar 22,4 persen, Bali sebesar 19,1 persen, dan Gorontalo sebesar 18,9 persen, yang menunjukkan adanya variasi struktur umur pekerja komuter antarwilayah.

Dominasi kelompok usia produktif, terutama usia 25–44 tahun terjadi karena kelompok umur ini merupakan bagian utama dari tenaga kerja yang memiliki mobilitas tinggi, baik karena tuntutan pekerjaan, akses terhadap peluang kerja di luar wilayah tempat tinggal, maupun keterhubungan dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Dengan demikian, karakteristik umur pekerja komuter menunjukkan bahwa mobilitas kerja harian paling kuat terjadi pada kelompok usia yang berada pada fase aktif dan produktif dalam pasar kerja.

Selain kelompok umur, status perkawinan memberikan gambaran mengenai komposisi sosial pekerja komuter. Karakteristik sosial tersebut terutama berkaitan dengan fase kehidupan dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Secara nasional, pekerja komuter didominasi oleh mereka yang berstatus kawin, yaitu sebesar 67,5 persen. Sementara itu, pekerja komuter yang berstatus belum kawin mencapai 27,8 persen, sedangkan yang berstatus cerai mencapai 4,7 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja komuter berada dalam kelompok yang telah membentuk rumah tangga, sehingga mobilitas kerja harian menjadi bagian dari strategi untuk mengakses pekerjaan tanpa harus berpindah tempat tinggal.

Dominasi pekerja komuter berstatus kawin terlihat di hampir seluruh provinsi (Gambar 42). Beberapa provinsi mencatat proporsi pekerja komuter berstatus kawin yang relatif tinggi, seperti Kalimantan Tengah sebesar 86,2 persen, Kalimantan Timur sebesar 80,5 persen, Riau sebesar 79,4 persen, Kalimantan Utara sebesar 79,5 persen, Maluku Utara sebesar 75,3 persen, dan Jawa Timur sebesar 70,6 persen. Tingginya proporsi ini mengindikasikan bahwa pada banyak wilayah, komuter dilakukan oleh pekerja yang kemungkinan telah memiliki keterikatan tempat tinggal dan rumah tangga, sehingga perjalanan ulang-alik menjadi pilihan yang lebih memungkinkan dibandingkan perpindahan tempat tinggal ke lokasi kerja.



Gambar 42 Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025

Sementara itu, pekerja komuter berstatus belum kawin juga memiliki proporsi yang cukup besar di beberapa provinsi. DKI Jakarta mencatat proporsi pekerja komuter

yang belum kawin sebesar 34,4 persen, diikuti oleh Bali sebesar 32,4 persen, Kalimantan Barat sebesar 32,4 persen, Sulawesi Barat sebesar 31,0 persen, serta Kepulauan Riau sebesar 31,0 persen. Proporsi yang relatif tinggi pada kelompok belum kawin dapat mencerminkan keterlibatan pekerja muda dalam mobilitas komuter, terutama pada wilayah dengan pasar kerja yang dinamis dan peluang kerja lintas wilayah yang lebih terbuka. Dengan demikian, meskipun pekerja komuter secara umum didominasi oleh kelompok kawin, kelompok belum kawin tetap menjadi komponen penting dalam mobilitas tenaga kerja.

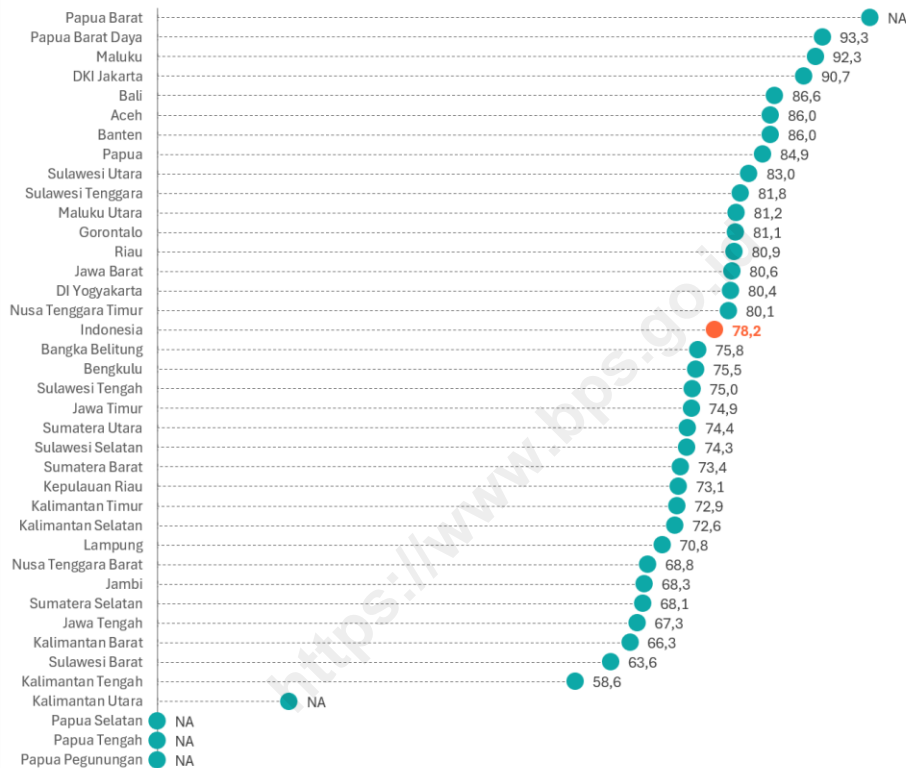
Pada kelompok berstatus cerai, proporsinya relatif kecil dibandingkan dua kelompok lainnya. Secara nasional, pekerja komuter berstatus cerai hanya sebesar 4,7 persen. Namun, beberapa provinsi mencatat proporsi yang lebih tinggi, seperti Kalimantan Utara sebesar 11,4 persen, Maluku Utara sebesar 10,3 persen, Sulawesi Barat sebesar 5,9 persen, Sulawesi Selatan sebesar 4,0 persen, dan DKI Jakarta sebesar 5,3 persen. Meskipun jumlahnya tidak dominan, keberadaan kelompok ini menunjukkan bahwa mobilitas komuter juga terjadi pada berbagai kondisi rumah tangga dan tidak terbatas pada pekerja yang belum kawin atau yang sudah kawin.

Secara umum, pola menurut status perkawinan menunjukkan bahwa pekerja komuter paling banyak berasal dari kelompok berstatus kawin. Hal ini menunjukkan bahwa komuter dapat menjadi mekanisme mobilitas yang memungkinkan pekerja tetap mempertahankan tempat tinggal dan kehidupan rumah tangga, sekaligus mengakses pekerjaan di wilayah lain. Dengan demikian, karakteristik status perkawinan memperkaya pemahaman bahwa mobilitas komuter tidak hanya berkaitan dengan lokasi kerja dan tempat tinggal, tetapi juga dengan fase kehidupan dan kondisi sosial pekerja.

Selain status perkawinan, aspek lain yang penting untuk diperhatikan terkait karakteristik sosial pekerja komuter adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Pendidikan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas tenaga kerja komuter, sekaligus menunjukkan keterkaitan antara mobilitas kerja dan peluang pekerjaan yang tersedia di luar wilayah tempat tinggal. Secara nasional, pekerja komuter didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMA ke atas, yaitu sebesar 78,2 persen, sedangkan pekerja komuter dengan pendidikan di bawah SMA sebesar 21,8 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa mobilitas komuter lebih banyak dilakukan oleh pekerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas.

Dominasi pekerja komuter berpendidikan SMA ke atas terlihat di sebagian besar provinsi (Gambar 43). Beberapa provinsi bahkan mencatat proporsi yang sangat tinggi, seperti Papua Barat sebesar 100,0 persen, Papua Barat Daya sebesar 93,3 persen,

Maluku sebesar 92,3 persen, DKI Jakarta sebesar 90,7 persen, Bali sebesar 86,6 persen, Aceh sebesar 86,0 persen, dan Banten sebesar 86,0 persen. Tingginya proporsi tersebut menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah tersebut, pekerja komuter cenderung berasal dari kelompok tenaga kerja dengan pendidikan yang relatif lebih tinggi. Hal ini dapat berkaitan dengan struktur pekerjaan di wilayah tujuan komuter, terutama pada sektor formal, jasa, administrasi, perdagangan modern, atau aktivitas ekonomi perkotaan yang lebih banyak membutuhkan pendidikan menengah dan tinggi.



Gambar 43 Persentase Pekerja Komuter dengan Tingkat Pendidikan SMA ke atas Menurut Provinsi, 2025

Meskipun demikian, masih terdapat variasi antarprovinsi dalam komposisi pendidikan pekerja komuter. Beberapa provinsi memiliki proporsi pekerja komuter berpendidikan di bawah SMA yang relatif lebih besar dibandingkan rata-rata nasional, seperti Kalimantan Utara sebesar 81,5 persen, Kalimantan Tengah sebesar 41,4 persen, Sulawesi Barat sebesar 36,4 persen, Kalimantan Barat sebesar 33,7 persen, Jawa Tengah sebesar 32,7 persen, Sumatera Selatan sebesar 31,9 persen, dan Jambi sebesar 31,7 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada sebagian wilayah, mobilitas komuter juga

melibatkan pekerja dengan pendidikan lebih rendah, yang kemungkinan terserap pada jenis pekerjaan yang tidak selalu mensyaratkan pendidikan menengah ke atas.

Karakteristik pendidikan menunjukkan bahwa pekerja komuter tidak dapat dipahami sebagai kelompok yang homogen. Secara umum, pekerja komuter memang didominasi oleh pekerja berpendidikan SMA ke atas, tetapi di beberapa provinsi komposisinya masih cukup beragam. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik pasar kerja lokal, jenis lapangan pekerjaan di wilayah tujuan, serta aksesibilitas antarwilayah tempat tinggal dan tempat kerja. Dengan demikian, karakteristik pendidikan memperkuat pemahaman bahwa mobilitas komuter bukan hanya fenomena spasial, tetapi juga terkait dengan struktur kualitas tenaga kerja yang bergerak antarwilayah.

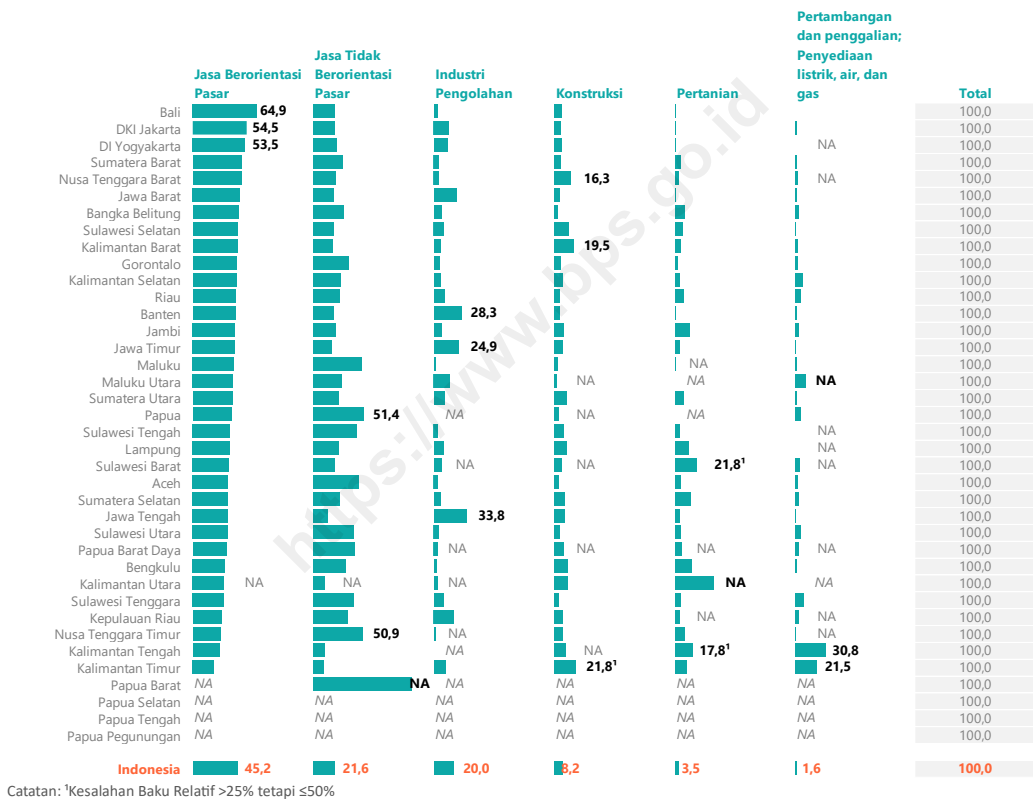
Setelah karakteristik pendidikan menunjukkan bahwa pekerja komuter didominasi oleh lulusan SMA ke atas, pembahasan berikutnya diarahkan pada lapangan pekerjaan tempat mereka bekerja. Keterkaitan antara pendidikan dan lapangan pekerjaan penting untuk diperhatikan karena jenis pekerjaan dapat memengaruhi kebutuhan mobilitas pekerja, terutama di sektor-sektor yang terkonsentrasi di pusat kegiatan ekonomi. Dalam konteks ini, distribusi pekerja komuter menurut lapangan pekerjaan utama memberikan gambaran mengenai sektor-sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja komuter.

Secara nasional, pekerja komuter paling banyak bekerja pada kelompok jasa berorientasi pasar, yaitu sebesar 45,2 persen. Kelompok ini menjadi lapangan pekerjaan utama terbesar bagi pekerja komuter, jauh lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Proporsi terbesar berikutnya terdapat pada jasa berorientasi nonpasar sebesar 21,6 persen, kemudian industri manufaktur sebesar 20,0 persen, industri konstruksi sebesar 8,2 persen, pertanian sebesar 3,5 persen, dan manufaktur lainnya sebesar 1,6 persen. Pola ini menunjukkan bahwa mobilitas komuter lebih kuat terkait dengan sektor jasa dan industri, yang umumnya terkonsentrasi di kawasan perkotaan atau pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Dominasi sektor jasa berorientasi pasar terlihat di banyak provinsi (Gambar 44). Beberapa provinsi mencatat proporsi yang sangat tinggi pada sektor ini, seperti Bali sebesar 64,9 persen, DKI Jakarta sebesar 54,5 persen, DI Yogyakarta sebesar 53,5 persen, Sumatera Barat sebesar 50,1 persen, dan Nusa Tenggara Barat sebesar 49,5 persen. Tingginya proporsi tersebut menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah tersebut, pekerja komuter banyak terserap dalam aktivitas perdagangan, akomodasi, transportasi, jasa perusahaan, dan berbagai kegiatan ekonomi berbasis pasar lainnya. Dengan demikian, sektor jasa berorientasi pasar tampak menjadi penggerak penting

bagi mobilitas komuter, terutama pada wilayah yang memiliki konsentrasi aktivitas ekonomi perkotaan dan pariwisata.

Sektor industri pengolahan juga menjadi lapangan pekerjaan penting bagi pekerja komuter di beberapa provinsi. Secara nasional, proporsinya mencapai 20,0 persen, tetapi di sejumlah provinsi nilainya jauh lebih tinggi. Jawa Tengah mencatat proporsi pekerja komuter di industri manufaktur sebesar 33,8 persen, diikuti Banten sebesar 28,3 persen, Jawa Timur sebesar 24,9 persen, Jawa Barat sebesar 23,0 persen, dan Kepulauan Riau sebesar 20,8 persen. Pola ini mengindikasikan bahwa wilayah dengan basis industri yang kuat cenderung menarik pekerja komuter, baik dari kabupaten/kota sekitar maupun dari wilayah penyangga kawasan industri.



Gambar 44 Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2025

Di sisi lain, sektor pertanian memiliki proporsi yang relatif kecil secara nasional, yaitu 3,5 persen, tetapi masih cukup menonjol di beberapa provinsi. Kalimantan Utara mencatat proporsi pekerja komuter di sektor pertanian sebesar 39,2 persen, diikuti oleh Sulawesi Barat sebesar 21,8 persen, Kalimantan Tengah sebesar 17,8 persen, Bengkulu sebesar 16,9 persen, serta Jambi dan Lampung masing-masing sekitar 14,2 persen dan

14,0 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komuter sering diasosiasikan dengan aktivitas perkotaan, pada beberapa wilayah mobilitas komuter juga terjadi dalam kegiatan berbasis pertanian atau sumber daya alam. Dengan demikian, karakter lapangan pekerjaan komuter dapat berbeda sesuai dengan struktur ekonomi wilayah.

Distribusi pekerja komuter menurut lapangan pekerjaan juga memperlihatkan peran sektor jasa berorientasi nonpasar, terutama di wilayah yang memiliki aktivitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, atau layanan sosial. Secara nasional, sektor ini mencakup 21,6 persen dari pekerja komuter. Beberapa provinsi mencatat proporsi yang relatif tinggi, seperti Nusa Tenggara Timur sebesar 50,9 persen, Papua sebesar 51,4 persen, Maluku sebesar 49,9 persen, Aceh sebesar 46,7 persen, dan Sulawesi Tengah sebesar 44,2 persen. Angka ini menunjukkan bahwa di sejumlah wilayah, mobilitas komuter tidak hanya digerakkan oleh kegiatan ekonomi pasar, tetapi juga oleh layanan publik dan aktivitas sosial yang terkonsentrasi di pusat-pusat pelayanan.

Karakteristik lapangan pekerjaan utama menunjukkan bahwa pekerja komuter lebih banyak terserap pada sektor jasa dan industri dibandingkan dengan pertanian. Kondisi ini sejalan dengan karakter mobilitas komuter yang umumnya terbentuk akibat pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan, kawasan industri, dan pusat pelayanan. Namun, variasi antarprovinsi menunjukkan bahwa pola komuter tidak sepenuhnya seragam; di wilayah tertentu, sektor pertanian, konstruksi, atau jasa nonpasar juga dapat menjadi penarik mobilitas pekerja. Dengan demikian, analisis lapangan pekerjaan memperkuat pemahaman bahwa karakteristik pekerja komuter dipengaruhi oleh struktur ekonomi wilayah tujuan kerja.

Jika lapangan pekerjaan menunjukkan sektor-sektor yang banyak menyerap pekerja komuter, analisis jenis jabatan diperlukan untuk memahami posisi pekerja komuter dalam struktur pekerjaan, apakah lebih banyak berada pada kelompok jabatan tinggi, menengah, rendah, atau pekerjaan terkait TNI/Polri. Dengan demikian, karakteristik pekerja komuter tidak hanya dilihat dari sektor tempat bekerja, tetapi juga dari tingkat jabatan yang dijalankan dalam pekerjaan utamanya.

Secara nasional, pekerja komuter paling banyak berada pada kelompok jabatan menengah, yaitu sebesar 59,0 persen. Kelompok berikutnya adalah jabatan tinggi sebesar 22,9 persen, kemudian jabatan rendah sebesar 16,8 persen, sedangkan kelompok TNI/Polri hanya sebesar 1,3 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa pekerja komuter didominasi oleh kelompok jabatan menengah, yang kemungkinan mencakup berbagai jenis pekerjaan operasional, teknis, administratif, perdagangan, jasa, maupun pekerjaan terampil lainnya. Dengan kata lain, mobilitas komuter lebih

banyak dilakukan oleh pekerja yang berada pada lapisan tengah dalam struktur pekerjaan.

Dominasi jabatan menengah terlihat di hampir seluruh provinsi (Gambar 45). Beberapa provinsi mencatat proporsi jabatan menengah yang sangat tinggi, seperti Sulawesi Barat sebesar 77,9 persen, Riau sebesar 70,7 persen, Jawa Tengah sebesar 65,6 persen, Kalimantan Tengah sebesar 65,4 persen, Maluku Utara sebesar 63,9 persen, dan Sumatera Barat sebesar 63,4 persen. Tingginya proporsi tersebut menunjukkan bahwa pada banyak wilayah, komuter terutama dilakukan oleh pekerja dengan jenis pekerjaan yang berada pada level menengah. Hal ini sejalan dengan karakter komuter sebagai mobilitas tenaga kerja yang banyak terkait dengan pekerjaan rutin di pusat kegiatan ekonomi, kawasan industri, pusat layanan, maupun wilayah perkotaan.

Meskipun jabatan menengah menjadi kelompok terbesar, proporsi pekerja komuter pada jabatan tinggi juga cukup menonjol di sejumlah provinsi. Secara nasional, sekitar 22,9 persen pekerja komuter berada pada jabatan tinggi. Beberapa provinsi memiliki proporsi yang lebih besar, seperti Papua Barat sebesar 66,6 persen, Papua Barat Daya sebesar 33,9 persen, Aceh sebesar 37,5 persen, Nusa Tenggara Timur sebesar 35,5 persen, DKI Jakarta sebesar 31,4 persen, Kalimantan Timur sebesar 31,5 persen, Kalimantan Utara sebesar 31,6 persen, dan Maluku sebesar 31,2 persen. Proporsi yang tinggi pada kelompok jabatan ini menunjukkan bahwa mobilitas komuter juga dilakukan oleh pekerja dengan posisi profesional, manajerial, atau pekerjaan berkeahlian yang memiliki keterhubungan yang kuat dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan.



Gambar 45 Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Jenis Jabatan dalam Pekerjaan Utama, 2025

Kelompok jabatan rendah mencakup 16,8 persen pekerja komuter secara nasional, tetapi variasi antarprovinsi cukup besar. Beberapa provinsi menunjukkan proporsi jabatan rendah yang relatif tinggi, seperti Sumatera Utara sebesar 28,0 persen, Kalimantan Barat sebesar 25,7 persen, Jambi sebesar 24,4 persen, Lampung sebesar 23,5 persen, Nusa Tenggara Barat sebesar 21,8 persen, dan Jawa Timur sebesar 21,1 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, komuter juga banyak dilakukan oleh pekerja pada jenis pekerjaan dengan tingkat keterampilan atau posisi pekerjaan yang lebih rendah. Dengan demikian, mobilitas komuter tidak hanya menjadi karakter pekerja pada jabatan menengah dan tinggi, tetapi juga mencakup kelompok jabatan rendah sesuai dengan struktur kesempatan kerja di masing-masing wilayah.

Kelompok TNI/Polri memiliki proporsi paling kecil di hampir semua provinsi. Secara nasional, persentasenya hanya 1,3 persen, meskipun beberapa provinsi menunjukkan angka yang lebih tinggi, seperti Papua Barat sebesar 14,1 persen, Nusa Tenggara Timur sebesar 7,2 persen, Kalimantan Tengah sebesar 5,8 persen, dan Papua Barat Daya sebesar 4,9 persen. Proporsi yang kecil ini menunjukkan bahwa kelompok

TNI/Polri bukan komponen utama dalam struktur pekerja komuter secara nasional. Namun, variasi di beberapa provinsi tetap menunjukkan bahwa struktur jabatan pekerja komuter dapat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, distribusi institusi, serta pola penempatan pekerjaan tertentu.

Distribusi jenis jabatan pekerja komuter mayoritas berada pada kelompok jabatan menengah. Temuan ini melengkapi analisis sebelumnya mengenai pendidikan dan lapangan pekerjaan, karena menunjukkan bahwa pekerja komuter tidak hanya terkonsentrasi pada sektor jasa dan industri, tetapi juga banyak menempati jenis pekerjaan pada lapisan menengah dalam struktur jabatan. Dengan demikian, karakteristik pekerja komuter dapat dipahami sebagai kelompok tenaga kerja yang secara umum berpendidikan relatif baik, banyak bekerja di sektor jasa dan industri, serta dominan berada pada jabatan menengah.

Setelah jenis jabatan, aspek berikutnya yang penting bagi seorang pekerja komuter adalah status status dalam pekerjaan utama. Status dalam pekerjaan memberikan gambaran mengenai sejauh mana pekerja komuter terserap dalam pekerjaan yang relatif lebih terstruktur, baik dari sisi hubungan kerja, perlindungan ketenagakerjaan, maupun karakter kegiatan ekonominya. Secara nasional, pekerja komuter didominasi oleh mereka yang bekerja di sektor formal, yaitu sebesar 82,3 persen. Sementara itu, pekerja komuter yang bekerja pada sektor informal hanya sebesar 17,7 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa mobilitas komuter lebih banyak terjadi pada pekerja yang memiliki keterikatan kerja yang lebih formal. Pola tersebut sejalan dengan karakter komuter yang umumnya terkait dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi, kawasan perkantoran, industri, perdagangan, dan jasa, yang banyak menyediakan pekerjaan dengan pola kerja lebih teratur dan lokasi kerja yang relatif tetap.

Dominasi pekerja formal terlihat hampir di seluruh provinsi (Gambar 46). Beberapa provinsi mencatat proporsi pekerja komuter formal yang sangat tinggi, seperti Papua Barat sebesar 100,0 persen, DKI Jakarta sebesar 92,9 persen, Banten sebesar 88,0 persen, Kepulauan Riau sebesar 86,6 persen, Kalimantan Barat dan Jawa Barat masing-masing sebesar 85,4 persen, Riau sebesar 84,0 serta Bali sebesar 83,6 persen. Tingginya proporsi tersebut menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah tersebut, pekerja komuter terutama terserap dalam pekerjaan formal. Kondisi ini juga memperkuat gambaran bahwa komuter banyak berkaitan dengan aktivitas ekonomi perkotaan, kawasan industri, dan pusat jasa yang memiliki struktur pekerjaan yang lebih formal.

Meskipun memiliki persentase yang lebih kecil, sektor informal tetap menjadi bagian dari struktur pekerja komuter di sejumlah provinsi. Proporsi pekerja komuter

informal tertinggi terlihat di Kalimantan Utara, yaitu sebesar 47,3 persen, diikuti oleh Sumatera Barat sebesar 34,6 persen, Bengkulu sebesar 32,9 persen, Maluku Utara sebesar 30,7 persen, Jambi sebesar 29,0 persen, dan Sulawesi Barat sebesar 28,8 persen. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pada sebagian wilayah, mobilitas komuter tidak hanya terjadi pada pekerjaan formal, tetapi juga pada kegiatan informal yang tetap membutuhkan perjalanan lintas wilayah antara tempat tinggal dan tempat kerja.



Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 46 Persentase Pekerja Komuter dengan Pekerjaan Utama Berstatus Formal Menurut Provinsi, 2025

Variasi antarprovinsi dalam status dalam pekerjaan komuter menunjukkan bahwa karakter formalitas pekerja komuter dipengaruhi oleh struktur ekonomi wilayah. Provinsi dengan pusat industri, perkantoran, pemerintahan, dan jasa modern cenderung memiliki proporsi pekerja komuter formal yang tinggi. Sebaliknya, provinsi dengan struktur ekonomi yang lebih banyak ditopang oleh usaha kecil, perdagangan informal, atau pekerjaan mandiri cenderung memiliki proporsi komuter informal yang lebih besar. Dengan demikian, perbedaan status formalitas pekerja komuter tidak hanya

mencerminkan karakter pekerjaanya, tetapi juga mencerminkan jenis kesempatan kerja yang tersedia di wilayah tujuan.

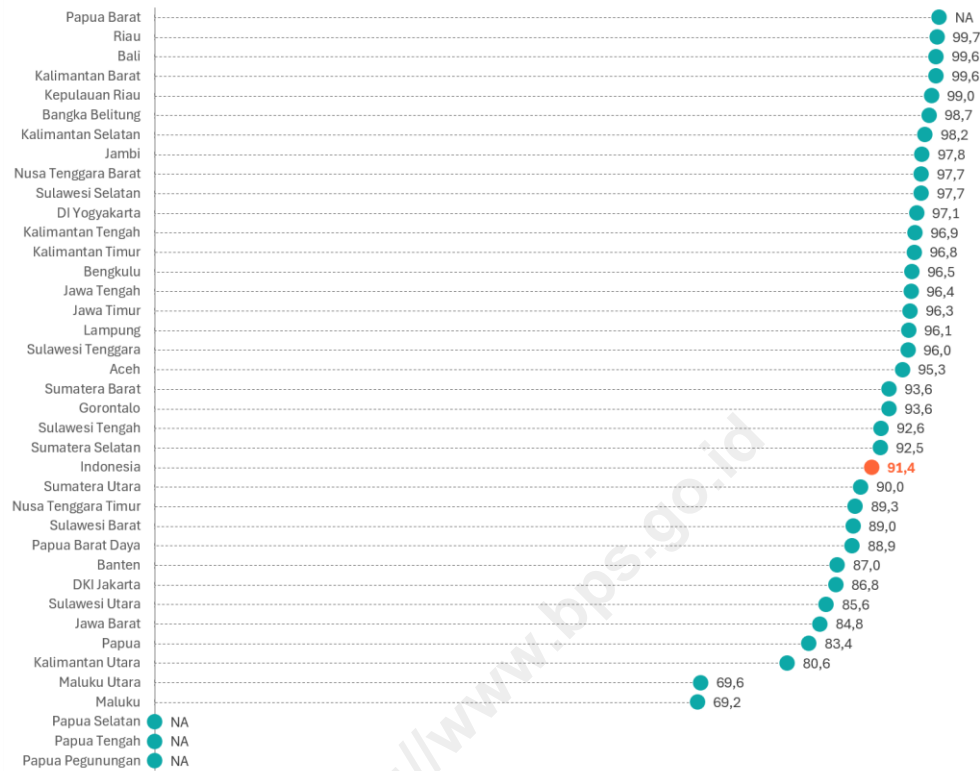
Setelah mengetahui bahwa pekerja komuter umumnya bekerja di sektor formal, pembahasan berikutnya diarahkan pada moda transportasi utama yang digunakan untuk mencapai tempat kerja. Moda transportasi menjadi aspek penting karena mobilitas komuter tidak hanya berkaitan dengan karakteristik pekerja dan pekerjaan, tetapi juga dengan cara pekerja mengakses lokasi kerja setiap hari. Dalam hal ini, pilihan moda transportasi dapat mencerminkan ketersediaan sarana transportasi, keterhubungan antarwilayah, serta pola perjalanan pekerja dari tempat tinggal menuju tempat kerja.

Secara nasional, pekerja komuter sangat dominan menggunakan transportasi pribadi, yaitu sebesar 91,4 persen. Sementara itu, penggunaan moda lainnya, termasuk transportasi umum, transportasi daring, jalan kaki, atau tidak menggunakan kendaraan, hanya sebesar 8,6 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa perjalanan pekerja komuter masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi. Ketergantungan tersebut dapat berkaitan dengan fleksibilitas waktu perjalanan, keterbatasan jangkauan transportasi umum, jarak antara tempat tinggal dan tempat kerja, serta kebutuhan untuk menyesuaikan perjalanan dengan jadwal kerja harian.

Dominasi transportasi pribadi terlihat hampir di seluruh provinsi (Gambar 47). Beberapa provinsi bahkan mencatat proporsi penggunaan transportasi pribadi yang sangat tinggi, seperti Papua Barat sebesar 100,0 persen, Bali dan Kalimantan Barat masing-masing sebesar 99,6 persen, Riau sebesar 99,7 persen, Kepulauan Riau sebesar 99,0 persen, Bangka Belitung sebesar 97,8 persen, serta Jambi sebesar 97,8 persen. Tingginya proporsi tersebut menunjukkan bahwa di banyak wilayah, kendaraan pribadi menjadi moda utama yang menopang mobilitas pekerja komuter. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa sistem mobilitas harian tenaga kerja di sebagian besar provinsi masih sangat bergantung pada akses individu terhadap kendaraan.

Terdapat beberapa provinsi yang menunjukkan bahwa proporsi penggunaan moda selain transportasi pribadi relatif lebih tinggi. Maluku dan Maluku Utara masing-masing mencatat penggunaan moda lainnya sebesar 30,8 persen dan 30,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Proporsi yang cukup tinggi juga terlihat di Kalimantan Utara sebesar 19,4 persen, Papua sebesar 16,6 persen, Jawa Barat sebesar 15,2 persen, Sulawesi Utara sebesar 14,4 persen, DKI Jakarta sebesar 13,2 persen, Banten sebesar 13,0 persen, Papua Barat Daya sebesar 11,1 persen, dan Sulawesi Barat sebesar 11,0 persen. Variasi ini menunjukkan bahwa pada sebagian wilayah, perjalanan komuter tidak sepenuhnya didominasi oleh kendaraan pribadi, tetapi juga melibatkan moda lain

sesuai dengan karakter geografis, ketersediaan transportasi, serta pola permukiman dan pusat kegiatan.



Gambar 47 Persentase Pekerja Komuter yang Menggunakan Kendaraan Pribadi sebagai Moda Transportasi Utama Menurut Provinsi, 2025

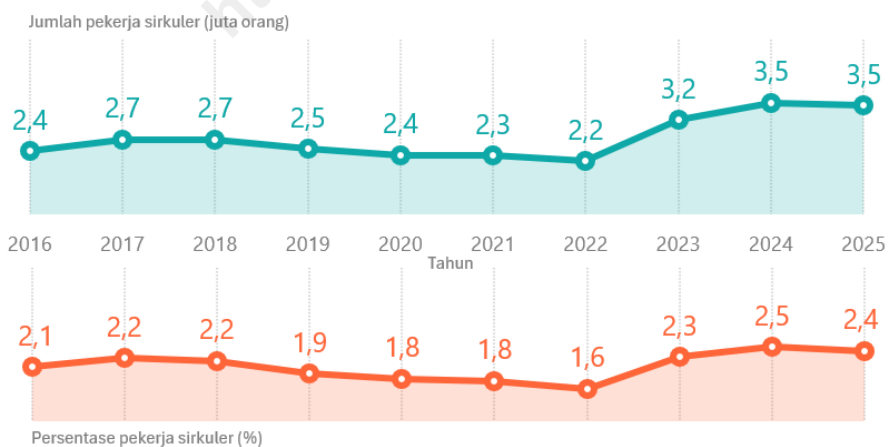
Perbedaan antarprovinsi tersebut menunjukkan bahwa pilihan moda transportasi pekerja komuter sangat dipengaruhi oleh konteks wilayah. Di wilayah perkotaan besar seperti DKI Jakarta, penggunaan moda selain transportasi pribadi dapat berkaitan dengan ketersediaan transportasi umum dan transportasi daring yang lebih beragam. Sementara itu, di wilayah kepulauan atau wilayah dengan karakter geografis khusus seperti Maluku, Maluku Utara, dan sebagian wilayah Papua, penggunaan moda transportasi lainnya kemungkinan mencerminkan kebutuhan perjalanan yang tidak selalu dapat dilayani oleh kendaraan pribadi konvensional. Dengan demikian, kategori moda selain transportasi pribadi perlu dibaca sesuai dengan karakter wilayah masing-masing.

4.5 Pekerja Sirkuler

Mobilitas sirkuler merupakan salah satu bentuk mobilitas horizontal yang terjadi di Indonesia selain migrasi dan komuter. Terdapat banyak faktor yang memengaruhi mobilitas sirkuler mulai dari ekonomi, sosial, hingga kultural. Hugo (1982) menyebutkan bahwa mobilitas sirkuler menjadi bukti adanya penduduk yang tinggal pada jarak yang relatif jauh yang tidak dapat ditempuh secara komuter, namun tetap mendapatkan keuntungan yang sama dengan komuter tanpa harus mengubah tempat tinggal secara permanen atau melakukan migrasi. Mobilitas sirkuler cenderung periodik atau musiman tanpa disertai niat menetap di tempat tujuan. Pekerja sirkuler didefinisikan sebagai pekerja berumur 15 tahun ke atas yang memiliki tempat bekerja berbeda dari tempat tinggal dan pulang secara rutin minimal satu bulan sekali.

4.5.1 Besaran dan Tren Pekerja Sirkuler

Gambar 48 menunjukkan tren pekerja sirkuler berdasarkan hasil Sakernas periode tahun 2016 sampai 2025. Berdasarkan gambar tersebut, tren pekerja sirkuler mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir sejak tahun 2022. Tahun 2022 menjadi titik terendah, baik jumlah maupun persentase pekerja sirkuler. Peningkatan pekerja sirkuler paling besar juga terjadi dari tahun 2022 ke 2023. Terdapat penambahan sekitar satu juta pekerja sirkuler di tahun 2023 menjadi 3,2 juta pekerja atau sebesar 2,3 persen. Jika dilihat pada ulasan sebelumnya, pada tahun tersebut juga terjadi penurunan pekerja komuter yang mengindikasikan adanya dinamika mobilitas tenaga kerja di Indonesia.



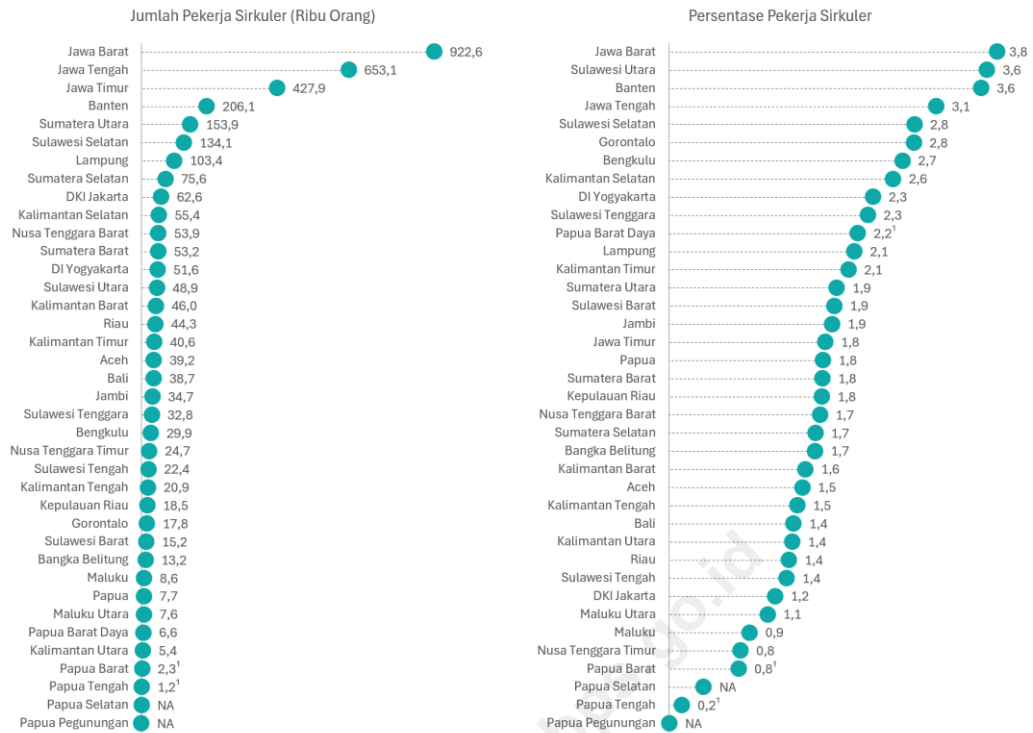
Gambar 48 Jumlah dan Persentase Pekerja Sirkuler, 2016–2025

Hasil Sakernas 2025 menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir sejak 2016, persentase pekerja sirkuler tercatat paling besar pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 2,5 persen. Pekerja sirkuler mengalami penurunan 0,1 persen poin pada tahun 2025 menjadi 2,4 persen dari seluruh pekerja. Persentase tersebut setara dengan 3,5 juta pekerja sirkuler di Indonesia. Secara jumlah, besar penurunan yang terjadi dari tahun 2024 ke 2025 kurang dari 100 ribu pekerja.

4.5.2 Distribusi Wilayah Pekerja Sirkuler

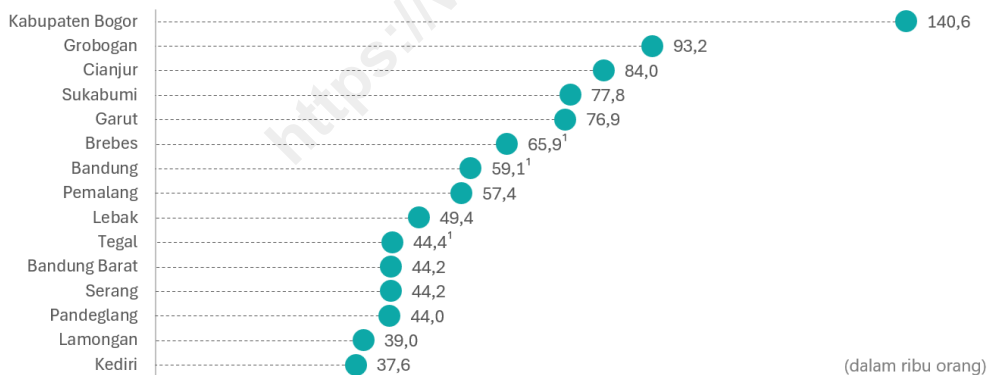
Dilihat berdasarkan sebaran wilayah tempat tinggal pekerja sirkuler di tahun 2025, pekerja sirkuler di Indonesia paling banyak tinggal di provinsi Jawa Barat dengan persentase sebesar 3,8 persen. Secara geografis, Jawa Barat memiliki kedekatan wilayah dengan DKI Jakarta yang menjadi pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Jawa Barat juga memiliki kawasan metropolitan Cekungan Bandung yang menempatkan Kota Bandung sebagai inti, salah satu mesin ekonomi di Indonesia. Kedua area tersebut dapat menjadi faktor penarik untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa harus berpindah tempat tinggal melalui sirkuler bagi pekerja di Jawa Barat.

Lima besar provinsi dengan persentase pekerja sirkuler tertinggi lainnya juga masih berada di Pulau Jawa yaitu Banten dan Jawa Tengah secara berturut-turut sebesar 3,6 persen dan 3,1 persen. Dua provinsi lainnya berasal dari Pulau Sulawesi yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Persentase pekerja sirkuler di Sulawesi Utara besarnya sama dengan Banten yaitu 3,6 persen. Sementara itu, persentase pekerja sirkuler di Sulawesi Selatan adalah 2,8 persen. Secara umum, mirip dengan distribusi komuter, provinsi-provinsi dengan distribusi pekerja sirkuler tinggi adalah provinsi yang memiliki pusat ekonomi yang besar. Banten berdekatan dengan DKI Jakarta, sementara Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan masing-masing memiliki wilayah metropolitan. Hal ini menunjukkan bahwa sirkuler menjadi bentuk alternatif mobilitas dengan motif ekonomi yang terjadi di Indonesia.



Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 49 Jumlah dan Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi, 2025

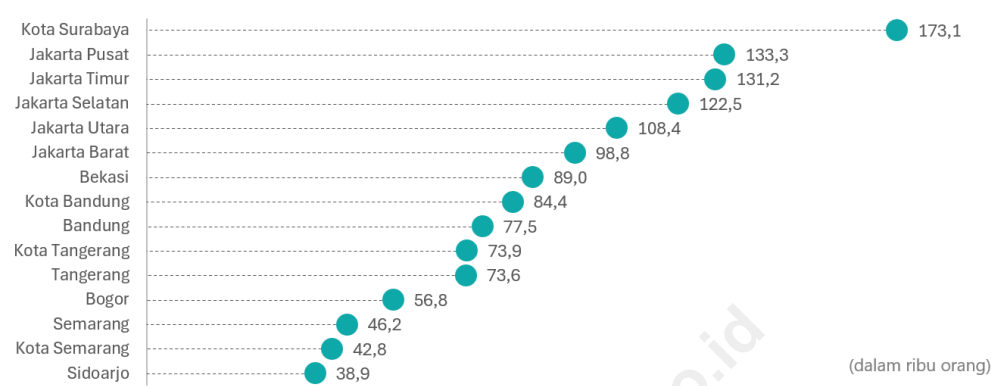


Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 50 Pekerja Menurut Status Pekerja Sirkuler di 15 Kabupaten/Kota Tempat Tinggal dengan Pekerja Sirkuler Terbesar, 2025

Apabila dilihat pada level yang lebih kecil yaitu tingkat kabupaten/kota, hasil Sakernas 2025 menunjukkan bahwa lima belas kabupaten/kota tempat tinggal pekerja sirkuler memiliki kesamaan karakteristik jarak. Secara umum, kabupaten/kota tersebut memiliki jarak yang cenderung jauh hingga menengah menuju kabupaten/kota yang

menjadi pusat ekonomi. Selain itu, adanya jalur transportasi ke pusat ekonomi yang lebih besar dapat menyumbang pada keputusan seorang pekerja menjadi sirkuler. Kabupaten Bogor menjadi tempat tinggal pekerja sirkuler yang paling besar secara jumlah, sementara Grobogan menjadi tempat tinggal pekerja sirkuler dengan persentase tertinggi.



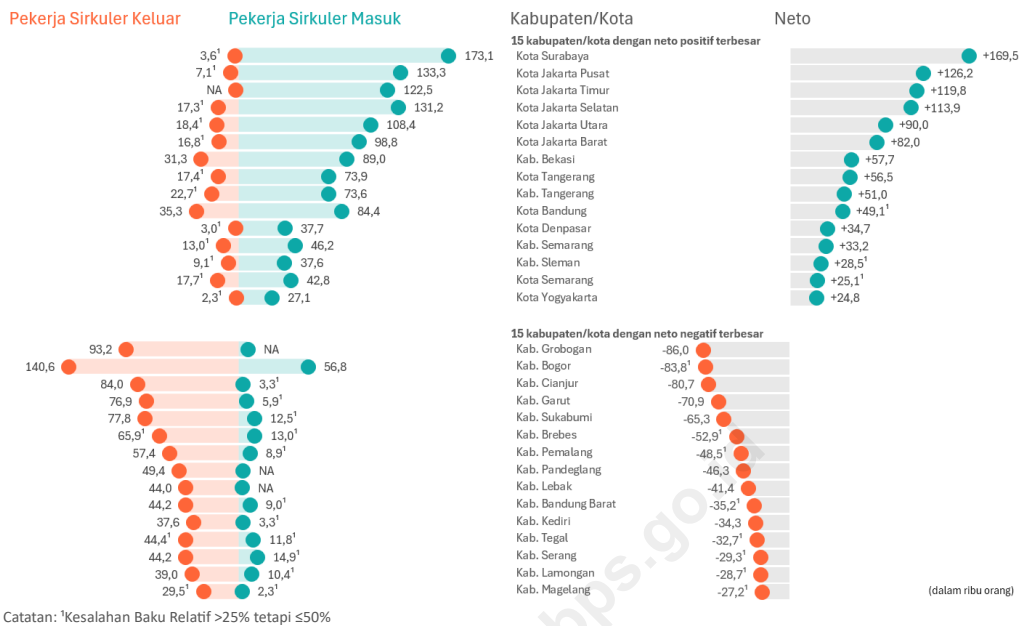
Gambar 51 Pekerja Sirkuler di 15 Kabupaten/Kota Tujuan Bekerja Terbesar, 2025

Serupa dengan komuter, lima belas kabupaten/kota tujuan utama pekerja sirkuler merupakan wilayah-wilayah perkotaan atau pusat ekonomi. Kabupaten/kota di wilayah metropolitan Jabodetabekpunjur masih menjadi magnet bagi pekerja sirkuler. Jakarta Pusat menjadi kota tujuan bekerja sirkuler dengan persentase tertinggi yaitu sebesar 25,9 persen. Angka tersebut dapat diartikan bahwa terdapat 1 pekerja sirkuler yang masuk ke Jakarta Pusat dari 4 pekerja yang tinggal di Jakarta Pusat. Angka tersebut setara dengan 133,3 ribu pekerja sirkuler yang masuk ke Jakarta Pusat. Sementara secara jumlah, Kota Surabaya di Jawa Timur menjadi tujuan bekerja terbanyak dengan 173,1 ribu pekerja sirkuler.

4.5.3 Arus dan Pola Pergerakan Pekerja Sirkuler

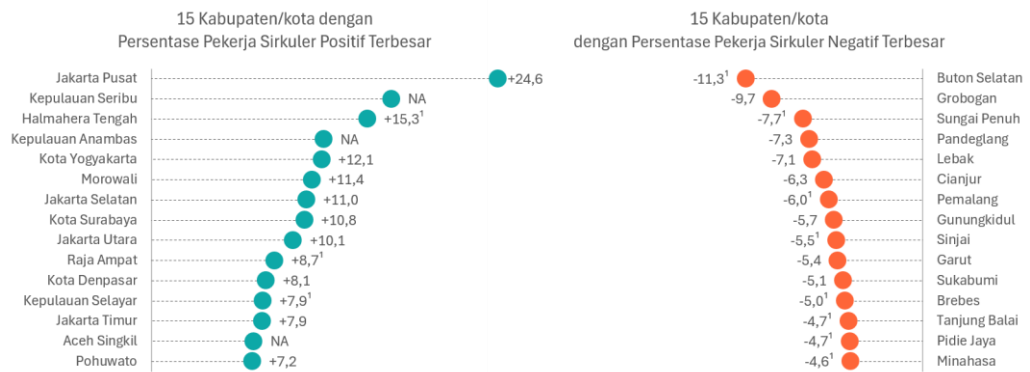
Gambar 52 menunjukkan arus dan pola pergerakan pekerja sirkuler hasil Sakernas 2025 pada level kabupaten/kota dengan nilai neto terbesar secara kumulatif. Kabupaten/kota di Pulau Jawa masih mendominasi wilayah tujuan maupun asal pekerja sirkuler secara jumlah. Kota Surabaya mengalami penambahan pekerja di siang hari dengan adanya pekerja sirkuler sebanyak 169,5 ribu pekerja atau setara dengan 10,8 persen. Kabupaten/kota di wilayah metropolitan Jabodetabekpunjur yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kabupaten Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Tangerang juga menjadi wilayah dengan penambahan pekerja terbesar melalui pekerja sirkuler pada siang hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi spasial wilayah metropolitan Jabodetabekpunjur terus meluas. Daerah tujuan lain dengan neto

pekerja sirkuler positif paling besar adalah Kota Bandung, Kota Denpasar, Kota dan Kabupaten Semarang, Sleman, dan Kota Yogyakarta.



Gambar 52 Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Sirkuler Neto Positif Terbesar dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Sirkuler Neto Negatif Terbesar pada Pekerja, 2025

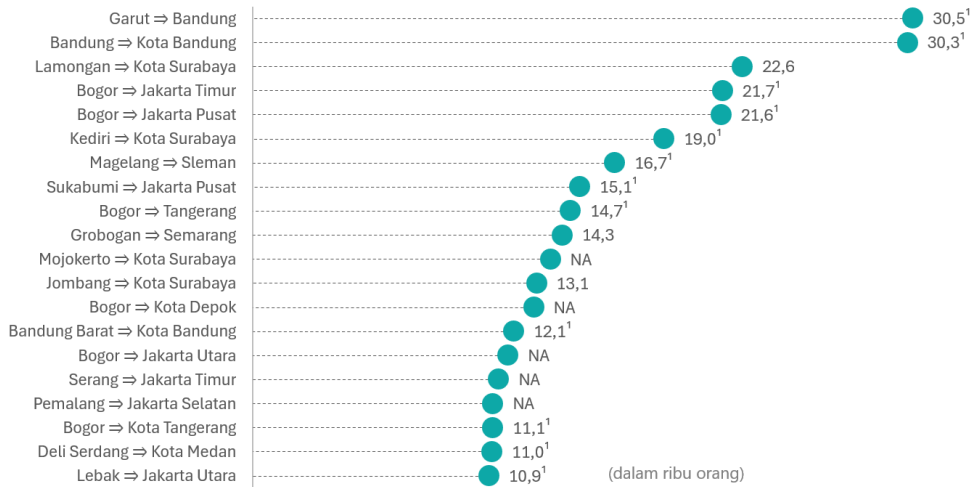
Sementara itu, kabupaten/kota dengan nilai negatif neto terbesar secara jumlah adalah Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat. Jumlah pekerja sirkuler di Kabupaten Bogor berkurang sekitar 83 ribu pekerja karena lebih banyak pekerja bersirkuler ke luar Kabupaten Bogor dibanding pekerja sirkuler yang masuk. Kabupaten/kota lain dengan neto negatif yang berasal dari pekerja sirkuler secara umum terletak di Pulau Jawa yaitu berada pada wilayah lain di Jawa Tengah (Brebes, Pemalang, Tegal, dan Magelang), Jawa Barat (Cianjur, Garut, Sukabumi, dan Bandung Barat), Banten (Pandeglang, Lebak, dan Serang), dan Jawa Timur (Kediri dan Lamongan).



Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 53 Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Persentase Pekerja Sirkuler Neto Positif Terbesar dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Persentase Pekerja Sirkuler Neto Negatif Terbesar pada Pekerja, 2025

Untuk melihat pola sirkuler dengan lebih terstandar, dilakukan analisis persentase pekerja sirkuler masuk, keluar, dan neto. Jika secara jumlah neto positif maupun negatif terbesar pekerja sirkuler pada 15 kabupaten/kota di Indonesia di dominasi oleh Pulau Jawa yang memang memiliki jumlah penduduk yang besar, maka kabupaten/kota positif dan negatif secara persentase lebih tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jakarta Pusat memiliki persentase neto positif terbesar untuk pekerja sirkuler sebesar 24,6 persen. Hugo (1982) menyebutkan bahwa daerah tujuan sirkuler merupakan wilayah dengan permintaan tenaga kerja musiman seperti pada sektor perdagangan. Sementara itu, Kabupaten Cianjur di Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan persentase neto negatif terbesar untuk pekerja sirkuler yaitu -6,3 persen. Hal itu berarti pada tahun 2025, terdapat pengurangan pekerja di Cianjur hasil pekerja yang melakukan sirkuler ke luar Cianjur sebanyak 6 orang berdasarkan hasil Sakernas 2025.



Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

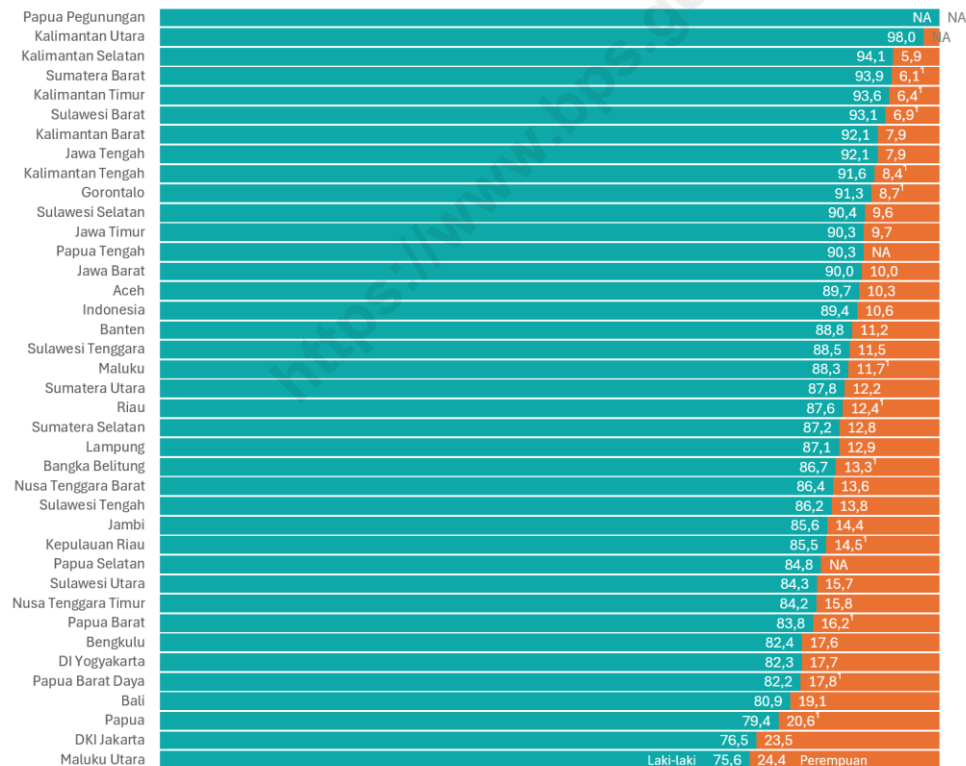
Gambar 54 Dua Puluh Besar Arus Pekerja Sirkuler Antarkabupaten/kota, 2025

Analisis arus pekerja sirkuler dilakukan untuk memperkaya informasi dinamika mobilitas sirkuler pada pekerja di Indonesia. Arus terbesar pekerja sirkuler terjadi dari Garut menuju Bandung sebanyak 30,5 ribu pekerja. Arus-arus terbesar banyak terjadi pada wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Barat menuju pusat-pusat ekonomi yang identik menyerap pekerja. Pekerja sirkuler yang tinggal di Bogor memiliki berbagai tujuan tempat kerja dengan arus yang besar yaitu ke Jakarta Timur (21,7 ribu pekerja), Jakarta Pusat (21,6 ribu pekerja), Tangerang (14,7 ribu pekerja), dan Kota Tangerang (11,1 ribu pekerja). Sementara arus-arus ke Kota Surabaya juga banyak muncul sebagai arus yang besar untuk wilayah Jawa Timur yang berasal dari Lamongan (22,6 ribu pekerja), Kediri (19 ribu pekerja), dan Jombang (13,1 ribu pekerja).

Secara umum dari analisis wilayah yang telah dilakukan, pekerja sirkuler berasal dari wilayah-wilayah dengan jarak mobilitas menengah atau yang tidak praktis ditempuh dengan komuter, namun belum mendorong perpindahan penduduk yang permanen atau migrasi. Sementara itu, kebanyakan wilayah tujuan utama pekerja sirkuler adalah pusat-pusat ekonomi baik metropolitan maupun wilayah lain yang dapat menyediakan pekerjaan musiman. Adanya jalur atau kesediaan transportasi, kompensasi dengan keuntungan finansial yang didapatkan, maupun keterikatan dengan daerah asal dapat menjadi alasan seseorang memutuskan menjadi sirkuler (Hugo, 1982).

4.5.4 Karakteristik Demografi dan Ketenagakerjaan Pekerja Sirkuler

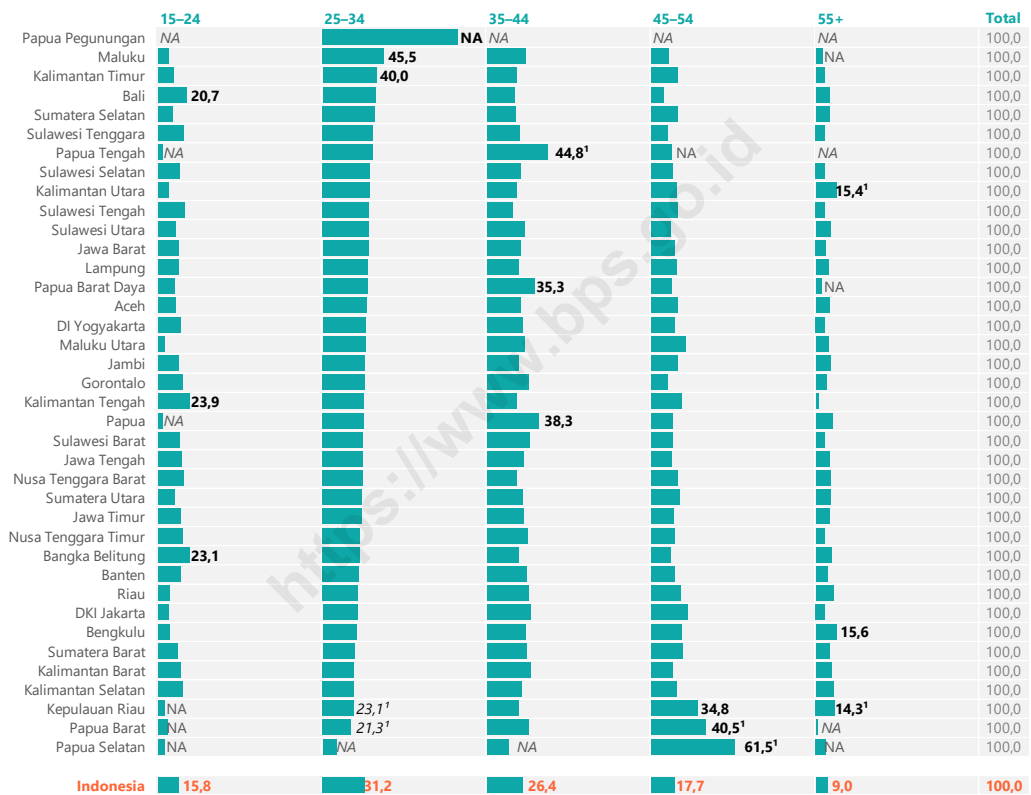
Selain memahami pola dan arus mobilitas pekerja sirkuler, analisis karakteristik pekerja dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh untuk memahami mobilitas sirkuler pada pekerja. Dari sebanyak 3,5 juta pekerja sirkuler, pekerja sirkuler didominasi oleh pekerja laki-laki dengan persentase sebesar 89,4 persen. Angka tersebut dapat diartikan bahwa terdapat sekitar 9 pekerja sirkuler berjenis kelamin laki-laki dari 10 pekerja sirkuler. Fenomena tersebut terjadi pada mobilitas pekerja sirkuler di seluruh provinsi. Pekerja sirkuler perempuan paling banyak tinggal di Provinsi Maluku Utara dan DKI Jakarta dengan persentase berturut-turut sebesar 24,4 persen dan 23,5 persen. Tarigan (2004) menyebutkan bahwa salah satu alasan laki-laki lebih banyak melakukan mobilitas sirkuler adalah bahwa secara umum laki-laki merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, termasuk dengan bekerja ke luar daerah tempat tinggal, meskipun perlu meninggalkan keluarganya untuk sementara.



Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 55 Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025

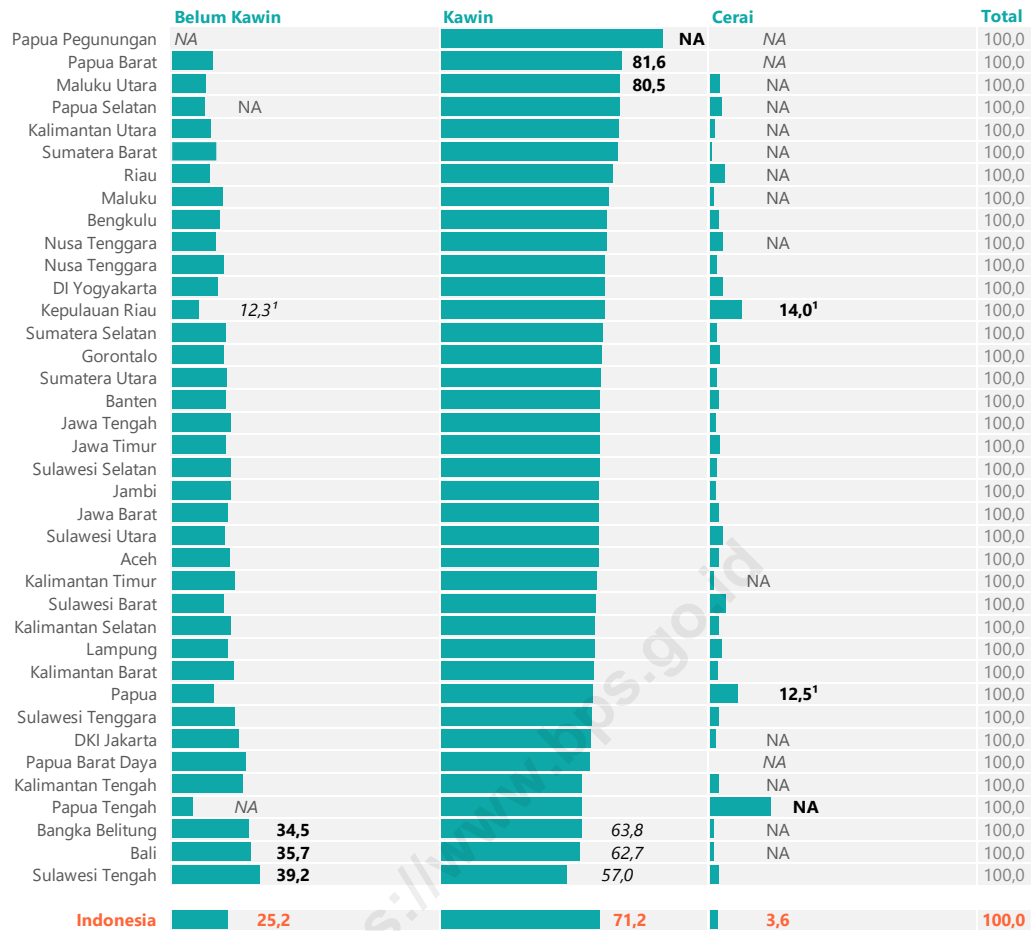
Pekerja sirkuler menurut kelompok umur ditampilkan melalui Gambar 56. Seperti pola mobilitas yang berbentuk kurva U terbalik, pekerja sirkuler paling banyak berada pada kelompok umur produktif muda 25–34 tahun yaitu sebesar 31,2 persen, dan persentase tersebut menurun seiring bertambahnya umur. Lebih dari setengah pekerja sirkuler (57,6 persen) berada di kelompok umur 25–44 tahun. Pekerja sirkuler di Maluku yang berada pada umur 25–34 tahun hampir mencapai setengahnya yaitu 45,5 persen. Pekerja sirkuler pada kelompok umur muda paling banyak berada di Kalimantan Tengah dengan persentase sebesar 23,9 persen. Sebaliknya, pekerja sirkuler pada kelompok umur tua 55 tahun ke atas dengan persentase tertinggi berada di provinsi Kalimantan Utara yaitu 15,4 persen.



Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 56 Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

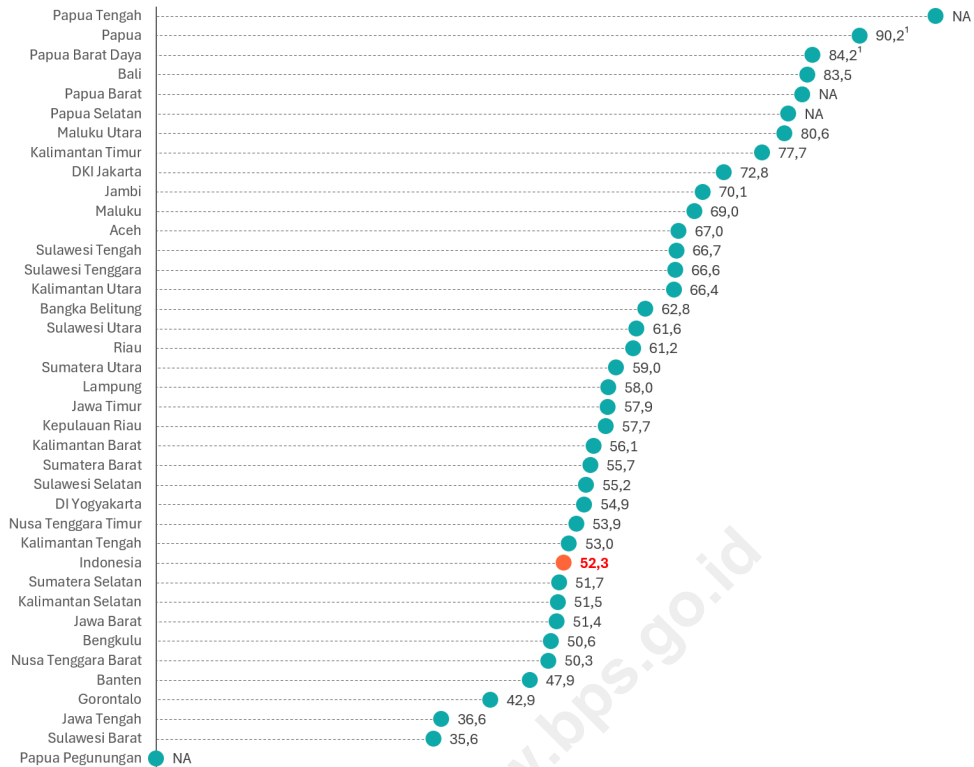
Kemudian, hasil Sakernas 2025 juga dapat menyajikan pekerja sirkuler menurut status perkawinan. Mayoritas pekerja sirkuler berstatus kawin dengan persentase sebesar 71,2 persen. Persentase pekerja sirkuler yang berstatus belum dan cerai secara berturut-turut adalah 25,2 persen dan 3,6 persen.



Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 57 Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025

Pada aspek pendidikan, sebanyak 52,3 persen pekerja sirkuler memiliki tingkat pendidikan akhir SMA ke atas. Dalam hal ini, lebih dari setengah pekerja sirkuler telah menamatkan pendidikan SMA atau diploma atau universitas. Selebihnya, sebanyak 47,7 persen pekerja sirkuler merupakan tamatan di bawah SMA. Terdapat empat provinsi yang memiliki perbedaan dengan pola nasional yaitu lebih banyak pekerja sirkuler yang bertempat tinggal pada provinsi tersebut memiliki tingkat pendidikan di bawah SMA. Provinsi-provinsi tersebut adalah Sulawesi Barat, Jawa Tengah, Gorontalo, dan Banten.



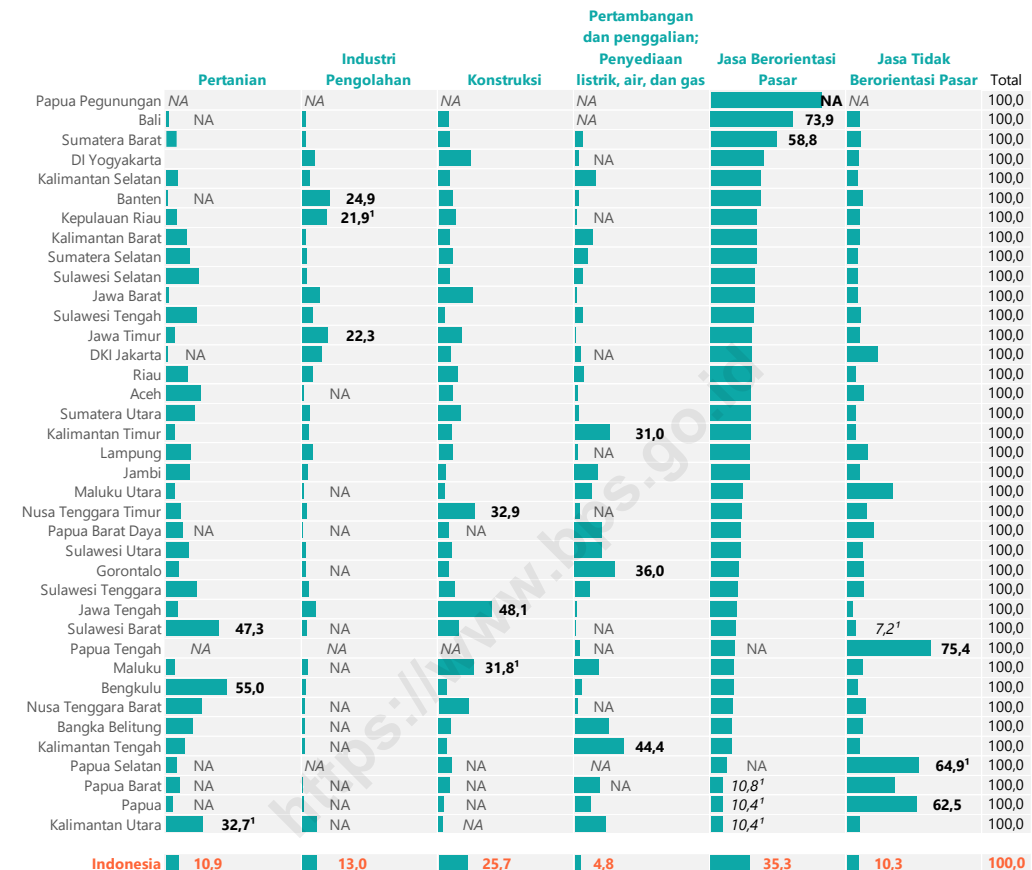
Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 58 Persentase Pekerja Sirkuler dengan Tingkat Pendidikan SMA ke Atas Menurut Provinsi, 2025

Fenomena pekerja sirkuler pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari motif ekonomi sebagai faktor yang mendorong mobilitas penduduk. Hugo (1982) menjelaskan bahwa mobilitas sirkuler sebagai strategi adaptasi dalam merespons ketimpangan spasial kesempatan kerja antara daerah asal dan daerah tujuan. Pekerja tidak selalu memilih migrasi, tetapi melakukan pergerakan musiman rutin untuk memperoleh akses terhadap pekerjaan, pendapatan, dan peluang ekonomi yang lebih baik. Pola ini memungkinkan individu tetap mempertahankan keterikatan sosial dan ekonomi di daerah asal, sambil bekerja di wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi lebih berkembang.

Gambar 59 menunjukkan persentase pekerja sirkuler menurut lapangan usaha utama hasil Sakernas 2025. Pekerja sirkuler paling banyak bekerja di sektor jasa berorientasi pasar dengan persentase sebesar 35,3 persen. Sektor lain yang menyerap tenaga kerja sirkuler terbesar adalah konstruksi yaitu 1 dari 4 pekerja sirkuler bekerja di sektor ini atau sebesar 25,7 persen. Kedua sektor ini umumnya memiliki kebutuhan tenaga kerja yang tinggi, fleksibel, dan musiman sehingga tidak selalu mensyaratkan

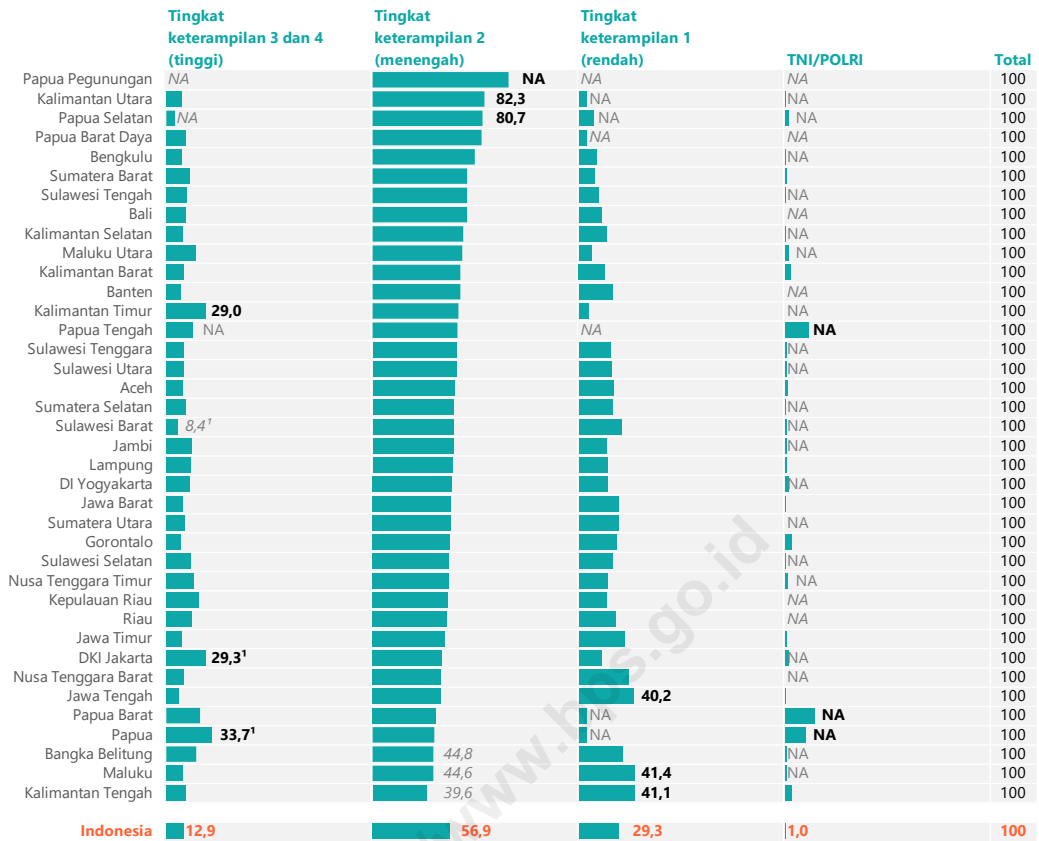
perpindahan tempat tinggal secara permanen. Sektor lain yaitu industri pengolahan, pertanian, jasa tidak berorientasi pasar, pertambangan dan penggalian; penyediaan listrik, air, dan gas dengan masing-masing persentase berturut-turut sebesar 13,0 persen, 10,9 persen, 10,3 persen, dan 4,8 persen.



Catatan:
Nilai yang tercetak **tebal** adalah 3 tertinggi, nilai yang tercetak *miring* adalah 3 terendah.
¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 59 Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2025

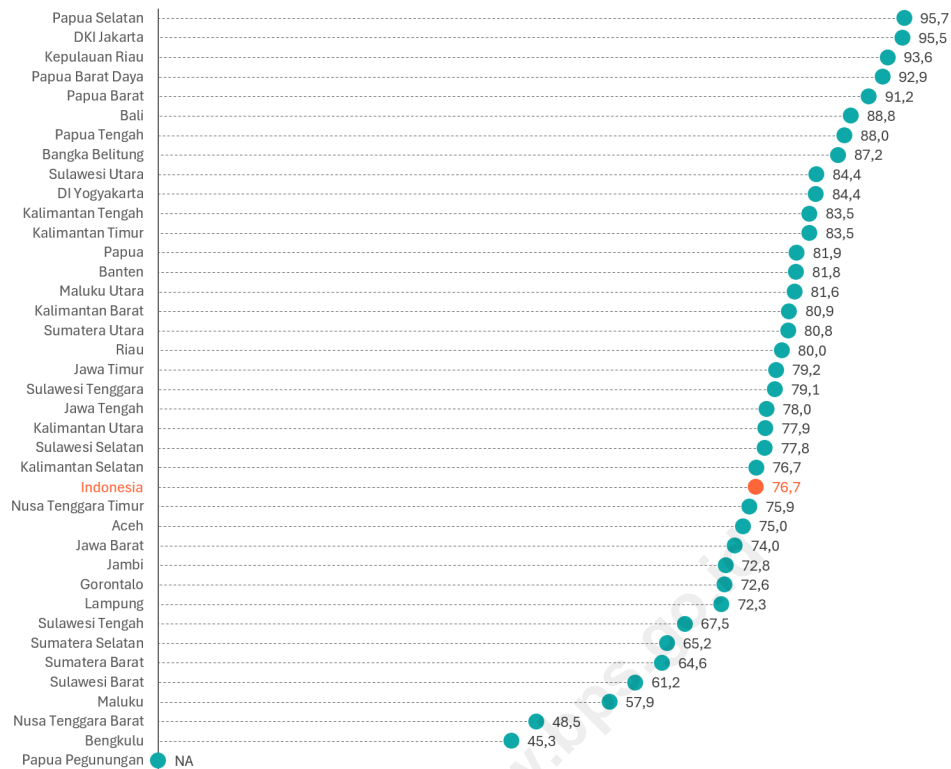
Provinsi Bali memiliki pekerja sirkuler pada lapangan usaha jasa berorientasi pasar tertinggi mencapai 73,9 persen. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan yang kuat pekerja di Bali pada sektor-sektor pekerjaan musiman seperti ekonomi pariwisata. Sumatera Barat berada pada urutan kedua dengan persentase sebesar 58,8 persen. Sementara itu provinsi-provinsi dengan persentase pekerja sirkuler tinggi banyak terserap di lapangan usaha jasa berorientasi pasar, Jawa Tengah memiliki pola yang berbeda dimana lapangan usaha utama yang menjadi mayoritas pekerja musiman disana adalah konstruksi dengan persentase sebesar 48,1 persen.



Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 60 Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2025

Secara umum, pekerjaan-pekerjaan dengan kebutuhan skill menengah ke rendah menjadi jenis pekerjaan yang menyerap pekerja sirkuler dibanding pekerjaan dengan kebutuhan skill yang tinggi. Pekerjaan dengan tingkat keterampilan menengah sampai kasar menjadi jenis pekerjaan yang mendominasi pekerja sirkuler dengan persentase sebesar 86,1 persen. Lebih lanjut, pekerja sirkuler yang bekerja pada pekerjaan dengan tingkat keterampilan rendah terdapat sebesar 29,3 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat sekitar 3 dari 10 pekerja sirkuler dengan jenis pekerjaan utama adalah pekerja kasar. Pola nasional yang telah diuraikan terjadi juga terjadi pada level provinsi. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan persentase pekerja sirkuler yang tinggi memiliki persentase pekerja sirkuler dengan pekerjaan tingkat keterampilan rendah mencapai 40,2 persen. Hal ini sejalan dengan ulasan sebelumnya dimana pekerja sirkuler di Jawa Tengah mayoritas bekerja pada lapangan usaha konstruksi.



Gambar 61 Persentase Pekerja Sirkuler dengan Status Formal pada Pekerjaan Utama, 2025

Berdasarkan status formalitas pekerjaan utama, sebagian besar pekerja sirkuler di Indonesia bekerja pada sektor formal dengan persentase sebesar 76,7 persen, sedangkan sekitar 23,3 persen lainnya bekerja pada sektor informal. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekitar 3 dari 4 pekerja sirkuler di Indonesia telah terserap pada pekerjaan dengan status formal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mobilitas sirkuler tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan informal dan tradisional, tetapi juga telah menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja formal di berbagai wilayah. Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat megapolitan terbesar di Indonesia menyerap hingga 95,5 persen pekerja sirkuler di sektor formal. Sementara itu, Bengkulu menjadi satu-satunya provinsi dengan penyerapan pekerja sirkuler lebih banyak di sektor informal (54,7 persen).

4.6 Mobilitas Pekerjaan

Perpindahan pekerjaan oleh tenaga kerja seringkali terjadi karena beragam faktor, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, serta bersifat sukarela ataupun terpaksa. Dari sisi internal, daya tarik pendapatan yang lebih tinggi menjadi alasan

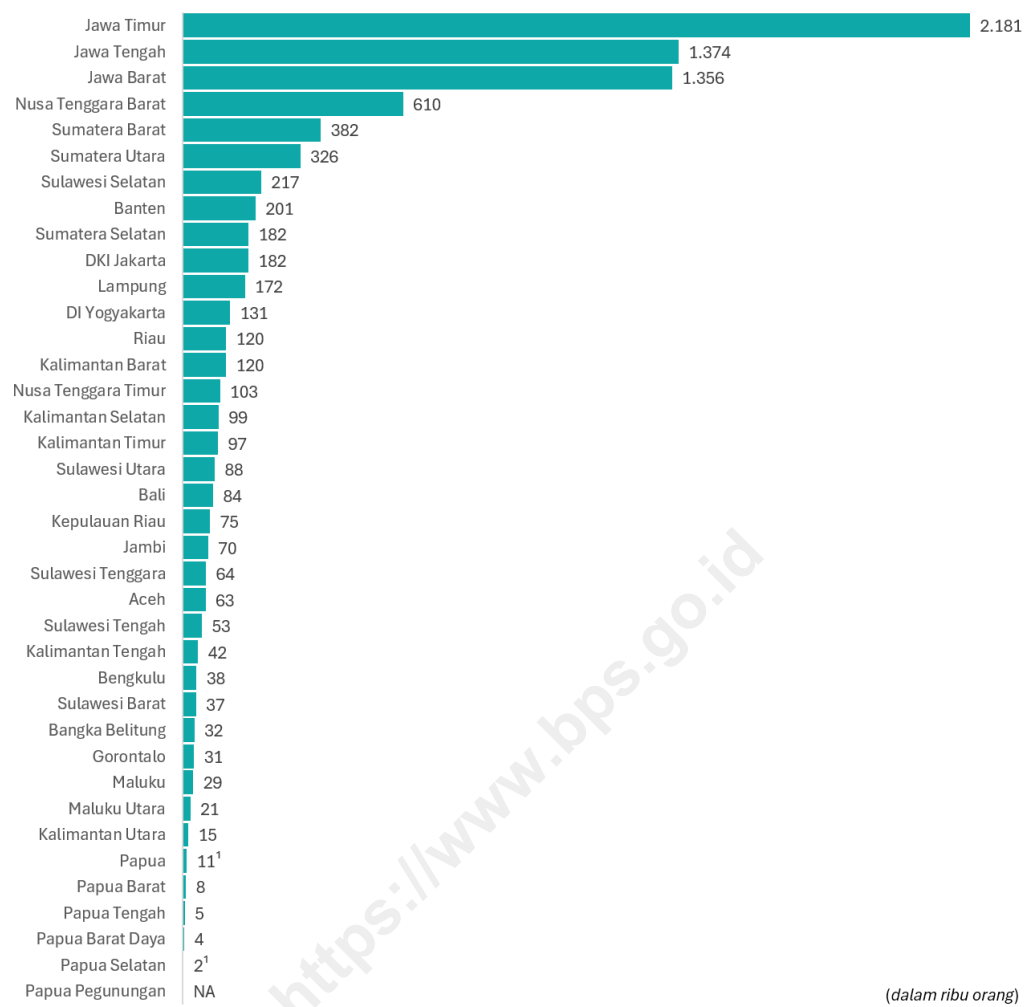
utama seseorang mencari pekerjaan baru. Faktor internal lain yang mendorong perpindahan meliputi ketidaksesuaian dengan lingkungan kerja sebelumnya, seperti masalah lokasi, relasi dengan rekan kerja, dan ketersediaan fasilitas. Di sisi eksternal, alasan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), kebangkrutan atau penutupan perusahaan, dan berakhirnya masa kontrak juga memaksa tenaga kerja untuk berganti pekerjaan.

4.6.1 Distribusi Wilayah Penduduk yang Pernah Berhenti Bekerja Setahun Terakhir

Hasil Sakernas 2025 menunjukkan 8,6 juta orang pernah berhenti bekerja dalam setahun terakhir (Agustus 2024–Agustus 2025). Sekitar 64,3 persennya atau 5,6 juta orang saat ini sudah kembali bekerja sementara itu 35,7 persennya atau 3,1 juta tidak sedang bekerja.

Distribusi penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah berhenti bekerja dalam setahun terakhir menunjukkan bahwa fenomena berhenti bekerja masih terkonsentrasi di provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk dan pasar kerja yang besar. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk yang pernah berhenti bekerja tertinggi, yaitu sekitar 2,18 juta orang (Gambar 62). Posisi selanjutnya ditempati oleh Jawa Tengah sebanyak 1,37 juta orang dan Jawa Barat sebanyak 1,36 juta orang.

Tingginya jumlah penduduk yang pernah berhenti bekerja di tiga provinsi tersebut menunjukkan kuatnya pengaruh struktur demografis dan besarnya aktivitas ketenagakerjaan di Pulau Jawa. Ketiga provinsi ini secara total mencakup sekitar 4,91 juta orang, atau lebih dari separuh total penduduk yang pernah berhenti bekerja dalam setahun terakhir. Di luar Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat menempati posisi tertinggi dengan jumlah sekitar 610 ribu orang. Provinsi lain yang juga mencatat jumlah relatif besar adalah Sumatera Barat sebanyak 382 ribu orang dan Sumatera Utara sebanyak 326 ribu orang.

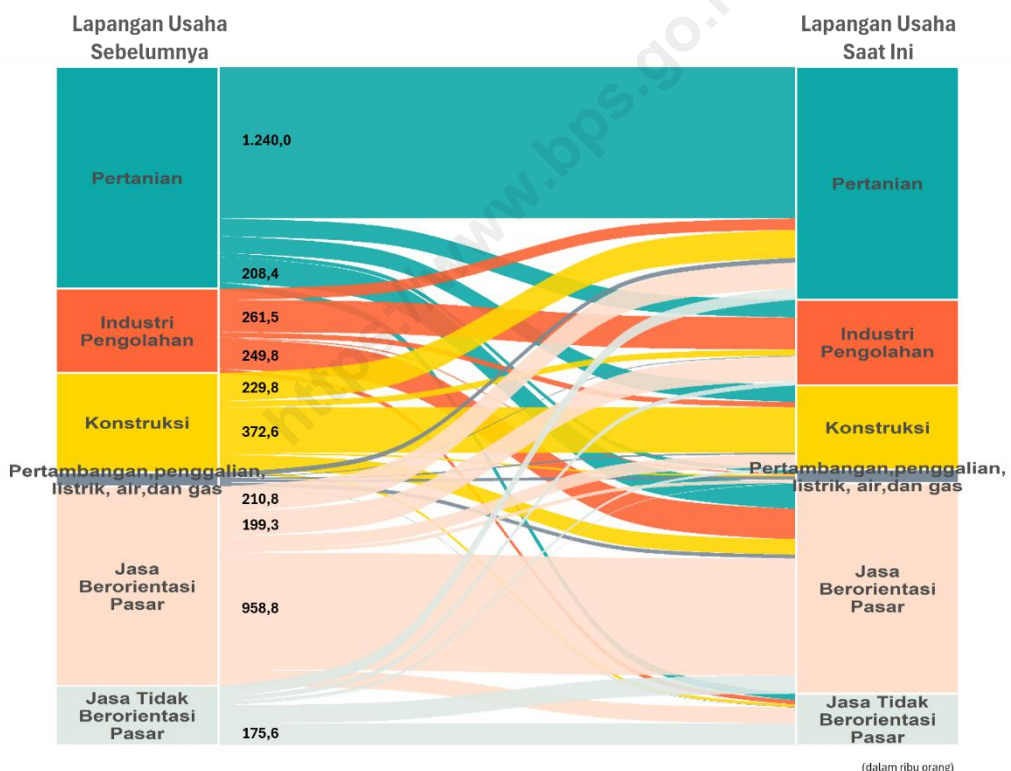


Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 62 Penduduk yang Pernah Berhenti Bekerja dari Pekerjaan Dalam Setahun Terakhir (Agustus 2024–Agustus 2025) Menurut Provinsi, 2025

4.6.2 Mobilitas Pekerjaan

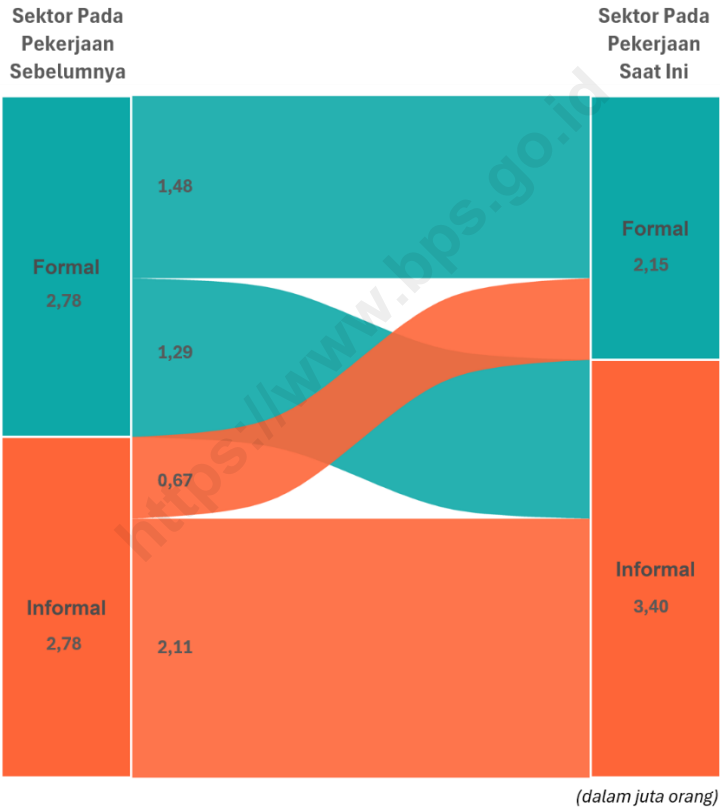
Hasil Sakernas 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar dari 5,6 juta penduduk yang sudah kembali bekerja cenderung tetap bekerja pada lapangan usaha yang sama dengan pekerjaan sebelumnya (Gambar 63). Hal ini terlihat dari besarnya persentase pada sektor pertanian yang tetap bekerja di pertanian sebesar 1,24 juta orang (68,3 persen), jasa berorientasi pasar yang tetap bekerja di jasa berorientasi pasar sebesar 959 ribu orang (58,7 persen), serta konstruksi yang tetap bekerja di konstruksi sebesar 373 ribu orang (45,8 persen). Pola serupa juga terlihat pada industri pengolahan, di mana 262 ribu orang (37,9 persen) penduduk yang sebelumnya bekerja di sektor tersebut kembali bekerja pada industri pengolahan. Sementara itu, pada kelompok jasa tidak berorientasi pasar, sebanyak 483 ribu orang (36,3 persen) tetap bekerja pada sektor yang sama, dengan proporsi yang berpindah ke jasa berorientasi pasar cukup besar, yaitu 176 ribu orang (30,9 persen).



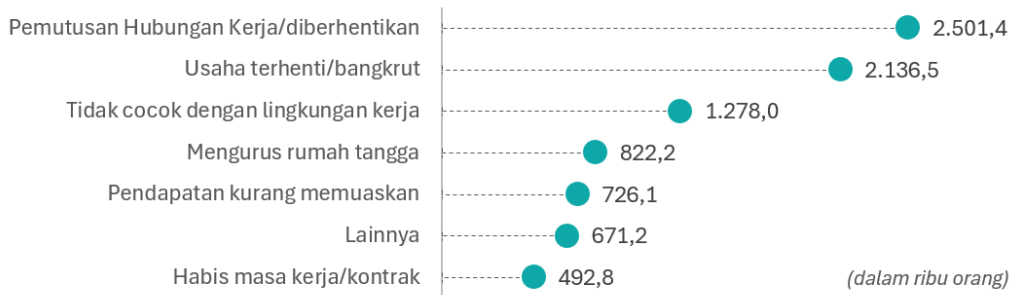
Gambar 63 Perpindahan Lapangan Usaha dari Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Berhenti Bekerja dalam Setahun Terakhir, 2025

Selanjutnya, hasil Sakernas 2025 menunjukkan bahwa penduduk yang pernah berhenti bekerja setahun terakhir cenderung kembali bekerja pada status pekerjaan

yang sama dengan pekerjaan sebelumnya (Gambar 64). Dari penduduk yang sebelumnya bekerja pada sektor formal, sebanyak 1,48 juta orang (53,4 persen) tetap bekerja pada sektor formal, sedangkan 1,29 juta orang (46,6 persen) berpindah ke sektor informal. Sementara itu, dari penduduk yang sebelumnya bekerja pada sektor informal, sebagian besar tetap berada pada sektor informal, yaitu 2,11 juta orang (76,0 persen), sedangkan 665 ribu orang (24,0 persen) berpindah ke sektor formal. Pola ini menunjukkan bahwa pekerja informal memiliki kecenderungan yang lebih kuat untuk tetap berada pada status pekerjaan yang sama dibandingkan dengan pekerja formal. Secara keseluruhan, penduduk yang pernah berhenti bekerja setahun terakhir lebih banyak terserap pada sektor informal, yaitu sebesar 3,4 juta orang (61,3 persen), dibandingkan sektor formal sebesar 2,15 juta orang (38,7 persen).



Gambar 64 Perpindahan Status Pekerjaan dari Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Berhenti Pekerjaan dalam Setahun Terakhir, 2025



Gambar 65 Penduduk Bekerja yang Pernah Berhenti Bekerja dari Pekerjaan Dalam Setahun Terakhir (Agustus 2024–Agustus 2025) Menurut Alasan Utama Berhenti Bekerja, 2025

Selanjutnya, hasil Sakernas 2025 menunjukkan bahwa penduduk yang pernah berhenti bekerja dalam setahun terakhir memiliki alasan utama yang beragam untuk berhenti bekerja. Alasan berhenti bekerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan kondisi pasar kerja maupun karakteristik individu, seperti masa kerja atau kontrak, keinginan usaha, kondisi keluarga, pendidikan, kesehatan, dan alasan pribadi lainnya.

Apabila dilihat menurut komposisinya, alasan berhenti bekerja yang paling dominan menunjukkan faktor utama yang mendorong penduduk keluar dari pekerjaan sebelumnya. Tingginya proporsi penduduk yang berhenti bekerja karena berakhirnya masa kerja atau kontrak, misalnya, dapat mencerminkan masih kuatnya pola kerja tidak tetap atau hubungan kerja jangka pendek. Sementara itu, alasan berupa PHK atau usaha berhenti menunjukkan adanya tekanan pada sisi permintaan tenaga kerja maupun pada keberlanjutan kegiatan ekonomi. Di sisi lain, alasan seperti mengurus rumah tangga, sekolah, kesehatan, atau alasan pribadi lainnya menunjukkan bahwa keputusan berhenti bekerja juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan kondisi individu.

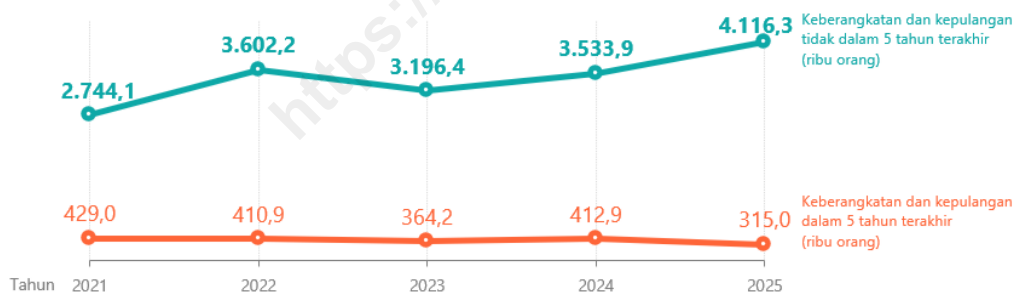
4.7 Penduduk Pernah Bekerja di Luar Negeri

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, individu membutuhkan sumber penghasilan yang memadai guna mencapai taraf hidup yang layak dan sejahtera. Seiring dinamika globalisasi dan meningkatnya kompleksitas kebutuhan hidup di Indonesia, sebagian generasi muda terdorong untuk mencari peluang penghidupan di luar negeri. Pekerjaan di negara tujuan migrasi dinilai mampu memberikan imbal hasil ekonomi yang lebih tinggi atau setara dengan ekspektasi mereka.

Migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri dapat menjadi solusi dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup individu, namun hal ini memiliki sejumlah implikasi yang signifikan bagi pembangunan nasional. Di satu sisi, keberangkatan pekerja ke luar negeri berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran di dalam negeri serta peningkatan penerimaan devisa negara. Namun di sisi lain, mobilitas tenaga kerja lintas negara ini juga diiringi oleh berbagai risiko dan tantangan yang kompleks, seperti potensi kekerasan, pelanggaran hak asasi, permasalahan keimigrasian, serta tindak pidana perdagangan orang dan pemerasan. Widodo dan Belgradoputra (2019) menyampaikan bahwa risiko-risiko ini semakin meningkat apabila pekerja migran tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik pada tahap pra-keberangkatan, selama masa kerja, maupun saat proses kepulangan ke Indonesia.

4.7.1 Besaran dan Tren Penduduk Pernah Bekerja di Luar Negeri

Hasil Sakernas 2021–2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang pernah bekerja di luar negeri mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Secara total, jumlah penduduk yang pernah bekerja ke luar negeri meningkat dari 2,7 juta orang pada 2021 menjadi 4,1 juta orang pada 2025. Meskipun sempat menurun pada 2023, jumlah tersebut kembali meningkat pada 2024 dan mencapai puncaknya pada 2025. Apabila dilihat berdasarkan waktu keberangkatan, penduduk yang pernah berangkat bekerja ke luar negeri dalam 5 tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Jumlahnya turun dari 429 ribu orang pada 2021 menjadi 315 ribu orang pada 2025.



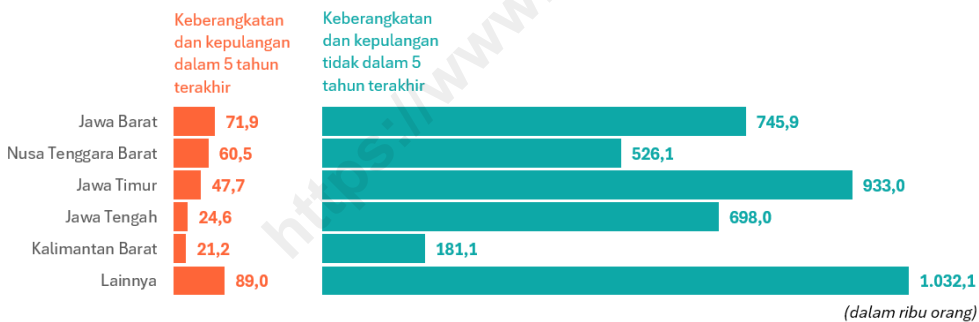
Gambar 66 Penduduk yang Pernah Bekerja ke Luar Negeri Menurut Periode Keberangkatan, 2021–2025

4.7.2 Distribusi Wilayah Penduduk Pernah Bekerja di Luar Negeri

Migrasi internasional menjadi pilihan menarik bagi banyak orang yang menghadapi keterbatasan lapangan kerja dan kenaikan biaya hidup di negara asal, dengan harapan memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Walaupun dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti politik, agama, pendidikan,

dan faktor psikologis, faktor ekonomi tetap menjadi pendorong utama bagi mayoritas individu yang memilih migrasi internasional demi untuk meningkatkan kualitas hidup (Kusmanto, 2014). Perspektif ini sejalan dengan temuan Marsel et al. (2022) yang menjelaskan bahwa migrasi internasional terjadi karena adanya *demand pull* dari negara tujuan, *supply push* dari negara asal, serta peran jaringan informasi. Ini berarti bahwa fenomena pekerja migran internasional muncul sebagai respons terhadap kebutuhan tenaga kerja di luar negeri, kurangnya peluang di negara asal, serta adanya informasi yang memotivasi perpindahan.

Bagi Indonesia, fenomena pekerja yang bekerja di luar negeri memiliki implikasi positif dan negatif. Marsel et al. (2022) mengindikasikan bahwa migrasi internasional dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi defisit tenaga kerja di dalam negeri. Menurut data Sakernas 2025, penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah bekerja di luar negeri dan melakukan keberangkatan maupun kepulangan dalam lima tahun terakhir paling banyak berasal dari Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur (Gambar 67). Ketiga provinsi tersebut masing-masing mencatat 71,9 ribu orang, 60,5 ribu orang, dan 47,7 ribu orang. Secara total, ketiga provinsi ini menyumbang sekitar 57,2 persen dari seluruh penduduk yang pernah bekerja di luar negeri dalam lima tahun terakhir.

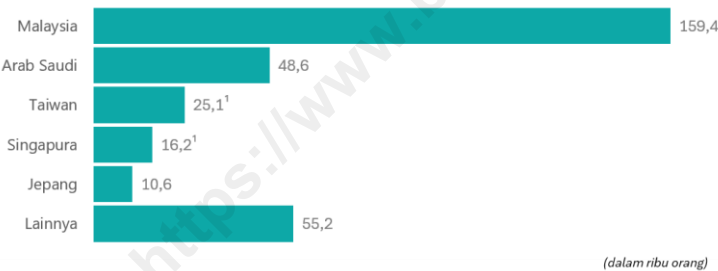


Gambar 67 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Masa Keberangkatan dan Kepulangan di Lima Provinsi dengan Penduduk yang Berangkat dan Pulang dalam 5 Tahun Terakhir Terbesar, 2025

Fenomena ini, menurut penelitian Muslihatinningsih et al. (2020), disebabkan oleh status Pulau Jawa sebagai wilayah yang lebih maju. Hal ini menarik banyak orang untuk mencari pekerjaan dan menetap di sana. Namun, konsekuensinya adalah meningkatnya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Pulau Jawa karena persaingan kerja yang ketat, yang mendorong banyak penduduknya untuk mencari solusi dengan bekerja di luar negeri. Di samping itu, menurut Tajuddin & Tukiran (2016), Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi fokus migrasi internasional karena kelompok usia muda di sana

melihat adanya peluang penghasilan yang lebih tinggi dengan bekerja di luar negeri dibandingkan jika mereka tetap bekerja di daerah asal.

Peningkatan migrasi pekerja migran memberikan keuntungan bagi individu yang bersangkutan, negara asal, dan negara tujuan (Haning et al., 2024). Migrasi ini juga memungkinkan para pekerja meningkatkan kesejahteraan keluarga di negara asal. Menurut data Sakernas 2025 seperti yang ditampilkan pada Gambar 68, Malaysia masih menjadi negara tujuan utama bagi penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang pernah bekerja di luar negeri dalam lima tahun terakhir. Sejalan dengan banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Malaysia, pada tahun 2022 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia menandatangani Nota Kesepahaman (NK) mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Sektor Domestik di Malaysia. Tujuan NK ini adalah untuk meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia sektor rumah tangga di Malaysia (IOM Indonesia, 2023). Namun, tingginya minat pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Malaysia justru diiringi oleh berbagai permasalahan. Permasalahan ini meliputi perekrutan yang tidak adil, pelanggaran hak-hak pekerja migran Indonesia, hingga kekerasan fisik di tempat kerja (Hamid, 2019).



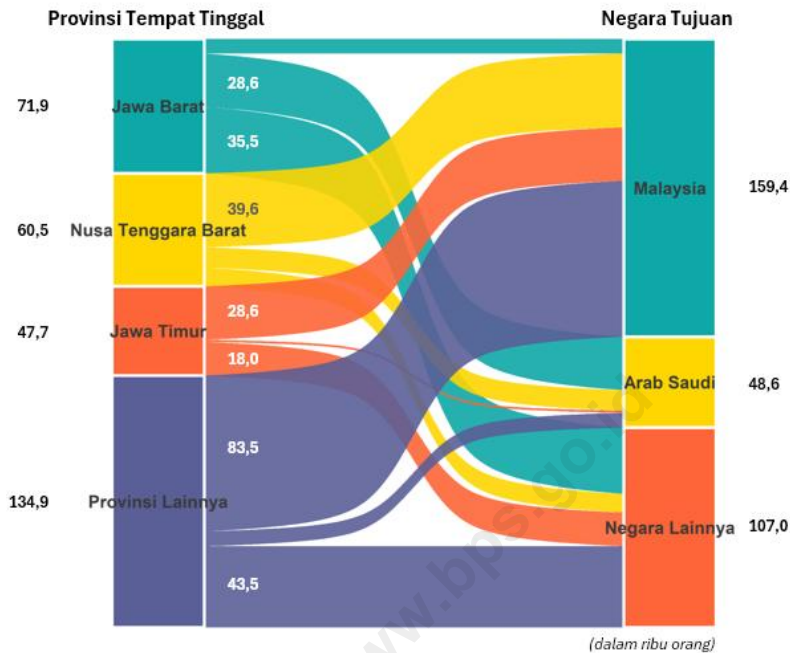
Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 68 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Berangkat untuk Bekerja ke Luar Negeri dalam 5 Tahun Terakhir Menurut Negara Tujuan, 2025

Dari total 315 ribu penduduk yang pernah bekerja di luar negeri, sebanyak 159,4 ribu orang atau 50,6 persen pernah bekerja di Malaysia. Selain Malaysia, Arab Saudi menjadi negara tujuan terbesar kedua, dengan jumlah 48,6 ribu orang (15,4 persen). Negara tujuan berikutnya adalah Taiwan sebanyak 25,1 ribu orang (8 persen), Singapura sebanyak 16,2 ribu orang (5,1 persen), dan Jepang sebanyak 10,6 ribu orang (3,4 persen).

Jumlah penduduk yang pernah bekerja di Malaysia, antara lain berasal dari Nusa Tenggara Barat sebanyak 39,6 ribu orang dan Jawa Timur sebanyak 28,6 ribu orang. Pola ini menunjukkan bahwa Malaysia masih menjadi salah satu negara tujuan utama bagi

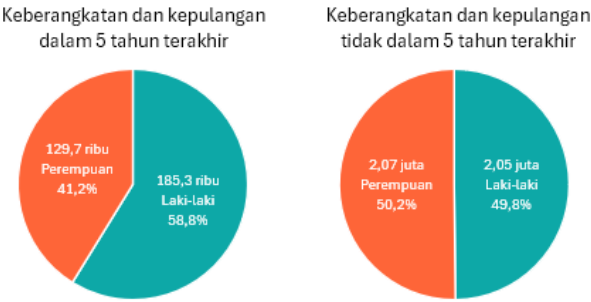
penduduk Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri. Selain Malaysia, negara tujuan lain yang cukup menonjol adalah Arab Saudi, Singapura, dan Taiwan. Arus ke Arab Saudi terutama berasal dari Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.



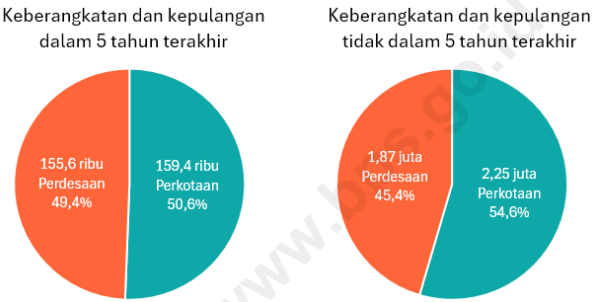
Gambar 69 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Pernah Bekerja di Luar Negeri dengan Keberangkatan dan Kepulangan dalam Lima Tahun Terakhir Menurut Provinsi Tempat Tinggal dan Negara Tujuan, 2025

4.7.3 Karakteristik Demografi dan Ketenagakerjaan Penduduk Pernah Bekerja di Luar Negeri

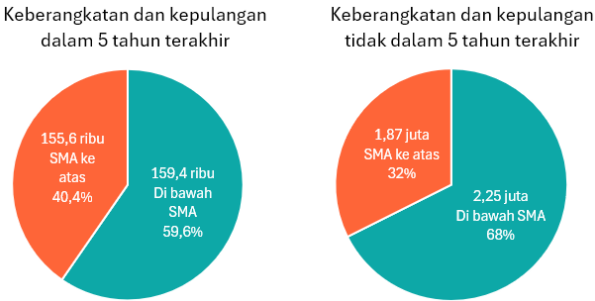
Perbandingan partisipasi laki-laki dan perempuan untuk menjadi pekerja di luar negeri dalam 5 tahun terakhir tidak jauh berbeda. Seperti ditunjukkan pada Gambar 70 sebanyak 58,8 persen pekerja yang pernah bekerja di luar negeri dalam 5 tahun terakhir adalah laki-laki, sedangkan 41,3 persen pekerja adalah perempuan. Para pekerja perempuan berkontribusi dalam peningkatan status sosial ekonomi keluarga mereka karena berbagai kondisi keluarga. Lebih lanjut, Nisa et al. (2023) mengidentifikasi bahwa kebutuhan keluarga yang mendesak, seperti biaya pendidikan anak dan perawatan orang tua, menjadi pertimbangan penting bagi keputusan mereka untuk bekerja.



Gambar 70 Penduduk Pernah Bekerja di Luar Negeri Menurut Periode Keberangkatan dan Jenis Kelamin, 2025

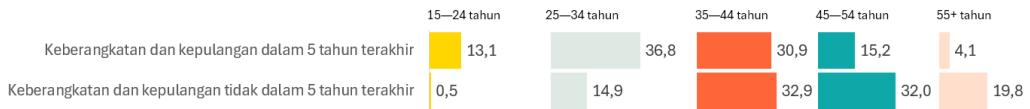


Gambar 71 Penduduk Pernah Bekerja di Luar Negeri Menurut Periode Keberangkatan dan Klasifikasi Tempat Tinggal, 2025

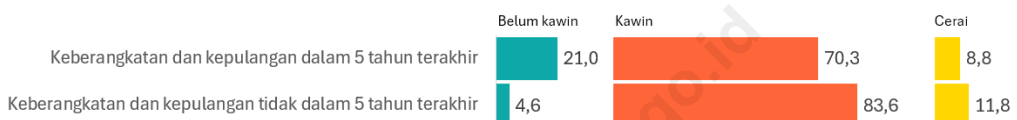


Gambar 72 Penduduk Pernah Bekerja di Luar Negeri Menurut Periode Keberangkatan dan Tingkat Pendidikan, 2025

Dari seluruh pekerja yang pernah bekerja di luar negeri dalam 5 tahun terakhir, 50,6 persen bertempat tinggal di perkotaan dan 49,4 persen bertempat tinggal di pedesaan. Fenomena ini mencerminkan bahwa motivasi untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia tidak lagi terbatas pada wilayah tertentu, melainkan telah menyebar secara merata di kalangan masyarakat dari berbagai daerah tempat tinggal, baik yang berasal dari kawasan perkotaan maupun pedesaan.



Gambar 73 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Periode Keberangkatan dan Umur



Gambar 74 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Periode Keberangkatan dan Status Perkawinan

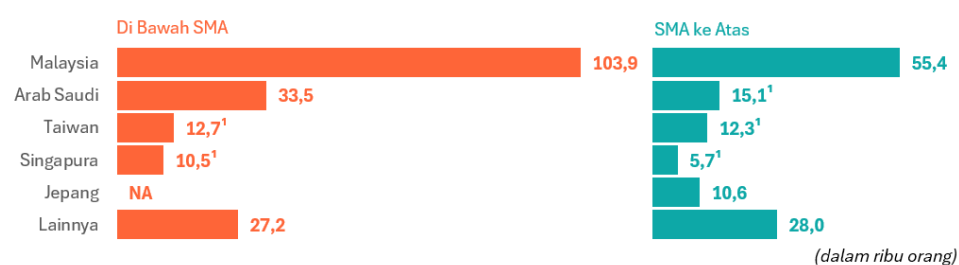
Mayoritas penduduk yang pernah bekerja ke luar negeri dalam 5 tahun terakhir berstatus kawin, yaitu sebesar 70,3 persen. Sementara itu, penduduk yang berstatus belum kawin sebesar 21,0 persen, dan yang berstatus cerai sebesar 8,8 persen. Menurut Haning et al. (2024), tingginya proporsi pekerja migran Indonesia yang sudah menikah mengindikasikan bahwa meskipun tujuan utama mereka bekerja di luar negeri adalah untuk memberikan dukungan finansial bagi keluarga, mereka tetap harus menghadapi beratnya hidup terpisah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan beban sosial dan psikologis yang besar, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan terabaikannya aspek-aspek penting dalam keluarga seperti pola asuh anak, kesehatan, dan pendidikan, serta memicu ketidakharmonisan hingga risiko perceraian.

Berdasarkan kelompok umur, pekerja yang pernah bekerja di luar negeri dalam 5 tahun terakhir paling banyak berasal dari kelompok umur 25–34 tahun, yaitu sebesar 36,8 persen. Kelompok umur terbesar berikutnya adalah 35–44 tahun (30,9 persen), diikuti kelompok umur 45–54 tahun (15,2 persen), 15–24 tahun (13,1 persen), dan 55 tahun ke atas (4,1 persen). Pola ini menunjukkan bahwa pekerja yang berangkat ke luar negeri dalam 5 tahun terakhir didominasi oleh penduduk umur produktif utama, khususnya kelompok umur 25–44 tahun. Pergeseran usia pekerja migran Indonesia, menurut Haning et al. (2024), merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan

pemerintah. Jika sebelumnya UU PPMI Nomor 18 Tahun 2017 menetapkan usia minimal 18 tahun, UU Nomor 39 Tahun 2004 kemudian mengubahnya menjadi minimal 21 tahun, terutama untuk pekerja rumah tangga atau domestik.

Tingginya potensi eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia kerap dikaitkan dengan rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Haning et al. (2024) mengemukakan bahwa keterbatasan pendidikan menjadi salah satu determinan utama yang menempatkan pekerja migran Indonesia dalam posisi yang rentan, khususnya dalam interaksi mereka dengan agen penyalur tenaga kerja maupun pemberi kerja. Kondisi ini turut berdampak pada minimnya pemahaman mereka terhadap hak-hak serta kewajiban yang melekat dalam hubungan kerja tersebut. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebagian besar pekerja Indonesia di luar negeri dalam lima tahun terakhir berpendidikan SMA ke bawah. Pada tahun 2025, dari total 315 ribu penduduk yang bekerja di luar negeri, sebanyak 187,8 ribu (59,6 persen) berpendidikan SMA ke bawah.

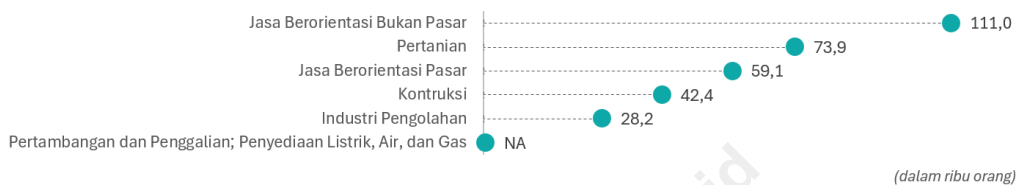
Menurut negara tujuan utama bagi pekerja yang pernah bekerja di luar negeri dalam lima tahun terakhir (Gambar 75), Malaysia menjadi negara tujuan utama bagi penduduk Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri dalam lima tahun terakhir, yaitu sebanyak 159,4 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sekitar dua pertiga berpendidikan di bawah SMA, yakni 103,9 ribu orang, sedangkan 55,4 ribu orang lainnya berpendidikan SMA ke atas. Pola serupa juga terlihat di Arab Saudi, di mana proporsi pekerja berpendidikan di bawah SMA lebih besar dibandingkan dengan pekerja berpendidikan SMA ke atas. Sementara itu, untuk pekerja yang pernah bekerja ke luar negeri dalam lima tahun terakhir, mereka yang bertujuan ke Jepang seluruhnya memiliki pendidikan SMA ke atas. Jepang mencatat 10,6 ribu orang yang seluruhnya berasal dari kelompok pendidikan SMA ke atas.



Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Gambar 75 Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Berangkat untuk Bekerja ke Luar Negeri dalam 5 Tahun Terakhir Menurut Negara Tujuan dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Data jumlah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang pernah bekerja ke luar negeri dalam lima tahun terakhir menurut lapangan usaha di negara tujuan menunjukkan bahwa dari total 315 ribu penduduk yang pernah bekerja di luar negeri, kelompok terbesar bekerja pada kategori jasa berorientasi bukan pasar, yaitu sebanyak 111 ribu orang (35,2 persen). Sektor terbesar berikutnya adalah pertanian, dengan jumlah 73,9 ribu orang (23,5 persen) dan jasa berorientasi pasar menempati posisi ketiga dengan jumlah 59,1 ribu orang (18,8 persen). Selain ketiga sektor tersebut, jumlah pekerja migran Indonesia juga cukup besar pada sektor konstruksi, yaitu 42,4 ribu orang (13,5 persen).



Gambar 76 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Berangkat untuk Bekerja ke Luar Negeri dalam 5 Tahun Terakhir Menurut Sektor Ekonomi, 2025

Sementara itu, sektor industri pengolahan mencatat 28,2 ribu orang (8,9 persen). Kedua sektor ini umumnya menyerap pekerja laki-laki usia produktif dengan pola kerja kontrak jangka pendek, terutama di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Beberapa sektor strategis lainnya, yaitu pertambangan dan penggalian serta penyediaan listrik, air, dan gas hanya mencatat 0,4 ribu orang (0,1 persen). Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi Indonesia pada sektor-sektor ekonomi berorientasi pada keterampilan tinggi di luar negeri masih sangat terbatas.



5

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Kondisi pasar kerja Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan struktur ketenagakerjaan yang terus berkembang seiring dinamika penduduk, pendidikan, dan sektor ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja masih berada pada skala yang besar, dengan komposisi angkatan kerja yang semakin mengarah pada tingkat pendidikan SMA ke atas. Dari sisi sektor pekerjaan, sektor jasa masih menjadi sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja, diikuti oleh sektor pertanian dan manufaktur. Komposisi ini menunjukkan bahwa pasar kerja Indonesia memiliki karakter yang beragam, dengan sektor jasa sebagai penopang utama, sementara sektor pertanian dan manufaktur tetap berperan penting dalam struktur ketenagakerjaan nasional.

Mobilitas tenaga kerja menjadi bagian penting dari dinamika pasar kerja tersebut. Berdasarkan cakupan publikasi ini, mobilitas tenaga kerja dapat dilihat melalui mobilitas spasial dan nonspasial. Mobilitas spasial mencakup migrasi risen, perjalanan pulang pergi harian, komuter, sirkuler, serta pengalaman bekerja di luar negeri. Sementara itu, mobilitas nonspasial tercermin dari perpindahan pekerjaan, baik menurut lapangan usaha maupun status pekerjaan. Dengan demikian, mobilitas tenaga kerja tidak hanya menggambarkan perpindahan pekerja antarwilayah, tetapi juga perubahan posisi pekerja dalam pasar kerja.

Pada migrasi, pekerja migran risen menunjukkan adanya perpindahan tempat tinggal dalam lima tahun terakhir yang berkaitan dengan aktivitas bekerja. Pada tahun 2025, pekerja migran risen hanya mencakup sebagian kecil dari total penduduk bekerja. Secara wilayah, pekerja migran risen terkonsentrasi pada provinsi-provinsi tertentu, terutama provinsi dengan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang besar. Pola ini menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja masih berkaitan erat dengan daya tarik wilayah tujuan, peluang kerja, serta keterhubungan antardaerah.

Karakteristik pekerja migran risen memperlihatkan bahwa pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam mobilitas tenaga kerja. Pada provinsi-provinsi terpilih, mayoritas pekerja migran risen memiliki pendidikan SMA ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan menengah dan tinggi menjadi modal penting bagi pekerja untuk mengakses peluang kerja di wilayah lain. Namun demikian, penyerapan pekerja migran risen pada sektor formal dan informal masih bervariasi antarwilayah. Variasi tersebut menunjukkan bahwa karakter pasar kerja di daerah tujuan turut menentukan jenis pekerjaan yang dapat diakses oleh pekerja migran.

Pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian merupakan kelompok terbesar dalam pola mobilitas harian tenaga kerja. Pada tahun 2025, sebagian besar penduduk bekerja melakukan perjalanan dari tempat tinggal menuju lokasi kerja dan kembali pada hari yang sama. Pola ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada mobilitas harian. Besarnya kelompok pekerja ini juga menunjukkan pentingnya ketersediaan akses transportasi, kedekatan lokasi tempat tinggal dengan lokasi kerja, serta keterhubungan antara kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi.

Distribusi pekerja pelaku perjalanan pulang pergi harian menunjukkan konsentrasi pada provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi besar, terutama di Pulau Jawa. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah pekerja pelaku perjalanan harian terbesar. Namun, jika dilihat dari proporsinya terhadap total pekerja di masing-masing provinsi, beberapa wilayah di luar Jawa juga menunjukkan intensitas perjalanan harian yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan pulang pergi harian tidak hanya dipengaruhi oleh skala jumlah pekerja, tetapi juga oleh struktur wilayah, pola permukiman, karakter pekerjaan, dan kondisi geografis.

Pekerja komuter merupakan bagian dari mobilitas temporer yang menunjukkan hubungan antara tempat tinggal dan lokasi kerja yang berbeda kabupaten/kota. Pada tahun 2025, jumlah pekerja komuter mencapai sekitar 7,7 juta orang atau 5,2 persen dari total pekerja Indonesia. Meskipun proporsinya relatif kecil dibandingkan pekerja nonkomuter, keberadaan pekerja komuter penting untuk menggambarkan keterhubungan pasar kerja antarwilayah. Pada periode 2016–2025, jumlah pekerja komuter mengalami fluktuasi, sementara persentasenya terhadap total pekerja cenderung berada pada kisaran sekitar lima hingga tujuh persen. Pola ini menunjukkan bahwa komuter tetap menjadi bagian penting dari mobilitas tenaga kerja, meskipun belum menjadi pola dominan dalam struktur ketenagakerjaan nasional.

Sebaran pekerja komuter pada tahun 2025 menunjukkan konsentrasi yang kuat di wilayah dengan aktivitas ekonomi dan jumlah penduduk bekerja yang besar. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Banten menjadi provinsi dengan jumlah pekerja komuter terbesar. Pada tingkat kabupaten/kota, wilayah tempat tinggal pekerja komuter banyak berada di daerah penyangga metropolitan, seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Sebaliknya, wilayah tujuan komuter banyak didominasi oleh kota inti dan pusat kegiatan ekonomi, seperti Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang. Pola ini menunjukkan adanya hubungan fungsional antara wilayah tempat tinggal dan pusat pekerjaan dalam kawasan perkotaan.

Arus dan pola pergerakan pekerja komuter menunjukkan adanya perbedaan peran antarwilayah. Kota inti cenderung menjadi wilayah dengan neto komuter positif karena menerima lebih banyak pekerja dari wilayah lain, sedangkan wilayah penyangga cenderung memiliki neto komuter negatif karena lebih banyak mengirim pekerja ke luar wilayah tempat tinggal. Pasangan asal-tujuan dengan jumlah komuter terbesar juga menunjukkan pola yang sama, yaitu pergerakan dari wilayah penyangga menuju kota inti atau pusat kegiatan ekonomi. Dengan demikian, mobilitas komuter mencerminkan integrasi pasar kerja antarwilayah, terutama di kawasan metropolitan dan aglomerasi perkotaan.

Karakteristik pekerja komuter menunjukkan bahwa kelompok ini didominasi oleh laki-laki, berada pada usia produktif, berstatus kawin, dan sebagian besar berpendidikan SMA ke atas. Dari sisi ketenagakerjaan, pekerja komuter banyak terserap di sektor jasa dan industri, terutama jasa berorientasi pasar, jasa berorientasi nonpasar, dan industri manufaktur. Sebagian besar pekerja komuter berada pada jabatan menengah dan bekerja di sektor formal. Pola ini menunjukkan bahwa komuter banyak berkaitan dengan pekerjaan yang relatif terstruktur dan terkonsentrasi di pusat kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, variasi antarprovinsi tetap terlihat sesuai dengan perbedaan struktur ekonomi wilayah.

Moda transportasi pekerja komuter menunjukkan dominasi penggunaan transportasi pribadi. Secara nasional, sebagian besar pekerja komuter menggunakan transportasi pribadi sebagai moda utama untuk mencapai tempat kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa mobilitas komuter masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi. Ketergantungan tersebut dapat berkaitan dengan kebutuhan akan fleksibilitas perjalanan, keterbatasan jangkauan transportasi umum, serta pola permukiman dan pusat pekerjaan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem transportasi massal.

Pekerja sirkuler merupakan bentuk mobilitas temporer yang berbeda dari komuter karena pekerja tidak kembali ke tempat tinggal pada hari yang sama. Pada tahun 2025, jumlah pekerja sirkuler lebih kecil dibandingkan pekerja komuter. Secara wilayah, pekerja sirkuler banyak terkonsentrasi di provinsi-provinsi dengan aktivitas ekonomi besar, terutama di Pulau Jawa. Pola ini menunjukkan bahwa mobilitas sirkuler menjadi pilihan bagi sebagian pekerja yang bekerja di luar wilayah tempat tinggal, tetapi jarak atau pola kerjanya tidak memungkinkan perjalanan pulang pergi harian.

Karakteristik pekerja sirkuler menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki pola ketenagakerjaan yang berbeda dari pekerja komuter. Pada beberapa wilayah, pekerja sirkuler banyak terserap di sektor formal serta lapangan usaha manufaktur dan jasa

berorientasi pasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mobilitas sirkuler tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan informal atau musiman, tetapi juga menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor ekonomi tertentu. Dengan demikian, pekerja sirkuler perlu dipahami sebagai bagian dari mobilitas tenaga kerja temporer yang memiliki karakter berbeda dari komuter.

Mobilitas pekerjaan memperlihatkan dinamika perpindahan pekerja dalam pasar kerja tanpa selalu disertai perpindahan wilayah. Penduduk yang pernah berhenti bekerja dalam setahun terakhir banyak ditemukan di provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk dan pasar kerja yang besar. Sebagian pekerja yang kembali bekerja tetap berada pada lapangan usaha yang sama dengan pekerjaan sebelumnya, sedangkan sebagian lainnya berpindah ke lapangan usaha atau status pekerjaan yang berbeda. Pola ini menunjukkan bahwa mobilitas pekerjaan tidak selalu mencerminkan perubahan sektor, tetapi juga dapat menggambarkan dinamika keluar-masuk pekerjaan dalam sektor yang sama.

Dilihat dari status pekerjaan, penduduk yang pernah berhenti bekerja setahun terakhir masih banyak terserap kembali di sektor informal. Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal tetap berperan sebagai penampung penting bagi pekerja yang mengalami jeda atau perpindahan pekerjaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mobilitas pekerjaan berkaitan erat dengan stabilitas kerja, ketersediaan kesempatan kerja, serta kemampuan pekerja untuk mengakses pekerjaan yang lebih formal dan terlindungi.

Penduduk yang pernah bekerja di luar negeri merupakan bagian dari mobilitas tenaga kerja internasional yang melengkapi gambaran mobilitas tenaga kerja Indonesia. Hasil Sakernas 2021–2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang pernah bekerja di luar negeri mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Secara total, jumlah penduduk yang pernah berangkat bekerja ke luar negeri meningkat dari 3,17 juta orang pada 2021 menjadi 4,43 juta orang pada 2025. Berdasarkan periode keberangkatan, penduduk yang pernah berangkat bekerja ke luar negeri dalam lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi, sedangkan penduduk yang pernah berangkat bekerja ke luar negeri tidak dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat.

Distribusi penduduk yang pernah bekerja di luar negeri dalam lima tahun terakhir menunjukkan konsentrasi pada beberapa provinsi asal. Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah bekerja di luar negeri dan melakukan keberangkatan maupun kepulangan dalam lima tahun terakhir terbanyak. Ketiga provinsi tersebut menunjukkan bahwa pengalaman bekerja di luar negeri masih berkaitan erat dengan wilayah asal tertentu

yang memiliki akses, jaringan, atau tradisi mobilitas tenaga kerja internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja internasional tidak tersebar merata di seluruh wilayah, tetapi terkonsentrasi pada daerah-daerah yang memiliki keterhubungan kuat dengan pasar kerja luar negeri.

Dilihat dari negara tujuan, Malaysia menjadi negara utama bagi penduduk Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri dalam lima tahun terakhir. Dari total 315 ribu penduduk yang pernah bekerja di luar negeri dalam lima tahun terakhir, sebanyak 159,4 ribu orang atau 50,6 persen pernah bekerja di Malaysia. Negara tujuan berikutnya adalah Arab Saudi, Taiwan, Singapura, dan Jepang. Pola ini menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja internasional Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa negara tujuan utama, terutama negara-negara yang memiliki kedekatan geografis, kebutuhan tenaga kerja, dan jaringan migrasi kerja yang telah terbentuk.

Karakteristik penduduk yang pernah bekerja di luar negeri menunjukkan bahwa kelompok ini didominasi oleh usia produktif utama. Selain itu, sebagian besar penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam lima tahun terakhir berpendidikan SMA ke bawah. Kondisi ini menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja internasional masih banyak melibatkan pekerja dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah, terutama pada negara tujuan dan sektor pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, perlindungan pekerja, penyediaan informasi, peningkatan keterampilan, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban kerja menjadi aspek penting dalam tata kelola mobilitas tenaga kerja internasional.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2025 memiliki pola yang beragam. Mayoritas pekerja masih bekerja di wilayah tempat tinggalnya atau melakukan perjalanan harian dalam jarak yang relatif dekat. Namun, pada wilayah metropolitan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi, mobilitas lintas wilayah tampak lebih kuat, terutama dalam bentuk komuter dan sirkuler. Selain itu, mobilitas pekerjaan dan pengalaman bekerja di luar negeri menunjukkan bahwa dinamika tenaga kerja tidak hanya terjadi secara spasial, tetapi juga melalui perubahan pekerjaan dan akses terhadap pasar kerja internasional. Temuan ini menegaskan pentingnya data mobilitas tenaga kerja sebagai dasar dalam perencanaan ketenagakerjaan, transportasi, pembangunan wilayah, serta perlindungan pekerja.

5.2 Saran

Hasil analisis mobilitas tenaga kerja menunjukkan bahwa data Sakernas perlu terus dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih

responsif terhadap perubahan sosial ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar kerja Indonesia dihadapkan pada berbagai dinamika, seperti perubahan struktur sektor pekerjaan, isu pemutusan hubungan kerja, berkembangnya pekerjaan berbasis platform digital, serta meningkatnya kebutuhan mobilitas pekerja di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, informasi mengenai migrasi risen, perjalanan pulang pergi harian, komuter, sirkuler, mobilitas pekerjaan, dan pengalaman bekerja di luar negeri perlu digunakan untuk mengidentifikasi kelompok pekerja dan wilayah yang membutuhkan intervensi kebijakan secara lebih tepat.

Pada aspek mobilitas harian dan komuter, tingginya pergerakan pekerja dari tempat tinggal menuju lokasi kerja menunjukkan perlunya penguatan konektivitas antara kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat perencanaan transportasi berbasis wilayah fungsional, terutama pada kawasan metropolitan dan wilayah penyangga yang memiliki arus komuter besar. Peningkatan kualitas transportasi umum, integrasi antarmoda, pengembangan layanan angkutan pengumpan, serta penyediaan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda perlu menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Kebijakan ini penting untuk menekan biaya perjalanan, mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, dan memperbaiki kualitas mobilitas pekerja.

Pola arus komuter yang menunjukkan perbedaan peran antara kota inti dan wilayah penyangga perlu menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah. Kota inti yang menjadi pusat tujuan kerja perlu memastikan tersedianya infrastruktur kerja, transportasi, dan layanan perkotaan yang memadai bagi pekerja dari luar wilayah. Sementara itu, wilayah penyangga perlu memperkuat penyediaan permukiman layak, layanan dasar, dan akses transportasi menuju pusat kerja. Dalam jangka menengah, pengembangan pusat-pusat pekerjaan baru di wilayah penyangga juga perlu dipertimbangkan agar tekanan mobilitas menuju kota inti dapat berkurang dan kesempatan kerja dapat tersebar lebih merata.

Dinamika mobilitas pekerjaan menunjukkan perlunya penguatan sistem transisi kerja, terutama bagi pekerja yang mengalami jeda pekerjaan, berpindah lapangan usaha, atau beralih status pekerjaan. Di tengah isu perubahan kebutuhan tenaga kerja, tekanan pada sektor tertentu, dan berkembangnya ekonomi digital, layanan ketenagakerjaan perlu diarahkan tidak hanya kepada pencari kerja baru, tetapi juga kepada pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan. Pemerintah dapat memperkuat pelatihan ulang, sertifikasi, layanan penempatan kerja, dan informasi pasar kerja berbasis wilayah. Selain itu, pekerja informal dan pekerja platform digital perlu memperoleh perhatian dalam aspek perlindungan sosial, keselamatan kerja, kepastian pendapatan, dan akses terhadap peningkatan keterampilan.

Pekerja sirkuler dan penduduk yang pernah bekerja di luar negeri memerlukan kebijakan perlindungan yang memperhatikan karakter mobilitasnya. Pekerja sirkuler yang tinggal sementara di wilayah kerja membutuhkan dukungan berupa hunian sementara yang layak, akses layanan kesehatan, jaminan sosial, serta pengawasan kondisi kerja. Sementara itu, penduduk yang pernah bekerja di luar negeri menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola pekerja migran sejak pra-keberangkatan, masa bekerja, hingga kepulangan. Wilayah asal pekerja migran perlu memperoleh dukungan informasi pasar kerja luar negeri, pelatihan keterampilan, pemahaman kontrak kerja, literasi keuangan, serta program reintegrasi agar pengalaman bekerja di luar negeri dapat menjadi modal ekonomi bagi pekerja, keluarga, dan daerah asal.

Statistik mobilitas tenaga kerja perlu terus disempurnakan agar mampu menangkap perubahan pola kerja yang semakin dinamis. Perkembangan kerja jarak jauh, kerja hibrida, pekerjaan berbasis platform digital, serta pekerjaan dengan lokasi yang tidak tetap perlu menjadi perhatian dalam pengembangan konsep dan instrumen pengumpulan data. Penyajian data menurut wilayah fungsional, kawasan metropolitan, karakteristik pekerja, sektor ekonomi, jenis pekerjaan, dan pola transportasi akan membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan penguatan data dan analisis yang berkelanjutan, statistik mobilitas tenaga kerja dapat menjadi dasar penting dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, aman, dan berkelanjutan.



NEXT STOP:
STASIUN KOTA



Daftar Pustaka

- Adams, R.H. Jr. & Page, J. (2005). Do International Migration and Remittances Reduce Poverty in Developing Countries? *World Development* Vol. 33 No. 10. (1645–1669).
- Aditjandra, P. T., Cao, X., & Mulley, C. (2012). Understanding Neighbourhood Design Impact on Travel Behaviour: An Application of Structural Equations Model to a British Metropolitan Data. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 46(1), 22–32.
- Barbosa, H., Barthelemy, M., Ghoshal, G., James, C. R., Lenormand, M., Louail, T., Menezes, R., Ramasco, J. J., Simini, F., & Tomasini, M. (2018). *Human mobility: Models and applications*. *Physics Reports*, 734, 1–74.
- Bell, M., & Charles-Edwards, E. (2013). *Cross-National Comparisons of Internal Migration*. *Human Development Research Paper*.
- Ben-Akiva, M., & Atherton, T. J. (1977). *Methodology for Short-Range Travel Demand Predictions: Analysis of Carpooling Incentives*. *Journal of Transport Economics and Policy*, 11(3), 224–261.
- Borjas, G. J. (1987). *Self-Selection and the Earnings of Immigrants*. *American Economic Review*, 77(4), 531–553.
- Boyd, M. (1989). Family and personal networks in international migration: Recent developments and new agendas. *The International Migration Review*, 23(3), 638–670.
- Burgess, S. (2016). Human Capital and Education: The State of the Art in the Economics of Education. *SSRN Electronic Journal*.
- Chiswick, B. R. (1999). *Are Immigrants Favorably Self-Selected?* *American Economic Review*, 89(2), 181–185.
- Clark, W. A. V., Huang, Y., & Withers, S. (2003). *Does commuting distance matter? Commuting tolerance and residential change*. *Regional Science and Urban Economics*, 33, 199–221.
- Czaika, M., & Reinprecht, C. (2022). *Migration Drivers: Why Do People Migrate?* In P. Scholten (Ed.), *Introduction to Migration Studies* (pp. 49–82). Springer International Publishing.
- Darini, R., & Anggraeni, D. A. (2021). *The Life of Deli Tobacco Plantation's Workers in East Sumatera, 1880–1930*. *Indonesian Historical Studies*, 5(1), 30–44.
- de Haas, H. (2020). *Paradoxes of migration and development*. In T. Bastia & R. Skeldon (Eds.), *Routledge Handbook of Migration and Development* (pp. 17–31). Routledge.

- Dustmann, C., & Glitz, A. (2011). *Migration and Education*. In E. Hanushek, S. Machin, & L. Woessmann (Eds.), *Handbook of the Economics of Education* (pp. 327–439). Elsevier.
- Fisher, J. S., & Mitchelson, R. L. (1981). Extended and Internal Commuting in the Transformation of the Intermetropolitan Periphery. *Economic Geography*, 57(3), 189–207.
- González, M. C., Hidalgo, C. A., & Barabási, A.-L. (2008). *Understanding Individual Human Mobility Patterns*. *Nature*, 458(7235), 238.
- Green, A. E., Hogarth, T., & Shackleton, R. E. (1999). Longer distance commuting as a substitute for migration in Britain: a review of trends, issues and implications. *International journal of population geography : IJPG*, 5(1), 49–67.
- Gregson, N. (2023). Work, labour and mobility: opening up a dialogue between mobilities and political economy through mobile work. *Mobilities*, 18(6), 888–902.
- Haas, A., & Osland, L. (2014). Commuting, Migration, Housing and Labour Markets: Complex Interactions. *Urban Studies*, 51(3), 463–476.
- Haley, A. (2017). Defining geographical mobility: Perspectives from higher education. *Geoforum*, 83, 50–59.
- Hamid, A. (2019). Diskursus Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia dalam Penempatan di Malaysia. *Arena Hukum*, 12(1), 153–171.
- Haning, R., Aswatini, N., Noveria, M., Fitranita, Saleh, R., Haqi, M., Rachmad, S. H., & Apriyanto, E. B. (2024). *Dinamika Migrasi Pekerja Migran Indonesia*. Penerbit Media Sains Indonesia.
- Harris, J. R., & Todaro, M. P. (1970). *Migration, Unemployment & Development: A Two-Sector Analysis*. *American Economic Review*, 60(1), 126–142.
- Hidayati, I. (2021). *Daily Commute of Circular Migrant in Greater Jakarta: A Review*. *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, 1(1), 14–23.
- Hugo, G. (1995). *Migration and Women's Empowerment*. In *Women, Empowerment and Demographic Processes*.
- Hugo, G. J. (2013). *What We Know About Circular Migration dan Enhanced Mobility*. Migration Policy Institute.
- Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Islam, M. R., & Saphores, J.-D. M. (2022). *An L.A. story: The impact of housing costs on commuting*. *Journal of Transport Geography*, 98.

- Jang, B. J., Casterline, J. B., & Snyder, A. R. (2014). *Migration and Marriage: Modeling the Joint Process*. *Demographic Research*, 30(47), 1339–1366.
- Lee, E.S. (1966). A Theory of Migration. *Demography*, Vol. 3, No. 1. (47–57).
- Li, Q., & Samimi, C. (2023). Assessing Human Mobility and Its Climatic and Socioeconomic Factors for Sustainable Development in Sub-Saharan Africa. *Sustainability*, 15(15).
- Mabogunje, A. L. (1970). *Systems Approach to a Theory of Rural-Urban Migration. Geographical Analysis*, 2(1), 1–18.
- Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). *Theories of International Migration: A Review and Appraisal*. *Population and Development Review*, 19(3), 431–466.
- Montanari, A. (2005). Human Mobility, Global Change, and Local Development. *Belgeo*, 1(2), 7–18.
- Ng, T. W. H., Sorensen, K. L., Eby, L. T., & Feldman, D. C. (2007). *Determinants of Job Mobility: A Theoretical Integration and Extension*. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 80(3), 363–386.
- Nuvolati, Giampaolo. 2014. *The Mobile City: Explorations on the Urban Evolution*. Milan: McGraw-Hill Education.
- OECD. (2019). *International Migration Outlook 2019*. OECD Publishing.
- Petzold, K. (2020). Migration, Commuting, or a Second Home? Insights from an Experiment Among Academics. *European Journal of Population*, 36(2), 277–315.
- Piper, N. (2008). *Feminisation of Migration and the Social Dimensions of Development*. UNRISD Social Policy and Development Paper No. 44.
- Pooley, Colin G., Jean Turnbull, and Mags Adams. 2005. *A Mobile Century? Changes in Everyday Mobility in Britain in the Twentieth Century*. Aldershot, UK: Ashgate Publishing.
- Reitsma, René F., and Dick Vergoossen. 1988. “A Causal Typology of Migration: The Role of Commuting.” *Regional Studies* 22 (4): 331–340.
- Rogers, A., & Castro, L. (1981). *Model Migration Schedules*.
- Rouwendal, J., & Rietveld, P. (1994). *Changes in Commuting Distances of Dutch Households*. *Urban Studies*, 31(9), 1545–1557.
- Schneider, J., & Parusel, B. (2011). *Circular and Temporary Migration: Empirical Evidence, Current Policy Practice and Future Options in Germany* (Vol. 35).
- Sheehan, C. M., & Riosmena, F. (2013). *Migration, business formation, and the informal economy in urban Mexico*. *Social Science Research*, 42(4), 1092–1108.

- Sheller, M., & Urry, J. (2006). *The New Mobilities Paradigm*. Environment and Planning A: Economy and Space, 38(2), 207–228.
- Simpson, B. (2021). Indonesian Transmigration and the Crisis of Development, 1968–1985. Diplomatic History, 45(2), 268–284.
- Sjaastad, L. A. (1962). *The Costs and Returns of Human Migration*. Journal of Political Economy, 70(5), 80–93.
- Srivastava, R. (2020). Understanding Circular Migration in India: Its Nature and Dimensions, the Crisis under Lockdown and the Response of the State. Centre for Employment Studies Working Paper Series.
- Stark, O., & Bloom, D. E. (1985). *The New Economics of Labor Migration*. The American Economic Review, 75(2), 173–178.
- Stouffer, Samuel A. 1940. “Intervening Opportunities: A Theory Relating Mobility and Distance.” *American Sociological Review* 5 (6): 845–867.
- Suzuki, T., & Lee, S. (2012). *Jobs–housing imbalance, spatial correlation, and excess commuting*. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 46(2), 322–336.
- Todaro, M. P. (1980). Internal Migration in Developing Countries: A Review of Theory, Evidence, Methodology and Research Priorities. Geneva: ILO.
- Weinberg, D. H. (1979). *The Determinants Intra-Urban Household Mobility*. Regional Science and Urban Economics, 9(2–3), 216–246.
- van der Veen, A., & Evers, G. (1983). A simultaneous model for regional labor supply, incorporating labor force participation, commuting and migration. *Socio-Economic Planning Sciences*, 17(5–6), 239–250.
- van Wee, B. (2009). Self-Selection: A Key to a Better Understanding of Location Choices, Travel Behaviour and Transport Externalities? *Transport Reviews*, 29(3), 279–292.
- Zipf, George Kingsley. 1946. “The P_1P_2/D Hypothesis: On the Intercity Movement of Persons.” *American Sociological Review* 11 (6): 677–686.



Lampiran

Lampiran 1 Penduduk Menurut Status Bekerja dan Status Migrasi Risen, 2025

Status Bekerja	Status Migrasi Risen				Total	
	Migran		Nonmigran		Jumlah (ribu orang)	%
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bekerja	3.393,6	2,3	143.148,6	97,7	146.542,2	100,0
Tidak bekerja	1.726,1	2,4	69.899,5	97,6	71.625,6	100,0
Total	5.119,7	2,3	213.048,1	97,7	218.167,8	100,0

Lampiran 2 Penduduk Bekerja Menurut Status Migrasi Risen, 2016–2025

Status Migrasi Risen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pekerja Migran Risen										
Jumlah (juta orang)	4,1	4,8	4,2	5,8	4,8	3,3	3,8	4,4	4,5	3,4
Persentase (%)	3,4	4,0	3,4	4,5	3,7	2,5	2,8	3,1	3,1	2,3
Pekerja Nonmigran Risen										
Jumlah (juta orang)	114,3	116,2	119,8	123,0	123,6	127,8	131,5	135,5	140,2	143,1
Persentase (%)	96,6	96,0	96,6	95,5	96,3	97,5	97,2	96,9	96,9	97,7
Total										
Jumlah (juta orang)	118,4	121,0	124,0	128,8	128,5	131,1	135,3	139,9	144,6	146,5
Persentase (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Lampiran 3 Pekerja Menurut Provinsi Tempat Tinggal Sekarang dan Status Migrasi Risen, 2025

Provinsi	Status Pekerja Migran Risen				Total	
	Pekerja Migran Risen		Pekerja Nonmigran Risen		Jumlah (ribu orang)	%
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	47,8	1,9	2.513,5	98,1	2.561,3	100,0
Sumatera Utara	220,1	2,8	7.756,1	97,2	7.976,3	100,0
Sumatera Barat	120,8	4,0	2.897,7	96,0	3.018,6	100,0
Riau	89,2	2,8	3.121,7	97,2	3.210,9	100,0
Jambi	37,1	2,0	1.814,8	98,0	1.851,9	100,0
Sumatera Selatan	64,6	1,4	4.428,0	98,6	4.492,6	100,0
Bengkulu	25,9	2,3	1.089,4	97,7	1.115,3	100,0
Lampung	89,1	1,8	4.764,3	98,2	4.853,4	100,0
Bangka Belitung	16,3	2,1	769,5	97,9	785,7	100,0
Kepulauan Riau	34,6	3,3	1.017,4	96,7	1.052,0	100,0
DKI Jakarta	108,8	2,1	5.019,7	97,9	5.128,5	100,0
Jawa Barat	526,6	2,1	23.980,2	97,9	24.506,9	100,0
Jawa Tengah	599,8	2,8	20.696,0	97,2	21.295,8	100,0
DI Yogyakarta	97,7	4,4	2.102,4	95,6	2.200,1	100,0
Jawa Timur	411,4	1,7	23.389,7	98,3	23.801,0	100,0
Banten	82,9	1,4	5.673,0	98,6	5.755,9	100,0
Bali	65,6	2,4	2.636,2	97,6	2.701,7	100,0
Nusa Tenggara Barat	85,2	2,7	3.021,6	97,3	3.106,7	100,0
Nusa Tenggara Timur	113,2	3,8	2.875,9	96,2	2.989,1	100,0
Kalimantan Barat	49,5	1,7	2.880,9	98,3	2.930,4	100,0
Kalimantan Tengah	31,8	2,2	1.385,9	97,8	1.417,7	100,0
Kalimantan Selatan	62,0	2,9	2.091,1	97,1	2.153,1	100,0
Kalimantan Timur	49,0	2,5	1.920,8	97,5	1.969,7	100,0
Kalimantan Utara	9,0	2,4	371,6	97,6	380,6	100,0
Sulawesi Utara	27,9	2,1	1.311,4	97,9	1.339,3	100,0
Sulawesi Tengah	31,2	1,9	1.621,7	98,1	1.652,8	100,0
Sulawesi Selatan	134,9	2,8	4.624,2	97,2	4.759,1	100,0
Sulawesi Tenggara	44,8	3,1	1.389,3	96,9	1.434,0	100,0
Gorontalo	14,4	2,3	618,9	97,7	633,3	100,0
Sulawesi Barat	23,0	2,9	777,5	97,1	800,4	100,0
Maluku	26,6	2,9	895,9	97,1	922,5	100,0
Maluku Utara	17,2	2,6	656,3	97,4	673,5	100,0
Papua Barat	9,4	3,3	278,9	96,7	288,3	100,0
Papua Barat Daya	8,3	2,7	293,6	97,3	301,9	100,0
Papua	5,4	1,2	428,6	98,8	434,0	100,0
Papua Selatan	5,0 ¹	2,3 ¹	212,7	97,7	217,7	100,0
Papua Tengah	5,9	0,8	784,3	99,2	790,2	100,0
Papua Pegunungan	NA	NA	1.038,1	99,8	1.040,0	100,0
Indonesia	3393,6	2,3	143.148,7	97,7	146.542,3	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 4 Pekerja Menurut Status Migrasi Risen di 15 Kabupaten/Kota Tujuan dengan Pekerja Migran Risen Terbesar, 2025

Kabupaten/Kota Tujuan (Tempat Tinggal Saat Survei)	Status Pekerja Migran Risen					
	Pekerja Migran Risen		Pekerja Nonmigran Risen		Total	
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bogor	62,6 ¹	2,4 ¹	2.558,3	97,6	2.620,9	100,0
Depok	59,4	6,0	934,3	94,0	993,7	100,0
Kebumen	53,4	6,6	757,9	93,4	811,2	100,0
Brebes	51,0	4,8	1.014,8	95,2	1.065,8	100,0
Bekasi	40,5	2,7	1.445,3	97,3	1.485,9	100,0
Jakarta Selatan	38,2 ¹	3,5 ¹	1.051,6	96,5	1.089,8	100,0
Bantul	36,4	6,2	556,0	93,8	592,4	100,0
Bandung	36,2	2,0	1.765,4	98,0	1.801,6	100,0
Sleman	35,2	5,3	626,8	94,7	662,0	100,0
Jakarta Timur	33,1	2,3	1.413,8	97,7	1.446,9	100,0
Cirebon	32,7 ¹	2,7 ¹	1.164,0	97,3	1.196,7	100,0
Kota Bekasi	31,9	2,5	1.219,5	97,5	1.251,4	100,0
Malang	31,3	2,0	1.502,2	98,0	1.533,5	100,0
Kota Semarang	30,6	3,3	908,2	96,7	938,8	100,0
Tangerang	30,1	1,9	1.596,1	98,1	1.626,2	100,0
Kabupaten lainnya	2791,0	2,2	124.634,4	97,8	127.425,4	100,0
Indonesia	3393,6	2,3	143.148,7	97,7	146.542,3	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 5 Pekerja Menurut Status Migrasi Risen di 15 Kabupaten/Kota Tujuan dengan Persentase Pekerja Migran Risen Tertinggi, 2025

Kabupaten/Kota Tujuan (Tempat Tinggal Saat Survei)	Status Pekerja Migran Risen					
	Pekerja Migran Risen		Pekerja Nonmigran Risen		Total	
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banjarbaru	14,2	10,4	123,1	89,6	137,3	100,0
Halmahera Tengah	2,8	9,1	28,3	90,9	31,1	100,0
Payakumbuh	7,0	9,1	69,6	90,9	76,6	100,0
Bukittinggi	5,5	8,6	58,1	91,4	63,6	100,0
Pakpak Barat	2,8	8,3	30,7	91,7	33,4	100,0
Padang Panjang	2,3	7,9	27,0	92,1	29,3	100,0
Kota Solok	3,1	7,6	37,3	92,4	40,4	100,0
Palopo	6,9	7,5	85,1	92,5	92,0	100,0
Toba	9,1 ¹	7,4 ¹	113,6	92,6	122,7	100,0
Teluk Wondama	1,5	7,3	19,1	92,7	20,6	100,0
Teluk Bintuni	3,5	7,2	45,3	92,8	48,8	100,0
Lembata	5,5	7,2	71,2	92,8	76,7	100,0
Dharmasraya	9,3	7,1	121,5	92,9	130,7	100,0
Sawahlunto	2,6	6,9	34,7	93,1	37,3	100,0
Pariaman	3,6	6,9	48,2	93,1	51,7	100,0
Kabupaten lainnya	3.313,9	2,3	142.235,9	97,7	145.549,8	100,0
Indonesia	3.393,6	2,3	143.148,7	97,7	146.542,3	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 6 Pekerja Menurut Status Migrasi Risen di 15 Kabupaten/Kota Asal dengan Pekerja Migran Risen Terbesar

Kabupaten/Kota Asal (Tempat Tinggal Pada Lima Tahun Sebelum Survei)	Status Pekerja Migran Risen					
	Pekerja Migran Risen		Pekerja Nonmigran Risen		Total	
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jakarta Selatan	89,9	7,9	1.051,6	92,1	1.141,6	100,0
Bekasi	81,8	5,4	1.445,3	94,6	1.527,1	100,0
Jakarta Timur	76,9	5,2	1.413,8	94,8	1.490,7	100,0
Surabaya	75,9	4,7	1.550,8	95,3	1.626,7	100,0
Medan	71,2	5,8	1.158,5	94,2	1.229,7	100,0
Jakarta Barat	63,8	5,2	1.164,6	94,8	1.228,4	100,0
Makassar	59,6	8,9	612,3	91,1	671,8	100,0
Bogor	55,3	2,1	2.558,3	97,9	2.613,6	100,0
Pekanbaru	52,6	9,9	480,7	90,1	533,3	100,0
Kota Tangerang	51,4	5,4	899,3	94,6	950,8	100,0
Jakarta Pusat	45,3	8,2	503,7	91,8	549,0	100,0
Karawang	44,5	3,7	1.174,6	96,3	1.219,1	100,0
Padang	42,6	8,9	435,1	91,1	477,7	100,0
Kota Bandung	42,5	3,3	1.261,1	96,7	1.303,6	100,0
Kota Semarang	36,8	3,9	908,2	96,1	945,0	100
Luar Negeri	170,6	–	–	–	–	–
Kabupaten lainnya	2.333,1	1,8	126.530,7	98,2	128.863,7	100,0
Indonesia	3.393,6	2,3	143.148,7	97,7	146.542,3	100,0

Lampiran 7 Pekerja Menurut Status Migrasi Risen di 15 Kabupaten/Kota Asal dengan Persentase Pekerja Migran Risen Tertinggi, 2025

Kabupaten/Kota Asal (Tempat Tinggal Pada Lima Tahun Sebelum Survei)	Status Pekerja Migran Risen					
	Pekerja Migran Risen		Pekerja Nonmigran Risen		Total	
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sibolga	8,5 ¹	16,7 ¹	42,5	83,3	50,9	100,0
Kepulauan Seribu	NA	NA	14,0	86,7	16,2	100,0
Bukittinggi	8,8	13,1	58,1	86,9	66,9	100,0
Yogyakarta	29,2	13,0	195,1	87,0	224,3	100,0
Jayapura	8,2 ¹	11,0	65,8	89,0	74,0	100,0
Sukamara	NA	NA	34,1	90,0	37,9	100,0
Pekanbaru	52,6	9,9	480,7	90,1	533,3	100,0
Seruyan	NA	9,8 ¹	87,1	90,2	96,5	100,0
Padang Panjang	2,7 ¹	9,1 ¹	27,0	90,9	29,7	100,0
Kota Kupang	21,5	9,0	217,9	91,0	239,4	100,0
Padang	42,6	8,9	435,1	91,1	477,7	100,0
Makassar	59,6	8,9	612,3	91,1	671,8	100,0
Kendari	15,5	8,4	168,9	91,6	184,5	100,0
Jakarta Pusat	45,3	8,2	503,7	91,8	549,0	100,0
Banjarmasin	27,2	8,1	310,1	91,9	337,3	100,0
Luar Negeri	170,6	100,0	–	–	–	–
Kabupaten lainnya	2886,1	2,0	139.896,2	98,0	142.782,3	100,0
Indonesia	3393,6	2,3	143.148,7	97,7	146.542,3	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 8 Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Migrasi Neto Positif Terbesar dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Migrasi Neto Negatif Terbesar pada Pekerja, 2025

Kabupaten/Kota	Migrasi Masuk Risen Pekerja		Migrasi Keluar Risen Pekerja		Migrasi Neto Risen Pekerja ¹	
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Migrasi Neto Positif Terbesar						
Kebumen	53,4	6,6	13,1 ²	1,6 ²	+40,3 ²	+5,0 ²
Brebes	51,0	4,8	13,1 ²	1,2 ²	+37,9 ²	+3,6 ²
Depok	59,4	6,0	29,1 ²	2,9 ²	+30,3 ²	+3,0 ²
Kampar	28,0	6,9	4,5 ²	1,1 ²	+23,5	+5,8
Blitar	27,9	3,8	8,2 ²	1,1 ²	+19,8 ²	+2,7 ²
Magelang	25,5	3,2	7,1 ²	0,9 ²	+18,4 ²	+2,3 ²
Indramayu	21,3	2,3	2,9 ²	0,3 ²	+18,3 ²	+2,0 ²
Lombok Tengah	20,8	3,3	4,5 ²	0,7 ²	+16,2 ²	+2,5 ²
Boyolali	24,1	3,7	7,9 ²	1,2 ²	+16,2 ²	+2,5 ²
Pemalang	23,0	2,8	7,0 ²	0,9 ²	+16,0 ²	+2,0 ²
Banyuwangi	21,9 ²	2,2 ²	5,9 ²	0,6 ²	+16,0 ²	+1,6 ²
Blora	18,9	3,4	3,0 ²	0,5 ²	+15,9 ²	+2,9 ²
Bantul	36,4	6,2	21,1	3,6	+15,4 ²	+2,6 ²
Magetan	19,8	4,9	5,3 ²	1,3 ²	+14,5 ²	+3,6 ²
Tegal	28,1 ²	3,3 ²	13,8 ²	1,6 ²	NA	NA
Migrasi Neto Negatif Terbesar						
Yogyakarta	10,6	5,1	29,2	14,2	-18,6	-9,0
Banjarmasin	5,3 ²	1,7 ²	27,2	8,6	-21,9	-7,0
Karawang	18,4	1,5	44,5	3,7	-26,1 ²	-2,2 ²
Kota Bandung	14,6 ²	1,1 ²	42,5	3,3	-27,8 ²	-2,2 ²
Kota Tangerang	21,1 ²	2,3 ²	51,4	5,6	-30,3 ²	-3,3 ²
Padang	10,6	2,4	42,6	9,5	-31,9	-7,2
Pekanbaru	19,3	3,9	52,6	10,5	-33,3	-6,7
Jakarta Pusat	9,9 ²	1,9 ²	45,3	8,8	-35,3	-6,9
Bekasi	40,5	2,7	81,8	5,5	-41,2 ²	-2,8 ²
Jakarta Timur	33,1	2,3	76,9	5,3	-43,8 ²	-3,0 ²
Makassar	10,1 ²	1,6 ²	59,6	9,6	-49,5	-7,9
Jakarta Selatan	38,2 ²	3,5 ²	89,9	8,3	-51,7 ²	-4,7 ²
Jakarta Barat	NA	NA	63,8	5,5	-59,1	-5,1
Medan	8,7 ²	0,7 ²	71,2	6,1	-62,5	-5,4
Surabaya	11,2 ²	0,7 ²	75,9	4,9	-64,7	-4,1

Catatan:

¹Kesalahan Baku Relatif dihitung dengan aproksimasi.

²Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 9 Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Angka Migrasi Neto Positif Terbesar dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Angka Migrasi Neto Negatif Terbesar pada Pekerja, 2025

Kabupaten/Kota	Migrasi Masuk Risen Pekerja		Migrasi Keluar Risen Pekerja		Migrasi Neto Risen Pekerja ¹	
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Migrasi Neto Positif Terbesar						
Pakpak Bharat	2,8	8,3	NA	NA	2,2 ²	6,4 ²
Banjarbaru	14,2	10,4	5,6	4,1	8,6 ²	6,3 ²
Tana Tidung	1,0	6,6	NA	NA	0,9	5,9
Dharmasraya	9,3	7,1	1,7 ²	1,3 ²	7,5	5,8
Kampar	28,0	6,9	4,5 ²	1,1 ²	23,5	5,8
Halmahera Tengah	2,8	9,1	1,1 ²	3,6 ²	1,7 ²	5,5 ²
Lembata	5,5	7,2	1,4 ²	1,8 ²	4,1 ²	5,3 ²
Teluk Bintuni	3,5	7,2	0,9 ²	1,9 ²	2,6 ²	5,3 ²
Dairi	11,2	5,6	1,1 ²	0,6 ²	10,1	5,1
Malaka	7,1	6,0	NA	NA	6,0	5,0
Payakumbuh	7,0	9,1	3,1 ²	4,1 ²	3,9 ²	5,0 ²
Kebumen	53,4	6,6	13,1 ²	1,6 ²	40,3 ²	5,0 ²
Karo	18,9	6,9	5,5 ²	2,0 ²	13,4 ²	4,9 ²
Enrekang	8,1	5,8	1,6 ²	1,1 ²	6,6	4,7
Samosir	4,6 ²	5,2 ²	NA	NA	4,1 ²	4,6 ²
Angka Migrasi Neto Negatif Terbesar						
Sibolga	1,5	3,4	8,5 ²	19,3 ²	-7,0 ²	-16,0 ²
Kepulauan Seribu	0,2 ²	1,4 ²	NA	NA	NA	NA
Jayapura	NA	NA	8,2 ²	12,3	-7,5 ²	-11,3 ²
Yogyakarta	10,6	5,1	29,2	14,2	-18,6	-9,0
Sukamara	0,9 ²	2,6 ²	NA	NA	NA	NA
Seruyan	2,2 ²	2,5 ²	NA	10,6 ²	NA	NA
Makassar	10,1 ²	1,6 ²	59,6	9,6	-49,5	-7,9
Kupang	4,1 ²	1,9 ²	21,5	9,7	-17,4	-7,8
Padang	10,6	2,4	42,6	9,5	-31,9	-7,2
Banjarmasin	5,3 ²	1,7 ²	27,2	8,6	-21,9	-7,0
Jakarta Pusat	9,9 ²	1,9 ²	45,3	8,8	-35,3	-6,9
Pekanbaru	19,3	3,9	52,6	10,5	-33,3	-6,7
Ambon	3,8	2,3	13,5	8,2	-9,7	-5,8
Kendari	5,5	3,1	15,5	8,9	-10,1	-5,8
Medan	8,7 ²	0,7 ²	71,2	6,1	-62,5	-5,4

Catatan:

¹Kesalahan Baku Relatif dihitung dengan aproksimasi.

²Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 10 Dua Puluh Arus Migrasi Pekerja Migran Risen Antarkabupaten/kota dengan Volume Terbesar, 2025

Kabupaten/Kota Asal	Kabupaten/Kota Tujuan	Jumlah (ribu orang)
(1)	(2)	(3)
Jakarta Selatan	Depok	23,2
Pekanbaru	Kampar	19,0
Medan	Deli Serdang	17,3
Surabaya	Sidoarjo	15,6
Kota Bandung	Bandung	14,7
Kota Tangerang	Tangerang	13,9 ¹
Luar Negeri	Lombok Timur	12,1
Jakarta Selatan	Bogor	11,1
Bekasi	Bogor	10,4 ¹
Jakarta Timur	Depok	9,9 ¹
Makassar	Gowa	9,8
Jakarta Timur	Kota Bekasi	8,7
Depok	Bogor	8,6
Luar Negeri	Blitar	8,4
Jakarta Barat	Jakarta Utara	8,2 ¹
Banjarmasin	Banjar	8,1
Luar Negeri	Lombok Tengah	8,0
Bogor	Bogor	7,8
Cirebon	Cirebon	7,6 ¹
Demak	Semarang	6,9

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 11 Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Jenis Kelamin di 10 Provinsi Terpilih, 2025

Provinsi	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
DI Yogyakarta	55,8	44,2	100,0
Sumatera Barat	61,2	38,8	100,0
Nusa Tenggara Timur	54,4	45,6	100,0
Kepulauan Riau	61,1	38,9	100,0
Papua Barat	50,3	49,7	100,0
Sulawesi Tenggara	59,2	40,8	100,0
Maluku	63,4	36,6	100,0
Kalimantan Selatan	62,7	37,3	100,0
Sulawesi Barat	56,9	43,1	100,0
Sulawesi Selatan	60,6	39,4	100,0
Provinsi Lainnya	62,7	37,3	100,0
Indonesia	62,0	38,0	100,0

Lampiran 12 Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Kelompok Umur di 10 Provinsi Terpilih, 2025

Provinsi	Kelompok Umur				
	15–24	25–34	35–44	45–54	55+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DI Yogyakarta	14,8	43,2	21,7	12,4	8,0
Sumatera Barat	16,4	45,8	22,7	9,8	5,3
Nusa Tenggara Timur	18,4	60,9	11,2	6,4	3,1
Kepulauan Riau	25,7	46,8	22,6	3,8 ¹	NA
Papua Barat	18,6	49,9	26,3	1,8	3,4
Sulawesi Tenggara	24,5	47,2	15,6	9,8	3,0
Maluku	20,2	53,6	13,7	9,3	3,2
Kalimantan Selatan	17,2	41,8	22,3	11,4	7,4
Sulawesi Barat	22,4	47,3	12,1	11,1	7,1 ¹
Sulawesi Selatan	17,9	43,4	21,8	10,0	6,9
Provinsi Lainnya	15,0	45,0	22,6	10,7	6,7
Indonesia	15,6	45,5	21,9	10,5	6,4

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 13 Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Status Perkawinan di 10 Provinsi Terpilih, 2025

Provinsi	Status Perkawinan		
	Belum Kawin	Kawin	Cerai
(1)	(2)	(3)	(4)
DI Yogyakarta	18,1	77,8	4,1
Sumatera Barat	28,4	66,7	4,9
Nusa Tenggara Timur	44,2	52,6	3,2
Kepulauan Riau	35,4	61,0	NA
Papua Barat	45,1	52,9	2,0
Sulawesi Tenggara	38,9	57,0	4,1
Maluku	41,6	54,9	3,4
Kalimantan Selatan	19,0	75,6	5,4
Sulawesi Barat	29,4	65,0	5,6 ¹
Sulawesi Selatan	24,9	68,7	6,4
Provinsi Lainnya	21,2	73,6	5,2
Indonesia	22,9	72,0	5,1

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 14 Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Tingkat Pendidikan di 10 Provinsi Terpilih, 2025

Provinsi	Tingkat Pendidikan	
	Di Bawah SMA	SMA ke Atas
(1)	(2)	(3)
DI Yogyakarta	13,7	86,3
Sumatera Barat	24,0	76,0
Nusa Tenggara Timur	26,9	73,1
Kepulauan Riau	15,2	84,8
Papua Barat	23,4	76,6
Sulawesi Tenggara	24,7	75,3
Maluku	13,8	86,2
Kalimantan Selatan	29,0	71,0
Sulawesi Barat	41,0	59,0
Sulawesi Selatan	32,4	67,6
Provinsi Lainnya	32,6	67,4
Indonesia	31,1	68,9

Lampiran 15 Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di 10 Provinsi Terpilih, 2025

Provinsi	Lapangan Pekerjaan Utama					
	Pertanian	Industri Pengolahan	Konstruksi	Pertambangan dan penggalan; Penyediaan listrik, air, dan gas	Jasa Berorientasi Pasar	Jasa Tidak Berorientasi Pasar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DI Yogyakarta	5,8	16,3	5,2	2,4	46,6	23,7
Sumatera Barat	19,9	10,5	5,3	2,1	38,7	23,5
Nusa Tenggara Timur	28,9	8,6	4,4	1,1 ¹	28,2	28,8
Kepulauan Riau	NA	20,7	12,4 ¹	NA	39,3	19,3 ¹
Papua Barat	20,6	6,1	6,2 ¹	0,7	38,4	27,9
Sulawesi Tenggara	19,5	10,0	6,6 ¹	4,5	33,9	25,4
Maluku	25,9	9,2	4,1 ¹	4,3 ¹	28,8	27,7
Kalimantan Selatan	12,6	6,9	3,2	9,8	48,4	19,1
Sulawesi Barat	42,6	6,7 ¹	1,9	NA	24,6	22,7
Sulawesi Selatan	26,0	7,6	5,7	1,6	38,1	21,1
Provinsi Lainnya	15,9	15,2	5,9	1,7	41,5	19,8
Indonesia	16,7	14,2	5,8	1,9	40,8	20,5

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 16 Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Jenis Pekerjaan Utama di 10 Provinsi Terpilih, 2025

Provinsi	Jenis Pekerjaan Utama			
	TNI/POLRI	Tingkat keterampilan 3 dan 4 (tinggi)	Tingkat keterampilan 2 (menengah)	Tingkat keterampilan 1 (rendah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DI Yogyakarta	2,5 ¹	11,8	57,9	27,7
Sumatera Barat	0,4	17,4	62,2	20,0
Nusa Tenggara Timur	1,8 ¹	16,1	59,2	22,9
Kepulauan Riau	NA	3,4	76,7	19,5
Papua Barat	1,5 ¹	7,5	62,5	28,5
Sulawesi Tenggara	2,7	11,6	68,1	17,6
Maluku	1,8 ¹	6,2 ¹	67,7	24,3
Kalimantan Selatan	1,2 ¹	8,8	70,5	19,5
Sulawesi Barat	NA	16,9	60,3	22,1
Sulawesi Selatan	2,2 ¹	18,0	59,6	20,2
Provinsi Lainnya	1,2	18,1	62,8	17,9
Indonesia	1,3	17,3	62,7	18,7

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 17 Persentase Pekerja Migran Risen Menurut Status Formalitas Pekerjaan Utama di 10 Provinsi Terpilih, 2025

Provinsi	Status Formalitas Pekerjaan Utama	
	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)
DI Yogyakarta	60,8	39,2
Sumatera Barat	46,4	53,6
Nusa Tenggara Timur	45,5	54,5
Kepulauan Riau	75,9	24,1
Papua Barat	50,0	50,0
Sulawesi Tenggara	52,9	47,1
Maluku	39,4	60,6
Kalimantan Selatan	56,8	43,2
Sulawesi Barat	33,3	66,7
Sulawesi Selatan	48,5	51,5
Provinsi Lainnya	54,4	45,6
Indonesia	53,7	46,3

Lampiran 18 Pekerja Menurut Jenis Tempat Bekerja dan Periode Kepulangan, 2025

Jenis Tempat Bekerja	Periode Kepulangan (ribu orang)				Total
	Harian (pada hari yang sama)	Nonharian (tidak pada hari yang sama)	Tidak rutin	Tidak melakukan perjalanan pulang pergi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Di rumah tempat tinggalnya					
Rumah sendiri	–	–	–	26.192,8	26.192,8
Rumah majikan/pemberi kerja ¹	–	–	–	69,3	69,3
Di luar rumah tempat tinggalnya					
Rumah keluarga/teman/tetangga	2.181,5	73,1	44,0	–	2.298,6
Rumah majikan/pemberi kerja	9.529,8	675,2	168,7	–	10.373,8
Lokasi pertanian, lahan pertanian atau perikanan (sawah, kebun, ladang, dll)	38.670,8	1.339,4	366,6	–	40.376,7
Sentra usaha, kantor, pabrik, mal, pasar dengan bangunan, pertokoan, tempat/lokasi tetap	50.535,7	2.942,6	412,4	–	53.890,7
Pasar tanpa bangunan	1.065,5	34,6	9,7 ²	–	1.109,8
Jalan atau ruang publik lainnya tanpa struktur tetap	5.790,5	382,4	79,6	–	6.252,4
Kendaraan (tanpa ada tempat pangkal sehari-hari)	2.405,0	353,6	65,3	–	2.823,9
Rumah ke rumah	1.352,2	58,5	9,3 ²	–	1.420,0
Lainnya/tidak tahu	1.465,7	196,2	72,5	–	1.734,3
Total	112.996,5	6.055,5	1.228,1	26.262,1	146.542,3

Catatan:

¹Khusus pembantu rumah tangga, sopir, tukang kebun, dan yang sejenis yang menjadi anggota rumah tangga²Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 19 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian, 2022–2025

Status Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian				
Jumlah (ribu orang)	105.353,7	105.924,6	108.580,6	112.996,5
Persentase (%)	77,9	75,7	75,1	77,1
Pekerja Nonpelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian				
Jumlah (ribu orang)	29.943,0	33.927,8	36.061,4	33.545,7
Persentase (%)	22,1	24,3	24,9	22,9
Total				
Jumlah (ribu orang)	135.296,7	139.852,4	144.642,0	146.542,3
Persentase (%)	100,0	100,0	100,0	100,0

Lampiran 20 Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi, 2025

Provinsi	Status Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian					
	Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian		Pekerja Bukan Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian		Total	
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2.081,5	81,3	479,9	18,7	2.561,3	100,0
Sumatera Utara	6.334,9	79,4	1.641,4	20,6	7.976,3	100,0
Sumatera Barat	2.409,4	79,8	609,2	20,2	3.018,6	100,0
Riau	2.480,1	77,2	730,9	22,8	3.210,9	100,0
Jambi	1.485,2	80,2	366,7	19,8	1.851,9	100,0
Sumatera Selatan	3.603,9	80,2	888,6	19,8	4.492,6	100,0
Bengkulu	880,7	79,0	234,6	21,0	1.115,3	100,0
Lampung	3.820,9	78,7	1.032,5	21,3	4.853,4	100,0
Bangka Belitung	630,8	80,3	154,9	19,7	785,7	100,0
Kepulauan Riau	828,2	78,7	223,7	21,3	1.052,0	100,0
DKI Jakarta	4.030,0	78,6	1.098,5	21,4	5.128,5	100,0
Jawa Barat	18.081,5	73,8	6.425,3	26,2	24.506,9	100,0
Jawa Tengah	16.340,1	76,7	4.955,7	23,3	21.295,8	100,0
DI Yogyakarta	1.737,5	79,0	462,6	21,0	2.200,1	100,0
Jawa Timur	18.040,5	75,8	5.760,5	24,2	23.801,0	100,0
Banten	4.484,4	77,9	1.271,5	22,1	5.755,9	100,0
Bali	2.126,4	78,7	575,3	21,3	2.701,7	100,0
Nusa Tenggara Barat	2.477,0	79,7	629,7	20,3	3.106,7	100,0
Nusa Tenggara Timur	2.324,0	77,7	665,1	22,3	2.989,1	100,0
Kalimantan Barat	2.334,9	79,7	595,6	20,3	2.930,4	100,0
Kalimantan Tengah	1.072,1	75,6	345,6	24,4	1.417,7	100,0
Kalimantan Selatan	1.688,5	78,4	464,6	21,6	2.153,1	100,0
Kalimantan Timur	1.481,8	75,2	487,9	24,8	1.969,7	100,0
Kalimantan Utara	288,2	75,7	92,4	24,3	380,6	100,0
Sulawesi Utara	1.012,0	75,6	327,4	24,4	1.339,3	100,0
Sulawesi Tengah	1.283,8	77,7	369,1	22,3	1.652,8	100,0
Sulawesi Selatan	3.739,3	78,6	1.019,8	21,4	4.759,1	100,0
Sulawesi Tenggara	1.116,3	77,8	317,8	22,2	1.434,0	100,0
Gorontalo	479,0	75,6	154,3	24,4	633,3	100,0
Sulawesi Barat	622,1	77,7	178,4	22,3	800,4	100,0
Maluku	722,7	78,3	199,8	21,7	922,5	100,0
Maluku Utara	523,4	77,7	150,1	22,3	673,5	100,0
Papua Barat	216,7	75,2	71,6	24,8	288,3	100,0
Papua Barat Daya	231,3	76,6	70,5	23,4	301,9	100,0
Papua	346,3	79,8	87,7	20,2	434,0	100,0
Papua Selatan	157,2	72,2	60,5	27,8	217,7	100,0
Papua Tengah	537,8	68,1	252,4	31,9	790,2	100,0
Papua Pegunungan	946,4	91,0	93,6	9,0	1.040,0	100,0
Indonesia	112.996,5	77,1	33.545,7	22,9	146.542,3	100,0

Lampiran 21 Dua Puluh Arus Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian dengan Volume Terbesar, 2025

Kabupaten/Kota Asal	Kabupaten/Kota Tujuan	Jumlah (ribu orang)
(1)	(2)	(3)
Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor	1.604,0
Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang	1.197,7
Kota Surabaya	Kota Surabaya	1.152,2
Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1.147,8
Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	1.116,1
Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	1.093,0
Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi	1.035,8
Kabupaten Garut	Kabupaten Garut	960,4
Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	909,5
Kota Medan	Kota Medan	891,5
Kabupaten Cianjur	Kabupaten Cianjur	887,2
Kota Bandung	Kota Bandung	879,9
Kabupaten Karawang	Kabupaten Karawang	853,7
Kota Jakarta Timur	Kota Jakarta Timur	826,9
Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	786,6
Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	783,1
Kabupaten Brebes	Kabupaten Brebes	769,6
Kabupaten Cilacap	Kabupaten Cilacap	768,1
Kota Jakarta Barat	Kota Jakarta Barat	717,9
Kota Jakarta Selatan	Kota Jakarta Selatan	711,4

Lampiran 22 Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025

Provinsi	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Aceh	65,9	34,1
Sumatera Utara	62,8	37,2
Sumatera Barat	62,4	37,6
Riau	70,9	29,1
Jambi	68,3	31,7
Sumatera Selatan	65,0	35,0
Bengkulu	62,9	37,1
Lampung	66,7	33,3
Bangka Belitung	68,2	31,8
Kepulauan Riau	66,8	33,2
DKI Jakarta	66,5	33,5
Jawa Barat	68,3	31,7
Jawa Tengah	61,2	38,8
DI Yogyakarta	58,2	41,8
Jawa Timur	63,2	36,8
Banten	68,3	31,7
Bali	58,2	41,8
Nusa Tenggara Barat	61,0	39,0
Nusa Tenggara Timur	59,1	40,9
Kalimantan Barat	64,1	35,9
Kalimantan Tengah	67,7	32,3
Kalimantan Selatan	65,4	34,6
Kalimantan Timur	69,9	30,1
Kalimantan Utara	66,9	33,1
Sulawesi Utara	68,7	31,3
Sulawesi Tengah	66,5	33,5
Sulawesi Selatan	64,0	36,0
Sulawesi Tenggara	63,7	36,3
Gorontalo	67,2	32,8
Sulawesi Barat	64,9	35,1
Maluku	64,0	36,0
Maluku Utara	65,1	34,9
Papua Barat	62,9	37,1
Papua Barat Daya	64,6	35,4
Papua	66,7	33,3
Papua Selatan	60,3	39,7
Papua Tengah	58,7	41,3
Papua Pegunungan	54,9	45,1
Indonesia	64,5	35,5

Lampiran 23 Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	Kelompok Umur				
	15–24	25–34	35–44	45–54	55+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	13,0	24,7	25,2	20,6	16,5
Sumatera Utara	15,8	25,1	22,9	18,8	17,4
Sumatera Barat	13,1	24,0	23,3	19,8	19,8
Riau	15,3	24,8	24,5	20,1	15,3
Jambi	12,6	24,1	24,1	21,3	17,9
Sumatera Selatan	13,1	23,6	23,9	21,2	18,2
Bengkulu	12,2	23,8	25,2	20,6	18,3
Lampung	13,3	21,9	23,3	21,0	20,5
Bangka Belitung	14,8	24,7	24,7	20,8	15,0
Kepulauan Riau	14,4	27,3	25,0	20,8	12,5
DKI Jakarta	12,5	25,9	25,4	22,2	14,0
Jawa Barat	12,8	23,6	23,2	20,9	19,5
Jawa Tengah	12,7	20,5	21,6	20,6	24,6
DI Yogyakarta	9,9	19,5	20,7	20,9	29,1
Jawa Timur	11,6	20,7	21,3	21,1	25,2
Banten	13,3	25,9	25,5	20,7	14,6
Bali	13,2	22,8	21,7	20,8	21,4
Nusa Tenggara Barat	13,9	24,4	24,4	19,9	17,4
Nusa Tenggara Timur	15,0	27,2	22,8	17,8	17,2
Kalimantan Barat	13,9	24,7	23,9	20,7	16,8
Kalimantan Tengah	14,4	24,9	23,9	20,9	15,9
Kalimantan Selatan	12,9	24,3	23,7	21,4	17,8
Kalimantan Timur	14,3	27,9	24,7	19,8	13,3
Kalimantan Utara	15,0	26,1	25,3	19,0	14,5
Sulawesi Utara	9,9	22,6	23,9	21,1	22,5
Sulawesi Tengah	13,4	25,2	23,8	19,8	17,9
Sulawesi Selatan	15,2	25,0	23,2	19,5	17,2
Sulawesi Tenggara	14,5	25,1	24,0	20,1	16,3
Gorontalo	14,1	24,9	23,1	20,4	17,5
Sulawesi Barat	16,1	25,6	22,4	19,0	17,0
Maluku	12,3	26,9	25,1	19,5	16,1
Maluku Utara	13,5	24,4	26,5	19,2	16,4
Papua Barat	11,8	28,1	26,1	19,8	14,1
Papua Barat Daya	11,6	28,4	26,5	19,7	13,8
Papua	8,9	26,8	30,3	20,1	13,9
Papua Selatan	13,6	27,3	28,5	18,4	12,2
Papua Tengah	14,0	26,0	26,3	20,1	13,7
Papua Pegunungan	15,1	24,9	22,6	19,3	18,1
Indonesia	13,1	23,3	23,1	20,6	20,0

Lampiran 24 Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025

Provinsi	Status Perkawinan		
	Belum Kawin	Kawin	Cerai
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	24,4	68,1	7,5
Sumatera Utara	26,1	65,4	8,5
Sumatera Barat	22,7	69,4	7,8
Riau	24,8	68,7	6,4
Jambi	20,7	72,7	6,6
Sumatera Selatan	21,1	71,7	7,2
Bengkulu	18,6	74,2	7,2
Lampung	20,5	72,5	7,1
Bangka Belitung	24,0	69,0	7,0
Kepulauan Riau	26,3	68,3	5,5
DKI Jakarta	30,1	61,1	8,9
Jawa Barat	19,9	71,9	8,2
Jawa Tengah	20,0	71,9	8,0
DI Yogyakarta	19,3	72,5	8,2
Jawa Timur	18,3	71,7	10,0
Banten	23,4	68,8	7,8
Bali	22,1	72,5	5,4
Nusa Tenggara Barat	17,7	74,5	7,8
Nusa Tenggara Timur	27,1	67,0	5,9
Kalimantan Barat	21,8	70,7	7,5
Kalimantan Tengah	21,2	71,5	7,3
Kalimantan Selatan	20,9	70,8	8,4
Kalimantan Timur	25,9	67,9	6,2
Kalimantan Utara	25,0	67,7	7,3
Sulawesi Utara	21,9	70,2	7,9
Sulawesi Tengah	21,7	70,1	8,2
Sulawesi Selatan	25,5	67,1	7,5
Sulawesi Tenggara	23,4	69,5	7,1
Gorontalo	20,1	72,1	7,8
Sulawesi Barat	22,1	70,7	7,2
Maluku	22,4	71,8	5,9
Maluku Utara	19,6	72,8	7,6
Papua Barat	21,6	70,6	7,8
Papua Barat Daya	22,5	69,3	8,2
Papua	21,4	70,1	8,5
Papua Selatan	19,3	72,1	8,6
Papua Tengah	26,4	64,8	8,7
Papua Pegunungan	25,2	65,2	9,6
Indonesia	21,6	70,3	8,1

Lampiran 25 Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2025

Provinsi	Tingkat Pendidikan	
	Di Bawah SMA	SMA ke Atas
(1)	(2)	(3)
Aceh	40,4	59,6
Sumatera Utara	40,8	59,2
Sumatera Barat	47,3	52,7
Riau	44,1	55,9
Jambi	51,2	48,8
Sumatera Selatan	54,6	45,4
Bengkulu	48,9	51,1
Lampung	58,9	41,1
Bangka Belitung	50,6	49,4
Kepulauan Riau	28,4	71,6
DKI Jakarta	20,6	79,4
Jawa Barat	52,5	47,5
Jawa Tengah	59,2	40,8
DI Yogyakarta	42,3	57,7
Jawa Timur	56,4	43,6
Banten	45,4	54,6
Bali	39,8	60,2
Nusa Tenggara Barat	54,4	45,6
Nusa Tenggara Timur	50,5	49,5
Kalimantan Barat	57,8	42,2
Kalimantan Tengah	49,6	50,4
Kalimantan Selatan	51,5	48,5
Kalimantan Timur	33,1	66,9
Kalimantan Utara	42,9	57,1
Sulawesi Utara	42,9	57,1
Sulawesi Tengah	50,9	49,1
Sulawesi Selatan	48,9	51,1
Sulawesi Tenggara	43,3	56,7
Gorontalo	54,5	45,5
Sulawesi Barat	54,6	45,4
Maluku	37,8	62,2
Maluku Utara	44,8	55,2
Papua Barat	45,0	55,0
Papua Barat Daya	33,9	66,1
Papua	30,7	69,3
Papua Selatan	55,0	45,0
Papua Tengah	77,3	22,7
Papua Pegunungan	87,9	12,1
Indonesia	50,8	49,2

Lampiran 26 Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2025

Provinsi	Lapangan Pekerjaan Utama						
	Pertanian	Industri Pengolahan	Konstruksi	Pertambangan dan penggalian; Penyediaan listrik, air, dan gas	Jasa Berorientasi Pasar	Jasa Tidak Berorientasi Pasar	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	43,3	3,7	7,7	1,4	21,5	22,4	100,0
Sumatera Utara	38,4	7,6	6,8	1,3	28,9	17,0	100,0
Sumatera Barat	42,3	5,0	5,6	2,2	26,3	18,6	100,0
Riau	40,1	6,1	6,7	2,5	26,5	18,0	100,0
Jambi	48,4	3,8	5,2	4,1	22,4	16,0	100,0
Sumatera Selatan	51,4	4,0	6,2	2,3	21,6	14,5	100,0
Bengkulu	49,1	3,1	5,1	1,4	21,2	20,0	100,0
Lampung	46,5	7,3	6,2	0,9	25,6	13,6	100,0
Bangka Belitung	30,4	4,6	5,1	15,7	25,8	18,4	100,0
Kepulauan Riau	7,5	24,2	8,7	2,2	35,9	21,5	100,0
DKI Jakarta	0,4	10,8	5,4	0,8	59,2	23,4	100,0
Jawa Barat	19,3	17,7	8,0	1,4	37,0	16,6	100,0
Jawa Tengah	32,8	17,2	8,2	1,2	27,6	13,0	100,0
DI Yogyakarta	23,0	14,2	7,3	1,0	37,0	17,4	100,0
Jawa Timur	36,5	12,6	7,6	1,1	29,0	13,2	100,0
Banten	15,1	23,8	6,6	1,6	35,3	17,7	100,0
Bali	20,6	7,6	9,2	0,7	44,6	17,3	100,0
Nusa Tenggara Barat	41,0	6,9	7,7	2,5	24,9	17,1	100,0
Nusa Tenggara Timur	49,6	3,0	4,4	1,1	19,3	22,5	100,0
Kalimantan Barat	49,2	3,2	7,1	4,4	21,1	15,0	100,0
Kalimantan Tengah	39,5	3,7	5,7	8,3	22,0	20,8	100,0
Kalimantan Selatan	32,2	5,6	6,0	5,3	30,4	20,5	100,0
Kalimantan Timur	20,8	5,0	8,7	9,8	33,9	21,8	100,0
Kalimantan Utara	33,7	6,0	6,3	4,4	23,8	25,8	100,0
Sulawesi Utara	26,6	9,8	8,1	3,5	29,3	22,5	100,0
Sulawesi Tengah	45,6	5,8	6,8	2,3	17,5	22,0	100,0
Sulawesi Selatan	42,0	5,1	8,1	1,3	25,1	18,4	100,0
Sulawesi Tenggara	38,2	5,9	6,9	3,1	21,7	24,2	100,0
Gorontalo	35,5	5,7	5,7	2,9	26,6	23,6	100,0
Sulawesi Barat	55,6	4,2	4,5	0,8	16,6	18,3	100,0
Maluku	36,3	10,0	3,9	1,6	21,5	26,7	100,0
Maluku Utara	28,2	25,5	3,7	3,7	16,3	22,7	100,0
Papua Barat	44,8	2,2	5,8	0,7	16,3	30,2	100,0
Papua Barat Daya	30,4	5,2	6,9	2,6	30,9	24,0	100,0
Papua	29,3	3,9	5,3	1,3	28,6	31,6	100,0
Papua Selatan	51,7	2,7	4,9	0,6 ¹	15,0	25,2	100,0
Papua Tengah	75,1	1,4 ¹	3,4	1,7 ¹	9,9	8,6	100,0
Papua Pegunungan	95,6	NA	NA	NA	1,1 ¹	3,0	100,0
Indonesia	33,2	11,5	7,1	1,8	29,8	16,6	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 27 Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2025

Provinsi	Jenis Pekerjaan Utama			
	TNI/POLRI	Tingkat keterampilan 3 dan 4 (tinggi)	Tingkat keterampilan 2 (menengah)	Tingkat keterampilan 1 (rendah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	1,1	16,0	59,7	23,2
Sumatera Utara	0,5	11,9	59,6	28,0
Sumatera Barat	0,4	13,7	63,9	21,9
Riau	0,3	14,1	55,4	30,1
Jambi	0,5	11,5	61,6	26,4
Sumatera Selatan	0,4	10,3	65,1	24,2
Bengkulu	0,6	13,3	66,1	20,0
Lampung	0,4	9,0	64,7	25,9
Bangka Belitung	1,0	12,2	63,2	23,7
Kepulauan Riau	1,3 ¹	18,6	67,2	13,0
DKI Jakarta	0,7 ¹	21,3	61,6	16,3
Jawa Barat	0,4	12,6	62,3	24,7
Jawa Tengah	0,3	9,1	67,1	23,5
DI Yogyakarta	0,6 ¹	14,1	67,2	18,1
Jawa Timur	0,3	11,0	61,6	27,0
Banten	0,2 ¹	12,6	62,0	25,1
Bali	0,7	13,2	65,5	20,5
Nusa Tenggara Barat	0,5	12,4	54,5	32,5
Nusa Tenggara Timur	0,7	16,3	65,7	17,3
Kalimantan Barat	0,7	10,9	65,4	23,0
Kalimantan Tengah	1,0	16,6	59,1	23,3
Kalimantan Selatan	0,5	14,3	67,7	17,4
Kalimantan Timur	1,1	19,4	63,2	16,3
Kalimantan Utara	0,9	18,3	59,7	21,1
Sulawesi Utara	1,0 ¹	15,7	62,3	21,0
Sulawesi Tengah	0,6	14,8	67,6	17,0
Sulawesi Selatan	0,7	13,8	64,1	21,4
Sulawesi Tenggara	1,3	13,9	72,8	12,1
Gorontalo	0,9	14,9	60,1	24,0
Sulawesi Barat	0,4	13,5	71,6	14,5
Maluku	2,6 ¹	17,9	70,5	9,0
Maluku Utara	1,2 ¹	14,8	68,1	15,9
Papua Barat	1,9	17,9	69,2	11,0
Papua Barat Daya	1,4	18,0	67,5	13,1
Papua	3,8 ¹	17,4	67,6	11,1
Papua Selatan	1,9 ¹	15,2	73,1	9,8
Papua Tengah	0,5 ¹	6,8	78,4	14,3
Papua Pegunungan	NA	1,7	97,9	NA
Indonesia	0,5	12,4	63,7	23,4

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 28 Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Status Formalitas Pekerjaan Utama, 2025

Provinsi	Status Formalitas Pekerjaan Utama		
	Formal	Informal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	39,1	60,9	100,0
Sumatera Utara	47,6	52,4	100,0
Sumatera Barat	39,7	60,3	100,0
Riau	55,5	44,5	100,0
Jambi	47,2	52,8	100,0
Sumatera Selatan	40,8	59,2	100,0
Bengkulu	39,2	60,8	100,0
Lampung	39,1	60,9	100,0
Bangka Belitung	54,6	45,4	100,0
Kepulauan Riau	76,4	23,6	100,0
DKI Jakarta	72,9	27,1	100,0
Jawa Barat	51,5	48,5	100,0
Jawa Tengah	45,8	54,2	100,0
DI Yogyakarta	52,3	47,7	100,0
Jawa Timur	44,8	55,2	100,0
Banten	62,7	37,3	100,0
Bali	57,2	42,8	100,0
Nusa Tenggara Barat	35,7	64,3	100,0
Nusa Tenggara Timur	36,6	63,4	100,0
Kalimantan Barat	47,5	52,5	100,0
Kalimantan Tengah	55,2	44,8	100,0
Kalimantan Selatan	52,6	47,4	100,0
Kalimantan Timur	66,7	33,3	100,0
Kalimantan Utara	57,4	42,6	100,0
Sulawesi Utara	50,8	49,2	100,0
Sulawesi Tengah	40,3	59,7	100,0
Sulawesi Selatan	43,2	56,8	100,0
Sulawesi Tenggara	44,3	55,7	100,0
Gorontalo	43,6	56,4	100,0
Sulawesi Barat	32,7	67,3	100,0
Maluku	39,3	60,7	100,0
Maluku Utara	40,0	60,0	100,0
Papua Barat	41,3	58,7	100,0
Papua Barat Daya	49,5	50,5	100,0
Papua	53,5	46,5	100,0
Papua Selatan	41,1	58,9	100,0
Papua Tengah	17,2	82,8	100,0
Papua Pegunungan	4,5	95,5	100,0
Indonesia	47,8	52,2	100,0

Lampiran 29 Persentase Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Moda Transportasi Utama, 2025

Provinsi	Moda Transportasi Utama		
	Transportasi Pribadi	Lainnya (termasuk Transportasi Umum, Transportasi Online, Jalan Kaki/Tidak Menggunakan Kendaraan)	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	86,3	13,7	100,0
Sumatera Utara	73,9	26,1	100,0
Sumatera Barat	73,4	26,6	100,0
Riau	90,4	9,6	100,0
Jambi	89,8	10,2	100,0
Sumatera Selatan	85,0	15,0	100,0
Bengkulu	84,1	15,9	100,0
Lampung	84,1	15,9	100,0
Bangka Belitung	93,1	6,9	100,0
Kepulauan Riau	90,7	9,3	100,0
DKI Jakarta	76,2	23,8	100,0
Jawa Barat	66,9	33,1	100,0
Jawa Tengah	76,4	23,6	100,0
DI Yogyakarta	78,5	21,5	100,0
Jawa Timur	80,5	19,5	100,0
Banten	73,5	26,5	100,0
Bali	82,9	17,1	100,0
Nusa Tenggara Barat	63,6	36,4	100,0
Nusa Tenggara Timur	44,7	55,3	100,0
Kalimantan Barat	81,8	18,2	100,0
Kalimantan Tengah	87,1	12,9	100,0
Kalimantan Selatan	85,7	14,3	100,0
Kalimantan Timur	91,6	8,4	100,0
Kalimantan Utara	84,4	15,6	100,0
Sulawesi Utara	69,7	30,3	100,0
Sulawesi Tengah	80,3	19,7	100,0
Sulawesi Selatan	76,2	23,8	100,0
Sulawesi Tenggara	80,4	19,6	100,0
Gorontalo	66,6	33,4	100,0
Sulawesi Barat	69,4	30,6	100,0
Maluku	50,1	49,9	100,0
Maluku Utara	62,7	37,3	100,0
Papua Barat	62,0	38,0	100,0
Papua Barat Daya	72,3	27,7	100,0
Papua	67,6	32,4	100,0
Papua Selatan	64,8	35,2	100,0
Papua Tengah	27,7	72,3	100,0
Papua Pegunungan	4,5	95,5	100,0
Indonesia	75,2	24,8	100,0

Lampiran 30 Penduduk Bekerja Menurut Lokasi Tempat Kerja dan Periode Pulang Pergi, 2025

Lokasi Tempat Kerja	Periode Pulang Pergi								Total	
	Berkala Harian		Berkala Nonharian		Tidak Berkala		Tidak Melakukan Perjalanan Pulang Pergi			
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Di dalam kabupaten/kota tempat tinggal	105.303,6	78,1	2.573,8	1,9	628,7	0,5	26.262,1	19,5	134.768	100,0
Di luar kabupaten/kota tempat tinggal	7.692,9	65,3	3.481,7	29,6	599,4	5,1	–	–	11.775	100,0
Dalam provinsi	6.137,9	73,9	1.997,7	24,1	166,7	2,0	–	–	8.303	100,0
Di luar provinsi (termasuk luar negeri)	1.555,0	46,5	1.484,0	42,9	432,7	10,6	–	–	3.472	100,0
Total	112.996,5	77,1	6.055,5	4,1	1.228,1	0,8	26.262,1	17,9	146.542	100,0

Lampiran 31 Penduduk Bekerja Menurut Status Komuter, 2025

Status Komuter	Tahun									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pekerja komuter										
Jumlah (ribu orang)	7.080,9	7.890,9	8.565,5	8.887,0	7.014,6	7.340,0	8.074,9	7.384,6	7.588,4	7.692,9
Persentase (%)	6,0	6,5	6,8	6,9	5,5	5,6	6,0	5,3	5,2	5,2
Pekerja nonkomuter										
Jumlah (ribu orang)	111.331,1	113.131,6	117.716,7	119.868,3	121.439,6	123.710,5	127.221,8	132.467,8	137.053,6	138.849,4
Persentase (%)	94,0	93,5	93,2	93,1	94,5	94,4	94,0	94,7	94,8	94,8
Total										
Jumlah (ribu orang)	118.412,0	121.022,4	126.282,2	128.755,3	128.454,2	131.050,5	135.296,7	139.852,4	144.642,0	146.542,3
Persentase (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Lampiran 32 Pekerja Menurut Provinsi Tempat Tinggal Sekarang dan Status Pekerja Komuter, 2025

Provinsi	Status Pekerja Komuter				Jumlah	
	Pekerja Komuter		Pekerja Nonkomuter		Jumlah (ribu orang)	%
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	72,0	2,8	2.489,4	97,2	2.561,3	100,0
Sumatera Utara	339,2	4,3	7.637,0	95,7	7.976,3	100,0
Sumatera Barat	104,6	3,5	2.914,0	96,6	3.018,6	100,0
Riau	46,8	1,5	3.164,1	98,6	3.210,9	100,0
Jambi	60,2	3,3	1.791,6	96,8	1.851,9	100,0
Sumatera Selatan	91,6	2,0	4.401,0	98,0	4.492,6	100,0
Bengkulu	32,4	2,9	1.082,9	97,1	1.115,3	100,0
Lampung	165,5	3,4	4.687,9	96,6	4.853,4	100,0
Bangka Belitung	33,6	4,3	752,1	95,7	785,7	100,0
Kepulauan Riau	15,7	1,5	1.036,3	98,5	1.052,0	100,0
DKI Jakarta	885,9	17,3	4.242,5	82,7	5.128,5	100,0
Jawa Barat	1.893,7	7,7	22.613,2	92,3	24.506,9	100,0
Jawa Tengah	1.146,0	5,4	20.149,8	94,7	21.295,8	100,0
DI Yogyakarta	287,3	13,1	1.912,8	86,9	2.200,1	100,0
Jawa Timur	941,5	4,0	22.859,5	96,0	23.801,0	100,0
Banten	565,3	9,8	5.190,6	90,2	5.755,9	100,0
Bali	246,4	9,1	2.455,4	90,8	2.701,7	100,0
Nusa Tenggara Barat	102,9	3,3	3.003,8	96,7	3.106,7	100,0
Nusa Tenggara Timur	30,1	1,0	2.959,0	99,0	2.989,1	100,0
Kalimantan Barat	92,4	3,2	2.838,0	96,9	2.930,4	100,0
Kalimantan Tengah	7,1	0,5	1.410,6	99,5	1.417,7	100,0
Kalimantan Selatan	140,6	6,5	2.012,6	93,5	2.153,1	100,0
Kalimantan Timur	19,4	1,0	1.950,4	99,1	1.969,7	100,0
Kalimantan Utara	0,7 ¹	0,2 ¹	379,9	99,8	380,6	100,0
Sulawesi Utara	63,9	4,8	1.275,5	95,2	1.339,3	100,0
Sulawesi Tengah	23,4	1,4	1.629,5	98,6	1.652,8	100,0
Sulawesi Selatan	189,2	4,0	4.569,9	96,0	4.759,1	100,0
Sulawesi Tenggara	24,6	1,7	1.409,5	98,3	1.434,0	100,0
Gorontalo	35,7	5,6	597,6	94,4	633,3	100,0
Sulawesi Barat	6,6 ¹	0,8 ¹	793,9	99,2	800,4	100,0
Maluku	14,7	1,6	907,8	98,4	922,5	100,0
Maluku Utara	3,5	0,5	670,0	99,4	673,5	100,0
Papua Barat	0,4 ¹	0,1 ¹	288,0	99,9	288,3	100,0
Papua Barat Daya	2,8 ¹	0,9 ¹	299,1	99,1	301,9	100,0
Papua	7,2	1,7	426,8	98,4	434,0	100,0
Papua Selatan	NA	NA	217,7	100,0	217,7	100,0
Papua Tengah	NA	NA	790,2	100,0	790,2	100,0
Papua Pegunungan	NA	NA	1.040,0	100,0	1.040,0	100,0
Indonesia	7.692,9	5,2	138.849,3	94,8	146.542,3	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 33 Pekerja Menurut Status Pekerja Komuter di 15 Kabupaten/Kota Tempat Tinggal dengan Pekerja Komuter Terbesar, 2025

Kabupaten/Kota Tempat Tinggal Saat Survei	Status Pekerja Komuter				Jumlah	
	Pekerja Komuter		Pekerja Nonkomuter		Jumlah (ribu orang)	%
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Depok	356,3	35,9	637,4	64,1	993,7	100,0
Kota Bekasi	304,5	24,3	946,9	75,7	1.251,4	100,0
Kota Jakarta Timur	303,8	21,0	1.143,0	79,0	1.446,9	100,0
Kab. Bogor	274,9	10,5	2.346,0	89,5	2.620,9	100,0
Kota Jakarta Barat	233,0	19,9	936,3	80,1	1.169,3	100,0
Kota Tangerang	199,8	21,7	720,6	78,3	920,5	100,0
Kab. Sidoarjo	189,9	16,7	950,2	83,3	1.140,2	100,0
Kota Jakarta Selatan	168,5	15,5	921,4	84,5	1.089,8	100,0
Kab. Bekasi	153,7	10,3	1.332,2	89,7	1.485,9	100,0
Kab. Deli Serdang	153,1	15,3	845,5	84,7	998,5	100,0
Kab. Demak	134,1	19,8	543,7	80,2	677,7	100,0
Kab. Bandung	125,8	7,0	1.675,7	93,0	1.801,6	100,0
Kota Tangerang Selatan	120,2	18,6	526,4	81,4	646,6	100,0
Kab. Bantul	118,6	20,0	473,8	80,0	592,4	100,0
Kab. Tangerang	111,6	6,9	1.514,6	93,1	1.626,2	100,0
Kabupaten lainnya	4.745,1	3,7	123.335,6	96,3	128.080,7	100,0
Indonesia	7.692,9	5,2	138.849,3	94,8	146.542,3	100,0

Lampiran 34 Pekerja Menurut Status Pekerja Komuter di 15 Kabupaten/Kota Tempat Tinggal dengan Persentase Pekerja Komuter Tertinggi, 2025

Kabupaten/Kota Tempat Tinggal Saat Survei	Status Pekerja Komuter				Jumlah	
	Pekerja Komuter		Pekerja Nonkomuter		Jumlah (ribu orang)	%
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Depok	356,3	35,86	637,4	64,14	993,7	100,00
Kota Mojokerto	18,2	25,03	54,4	74,97	72,6	100,00
Kota Bekasi	304,5	24,33	946,9	75,67	1.251,4	100,00
Kota Cimahi	64,7	22,22	226,6	77,78	291,3	100,00
Kota Tangerang	199,8	21,71	720,6	78,29	920,5	100,00
Kab. Gowa	89,1	21,55	324,3	78,45	413,4	100,00
Kota Jakarta Timur	303,8	21,00	1.143,0	79,00	1.446,9	100,00
Kab. Bantul	118,6	20,02	473,8	79,98	592,4	100,00
Kota Jakarta Barat	233,0	19,93	936,3	80,07	1.169,3	100,00
Kab. Demak	134,1	19,78	543,7	80,22	677,7	100,00
Kota Jakarta Pusat	99,2	19,32	414,4	80,68	513,6	100,00
Kab. Sukoharjo	97,0	19,12	410,4	80,88	507,4	100,00
Kota Yogyakarta	39,3	19,11	166,4	80,89	205,7	100,00
Kota Denpasar	81,3	19,05	345,4	80,95	426,6	100,00
Kota Tangerang Selatan	120,2	18,59	526,4	81,41	646,6	100,00
Kabupaten lainnya	5.433,8	3,98	130.979,4	96,02	136.413,1	100,00
Indonesia	7.692,9	5,25	138.849,3	94,75	146.542,3	100,00

Lampiran 35 Pekerja Komuter di 15 Kabupaten/Kota Tujuan Bekerja Terbesar, 2025

Kabupaten/Kota Tempat Tujuan Bekerja	Pekerja Komuter	
	Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)
Kota Jakarta Selatan	557,2	39,2
Kota Jakarta Pusat	420,6	48,5
Kota Jakarta Barat	247,6	22,4
Kota Jakarta Timur	247,2	20,2
Kota Surabaya	241,2	15,1
Kota Jakarta Utara	223,1	23,8
Kota Bandung	201,7	16,8
Kota Medan	159,4	14,3
Kab. Bekasi	154,2	11,8
Kota Surakarta	149,3	45,0
Kota Semarang	143,6	15,9
Kota Yogyakarta	129,5	46,9
Kota Tangerang	124,9	16,9
Kota Makassar	122,8	19,4
Kab. Sleman	121,6	19,4
Kabupaten lainnya	4.449,0	3,4
Total	7.692,9	5,2

Lampiran 36 Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Arus Komuter Neto Positif Terbesar dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Arus Komuter Neto Negatif Terbesar pada Pekerja, 2025

Kabupaten/Kota	Pekerja Komuter Masuk		Pekerja Komuter Keluar		Neto	
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Komuter Neto Positif Terbesar						
Kota Jakarta Selatan	557,2	39,2	168,5	15,5	+388,8	+23,7
Kota Jakarta Pusat	420,6	48,5	99,2	19,3	+321,4	+29,2
Kota Surabaya	241,2	15,1	41,7 ¹	2,7	+199,5	+12,4
Kota Bandung	201,7	16,8	29,4	2,3	+172,3	+14,5
Kota Medan	159,4	14,3	6,0 ¹	0,5	+153,4	+13,8
Kota Jakarta Utara	223,1	23,8	81,3	9,1	+141,8	+14,7
Kota Semarang	143,6	15,9	23,0	2,4	+120,7	+13,5
Kota Makassar	122,8	19,4	8,4 ¹	1,3	+114,4	+18,1
Kota Surakarta	149,3	45,0	37,8	13,1	+111,6	+31,9
Kota Yogyakarta	129,5	46,9	39,3	19,1	+90,2	+27,8
Kab. Badung	117,5	31,9	43,5	12,8	+74,0	+19,1
Kota Cirebon	76,8	39,0	16,5	9,5	+60,2	+29,5
Kab. Sleman	121,6	19,4	65,0	9,8	+56,6	+9,6
Kota Malang	76,8	18,7	24,6	5,4	+52,2	+13,3
Kota Mataram	57,0	25,6	11,0	4,9	+46,0	+20,7
Komuter Neto Negatif Terbesar						
Kota Depok	69,2	12,0	356,3	10,5	-287,2	-23,9
Kota Bekasi	89,9	11,3	304,5	24,3	-214,6	-13,0
Kab. Bogor	76,9	4,2	274,9	35,9	-198,0	-6,3
Kab. Deli Serdang	NA	NA	153,1	7,0	-153,1	-15,3
Kab. Sidoarjo	70,2	8,5	189,9	2,3	-119,7	-8,2
Kab. Demak	20,1	4,4	134,1	0,2	-114,0	-15,4
Kab. Gowa	9,5	3,9	89,1	5,7	-79,6	-17,6
Kab. Bandung Barat	23,7	3,6	103,0	1,2	-79,2	-7,1
Kota Tangerang	124,9	16,9	199,8	7,4	-75,0	-4,8
Kab. Bantul	58,2	14,1	118,6	15,3	-60,4	-5,9
Kab. Cirebon	29,3	3,4	88,9	16,7	-59,7	-4,0
Kota Jakarta Timur	247,2	20,2	303,8	10,7	-56,6	-0,8
Kab. Malang	32,1	2,7	87,2	1,5	-55,1	-3,0
Kab. Kendal	14,9 ¹	3,3 ¹	68,3	2,5	-53,4	-7,8
Kab. Boyolali	40,2	7,9	85,4	3,1	-45,2	-5,2

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 37 Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Persentase Komuter Neto Positif Tertinggi dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Persentase Komuter Neto Negatif Terendah pada Pekerja, 2025

Kabupaten/Kota	Pekerja Komuter Masuk		Pekerja Komuter Keluar		Neto	
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Komuter Neto Positif Tertinggi						
Kota Surakarta	149,3	45,0	37,8	13,1	+111,6	+31,9
Kota Cirebon	76,8	39,0	16,5	9,5	+60,2	+29,5
Kota Jakarta Pusat	420,6	48,5	99,2	19,3	+321,4	+29,2
Kota Yogyakarta	129,5	46,9	39,3	19,1	+90,2	+27,8
Kota Magelang	26,1 ¹	39,7	7,8	11,9	+18,3 ¹	+27,8
Kota Salatiga	43,4	36,3	13,0	11,8	+30,4	+24,5
Kota Jakarta Selatan	557,2	39,2	168,5	15,5	+388,8	+23,7
Kota Bukittinggi	21,3	30,9	5,0	7,9	+16,3	+23,0
Kota Mataram	57,0	25,6	11,0	4,9	+46,0	+20,7
Kota Pematang Siantar	43,5 ¹	27,8	10,4	7,2	+33,0 ¹	+20,6
Kota Sibolga	11,8	25,5	2,6	5,9	+9,3	+19,6
Kab. Badung	117,5	31,9	43,5	12,8	+74,0	+19,1
Kota Makassar	122,8	19,4	8,4 ¹	1,3 ¹	+114,4 ¹	+18,1 ¹
Kota Metro	23,8 ¹	25,9 ¹	7,7	8,5	+16,1 ¹	+17,4 ¹
Kota Padang Panjang	6,6 ¹	23,9 ¹	1,9	6,6	+4,7 ¹	+17,3 ¹
Persentase Komuter Neto Negatif Terendah						
Kota Depok	69,2	12,0	356,3	35,9	-287,2	-23,9
Kab. Gowa	9,5	3,9	89,1	21,5	-79,6	-17,6
Kab. Demak	20,1	4,4	134,1	19,8	-114,0	-15,4
Kab. Deli Serdang	NA	NA	153,1	15,3	-153,1	-15,3
Kota Bekasi	89,9	11,3	304,5	24,3	-214,6	-13,0
Kab. Tabanan	8,5 ¹	4,1	47,4	16,2	-38,9 ¹	-12,1
Kab. Maros	4,7 ¹	3,4 ¹	30,2	15,0	-25,5 ¹	-11,6 ¹
Kab. Barito Kuala	7,5 ¹	6,0 ¹	30,0	17,1	-22,5 ¹	-11,1 ¹
Kab. Minahasa	2,6	2,4	20,2	12,0	-17,6	-9,6
Kab. Aceh besar	8,6	5,3	29,3	14,8	-20,7	-9,5
Kab. Lombok Barat	17,8 ¹	6,4	62,8	15,3	-44,9 ¹	-8,9
Kab. Kubu Raya	18,1	7,5	51,6	16,2	-33,5	-8,7
Kab. Sidoarjo	70,2	8,5	189,9	16,7	-119,7	-8,2
Kab. Kendal	14,9 ¹	3,3 ¹	68,3	11,1	-53,4 ¹	-7,8 ¹
Kab. Sigi	1,9 ¹	1,6 ¹	14,2	9,3	-12,3 ¹	-7,7 ¹

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 38 Dua Puluh Besar Arus Pekerja Komuter Antarkabupaten/kota, 2025

Kabupaten/Kota Asal	Kabupaten/Kota Tujuan	Jumlah (ribu orang)
(1)	(2)	(3)
Kota Depok	Kota Jakarta Selatan	148,3
Kab. Deli Serdang	Kota Medan	139,4
Kab. Sidoarjo	Kota Surabaya	134,8
Kab. Bandung	Kota Bandung	104,4
Kota Jakarta Timur	Kota Jakarta Selatan	93,0
Kab. Gowa	Kota Makassar	77,4
Kota Bekasi	Kota Jakarta Timur	73,6
Kota Bekasi	Kab. Bekasi	71,7
Kota Jakarta Timur	Kota Jakarta Pusat	70,0
Kota Denpasar	Kab. Badung	67,2
Kab. Malang	Kota Malang	67,0
Kota Jakarta Barat	Kota Jakarta Utara	66,2
Kab. Bantul	Kota Yogyakarta	63,8
Kab. Tangerang	Kota Tangerang	62,7
Kota Depok	Kota Jakarta Pusat	62,4
Kab. Gresik	Kota Surabaya	59,9
Kab. Demak	Kota Semarang	59,2
Kota Tangerang Selatan	Kota Jakarta Selatan	56,7
Kab. Sukoharjo	Kota Surakarta	56,4
Kota Tangerang	Kota Jakarta Barat	53,4

Lampiran 39 Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	67,9	32,1	100,0
Sumatera Utara	69,1	30,9	100,0
Sumatera Barat	68,8	31,2	100,0
Riau	83,0	17,0	100,0
Jambi	72,9	27,1	100,0
Sumatera Selatan	77,4	22,6	100,0
Bengkulu	66,8	33,2	100,0
Lampung	73,3	26,7	100,0
Bangka Belitung	64,5	35,5	100,0
Kepulauan Riau	71,0	29,0	100,0
DKI Jakarta	67,7	32,3	100,0
Jawa Barat	73,4	26,6	100,0
Jawa Tengah	67,2	32,8	100,0
DI Yogyakarta	64,7	35,3	100,0
Jawa Timur	74,6	25,4	100,0
Banten	75,5	24,5	100,0
Bali	63,8	36,2	100,0
Nusa Tenggara Barat	74,6	25,4	100,0
Nusa Tenggara Timur	62,6	37,4	100,0
Kalimantan Barat	74,4	25,6	100,0
Kalimantan Tengah	84,9	15,1 ¹	100,0
Kalimantan Selatan	75,7	24,3	100,0
Kalimantan Timur	89,9	10,1 ¹	100,0
Kalimantan Utara	88,6	NA	100,0
Sulawesi Utara	65,9	34,1	100,0
Sulawesi Tengah	66,4	33,6	100,0
Sulawesi Selatan	73,1	26,9	100,0
Sulawesi Tenggara	72,5	27,5	100,0
Gorontalo	68,3	31,7	100,0
Sulawesi Barat	74,2	25,8 ¹	100,0
Maluku	58,7	41,3	100,0
Maluku Utara	70,3	29,7 ¹	100,0
Papua Barat	87,0	NA	100,0
Papua Barat Daya	65,9	34,1	100,0
Papua	78,3	21,7 ¹	100,0
Papua Selatan	NA	NA	100,0
Papua Tengah	NA	NA	100,0
Papua Pegunungan	NA	NA	100,0
Indonesia	71,2	28,8	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 40 Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	Kelompok Umur					Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	10,9	29,6	30,0	19,5	10,0	100,0
Sumatera Utara	15,8	33,0	23,4	16,8	11,0	100,0
Sumatera Barat	16,2	33,9	24,8	14,9	10,1	100,0
Riau	11,3 ¹	34,3	25,2	23,4	5,8 ¹	100,0
Jambi	16,8	30,1	24,7	16,7	11,8	100,0
Sumatera Selatan	18,7	29,1	26,1	17,9	8,2	100,0
Bengkulu	18,0	28,9	26,4	19,2	7,5	100,0
Lampung	22,4	27,1	25,1	17,0	8,5	100,0
Bangka Belitung	17,3	33,7	25,3	15,8	8,0 ¹	100,0
Kepulauan Riau	18,0 ¹	33,6	15,4 ¹	23,4	9,6 ¹	100,0
DKI Jakarta	11,6	31,4	26,6	22,0	8,4	100,0
Jawa Barat	13,2	34,1	25,8	18,4	8,6	100,0
Jawa Tengah	17,8	33,1	26,3	15,5	7,2	100,0
DI Yogyakarta	15,2	34,0	26,9	14,3	9,6	100,0
Jawa Timur	13,7	31,5	26,2	17,6	10,9	100,0
Banten	10,8	34,1	28,3	19,3	7,4	100,0
Bali	19,1	31,9	25,3	16,3	7,4	100,0
Nusa Tenggara Barat	13,7	36,7	25,5	16,8	7,3 ¹	100,0
Nusa Tenggara Timur	10,6 ¹	29,7	32,5	20,7 ¹	6,5 ¹	100,0
Kalimantan Barat	18,9	35,1	24,9	14,8	6,3	100,0
Kalimantan Tengah	13,6 ¹	37,6 ¹	28,3	19,4 ¹	1,1	100,0
Kalimantan Selatan	13,9	30,6	26,5	18,1	10,8	100,0
Kalimantan Timur	13,7 ¹	31,1	28,6 ¹	19,5 ¹	7,0 ¹	100,0
Kalimantan Utara	NA	12,8 ¹	NA	53,6 ¹	NA	100,0
Sulawesi Utara	13,3	28,9	29,3	19,0	9,5	100,0
Sulawesi Tengah	17,9	26,4	26,1	20,2	9,4 ¹	100,0
Sulawesi Selatan	16,5	40,5	22,9	14,5	5,6	100,0
Sulawesi Tenggara	10,9	39,4	21,5	22,6	5,6 ¹	100,0
Gorontalo	18,9	30,8	24,8	18,1	7,4	100,0
Sulawesi Barat	NA	43,0	22,0 ¹	15,8 ¹	NA	100,0
Maluku	12,4 ¹	30,2	29,7	14,3 ¹	13,3 ¹	100,0
Maluku Utara	9,5 ¹	32,3 ¹	26,9 ¹	19,4	NA	100,0
Papua Barat	NA	80,7	NA	6,4	NA	100,0
Papua Barat Daya	NA	29,2 ¹	46,0 ¹	6,0 ¹	8,6 ¹	100,0
Papua	NA	18,3 ¹	39,6 ¹	25,0 ¹	NA	100,0
Papua Selatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papua Tengah	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Indonesia	14,5	32,9	26,1	17,9	8,6	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 41 Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025

Provinsi	Status Perkawinan			Total
	Belum Kawin	Kawin	Cerai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	24,5	71,9	3,6 ¹	100,0
Sumatera Utara	28,2	66,9	4,9	100,0
Sumatera Barat	26,4	69,4	4,1	100,0
Riau	18,7 ¹	79,4	NA	100,0
Jambi	24,3	72,9	2,8 ¹	100,0
Sumatera Selatan	28,5	68,8	2,7 ¹	100,0
Bengkulu	25,3	68,3	6,4 ¹	100,0
Lampung	31,3	62,8	5,9	100,0
Bangka Belitung	28,0	69,2	2,8 ¹	100,0
Kepulauan Riau	31,0	62,2	6,8 ¹	100,0
DKI Jakarta	34,4	60,3	5,3	100,0
Jawa Barat	26,4	68,1	5,5	100,0
Jawa Tengah	28,2	67,8	4,0	100,0
DI Yogyakarta	27,9	68,4	3,7	100,0
Jawa Timur	24,0	70,6	5,4	100,0
Banten	27,4	68,0	4,6	100,0
Bali	32,4	65,7	1,8	100,0
Nusa Tenggara Barat	19,8	76,4	3,9 ¹	100,0
Nusa Tenggara Timur	27,8	70,6	NA	100,0
Kalimantan Barat	32,4	64,2	3,5 ¹	100,0
Kalimantan Tengah	13,8 ¹	86,2	NA	100,0
Kalimantan Selatan	22,6	72,9	4,4	100,0
Kalimantan Timur	16,7 ¹	80,5	NA	100,0
Kalimantan Utara	9,2 ¹	79,5	NA	100,0
Sulawesi Utara	28,8	67,0	4,1	100,0
Sulawesi Tengah	27,0	65,0	8,1	100,0
Sulawesi Selatan	29,8	66,2	4,0	100,0
Sulawesi Tenggara	24,3	69,7	6,0 ¹	100,0
Gorontalo	30,8	65,1	4,1 ¹	100,0
Sulawesi Barat	31,0 ¹	63,1	NA	100,0
Maluku	29,7 ¹	68,5	NA	100,0
Maluku Utara	NA	75,3	NA	100,0
Papua Barat	93,6	NA	NA	100,0
Papua Barat Daya	NA	71,7	NA	100,0
Papua	20,7 ¹	79,3	NA	100,0
Papua Selatan	NA	NA	NA	NA
Papua Tengah	NA	NA	NA	NA
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA
Indonesia	27,8	67,5	4,7	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 42 Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2025

Provinsi	Tingkat Pendidikan		Total
	Di Bawah SMA	SMA ke Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	14,0	86,0	100,0
Sumatera Utara	25,6	74,4	100,0
Sumatera Barat	26,6	73,4	100,0
Riau	19,1 ¹	80,9	100,0
Jambi	31,7	68,3	100,0
Sumatera Selatan	31,9	68,1	100,0
Bengkulu	24,5	75,5	100,0
Lampung	29,2	70,8	100,0
Bangka Belitung	24,2	75,8	100,0
Kepulauan Riau	26,9	73,1	100,0
DKI Jakarta	9,3	90,7	100,0
Jawa Barat	19,4	80,6	100,0
Jawa Tengah	32,7	67,3	100,0
DI Yogyakarta	19,6	80,4	100,0
Jawa Timur	25,1	74,9	100,0
Banten	14,0	86,0	100,0
Bali	13,4	86,6	100,0
Nusa Tenggara Barat	31,2	68,8	100,0
Nusa Tenggara Timur	19,9 ¹	80,1	100,0
Kalimantan Barat	33,7	66,3	100,0
Kalimantan Tengah	41,4	58,6	100,0
Kalimantan Selatan	27,4	72,6	100,0
Kalimantan Timur	27,1 ¹	72,9	100,0
Kalimantan Utara	81,5	NA	100,0
Sulawesi Utara	17,0	83,0	100,0
Sulawesi Tengah	25,0	75,0	100,0
Sulawesi Selatan	25,7	74,3	100,0
Sulawesi Tenggara	18,2 ¹	81,8	100,0
Gorontalo	18,9	81,1	100,0
Sulawesi Barat	36,4 ¹	63,6	100,0
Maluku	7,7 ¹	92,3	100,0
Maluku Utara	18,8 ¹	81,2	100,0
Papua Barat	NA	NA	100,0
Papua Barat Daya	NA	93,3	100,0
Papua	15,1 ¹	84,9	100,0
Papua Selatan	NA	NA	100,0
Papua Tengah	NA	NA	100,0
Papua Pegunungan	NA	NA	100,0
Indonesia	21,8	78,2	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 43 Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2025

Provinsi	Lapangan Pekerjaan Utama						Total
	Pertanian	Industri Pengolahan	Konstruksi	Pertambangan dan penggalan; Penyediaan listrik, air, dan gas	Jasa Berorientasi Pasar	Jasa Tidak Berorientasi Pasar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	5,7	4,3 ¹	4,4 ¹	2,6 ¹	36,4	46,7	100,0
Sumatera Utara	8,2	11,3	12,7	1,6 ¹	40,4	25,8	100,0
Sumatera Barat	5,9	5,4	7,2	1,4 ¹	50,1	30,0	100,0
Riau	8,3 ¹	11,0	5,1 ¹	5,4 ¹	43,9	26,4	100,0
Jambi	14,2	7,7 ¹	9,1 ¹	3,2 ¹	42,8	23,0	100,0
Sumatera Selatan	15,6	6,8 ¹	10,6	3,7 ¹	36,3	27,1	100,0
Bengkulu	16,9	2,6 ¹	13,9	1,5 ¹	32,7	32,5	100,0
Lampung	14,0	9,1	13,0	NA	37,6	26,0	100,0
Bangka Belitung	9,2	7,4 ¹	3,5 ¹	3,1 ¹	46,1	30,7	100,0
Kepulauan Riau	NA	20,8	8,3 ¹	NA	28,9	34,9	100,0
DKI Jakarta	NA	15,5	6,8	1,5 ¹	54,5	21,1	100,0
Jawa Barat	1,1 ¹	23,0	5,4	1,6	47,9	21,0	100,0
Jawa Tengah	4,1	33,8	10,4	0,7 ¹	36,1	14,9	100,0
DI Yogyakarta	1,0 ¹	13,6	7,5	NA	53,5	23,9	100,0
Jawa Timur	4,3	24,9	8,6	0,8	42,5	18,9	100,0
Banten	NA	28,3	5,6	1,6	43,4	20,6	100,0
Bali	0,9 ¹	3,8	8,0	NA	64,9	22,0	100,0
Nusa Tenggara Barat	3,1 ¹	5,1 ¹	16,3	NA	49,5	23,2	100,0
Nusa Tenggara Timur	9,5 ¹	NA	8,7 ¹	NA	28,4	50,9	100,0
Kalimantan Barat	5,6	7,2	19,5	2,6 ¹	45,2	19,9	100,0
Kalimantan Tengah	17,8 ¹	NA	NA	30,8	27,1 ¹	12,3 ¹	100,0
Kalimantan Selatan	4,2 ¹	6,6	8,9	7,8	44,4	28,1	100,0
Kalimantan Timur	12,0 ¹	12,4 ¹	21,8 ¹	21,5	21,4 ¹	11,0 ¹	100,0
Kalimantan Utara	NA	NA	13,5	NA	NA	NA	100,0
Sulawesi Utara	5,2	5,4 ¹	6,1 ¹	5,8	35,9	41,5	100,0
Sulawesi Tengah	4,2 ¹	4,0 ¹	9,2	NA	38,1	44,2	100,0
Sulawesi Selatan	8,1	10,3	14,8	1,0 ¹	45,7	20,2	100,0
Sulawesi Tenggara	5,9 ¹	9,1 ¹	4,2 ¹	8,2 ¹	31,6	41,0	100,0
Gorontalo	2,9 ¹	6,3 ¹	7,0	2,7 ¹	45,0	36,1	100,0
Sulawesi Barat	21,8 ¹	NA	NA	NA	37,0 ¹	22,1 ¹	100,0
Maluku	NA	2,1 ¹	3,5 ¹	1,3 ¹	42,0	49,9	100,0
Maluku Utara	NA	15,9 ¹	NA	NA	41,5	29,0	100,0
Papua Barat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,0
Papua Barat Daya	NA	NA	NA	NA	34,2 ¹	41,9 ¹	100,0
Papua	NA	NA	NA	5,5 ¹	39,1	51,4	100,0
Papua Selatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papua Tengah	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Indonesia	3,5	20,0	8,2	1,6	45,2	21,6	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 44 Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2025

Provinsi	Jenis Pekerjaan Utama				Total
	TNI/POLRI	Tingkat keterampilan 3 dan 4 (tinggi)	Tingkat keterampilan 2 (menengah)	Tingkat keterampilan 1 (rendah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2,2 ¹	37,5	46,7	13,6	100,0
Sumatera Utara	0,9 ¹	16,4	54,7	28,0	100,0
Sumatera Barat	NA	24,0	63,4	11,9	100,0
Riau	NA	16,7 ¹	70,7	12,6 ¹	100,0
Jambi	NA	21,7	52,8	24,4	100,0
Sumatera Selatan	3,2 ¹	17,9	59,2	19,7	100,0
Bengkulu	NA	26,2	57,9	14,6	100,0
Lampung	2,2 ¹	16,8	57,5	23,5	100,0
Bangka Belitung	2,3 ¹	27,2	58,0	12,5	100,0
Kepulauan Riau	NA	27,9	47,2	18,1	100,0
DKI Jakarta	NA	31,4	57,7	10,2	100,0
Jawa Barat	1,2 ¹	27,2	57,6	13,9	100,0
Jawa Tengah	0,8	13,3	65,6	20,3	100,0
DI Yogyakarta	NA	24,0	62,4	13,1	100,0
Jawa Timur	2,4	20,2	56,4	21,1	100,0
Banten	0,7 ¹	23,3	59,7	16,3	100,0
Bali	1,2 ¹	21,9	62,6	14,3	100,0
Nusa Tenggara Barat	1,9 ¹	19,2	57,1	21,8	100,0
Nusa Tenggara Timur	7,2 ¹	35,5	43,5	13,9 ¹	100,0
Kalimantan Barat	2,2 ¹	15,6	56,5	25,7	100,0
Kalimantan Tengah	NA	16,6 ¹	65,4	12,2 ¹	100,0
Kalimantan Selatan	2,0 ¹	21,1	62,7	14,2	100,0
Kalimantan Timur	NA	31,5	56,4	11,8 ¹	100,0
Kalimantan Utara	NA	NA	54,9 ¹	13,5	100,0
Sulawesi Utara	2,8 ¹	28,9	57,7	10,6	100,0
Sulawesi Tengah	NA	28,1	61,1	9,5 ¹	100,0
Sulawesi Selatan	1,4 ¹	20,4	56,2	22,0	100,0
Sulawesi Tenggara	NA	27,0	62,0	10,3	100,0
Gorontalo	2,7 ¹	28,2	56,1	13,0	100,0
Sulawesi Barat	NA	14,5 ¹	77,9	NA	100,0
Maluku	NA	31,2	53,5	12,7 ¹	100,0
Maluku Utara	NA	21,3 ¹	63,9	13,0 ¹	100,0
Papua Barat	NA	66,6	NA	NA	100,0
Papua Barat Daya	NA	33,9 ¹	52,2	NA	100,0
Papua	NA	43,4	45,7	NA	100,0
Papua Selatan	NA	NA	NA	NA	NA
Papua Tengah	NA	NA	NA	NA	NA
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	NA
Indonesia	1,3	22,9	59,0	16,8	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 45 Persentase Pekerja Komuter Menurut Status Formalitas Pekerjaan Utama, 2025

Provinsi	Status Formalitas Pekerjaan Utama		
	Formal	Informal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	75,2	24,8	100,0
Sumatera Utara	75,9	24,1	100,0
Sumatera Barat	65,4	34,6	100,0
Riau	84,0	16,0	100,0
Jambi	71,0	29,0	100,0
Sumatera Selatan	75,8	24,2	100,0
Bengkulu	67,1	32,9	100,0
Lampung	71,9	28,1	100,0
Bangka Belitung	78,1	21,9	100,0
Kepulauan Riau	86,6	13,4 ¹	100,0
DKI Jakarta	92,9	7,1	100,0
Jawa Barat	85,4	14,6	100,0
Jawa Tengah	78,7	21,3	100,0
DI Yogyakarta	80,8	19,2	100,0
Jawa Timur	79,7	20,3	100,0
Banten	88,0	12,0	100,0
Bali	83,6	16,4	100,0
Nusa Tenggara Barat	71,1	28,9	100,0
Nusa Tenggara Timur	81,4	18,6	100,0
Kalimantan Barat	85,4	14,6	100,0
Kalimantan Tengah	77,1	22,9 ¹	100,0
Kalimantan Selatan	77,7	22,3	100,0
Kalimantan Timur	76,5	23,5	100,0
Kalimantan Utara	52,7 ¹	47,3 ¹	100,0
Sulawesi Utara	78,7	21,3	100,0
Sulawesi Tengah	78,5	21,5	100,0
Sulawesi Selatan	77,2	22,8	100,0
Sulawesi Tenggara	72,6	27,4	100,0
Gorontalo	76,2	23,8	100,0
Sulawesi Barat	71,2	28,8 ¹	100,0
Maluku	79,4	20,6 ¹	100,0
Maluku Utara	69,3	30,7	100,0
Papua Barat	100,0	NA	100,0
Papua Barat Daya	80,3	NA	100,0
Papua	81,7	18,3 ¹	100,0
Papua Selatan	NA	NA	NA
Papua Tengah	NA	NA	NA
Papua Pegunungan	NA	NA	NA
Indonesia	82,3	17,7	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 46 Persentase Pekerja Komuter Menurut Moda Transportasi Utama, 2025

Provinsi	Moda Transportasi Utama		
	Transportasi Pribadi	Lainnya (termasuk Transportasi Umum, Transportasi Online, Jalan Kaki/Tidak Menggunakan Kendaraan)	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	95,3	4,7 ¹	100,0
Sumatera Utara	90,0	10,0	100,0
Sumatera Barat	93,6	6,4	100,0
Riau	99,7	NA	100,0
Jambi	97,8	2,2 ¹	100,0
Sumatera Selatan	92,5	7,5 ¹	100,0
Bengkulu	96,5	3,5 ¹	100,0
Lampung	96,1	3,9 ¹	100,0
Bangka Belitung	98,7	NA	100,0
Kepulauan Riau	99,0	1,0	100,0
DKI Jakarta	86,8	13,2	100,0
Jawa Barat	84,8	15,2	100,0
Jawa Tengah	96,4	3,6	100,0
DI Yogyakarta	97,1	2,9 ¹	100,0
Jawa Timur	96,3	3,7	100,0
Banten	87,0	13,0	100,0
Bali	99,6	NA	100,0
Nusa Tenggara Barat	97,7	2,3 ¹	100,0
Nusa Tenggara Timur	89,3	10,7 ¹	100,0
Kalimantan Barat	99,6	NA	100,0
Kalimantan Tengah	96,9	NA	100,0
Kalimantan Selatan	98,2	1,8 ¹	100,0
Kalimantan Timur	96,8	NA	100,0
Kalimantan Utara	80,6	NA	100,0
Sulawesi Utara	85,6	14,4	100,0
Sulawesi Tengah	92,6	7,4 ¹	100,0
Sulawesi Selatan	97,7	2,3	100,0
Sulawesi Tenggara	96,0	4,0 ¹	100,0
Gorontalo	93,6	6,4	100,0
Sulawesi Barat	89,0	NA	100,0
Maluku	69,2	30,8	100,0
Maluku Utara	69,6	30,4	100,0
Papua Barat	NA	NA	100,0
Papua Barat Daya	88,9	NA	100,0
Papua	83,4	16,6 ¹	100,0
Papua Selatan	NA	NA	NA
Papua Tengah	NA	NA	NA
Papua Pegunungan	NA	NA	NA
Indonesia	91,4	8,6	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 47 Penduduk Bekerja Menurut Status Bersirkuler, 2025

Status Bersirkuler	Tahun									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pekerja sirkuler										
Jumlah (ribu orang)	2.441,8	2.707,0	2.706,5	2.488,2	2.357,0	2.337,7	2.213,5	3.151,9	3.545,4	3.481,7
Persentase (%)	2,1	2,2	2,2	1,9	1,8	1,8	1,6	2,3	2,5	2,4
Pekerja nonsirkuler										
Jumlah (ribu orang)	115.970,2	118.315,4	121.298,4	126.250,1	126.097,2	128.712,8	133.083,2	136.700,5	141.096,6	143.060,6
Persentase (%)	97,9	97,8	97,8	98,1	98,2	98,2	98,4	97,7	97,5	97,6
Total										
Jumlah (ribu orang)	118.412,0	121.022,4	124.005,0	128.738,3	128.454,2	131.050,5	135.296,7	139.852,4	144.642,0	146.542,3
Persentase (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Lampiran 48 Pekerja Menurut Provinsi Tempat Tinggal Sekarang dan Status Pekerja Sirkuler, 2025

Provinsi	Pekerja sirkuler		Pekerja nonsirkuler		Jumlah	
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	39,2	1,5	2.522,1	98,5	2.561,3	100,0
Sumatera Utara	153,9	1,9	7.822,4	98,1	7.976,3	100,0
Sumatera Barat	53,2	1,8	2.965,3	98,2	3.018,6	100,0
Riau	44,3	1,4	3.166,6	98,6	3.210,9	100,0
Jambi	34,7	1,9	1.817,2	98,1	1.851,9	100,0
Sumatera Selatan	75,6	1,7	4.417,0	98,3	4.492,6	100,0
Bengkulu	29,9	2,7	1.085,4	97,3	1.115,3	100,0
Lampung	103,4	2,1	4.750,0	97,9	4.853,4	100,0
Bangka Belitung	13,2	1,7	772,5	98,3	785,7	100,0
Kepulauan Riau	18,5	1,8	1.033,5	98,2	1.052,0	100,0
DKI Jakarta	62,6	1,2	5.065,9	98,8	5.128,5	100,0
Jawa Barat	922,6	3,8	23.584,3	96,2	24.506,9	100,0
Jawa Tengah	653,1	3,1	20.642,7	96,9	21.295,8	100,0
DI Yogyakarta	51,6	2,3	2.148,5	97,7	2.200,1	100,0
Jawa Timur	427,9	1,8	23.373,2	98,2	23.801,0	100,0
Banten	206,1	3,6	5.549,8	96,4	5.755,9	100,0
Bali	38,7	1,4	2.663,0	98,6	2.701,7	100,0
Nusa Tenggara Barat	53,9	1,7	3.052,8	98,3	3.106,7	100,0
Nusa Tenggara Timur	24,7	0,8	2.964,4	99,2	2.989,1	100,0
Kalimantan Barat	46,0	1,6	2.884,4	98,4	2.930,4	100,0
Kalimantan Tengah	20,9	1,5	1.396,8	98,5	1.417,7	100,0
Kalimantan Selatan	55,4	2,6	2.097,7	97,4	2.153,1	100,0
Kalimantan Timur	40,6	2,1	1.929,1	97,9	1.969,7	100,0
Kalimantan Utara	5,4	1,4	375,2	98,6	380,6	100,0
Sulawesi Utara	48,9	3,6	1.290,4	96,4	1.339,3	100,0
Sulawesi Tengah	22,4	1,4	1.630,5	98,6	1.652,8	100,0
Sulawesi Selatan	134,1	2,8	4.624,9	97,2	4.759,1	100,0
Sulawesi Tenggara	32,8	2,3	1.401,3	97,7	1.434,0	100,0
Gorontalo	17,8	2,8	615,5	97,2	633,3	100,0
Sulawesi Barat	15,2	1,9	785,2	98,1	800,4	100,0
Maluku	8,6	0,9	913,9	99,1	922,5	100,0
Maluku Utara	7,6	1,1	665,8	98,9	673,5	100,0
Papua Barat	2,3 ¹	0,8 ¹	286,0	99,2	288,3	100,0
Papua Barat Daya	6,6	2,2 ¹	295,3	97,8	301,9	100,0
Papua	7,7	1,8	426,3	98,2	434,0	100,0
Papua Selatan	NA	NA	216,8	99,6	217,7	100,0
Papua Tengah	1,2 ¹	0,2 ¹	789,0	99,8	790,2	100,0
Papua Pegunungan	NA	NA	1.039,9	100,0	1.040,0	100,0
Indonesia	3.481,7	2,4	143.060,6	97,6	146.542,3	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 49 Pekerja Menurut Status Pekerja Sirkuler di 15 Kabupaten/Kota Tempat Tinggal dengan Pekerja Sirkuler Terbesar, 2025

Kabupaten/Kota Tempat Tinggal Saat Survei	Pekerja Sirkuler		Pekerja NonSirkuler		Jumlah	
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bogor	140,6	5,4	2.480,3	97,0	2.620,9	100,0
Grobogan	93,2	10,5	797,0	96,5	890,2	100,0
Cianjur	84,0	6,6	1.193,1	95,0	1.277,1	100,0
Sukabumi	77,8	5,5	1.341,3	96,8	1.419,0	100,0
Garut	76,9	5,9	1.228,9	97,6	1.305,8	100,0
Brebes	65,9 ¹	6,2 ¹	999,9	97,0	1.065,8	100,0
Bandung	59,1 ¹	3,3 ¹	1.742,5	97,2	1.801,6	100,0
Pemalang	57,4	7,1	752,7	97,3	810,1	100,0
Lebak	49,4	7,6	604,5	97,5	653,9	100,0
Tegal	44,4 ¹	5,2 ¹	817,7	97,6	862,1	100,0
Bandung Barat	44,2	4,6	917,7	98,0	961,9	100,0
Serang	44,2	5,5	753,3	96,1	797,5	100,0
Pandeglang	44,0	7,7	525,7	97,3	569,7	100,0
Lamongan	39,0	4,9	758,8	96,9	797,9	100,0
Kediri	37,6	4,2	857,0	94,6	894,6	100,0
Kabupaten lainnya	2.523,9	1,9	127.290,3	98,1	129.814,2	100,0
Indonesia	3.481,7	2,4	143.060,6	97,6	146.542,3	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 50 Pekerja Sirkuler di 15 Kabupaten/Kota Tujuan Bekerja Terbesar, 2025

Kabupaten/Kota Tempat Tujuan Bekerja	Pekerja Sirkuler	
	Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)
Kota Surabaya	173,1	11,1
Jakarta Pusat	133,3	25,9
Jakarta Timur	131,2	9,1
Jakarta Selatan	122,5	11,2
Jakarta Utara	108,4	12,1
Jakarta Barat	98,8	8,4
Bekasi	89,0	6,0
Kota Bandung	84,4	6,6
Bandung	77,5	4,3
Kota Tangerang	73,9	8,0
Tangerang	73,6	4,5
Bogor	56,8	2,2
Semarang	46,2	6,9
Kota Semarang	42,8	4,6
Sidoarjo	38,9	3,4
Kabupaten lainnya	2.131,3	1,7
Total	3.481,7	2,4

Lampiran 51 Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Sirkuler Neto Positif Tertinggi dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Sirkuler Neto Negatif Terendah pada Pekerja, 2025

Kabupaten/Kota	Pekerja Sirkuler Masuk		Pekerja Sirkuler Keluar		Neto	
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pekerja Sirkuler Neto Positif Terbesar						
Kota Surabaya	173,1	11,1	3,6 ¹	NA	+169,5	+10,8
Kota Jakarta Pusat	133,3	25,9	7,1 ¹	1,4 ¹	+126,2	+24,6
Kota Jakarta Selatan	122,5	11,2	NA	NA	+119,8	+11,0
Kota Jakarta Timur	131,2	9,1	17,3 ¹	1,2 ¹	+113,9	+7,9
Kota Jakarta Utara	108,4	12,1	18,4 ¹	2,1	+90,0	+10,1
Kota Jakarta Barat	98,8	8,4	16,8 ¹	1,4 ¹	+82,0	+7,0
Kab. Bekasi	89,0	6,0	31,3	2,1	+57,7	+3,9
Kota Tangerang	73,9	8,0	17,4 ¹	1,9 ¹	+56,5	+6,1
Kab. Tangerang	73,6	4,5	22,7 ¹	1,4 ¹	+51,0	+3,1
Kota Bandung	84,4	6,6	35,3	2,8	+49,1 ¹	+3,8 ¹
Kota Denpasar	37,7	8,8	3,0 ¹	0,7 ¹	+34,7	+8,1
Kab. Semarang	46,2	6,9	13,0 ¹	2,0 ¹	+33,2	+5,0
Kab. Sleman	37,6	5,7	9,1 ¹	1,4 ¹	+28,5 ¹	+4,3 ¹
Kota Semarang	42,8	4,6	17,7 ¹	1,9 ¹	+25,1 ¹	+2,7 ¹
Kota Yogyakarta	27,1	13,2	2,3 ¹	1,1 ¹	+24,8	+12,1
Pekerja Sirkuler Neto Negatif Terbesar						
Kab. Grobogan	NA	NA	93,2	10,5	-86,0	-9,7
Kab. Bogor	56,8	2,2	140,6	5,4	-83,8 ¹	-3,2 ¹
Kab. Cianjur	3,3 ¹	0,3 ¹	84,0	6,6	-80,7	-6,3
Kab. Garut	5,9 ¹	0,5 ¹	76,9	5,9	-70,9	-5,4
Kab. Sukabumi	12,5 ¹	0,9 ¹	77,8	5,5	-65,3	-4,6
Kab. Brebes	13,0 ¹	1,2 ¹	65,9 ¹	6,2 ¹	-52,9 ¹	-5,0 ¹
Kab. Pematang	8,9 ¹	1,1 ¹	57,4	7,1	-48,5 ¹	-6,0 ¹
Kab. Pandeglang	NA	NA	49,4	7,6	-46,3	-7,1
Kab. Lebak	NA	NA	44,0	7,7	-41,4	-7,3
Kab. Bandung Barat	9,0 ¹	0,9 ¹	44,2	4,6	-35,2 ¹	-3,7 ¹
Kab. Kediri	3,3 ¹	0,4 ¹	37,6	4,2	-34,3	-3,8 ¹
Kab. Tegal	11,8 ¹	1,4 ¹	44,4 ¹	5,2 ¹	-32,7 ¹	-3,8 ¹
Kab. Serang	14,9 ¹	1,9 ¹	44,2	5,5	-29,3 ¹	-3,7 ¹
Kab. Lamongan	10,4 ¹	1,3 ¹	39,0	4,9	-28,7 ¹	-3,6 ¹
Kab. Magelang	2,3 ¹	0,3 ¹	29,5 ¹	3,7 ¹	-27,2 ¹	-3,4 ¹

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 52 Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Persentase Pekerja Sirkuler Neto Positif Tertinggi dan Lima Belas Kabupaten/Kota dengan Persentase Pekerja Sirkuler Neto Negatif Terendah, 2025

Kabupaten/Kota	Pekerja Sirkuler Masuk		Pekerja Sirkuler Keluar		Neto	
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Pekerja Sirkuler Neto Positif Terbesar						
Jakarta Pusat	133,3	25,9	7,1 ¹	1,4 ¹	+126,2	+24,6
Kepulauan Seribu	NA	NA	0,2 ¹	1,5 ¹	NA	NA
Halmahera Tengah	4,9 ¹	15,6 ¹	NA	NA	+4,8 ¹	+15,3 ¹
Kepulauan Anambas	NA	NA	0,3 ¹	1,3 ¹	NA	NA
Kota Yogyakarta	27,1	13,2	2,3 ¹	1,1 ¹	+24,8	+12,1
Morowali	9,5	11,5	NA	NA	+9,4	+11,4
Jakarta Selatan	122,5	11,2	NA	NA	+119,8	+11,0
Kota Surabaya	173,1	11,1	3,6 ¹	NA	+169,5	+10,8
Jakarta Utara	108,4	12,1	18,4 ¹	2,1	+90,0	+10,1
Raja Ampat	2,7 ¹	8,8 ¹	NA	NA	+2,7 ¹	+8,7 ¹
Kota Denpasar	37,7	8,8	3,0 ¹	0,7 ¹	+34,7	+8,1
Kepulauan Selayar	6,0 ¹	8,0 ¹	NA	NA	+5,9 ¹	+7,9 ¹
Jakarta Timur	131,2	9,1	17,3 ¹	1,2 ¹	+113,9	+7,9
Aceh Singkil	4,3 ¹	8,3 ¹	NA	NA	NA	NA
Pohuwato	6,2	7,6	NA	NA	+5,9	+7,2
Persentase Pekerja Sirkuler Neto Negatif Terbesar						
Buton Selatan	NA	NA	NA	11,9 ¹	NA	-11,3 ¹
Grobogan	NA	NA	93,2	10,5	-86,0	-9,7
Sungai Penuh	NA	NA	4,2	8,1	-4,0 ¹	-7,7 ¹
Pandeglang	NA	NA	44,0	7,7	-41,4	-7,3
Lebak	NA	NA	49,4	7,6	-46,3	-7,1
Cianjur	3,3 ¹	0,3 ¹	84,0	6,6	-80,7	-6,3
Pemalang	8,9 ¹	1,1 ¹	57,4	7,1	-48,5 ¹	-6,0 ¹
Gunungkidul	4,2 ¹	0,9 ¹	30,6	6,6	-26,4	-5,7
Sinjai	1,9 ¹	1,2 ¹	10,9	6,7	-9,0 ¹	-5,5 ¹
Garut	5,9 ¹	0,5 ¹	76,9	5,9	-70,9	-5,4
Sukabumi	NA	NA	9,0	5,3	-8,7	-5,1
Brebes	13,0 ¹	1,2 ¹	65,9 ¹	6,2 ¹	-52,9 ¹	-5,0 ¹
Tanjung Balai	NA	NA	6,0	6,2	-4,5 ¹	-4,7 ¹
Pidie Jaya	NA	NA	3,4 ¹	4,7 ¹	-3,4 ¹	-4,7 ¹
Minahasa	3,0 ¹	1,8 ¹	10,8	6,4	-7,8 ¹	-4,6 ¹

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 53 Dua Puluh Besar Arus Pekerja Sirkuler Antarkabupaten/kota, 2025

Kabupaten/Kota Asal	Kabupaten/Kota Tujuan	Jumlah (ribu orang)
(1)	(2)	(3)
Garut	Bandung	30,5 ¹
Bandung	Kota Bandung	30,3 ¹
Lamongan	Kota Surabaya	22,6
Bogor	Jakarta Timur	21,7 ¹
Bogor	Jakarta Pusat	21,6 ¹
Kediri	Kota Surabaya	19,0 ¹
Magelang	Sleman	16,7 ¹
Sukabumi	Jakarta Pusat	15,1 ¹
Bogor	Tangerang	14,7 ¹
Grobogan	Semarang	14,3
Mojokerto	Kota Surabaya	NA
Jombang	Kota Surabaya	13,1
Bogor	Kota Depok	NA
Bandung Barat	Kota Bandung	12,1 ¹
Bogor	Jakarta Utara	NA
Serang	Jakarta Timur	NA
Pemalang	Jakarta Selatan	NA
Bogor	Kota Tangerang	11,1 ¹
Deli Serdang	Kota Medan	11,0 ¹
Lebak	Jakarta Utara	10,9 ¹

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 54 Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(3)
Aceh	89,7	10,3	100,0
Sumatera Utara	87,8	12,2	100,0
Sumatera Barat	93,9	6,1 ¹	100,0
Riau	87,6	12,4 ¹	100,0
Jambi	85,6	14,4	100,0
Sumatera Selatan	87,2	12,8	100,0
Bengkulu	82,4	17,6	100,0
Lampung	87,1	12,9	100,0
Bangka Belitung	86,7	13,3 ¹	100,0
Kepulauan Riau	85,5	14,5 ¹	100,0
DKI Jakarta	76,5	23,5	100,0
Jawa Barat	90,0	10,0	100,0
Jawa Tengah	92,1	7,9	100,0
DI Yogyakarta	82,3	17,7	100,0
Jawa Timur	90,3	9,7	100,0
Banten	88,8	11,2	100,0
Bali	80,9	19,1	100,0
Nusa Tenggara Barat	86,4	13,6	100,0
Nusa Tenggara Timur	84,2	15,8	100,0
Kalimantan Barat	92,1	7,9	100,0
Kalimantan Tengah	91,6	8,4 ¹	100,0
Kalimantan Selatan	94,1	5,9	100,0
Kalimantan Timur	93,6	6,4 ¹	100,0
Kalimantan Utara	98,0	NA	100,0
Sulawesi Utara	84,3	15,7	100,0
Sulawesi Tengah	86,2	13,8	100,0
Sulawesi Selatan	90,4	9,6	100,0
Sulawesi Tenggara	88,5	11,5	100,0
Gorontalo	91,3	8,7 ¹	100,0
Sulawesi Barat	93,1	6,9 ¹	100,0
Maluku	88,3	11,7 ¹	100,0
Maluku Utara	75,6	24,4	100,0
Papua Barat	83,8	16,2 ¹	100,0
Papua Barat Daya	82,2	17,8 ¹	100,0
Papua	79,4	20,6 ¹	100,0
Papua Selatan	84,8	NA	100,0
Papua Tengah	90,3	NA	100,0
Papua Pegunungan	NA	NA	NA
Indonesia	89,4	10,6	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 55 Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	Kelompok Umur					Total
	15–24	25–34	35–44	45–54	55+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	12,9	32,4	25,0	19,7	10,0	100,0
Sumatera Utara	11,9	29,4	26,7	20,9	11,0	100,0
Sumatera Barat	14,5	23,7	28,9	23,0	9,9	100,0
Riau	8,7	26,6	30,4	21,7	12,7 ¹	100,0
Jambi	14,8	31,3	23,0	19,8	11,1 ¹	100,0
Sumatera Selatan	10,7	38,5	20,7	19,8	10,4	100,0
Bengkulu	8,6	25,0	28,4	22,4	15,6	100,0
Lampung	14,8	33,3	24,0	18,7	9,2	100,0
Bangka Belitung	23,1	28,1	23,0	14,5	11,4 ¹	100,0
Kepulauan Riau	NA	23,1 ¹	22,8	34,8	14,3 ¹	100,0
DKI Jakarta	7,2 ¹	26,1 ¹	32,5	27,3	6,9 ¹	100,0
Jawa Barat	15,8	34,1	25,3	17,7	7,1	100,0
Jawa Tengah	17,6	29,8	27,3	15,4	9,9	100,0
DI Yogyakarta	17,0	32,2	26,8	17,4	6,6 ¹	100,0
Jawa Timur	16,7	28,9	27,1	16,8	10,5	100,0
Banten	17,0	27,4	29,1	17,8	8,8 ¹	100,0
Bali	20,7	39,5	20,3	9,3	10,2 ¹	100,0
Nusa Tenggara Barat	19,0 ¹	29,5	21,5	19,4	10,6 ¹	100,0
Nusa Tenggara Timur	18,6 ¹	28,1	29,5	17,8	5,9 ¹	100,0
Kalimantan Barat	17,0	23,4	32,3	16,0	11,4	100,0
Kalimantan Tengah	23,9	30,4	21,4	22,2	2,0 ¹	100,0
Kalimantan Selatan	18,6	23,2	26,0	19,2	13,0	100,0
Kalimantan Timur	11,8 ¹	40,0	21,9	19,9	6,4 ¹	100,0
Kalimantan Utara	8,4 ¹	35,1 ¹	21,7 ¹	19,3 ¹	15,4 ¹	100,0
Sulawesi Utara	13,1	34,3	27,7	14,3	10,6	100,0
Sulawesi Tengah	19,5	34,8	19,2	19,5	7,0 ¹	100,0
Sulawesi Selatan	16,0	35,6	25,3	16,1	7,0	100,0
Sulawesi Tenggara	19,1	37,4	24,2	12,2	7,0 ¹	100,0
Gorontalo	18,1	30,9	30,5	12,3	8,2 ¹	100,0
Sulawesi Barat	16,6	30,1	31,1	16,4	5,8 ¹	100,0
Maluku	8,0 ¹	45,5	28,6 ¹	13,1 ¹	NA	100,0
Maluku Utara	4,8 ¹	31,7	27,8	26,0	9,6 ¹	100,0
Papua Barat	NA	21,3 ¹	30,5 ¹	40,5 ¹	NA	100,0
Papua Barat Daya	12,5 ¹	32,9 ¹	35,3	15,1 ¹	NA	100,0
Papua	NA	30,3	38,3	16,1 ¹	11,9 ¹	100,0
Papua Selatan	NA	NA	NA	61,5 ¹	NA	100,0
Papua Tengah	NA	37,0 ¹	44,8 ¹	NA	NA	100,0
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Indonesia	15,8	31,2	26,4	17,7	9,0	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 56 Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025

Provinsi	Status Perkawinan			Total
	Belum Kawin	Kawin	Cerai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	25,6	70,7	3,7 ¹	100,0
Sumatera Utara	24,8	72,0	3,1 ¹	100,0
Sumatera Barat	19,9	79,5	NA	100,0
Riau	16,8	77,1	NA	100,0
Jambi	26,3	71,1	2,6 ¹	100,0
Sumatera Selatan	24,2	72,9	2,9 ¹	100,0
Bengkulu	21,3	74,9	3,8 ¹	100,0
Lampung	25,3	69,6	5,2 ¹	100,0
Bangka Belitung	34,5	63,8	NA	100,0
Kepulauan Riau	12,3 ¹	73,7	14,0 ¹	100,0
DKI Jakarta	30,2	67,4	NA	100,0
Jawa Barat	25,2	71,0	3,7	100,0
Jawa Tengah	26,2	71,4	2,4	100,0
DI Yogyakarta	20,3	73,9	5,8 ¹	100,0
Jawa Timur	24,5	71,3	4,2	100,0
Banten	24,5	71,5	4,0 ¹	100,0
Bali	35,7	62,7	NA	100,0
Nusa Tenggara Barat	19,4	74,9	NA	100,0
Nusa Tenggara Timur	23,2	74,0	2,8 ¹	100,0
Kalimantan Barat	27,5	69,1	3,4 ¹	100,0
Kalimantan Tengah	32,2	63,8	NA	100,0
Kalimantan Selatan	26,5	69,7	3,9 ¹	100,0
Kalimantan Timur	28,2	70,6	NA	100,0
Kalimantan Utara	17,7 ¹	80,2	NA	100,0
Sulawesi Utara	23,6	70,8	5,7	100,0
Sulawesi Tengah	39,2	57,0	3,8 ¹	100,0
Sulawesi Selatan	26,0	71,3	2,7 ¹	100,0
Sulawesi Tenggara	28,2	68,0	3,8 ¹	100,0
Gorontalo	23,4	72,2	4,4 ¹	100,0
Sulawesi Barat	23,1	70,1	6,8 ¹	100,0
Maluku	22,7 ¹	75,9	NA	100,0
Maluku Utara	15,1 ¹	80,5	NA	100,0
Papua Barat	18,4 ¹	81,6	NA	100,0
Papua Barat Daya	33,1 ¹	66,9	NA	100,0
Papua	19,0 ¹	68,5	12,5 ¹	100,0
Papua Selatan	NA	80,5	NA	100,0
Papua Tengah	NA	63,8 ¹	NA	100,0
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	100,0
Indonesia	25,2	71,2	3,6	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 57 Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2025

Provinsi	Tingkat Pendidikan		Total
	Di Bawah SMA	SMA ke Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	33,0	67,0	100,0
Sumatera Utara	41,0	59,0	100,0
Sumatera Barat	44,3	55,7	100,0
Riau	38,8	61,2	100,0
Jambi	29,9	70,1	100,0
Sumatera Selatan	48,3	51,7	100,0
Bengkulu	49,4	50,6	100,0
Lampung	42,0	58,0	100,0
Bangka Belitung	37,2	62,8	100,0
Kepulauan Riau	42,3	57,7	100,0
DKI Jakarta	27,2	72,8	100,0
Jawa Barat	48,6	51,4	100,0
Jawa Tengah	63,4	36,6	100,0
DI Yogyakarta	45,1	54,9	100,0
Jawa Timur	42,1	57,9	100,0
Banten	52,1	47,9	100,0
Bali	16,5	83,5	100,0
Nusa Tenggara Barat	49,7	50,3	100,0
Nusa Tenggara Timur	46,1	53,9	100,0
Kalimantan Barat	43,9	56,1	100,0
Kalimantan Tengah	47,0	53,0	100,0
Kalimantan Selatan	48,5	51,5	100,0
Kalimantan Timur	22,3	77,7	100,0
Kalimantan Utara	33,6	66,4	100,0
Sulawesi Utara	38,4	61,6	100,0
Sulawesi Tengah	33,3	66,7	100,0
Sulawesi Selatan	44,8	55,2	100,0
Sulawesi Tenggara	33,4	66,6	100,0
Gorontalo	57,1	42,9	100,0
Sulawesi Barat	64,4	35,6	100,0
Maluku	31,0	69,0	100,0
Maluku Utara	19,4	80,6	100,0
Papua Barat	NA	82,9	100,0
Papua Barat Daya	15,8 ¹	84,2	100,0
Papua	9,8 ¹	90,2	100,0
Papua Selatan	NA	81,1	100,0
Papua Tengah	NA	NA	NA
Papua Pegunungan	NA	NA	NA
Indonesia	47,7	52,3	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 58 Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2025

Provinsi	Lapangan Pekerjaan Utama					
	Pertanian	Industri Pengolahan	Konstruksi	Pertambangan dan penggalian; Penyediaan listrik, air, dan gas	Jasa Berorientasi Pasar	Jasa Tidak Berorientasi Pasar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	31,3	NA	12,9	2,7 ¹	36,3	15,3
Sumatera Utara	26,0	6,7	19,9	3,7 ¹	36,0	7,8
Sumatera Barat	9,4	3,7 ¹	9,9	6,7	58,8	11,4
Riau	19,1	9,6 ¹	17,9	8,7 ¹	36,8	8,0 ¹
Jambi	20,9	5,4 ¹	6,6 ¹	21,2	34,7	11,2 ¹
Sumatera Selatan	20,7	4,3 ¹	12,8	11,7 ¹	40,8	9,6 ¹
Bengkulu	55,0	3,3 ¹	7,2 ¹	5,7 ¹	20,1	8,8
Lampung	21,9	9,1 ¹	12,3	NA	35,7	18,3
Bangka Belitung	23,6	NA	11,1 ¹	30,1	18,7	14,1 ¹
Kepulauan Riau	9,6 ¹	21,9 ¹	15,0 ¹	NA	41,1	11,1 ¹
DKI Jakarta	NA	17,7 ¹	11,1 ¹	NA	37,3	27,6
Jawa Barat	2,6	16,2	30,9	1,9	39,1	9,2
Jawa Tengah	10,1	12,0	48,1	1,6 ¹	23,3	4,8
DI Yogyakarta	0,0	11,1 ¹	28,4	NA	47,4	9,8 ¹
Jawa Timur	7,3	22,3	21,2	0,9 ¹	37,3	11,1
Banten	NA	24,9	12,2	3,2 ¹	44,2	13,9
Bali	NA	3,5 ¹	9,2 ¹	0,0	73,9	11,1
Nusa Tenggara Barat	31,8	NA	26,5 ¹	NA	19,6	16,9 ¹
Nusa Tenggara Timur	13,2 ¹	4,5 ¹	32,9	NA	27,9	17,4
Kalimantan Barat	18,8	3,5 ¹	10,0 ¹	15,7	40,8	11,1
Kalimantan Tengah	16,6	NA	7,2 ¹	44,4	18,3	11,1 ¹
Kalimantan Selatan	10,3 ¹	7,1 ¹	10,3	18,5	44,4	9,5
Kalimantan Timur	7,7 ¹	5,5 ¹	11,9 ¹	31,0	35,9	7,9 ¹
Kalimantan Utara	32,7 ¹	NA	NA	27,7 ¹	10,4 ¹	11,3 ¹
Sulawesi Utara	20,1	3,3 ¹	11,8	24,1	26,8	14,0
Sulawesi Tengah	27,6	8,9 ¹	6,2 ¹	7,1 ¹	38,4	11,7 ¹
Sulawesi Selatan	29,6	4,2	10,0	7,9	39,2	9,2
Sulawesi Tenggara	27,9 ¹	5,7 ¹	14,0	13,2	24,0	15,1
Gorontalo	11,0 ¹	NA	9,1 ¹	36,0	25,1	15,2 ¹
Sulawesi Barat	47,3	NA	18,6 ¹	NA	21,6 ¹	7,2 ¹
Maluku	7,5 ¹	NA	31,8 ¹	21,8 ¹	20,2 ¹	14,0 ¹
Maluku Utara	7,9 ¹	NA	5,8 ¹	14,9 ¹	28,9	41,0
Papua Barat	NA	NA	NA	NA	10,8 ¹	42,9 ¹
Papua Barat Daya	NA	NA	NA	24,0 ¹	27,2 ¹	23,4 ¹
Papua	NA	NA	NA	14,7 ¹	10,4 ¹	62,5
Papua Selatan	NA	NA	NA	NA	NA	64,9 ¹
Papua Tengah	NA	NA	NA	NA	NA	75,4
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Indonesia	10,9	13,0	25,7	4,8	35,3	10,3

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 59 Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2025

Provinsi	Jenis Pekerjaan Utama			
	TNI/POLRI	Tingkat keterampilan 3 dan 4 (tinggi)	Tingkat keterampilan 2 (menengah)	Tingkat keterampilan 1 (rendah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	2,3 ¹	12,0	60,4	25,2
Sumatera Utara	NA	13,2	57,4	29,3
Sumatera Barat	1,3 ¹	17,3	69,8	11,7
Riau	NA	18,4	54,7	27,0
Jambi	NA	18,5	59,6	20,9
Sumatera Selatan	NA	14,1	59,8	25,0
Bengkulu	NA	11,3	75,0	12,8
Lampung	1,6 ¹	17,9	59,1	21,4
Bangka Belitung	NA	22,3	44,8	31,8
Kepulauan Riau	NA	23,8 ¹	55,4	20,7 ¹
DKI Jakarta	NA	29,3 ¹	51,2	16,4 ¹
Jawa Barat	0,8 ¹	12,1	57,8	29,4
Jawa Tengah	0,4 ¹	8,9	50,4	40,2
DI Yogyakarta	NA	17,0 ¹	58,3	21,6 ¹
Jawa Timur	1,5 ¹	11,3	53,7	33,6
Banten	NA	10,6	64,4	25,0
Bali	NA	13,9	69,5	16,6
Nusa Tenggara Barat	NA	13,0 ¹	50,7	36,1
Nusa Tenggara Timur	NA	20,3	56,1	21,2
Kalimantan Barat	4,0 ¹	12,5	64,4	19,1
Kalimantan Tengah	5,0 ¹	14,4 ¹	39,6	41,1
Kalimantan Selatan	NA	12,1	66,8	20,6
Kalimantan Timur	NA	29,0	63,4	7,4 ¹
Kalimantan Utara	NA	11,1 ¹	82,3	NA
Sulawesi Utara	NA	12,7	62,0	23,9
Sulawesi Tengah	NA	14,8	69,8	14,4
Sulawesi Selatan	NA	17,9	56,3	25,2
Sulawesi Tenggara	NA	12,5	62,1	23,6
Gorontalo	4,8 ¹	10,6	56,8	27,8
Sulawesi Barat	NA	8,4 ¹	59,6	30,9 ¹
Maluku	NA	12,3 ¹	44,6	41,4
Maluku Utara	NA	22,1 ¹	66,0	9,3 ¹
Papua Barat	NA	24,8 ¹	47,1 ¹	NA
Papua Barat Daya	NA	14,5 ¹	80,0	NA
Papua	NA	33,7 ¹	45,7	NA
Papua Selatan	NA	NA	80,7	NA
Papua Tengah	NA	NA	62,7 ¹	NA
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA
Indonesia	1,0	12,9	56,9	29,3

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 60 Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Status Formalitas Pekerjaan Utama, 2025

Provinsi	Status Formalitas Pekerjaan Utama		
	Formal	Informal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	75,0	25,0	100,0
Sumatera Utara	80,8	19,2	100,0
Sumatera Barat	64,6	35,4	100,0
Riau	80,0	20,0	100,0
Jambi	72,8	27,2	100,0
Sumatera Selatan	65,2	34,8	100,0
Bengkulu	45,3	54,7	100,0
Lampung	72,3	27,7	100,0
Bangka Belitung	87,2	12,8 ¹	100,0
Kepulauan Riau	93,6	6,4 ¹	100,0
DKI Jakarta	95,5	NA	100,0
Jawa Barat	74,0	26,0	100,0
Jawa Tengah	78,0	22,0	100,0
DI Yogyakarta	84,4	15,6 ¹	100,0
Jawa Timur	79,2	20,8	100,0
Banten	81,8	18,2	100,0
Bali	88,8	11,2 ¹	100,0
Nusa Tenggara Barat	48,5	51,5	100,0
Nusa Tenggara Timur	75,9	24,1	100,0
Kalimantan Barat	80,9	19,1	100,0
Kalimantan Tengah	83,5	16,5	100,0
Kalimantan Selatan	76,7	23,3	100,0
Kalimantan Timur	83,5	16,5 ¹	100,0
Kalimantan Utara	77,9	22,1 ¹	100,0
Sulawesi Utara	84,4	15,6	100,0
Sulawesi Tengah	67,5	32,5	100,0
Sulawesi Selatan	77,8	22,2	100,0
Sulawesi Tenggara	79,1	20,9	100,0
Gorontalo	72,6	27,4	100,0
Sulawesi Barat	61,2	38,8	100,0
Maluku	57,9	42,1	100,0
Maluku Utara	81,6	18,4 ¹	100,0
Papua Barat	91,2	NA	100,0
Papua Barat Daya	92,9	NA	100,0
Papua	81,9	18,1 ¹	100,0
Papua Selatan	95,7	NA	100,0
Papua Tengah	88,0	NA	100,0
Papua Pegunungan	NA	NA	NA
Indonesia	76,7	23,3	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 61 Penduduk yang Pernah Berhenti Bekerja dari Pekerjaan Dalam Setahun Terakhir (Agustus 2024–Agustus 2025) Menurut Provinsi dan Status Bekerja, 2025

Provinsi	Status Bekerja Saat Survei (dalam Ribu Orang)		Total
	Bekerja	Tidak bekerja	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	31,6	31,6	63,2
Sumatera Utara	198,5	127,2	325,7
Sumatera Barat	282,7	99,4	382,1
Riau	77,4	42,6	120,0
Jambi	40,9	29,2	70,0
Sumatera Selatan	110,6	71,4	181,9
Bengkulu	23,7	14,4	38,1
Lampung	112,3	59,4	171,7
Bangka Belitung	20,3	11,7	32,0
Kepulauan Riau	46,7	28,5	75,2
DKI Jakarta	119,1	62,7	181,8
Jawa Barat	742,8	613,0	1.355,8
Jawa Tengah	805,4	568,4	1.373,8
DI Yogyakarta	83,8	46,9	130,8
Jawa Timur	1.580,2	601,3	2.181,5
Banten	97,9	103,5	201,5
Bali	65,8	17,7	83,5
Nusa Tenggara Barat	483,8	126,6	610,5
Nusa Tenggara Timur	66,7	36,1	102,8
Kalimantan Barat	70,9	49,1	120,0
Kalimantan Tengah	26,1	16,0	42,1
Kalimantan Selatan	59,6	39,9	99,5
Kalimantan Timur	54,7	42,8	97,5
Kalimantan Utara	9,6	5,6	15,2
Sulawesi Utara	53,9	34,3	88,2
Sulawesi Tengah	30,7	21,8	52,5
Sulawesi Selatan	130,8	86,5	217,3
Sulawesi Tenggara	38,7	25,3	64,0
Gorontalo	17,4	13,9	31,2
Sulawesi Barat	23,8	12,9	36,7
Maluku	14,3	14,7	29,0
Maluku Utara	12,6	8,3	20,9
Papua Barat	3,8	4,7	8,4
Papua Barat Daya	2,4	2,0 ¹	4,4
Papua	4,2	6,4 ¹	10,7 ¹
Papua Selatan	1,9 ¹	0,6 ¹	2,5 ¹
Papua Tengah	3,7 ¹	1,3 ¹	5,1
Papua Pegunungan	NA	NA	NA
Total	5.550,5	3.077,8	8.628,3

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 62 Persentase Perpindahan Lapangan Usaha dari Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Berhenti Bekerja dalam Setahun Terakhir, 2025

Lapangan Usaha Sebelumnya	Lapangan Usaha Saat Ini						Total
	Pertanian	Industri Pengolahan	Konstruksi	Pertambangan dan penggalian; Penyediaan listrik, air, dan gas	Jasa Berorientasi Pasar	Jasa Tidak Berorientasi Pasar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian	68,3	8,0	7,5	1,8	11,5	2,9	100,0
Industri Pengolahan	13,4	37,9	6,2	1,3	36,2	5,0	100,0
Konstruksi	28,2	6,1	45,8	1,8 ¹	15,4	2,7	100,0
Pertambangan dan penggalian; Penyediaan listrik, air, dan gas	33,8	5,2 ¹	11,2	20,1	27,4	2,3 ¹	100,0
Jasa Berorientasi Pasar	12,9	12,2	6,4	1,7	58,7	8,1	100,0
Jasa Tidak Berorientasi Pasar	19,3	8,1	4,4	1,0	30,9	36,3	100,0
Total	34,3	12,6	12,4	2,0	31,0	7,6	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 63 Persentase Perpindahan Status Pekerjaan Penduduk 15 Tahun ke Atas Dalam Setahun Terakhir, 2025

Status Pekerjaan Sebelumnya	Status Pekerjaan Saat Ini		Total
	Formal	Informal	
(1)	(2)	(3)	(4)
Formal	53,4	46,6	100,0
Informal	24,0	76,0	100,0
Total	38,7	61,3	100,0

Lampiran 64 Penduduk Bekerja yang Pernah Berhenti Bekerja dari Pekerjaan Dalam Setahun Terakhir (Agustus 2024–Agustus 2025) Menurut Alasan Utama Berhenti Bekerja, 2025

Alasan Utama Berhenti Bekerja	Status Bekerja					
	Bekerja		Tidak Bekerja		Total	
	Jumlah (dalam ribuan)	%	Jumlah (dalam ribuan)	%	Jumlah (dalam ribuan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemutusan Hubungan Kerja/diberhentikan	264,6	4,8	228,2	7,4	492,8	5,7
Usaha terhenti/bangkrut	459,5	8,3	211,8	6,9	671,2	7,8
Pendapatan kurang memuaskan	974,8	17,6	303,2	9,9	1.278,0	14,8
Tidak cocok dengan lingkungan kerja	463,6	8,4	262,5	8,5	726,1	8,4
Habis masa kerja/kontrak	1.783,5	32,1	717,9	23,3	2.501,4	29,0
Mengurus rumah tangga	326,6	5,9	495,6	16,1	822,2	9,5
Lainnya	1.277,8	23,0	858,7	27,9	2.136,5	24,8
Total	5.550,5	100,0	3.077,8	100,0	8.628,3	100,0

Lampiran 65 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Bekerja di Luar Negeri Menurut Periode Keberangkatan dan Kepulangan, 2021–2025

Periode Keberangkatan dan Kepulangan	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Keberangkatan dan kepulangan dalam 5 tahun terakhir					
Jumlah (ribu orang)	429,0	410,9	364,2	412,9	315,0
Persentase (%)	13,5	10,2	10,2	10,5	7,1
Keberangkatan dan kepulangan tidak dalam 5 tahun terakhir					
Jumlah (ribu orang)	2.744,1	3.602,2	3.196,4	3.533,9	4.116,3
Persentase (%)	86,5	89,8	89,8	89,5	92,9
Total					
Jumlah (ribu orang)	3.173,1	4.013,1	3.560,6	3.946,8	4.431,3
Persentase (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Lampiran 66 Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Status Pengalaman Bekerja di Luar Negeri, 2025

Provinsi	Pernah Bekerja di Luar Negeri (Ribu Orang)			Tidak
	Ya			
	Keberangkatan dalam 5 tahun terakhir	Keberangkatan tidak dalam 5 tahun terakhir	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	8,1 ¹	44,3	52,4	4.103,6
Sumatera Utara	18,7	131,3	150,0	11.503,4
Sumatera Barat	1,7 ¹	45,0	46,8	4.436,3
Riau	6,2	31,3	37,5	4.996,6
Jambi	3,3 ¹	36,9	40,2	2.788,8
Sumatera Selatan	1,8 ¹	21,8	23,6	6.652,1
Bengkulu	1,1 ¹	8,1	9,2	1.599,5
Lampung	6,7 ¹	115,7	122,4	7.070,1
Bangka Belitung	NA	4,7	5,1	1.180,0
Kepulauan Riau	3,5 ¹	49,6	53,1	1.595,1
DKI Jakarta	NA	35,6	39,6	8.391,0
Jawa Barat	71,9	745,9	817,8	38.419,6
Jawa Tengah	24,6	698,0	722,7	29.314,4
DI Yogyakarta	NA	56,6	57,3	2.991,9
Jawa Timur	47,7	933,0	980,8	32.491,7
Banten	7,5 ¹	72,2	79,7	9.460,1
Bali	3,7 ¹	32,3	36,0	3.511,5
Nusa Tenggara Barat	60,5	526,1	586,7	3.623,9
Nusa Tenggara Timur	2,5 ¹	75,5	78,0	4.014,0
Kalimantan Barat	21,2	181,1	202,3	4.139,8
Kalimantan Tengah	0,0	3,3 ¹	3,3 ¹	2.154,9
Kalimantan Selatan	NA	16,0	16,0	3.196,5
Kalimantan Timur	NA	17,9	18,0	3.102,1
Kalimantan Utara	0,6 ¹	15,7	16,3	552,8
Sulawesi Utara	0,7 ¹	8,7	9,3	2.110,6
Sulawesi Tengah	NA	7,3	7,7	2.343,7
Sulawesi Selatan	14,5 ¹	137,0	151,4	7.192,0
Sulawesi Tenggara	NA	19,6	20,1	2.049,3
Gorontalo	0,0	NA	NA	945,2
Sulawesi Barat	2,0 ¹	36,5	38,5	1.071,3
Maluku	NA	3,9	4,0	1.472,5
Maluku Utara	NA	0,6 ¹	0,6 ¹	1.013,6
Papua Barat	NA	0,5 ¹	0,5 ¹	433,9
Papua Barat Daya	NA	1,0 ¹	1,2 ¹	474,6
Papua	NA	NA	NA	728,3
Papua Selatan	NA	NA	NA	336,0
Papua Tengah	NA	NA	NA	1.109,1
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	1.166,8
Total	315,0	4.116,3	4.431,3	213.736,5

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 67 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Berangkat untuk Bekerja ke Luar Negeri dalam 5 Tahun Terakhir Menurut Negara Tujuan, 2025

Negara Tujuan	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Bekerja di Luar Negeri	
	Jumlah (dalam ribuan)	%
(1)	(2)	(3)
Malaysia	159,4	50,6
Arab Saudi	48,6	15,4
Taiwan	25,1 ¹	8,0 ¹
Singapura	16,2 ¹	5,1
Jepang	10,6	3,4
Lainnya	55,2	17,5
Jumlah	315,0	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 68 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Berangkat untuk Bekerja ke Luar Negeri dalam 5 Tahun Terakhir Menurut Negara Tujuan dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (ribu orang), 2025

Negara	Pendidikan		
	Di bawah SMA	SMA ke Atas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Malaysia	103,9	55,4	159,4
Arab Saudi	33,5	15,1 ¹	48,6
Taiwan	12,7 ¹	12,3 ¹	25,1 ¹
Singapura	10,5 ¹	5,7 ¹	16,2 ¹
Jepang	NA	10,6	10,6
Lainnya	27,2	28,0	55,2
Total	187,8	127,1	315,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 69 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Berangkat untuk Bekerja ke Luar Negeri dalam 5 Tahun Terakhir Menurut Sektor Ekonomi, 2025

Lapangan Usaha	Penduduk 15+ yang Pernah Bekerja di Luar Negeri (ribu orang)	
		Persentase
(1)	(2)	(3)
Pertanian	73,9	23,5
Industri Pengolahan	28,2	8,9
Konstruksi	42,4	13,5
Pertambangan dan Penggalan;	NA	NA
Penyediaan Listrik, Air, dan Gas		
Jasa Berorientasi Pasar	59,1	18,8
Jasa Tidak Berorientasi Pasar	111,0	35,2
Total	315,0	100,0

Lampiran 70 Karakteristik Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Bekerja di Luar Negeri Menurut Periode Keberangkatan, 2025

Karakteristik	Kategori	Keberangkatan dan kepulangan dalam 5 tahun terakhir		Keberangkatan dan kepulangan tidak dalam 5 tahun terakhir	
		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin	Laki-laki	185,3	58,8	2.051,1	49,8
	Perempuan	129,7	41,2	2.065,2	50,2
	Total	315,0	100,0	4.116,3	100,0
Klasifikasi Tempat Tinggal	Perkotaan	159,4	50,6	2.245,6	54,6
	Perdesaan	155,6	49,4	1.870,8	45,4
	Total	315,0	100,0	4.116,3	100,0
Kelompok Umur	15—24 tahun	41,2	13,1	19,9	0,5
	25—34 tahun	116,0	36,8	612,3	14,9
	35—44 tahun	97,2	30,9	1.352,7	32,9
	45—54 tahun	47,8	15,2	1.316,0	32,0
	55+ tahun	12,8 ¹	4,1 ¹	815,4	19,8
	Total	315,0	100,0	4.116,3	100,0
Tingkat Pendidikan	Di bawah SMA	187,8	59,6	2.783,2	67,6
	SMA ke atas	127,1	40,4	1.333,2	32,4
	Total	315,0	100,0	4.116,3	100,0
Status Perkawinan	Belum kawin	66,1	21,0	188,8	4,6
	Kawin	221,3	70,3	3.440,6	83,6
	Cerai	27,6	8,8	486,9	11,8
	Total	315,0	100,0	4.116,3	100,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 71 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Bekerja di Luar Negeri dengan Keberangkatan dan Kepulangan dalam Lima Tahun Terakhir Menurut Provinsi Tempat Tinggal dan Negara Tujuan, 2025

Provinsi	Negara Tujuan (dalam ribu orang)			
	Malaysia	Arab Saudi	Negara Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jawa Barat	NA	28,6	35,5	71,9
Nusa Tenggara Barat	39,6	11,0 ¹	10,0 ¹	60,5
Jawa Timur	28,6	NA	18,0	47,7
Provinsi Lainnya	83,5	7,9 ¹	43,5	134,9
Total	159,4	48,6	107,0	315,0

Catatan: ¹Kesalahan Baku Relatif >25% tetapi ≤50%

Lampiran 72 Kesalahan Sampling Jumlah Pekerja Migran Risen Menurut Provinsi, Sakernas Agustus 2025

Provinsi	Jumlah Pekerja Migran Risen				
	Estimasi (ribu orang)	Kesalahan baku (ribu orang)	Kesalahan Baku Relatif	Selang Kepercayaan (95%)	
				Batas Bawah (ribu orang)	Batas Atas (ribu orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	74,4	6,3	8,5	62,1	86,7
Sumatera Utara	271,7	16,3	6,0	239,7	303,7
Sumatera Barat	146,5	8,6	5,9	129,6	163,4
Riau	102,0	8,4	8,3	85,4	118,5
Jambi	43,6	4,3	9,8	35,2	52,0
Sumatera Selatan	89,6	7,8	8,7	74,3	104,9
Bengkulu	42,6	3,5	8,2	35,8	49,5
Lampung	129,4	10,3	8,0	109,2	149,6
Bangka Belitung	24,1	2,5	10,5	19,2	29,1
Kepulauan Riau	56,8	9,2	16,1	38,9	74,8
DKI Jakarta	101,5	13,3	13,1	75,4	127,6
Jawa Barat	620,2	36,1	5,8	549,3	691,1
Jawa Tengah	810,6	33,6	4,1	744,7	876,5
DI Yogyakarta	113,2	9,0	8,0	95,5	130,9
Jawa Timur	606,7	27,3	4,5	553,3	660,2
Banten	81,0	11,2	13,9	59,0	103,0
Bali	74,9	7,8	10,4	59,6	90,2
Nusa Tenggara Barat	155,1	12,8	8,2	130,0	180,2
Nusa Tenggara Timur	145,2	7,4	5,1	130,7	159,7
Kalimantan Barat	73,6	7,0	9,4	60,0	87,2
Kalimantan Tengah	49,6	5,6	11,4	38,5	60,6
Kalimantan Selatan	68,6	5,8	8,4	57,3	79,8
Kalimantan Timur	61,9	8,2	13,3	45,8	78,1
Kalimantan Utara	14,6	1,7	11,3	11,3	17,8
Sulawesi Utara	39,6	4,6	11,6	30,6	48,7
Sulawesi Tengah	46,4	4,4	9,4	37,8	54,9
Sulawesi Selatan	184,4	10,3	5,6	164,2	204,6
Sulawesi Tenggara	69,1	5,6	8,1	58,1	80,0
Gorontalo	22,5	2,9	12,7	16,9	28,2
Sulawesi Barat	30,9	3,5	11,4	24,0	37,8
Maluku	36,1	3,2	8,9	29,8	42,3
Maluku Utara	23,2	2,4	10,5	18,4	28,0
Papua Barat	10,3	1,5	14,4	7,4	13,2
Papua Barat Daya	14,8	2,2	14,9	10,5	19,2
Papua	12,2	2,2	18,4	7,8	16,6
Papua Selatan	4,6	0,7	15,1	3,2	5,9
Papua Tengah	9,2	1,8	19,0	5,8	12,7
Papua Pegunungan	6,5	1,6	24,0	3,4	9,6
Total	3.393,6	55,6	1,6	3.284,7	3.502,5

Lampiran 73 Kesalahan Sampling Jumlah Pekerja Pelaku Perjalanan Pulang Pergi Harian Menurut Provinsi, Sakernas Agustus 2025

Provinsi	Jumlah Pekerja Komuter				
	Estimasi (ribu orang)	Kesalahan baku (ribu orang)	Kesalahan Baku Relatif	Selang Kepercayaan (95%)	
				Batas Bawah (ribu orang)	Batas Atas (ribu orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2.081,5	26,1	1,3	2.030,4	2.132,5
Sumatera Utara	6.334,9	76,2	1,2	6.185,5	6.484,3
Sumatera Barat	2.409,4	32,9	1,4	2.344,8	2.473,9
Riau	2.480,1	36,7	1,5	2.408,2	2.551,9
Jambi	1.485,2	21,2	1,4	1.443,6	1.526,8
Sumatera Selatan	3.603,9	46,9	1,3	3.511,9	3.695,9
Bengkulu	880,7	14,3	1,6	852,6	908,8
Lampung	3.820,9	55,7	1,5	3.711,6	3.930,2
Bangka Belitung	630,8	11,0	1,8	609,2	652,5
Kepulauan Riau	828,2	21,9	2,6	785,3	871,2
DKI Jakarta	4.030,0	75,3	1,9	3.882,3	4.177,6
Jawa Barat	18.081,5	175,8	1,0	17.737,0	18.426,0
Jawa Tengah	16.340,1	137,8	0,8	16.069,9	16.610,2
DI Yogyakarta	1.737,5	38,3	2,2	1.662,3	1.812,6
Jawa Timur	18.040,5	150,8	0,8	17.744,9	18.336,1
Banten	4.484,4	85,0	1,9	4.317,9	4.650,9
Bali	2.126,4	39,4	1,9	2.049,3	2.203,6
Nusa Tenggara Barat	2.477,0	47,5	1,9	2.383,9	2.570,1
Nusa Tenggara Timur	2.324,0	28,1	1,2	2.269,0	2.379,0
Kalimantan Barat	2.334,9	30,2	1,3	2.275,7	2.394,0
Kalimantan Tengah	1.072,1	19,1	1,8	1.034,7	1.109,4
Kalimantan Selatan	1.688,5	25,2	1,5	1.639,2	1.737,8
Kalimantan Timur	1.481,8	32,7	2,2	1.417,6	1.546,0
Kalimantan Utara	288,2	7,7	2,7	273,0	303,3
Sulawesi Utara	1.012,0	15,3	1,5	982,0	1.041,9
Sulawesi Tengah	1.283,8	18,0	1,4	1.248,5	1.319,0
Sulawesi Selatan	3.739,3	43,2	1,2	3.654,7	3.823,9
Sulawesi Tenggara	1.116,3	16,0	1,4	1.085,0	1.147,6
Gorontalo	479,0	9,4	2,0	460,6	497,3
Sulawesi Barat	622,1	14,0	2,3	594,6	649,5
Maluku	722,7	13,7	1,9	695,9	749,4
Maluku Utara	523,4	10,2	2,0	503,3	543,5
Papua Barat	216,7	6,4	2,9	204,2	229,3
Papua Barat Daya	231,3	7,7	3,3	216,3	246,3
Papua	346,3	9,0	2,6	328,6	364,0
Papua Selatan	157,2	5,8	3,7	145,8	168,6
Papua Tengah	537,8	17,2	3,2	504,0	571,6
Papua Pegunungan	946,4	25,0	2,6	897,3	995,5
Total	112.996,5	338,4	0,3	112.333,3	113.659,8

Lampiran 74 Kesalahan Sampling Jumlah Pekerja Komuter Menurut Provinsi, Sakernas Agustus 2025

Provinsi	Jumlah Pekerja Komuter				
	Estimasi (ribu orang)	Kesalahan baku (ribu orang)	Kesalahan Baku Relatif	Selang Kepercayaan (95%)	
				Batas Bawah (ribu orang)	Batas Atas (ribu orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	73,0	5,5	7,5	62,3	83,8
Sumatera Utara	408,3	30,3	7,4	348,9	467,7
Sumatera Barat	107,1	7,6	7,1	92,3	122,0
Riau	34,0	6,0	17,6	22,3	45,7
Jambi	50,1	5,4	10,9	39,5	60,8
Sumatera Selatan	101,1	10,2	10,1	81,0	121,2
Bengkulu	31,7	3,9	12,3	24,1	39,4
Lampung	138,6	12,4	9,0	114,3	162,9
Bangka Belitung	30,7	3,8	12,3	23,2	38,1
Kepulauan Riau	11,9	2,0	16,5	8,1	15,8
DKI Jakarta	856,2	43,7	5,1	770,6	941,9
Jawa Barat	1.997,6	82,3	4,1	1.836,3	2.158,8
Jawa Tengah	1.064,6	41,3	3,9	983,5	1.145,6
DI Yogyakarta	281,0	17,3	6,2	247,0	315,0
Jawa Timur	870,2	38,9	4,5	793,9	946,4
Banten	543,6	35,6	6,6	473,7	613,4
Bali	251,1	13,9	5,5	223,9	278,3
Nusa Tenggara Barat	128,1	10,5	8,2	107,5	148,7
Nusa Tenggara Timur	31,2	3,9	12,6	23,5	38,9
Kalimantan Barat	76,3	8,1	10,6	60,4	92,2
Kalimantan Tengah	9,9	1,7	17,7	6,5	13,3
Kalimantan Selatan	117,3	8,1	6,9	101,4	133,3
Kalimantan Timur	24,4	3,5	14,3	17,5	31,2
Kalimantan Utara	0,9	0,4	40,7	0,2	1,6
Sulawesi Utara	65,0	5,6	8,7	54,0	76,1
Sulawesi Tengah	27,9	3,4	12,3	21,2	34,6
Sulawesi Selatan	162,6	11,4	7,0	140,3	184,9
Sulawesi Tenggara	29,1	3,1	10,8	23,0	35,2
Gorontalo	29,8	3,0	10,0	24,0	35,7
Sulawesi Barat	8,3	1,9	22,4	4,7	12,0
Maluku	9,1	2,3	25,0	4,7	13,6
Maluku Utara	5,4	1,0	19,0	3,4	7,5
Papua Barat	0,1	0,1	74,3	-0,1	0,3
Papua Barat Daya	6,0	1,6	26,4	2,9	9,1
Papua	5,8	1,3	21,8	3,3	8,3
Papua Selatan	0,1	0,1	100,0	-0,1	0,2
Papua Tengah	0,1	0,1	71,7	-0,1	0,4
Papua Pegunungan	0,2	0,1	58,1	0,0	0,4
Total	7.692,9	80,4	1,0	7.535,3	7.850,5

Lampiran 75 Kesalahan Sampling Jumlah Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi, Sakernas Agustus 2025

Provinsi	Jumlah Pekerja Sirkuler				
	Estimasi (ribu orang)	Kesalahan baku (ribu orang)	Kesalahan Baku Relatif	Selang Kepercayaan (95%)	
				Batas Bawah (ribu orang)	Batas Atas (ribu orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	39,2	3,3	8,5	32,7	45,8
Sumatera Utara	153,9	10,4	6,8	133,4	174,3
Sumatera Barat	53,2	4,0	7,6	45,3	61,1
Riau	44,3	4,9	11,1	34,7	53,9
Jambi	34,7	3,2	9,3	28,3	41,0
Sumatera Selatan	75,6	7,6	10,0	60,7	90,4
Bengkulu	29,9	3,0	9,9	24,1	35,7
Lampung	103,4	8,7	8,4	86,3	120,4
Bangka Belitung	13,2	1,5	11,2	10,3	16,1
Kepulauan Riau	18,5	3,2	17,3	12,2	24,8
DKI Jakarta	62,6	9,6	15,3	43,8	81,4
Jawa Barat	922,6	48,9	5,3	826,8	1.018,4
Jawa Tengah	653,1	40,3	6,2	574,1	732,1
DI Yogyakarta	51,6	6,9	13,5	37,9	65,2
Jawa Timur	427,9	27,1	6,3	374,7	481,0
Banten	206,1	19,3	9,4	168,3	243,9
Bali	38,7	4,4	11,3	30,2	47,3
Nusa Tenggara Barat	53,9	8,6	15,9	37,1	70,7
Nusa Tenggara Timur	24,7	2,8	11,2	19,2	30,1
Kalimantan Barat	46,0	4,3	9,4	37,5	54,5
Kalimantan Tengah	20,9	2,7	13,1	15,5	26,3
Kalimantan Selatan	55,4	4,7	8,5	46,2	64,7
Kalimantan Timur	40,6	6,2	15,3	28,5	52,8
Kalimantan Utara	5,4	0,9	17,3	3,6	7,2
Sulawesi Utara	48,9	3,9	8,0	41,2	56,6
Sulawesi Tengah	22,4	2,8	12,7	16,8	27,9
Sulawesi Selatan	134,1	9,4	7,0	115,6	152,6
Sulawesi Tenggara	32,8	4,1	12,6	24,6	40,9
Gorontalo	17,8	2,1	11,9	13,6	22,0
Sulawesi Barat	15,2	2,4	16,0	10,5	20,0
Maluku	8,6	1,6	18,6	5,4	11,7
Maluku Utara	7,6	1,0	13,2	5,7	9,6
Papua Barat	2,3	0,6	28,0	1,0	3,6
Papua Barat Daya	6,6	1,6	24,8	3,4	9,7
Papua	7,7	1,5	19,8	4,7	10,7
Papua Selatan	0,9	0,5	60,7	-0,2	1,9
Papua Tengah	1,2	0,5	38,7	0,3	2,1
Papua Pegunungan	0,1	0,1	100,0	-0,1	0,3
Total	3.481,7	56,7	1,6	3.370,6	3.592,8

Lampiran 76 Kesalahan Sampling Jumlah Penduduk yang Pernah Berhenti Bekerja dari Pekerjaan Dalam Setahun Terakhir, Sakernas Agustus 2025

Provinsi	Jumlah Penduduk yang Pernah Berhenti Bekerja dari Pekerjaan Dalam Setahun Terakhir				
	Estimasi (ribu orang)	Kesalahan baku (ribu orang)	Kesalahan Baku Relatif	Selang Kepercayaan (95%)	
				Batas Bawah (ribu orang)	Batas Atas (ribu orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	63,2	2,5	4,0	58,2	68,1
Sumatera Utara	325,7	11,9	3,6	302,5	348,9
Sumatera Barat	382,1	15,2	4,0	352,4	411,9
Riau	120,0	6,0	5,0	108,2	131,8
Jambi	70,0	3,6	5,2	62,9	77,2
Sumatera Selatan	181,9	7,6	4,2	167,0	196,9
Bengkulu	38,1	1,8	4,7	34,6	41,6
Lampung	171,7	8,7	5,1	154,6	188,8
Bangka Belitung	32,0	1,8	5,8	28,4	35,6
Kepulauan Riau	75,2	5,7	7,6	64,0	86,5
DKI Jakarta	181,8	10,3	5,6	161,7	201,9
Jawa Barat	1.355,8	50,5	3,7	1.256,8	1.454,8
Jawa Tengah	1.373,8	35,2	2,6	1.304,7	1.442,9
DI Yogyakarta	130,8	8,6	6,5	114,0	147,5
Jawa Timur	2.181,5	68,3	3,1	2.047,5	2.315,4
Banten	201,5	12,0	5,9	178,0	224,9
Bali	83,5	4,8	5,8	74,1	93,0
Nusa Tenggara Barat	610,5	33,1	5,4	545,6	675,4
Nusa Tenggara Timur	102,8	4,6	4,5	93,8	111,8
Kalimantan Barat	120,0	5,1	4,2	110,1	129,9
Kalimantan Tengah	42,1	2,4	5,7	37,4	46,8
Kalimantan Selatan	99,5	4,2	4,3	91,2	107,8
Kalimantan Timur	97,5	5,2	5,3	87,3	107,6
Kalimantan Utara	15,2	1,4	9,3	12,5	18,0
Sulawesi Utara	88,2	5,4	6,1	77,6	98,7
Sulawesi Tengah	52,5	3,0	5,7	46,6	58,4
Sulawesi Selatan	217,3	8,0	3,7	201,6	233,0
Sulawesi Tenggara	64,0	3,1	4,8	58,0	70,0
Gorontalo	31,2	1,9	5,9	27,6	34,9
Sulawesi Barat	36,7	2,7	7,4	31,3	42,0
Maluku	29,0	1,7	5,8	25,7	32,3
Maluku Utara	20,9	1,7	8,0	17,6	24,1
Papua Barat	8,4	0,8	9,5	6,9	10,0
Papua Barat Daya	4,4	0,4	8,9	3,6	5,2
Papua	10,7	2,4	22,8	5,9	15,4
Papua Selatan	2,5	0,2	8,0	2,1	2,9
Papua Tengah	5,1	0,5	10,0	4,1	6,1
Papua Pegunungan	1,3	0,0	0,8	1,3	1,3
Total	8.628,3	103,6	1,2	8.425,2	8.831,4

Lampiran 77 Kesalahan Sampling Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Pernah Bekerja di Luar Negeri dengan Keberangkatan dan Kepulangan dalam Lima Tahun Terakhir, Sakernas Agustus 2025

Estimasi (ribu orang)	Kesalahan baku (ribu orang)	Kesalahan Baku Relatif	Selang Kepercayaan (95%)	
			Batas Bawah (ribu orang)	Batas Atas (ribu orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
315,0	19,2	6,1	277,4	352,6

<https://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Fax : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

